



**QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2017 - 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2018**



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2017-2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025, dipandang perlu untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022 sebagai perwujudan aplikatif pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025, selama lima tahun kedepan dan kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Perencanaan Pembangunan disusun secara komprehensif sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan memperhatikan nilai-nilai islam, sosial budaya, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, keadilan, pemerataan dan kebutuhan, ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022;

Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033;
12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 – 2032;
13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 –2025;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2017-2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut DPRK Aceh Utara adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari Dinas, Badan, Sekretariat dan Satuan Teknis.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut RPJM Kabupaten Aceh Utara adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Aceh Utara.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut RPJMA adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Aceh untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
14. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Kabupaten adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Aceh Utara adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Aceh Utara untuk periode 1 (satu) tahun

Pasal 2

- (1) RPJM Kabupaten Aceh Utara berisi penjabaran visi, misi dan program Bupati Aceh Utara terpilih hasil pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2017.
- (2) RPJM Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam melaksanakan pembangunan dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun dimulai sejak tahun 2017 sampai tahun 2022.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

RPJM Kabupaten Aceh Utara disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- | | |
|----------|---|
| BAB I | : Pendahuluan |
| BAB II | : Gambaran Umum Kondisi Daerah |
| BAB III | : Gambaran Keuangan Daerah |
| BAB IV | : Analisis Isu-Isu Strategis |
| BAB V | : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran |
| BAB VI | : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah |
| BAB VII | : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah |
| BAB VIII | : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. |
| BAB IX | : Penutup |

Pasal 4

Sistematika RPJM Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 5

RPJM Kabupaten Aceh Utara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi :

- a. SKPK dalam menyusun Renstra SKPK dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Aceh Utara dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 2017-2022; dan
- b. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam menyusun RKPD setiap tahunnya.

Pasal 6

Kerangka Kebutuhan Pendanaan berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Utara merupakan pagu indikatif yang akan dilakukan penyesuaian berdasarkan kemampuan keuangan daerah serta sesuai dengan kebijakan umum dan program prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Utara

Pasal 7

RPJM Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Utara; dan
 - b. Pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten Aceh Utara.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Sebelum Qanun ini mulai berlaku ketentuan mengenai RPJM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017 sebagaimana dimaksud dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012- 2017 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara tahun 2012- 2017 dinyatakan masih berlaku sampai dengan diundangkannya Qanun ini.
- (2) Peninjauan kembali dan/atau perubahan RPJM Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan paling cepat 2 (dua) tahun.

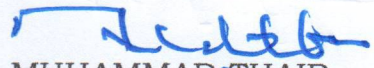
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

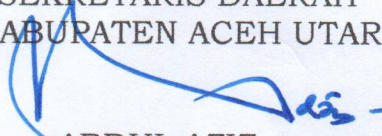
Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 3 September 2018 M
23 Dzulhijjah 1439 H

BUPATI ACEH UTARA,


H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 3 September 2018 M
23 Dzulhijjah 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,


ABDUL AZIZ

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I.2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I.4
1.3.1. Keterkaitan RPJM Kab. dengan RTRW Kab.....	I.5
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I.5
1.5. Sistematika Penulisan.....	I.6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II.1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II.1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	II.1
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah.....	II.10
2.1.3 Demografi.....	II.18
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II.19
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II.19
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat.....	II.25
A. Pendidikan.....	II.26
B. Kesehatan.....	II.30
C. Ketenagakerjaan.....	II.33
2.2.3 Fokus Seni, Budaya dan Olahraga.....	II.34
2.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II.36
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib.....	II.36
A. Pendidikan	II.36
B. Kesehatan	II.44
C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II.55
D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	II.65
E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	II.69
F. Sosial.....	II.71
2.3.2 Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	II.72
A. Tenaga Kerja	II.72
B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II.74
C. Pangan.....	II.76
D. Pertanahan.....	II.77
E. Lingkungan Hidup.....	II.78
F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II.82
G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II.83
H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II.85
I. Perhubungan.....	II.88
J. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	II.93
K. Kepemudaan dan Olahraga.....	II.95
L. Kebudayaan.....	II.97
M. Perpustakaan dan Kearsipan.....	II.98
2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	II.99
A. Kelautan dan Perikanan.....	II.99
B. Pariwisata.....	II.102
C. Pertanian.....	II.102
D. Perindustrian dan Perdagangan.....	II.105
2.4 Aspek Daya Saing.....	II.107
2.4.1 Fokus Fasilitas Wilayah Infrastruktur.....	II.107
2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi.....	II.108
2.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia.....	II.108

BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	III.1
3.1.	Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III.1
3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBK.....	III.1
	A. Pendapatan Daerah.....	III.1
	B. Belanja Daerah.....	III.2
	C. Pembiayaan Daerah.....	III.2
3.1.2.	Neraca Daerah.....	III.5
3.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III.11
3.2.1.	Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III.11
3.2.2.	Analisis Pembiayaan.....	III.11
3.3.	Kerangka Pendanaan.....	III.16
3.3.1.	Proyeksi Pendapatan dan Belanja.....	III.16
3.3.2.	Penghitungan Kerangka Pendanaan	III.19
BAB IV	ANALISIS ISI - ISU STRATEGIS.....	IV.1
4.1.	Permasalahan Dan Tantangan Pembangunan Aceh Utara.....	IV.1
4.1.1.	Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.....	IV.1
4.1.2.	Kualitas Sumber Daya Manusia masih rendah dan belum terintegrasinya pendidikan.....	IV.2
4.1.3.	Tingginya tingkat kemiskinan.....	IV.3
4.1.4.	Tingginya tingkat pengangguran terbuka.....	IV.3
4.1.5.	Pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga sejahtera.....	IV.4
4.1.6.	Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Belum Berkembang Dengan Baik.....	IV.4
4.1.7.	Belum memadainya kuantitas dan kualitas infrastruktur.....	IV.5
4.1.8.	Kinerja Badan Usaha Milik Daerah masih rendah.....	IV.6
4.1.9.	Keterlibatan peran swasta dalam pembangunan masih rendah.....	IV.8
4.1.10.	Pemanfaatan Sumber Daya Alam belum berwawasan lingkungan.....	IV.9
4.1.11.	Pemanfaatan potensi pariwisata masih kurang.....	IV.10
4.1.12.	Produktivitas hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan masih rendah dan agroindustri belum berkembang.....	IV.10
4.1.13.	Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik, sosial budaya dan adat.....	IV.11
4.1.14.	Pertumbuhan ekonomi masih rendah.....	IV.12
4.1.15.	Masih lemahnya pelaksanaan penegakan supremasi hukum.....	IV.12
4.1.16.	Masih kurangnya pemberdayaan kepemudaan, pramuka dan keolahragaan.....	IV.12
4.1.17.	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.....	IV.13
4.1.18.	Peran lembaga adat dan agama dalam perencanaan pembangunan belum optimal.....	IV.13
4.1.19.	Menerapkan ukuran-ukuran keberlanjutan pembangunan.....	IV.14
4.2.	Isu Strategis.....	IV.14
4.2.1.	Isu Strategis Pembangunan Aceh Utara 2017 - 2022.....	IV.15
4.2.2.	Isu Strategis Pembangunan Prioritas Nasional Dalam Nawa Cita	IV.21
4.2.3.	Isu strategis pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan.....	IV.22
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V.1
5.1.	V i s i	V.1
5.2.	M i s i	V.1
5.3.	Tujuan dan Sasaran	V.2

BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....	VI.1
	6.1. Strategi dan arah kebijakan RPJM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022.....	VI.1
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	VII.1
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VIII.1
BAB IX	PENUTUP	IX.1

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar	1.1 Hubungan Antara Dokumen Perencanaan	I.5
Gambar	2.1 Peta Administrasi Kabupaten Aceh Utara.....	II.2
Gambar	2.2 Profil Morfologi Wilayah Kabupaten Aceh Utara	II.5
Gambar	2.3 Peta Ketinggian Lahan Kabupaten Aceh Utara.....	II.6
Gambar	2.4 Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Aceh Utara	II.7
Gambar	2.5 Peta Curah Hujan Kabupaten Aceh Utara.....	II.8
Gambar	2.6 Peta Jenis Tanah Kabupaten Aceh Utara.....	II.9
Gambar	2.7 Peta Geologi Kabupaten Aceh Utara.....	II.9
Gambar	2.8 Peta Pola Ruang Kabupaten Aceh Utara.....	II.17
Gambar	2.9 PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011-2015 (JutaRupiah).....	II.24
Gambar	2.10 Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara.....	II.34
Gambar	2.11 Jumlah Grup Kesenian di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016.....	II.35
Gambar	2.12 Rasio Dokter di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016.....	II.46
Gambar	2.13 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan.....	II.48
Gambar	2.14 Cakupan Desa UCI di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016.....	II.50
Gambar	2.15 Persentase Kondisi Jalan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016.....	II.56
Gambar	2.16 Kondisi Irigasi Tahun 2016.....	II.58
Gambar	2.17 Persentase Rumah Berakses Sanitasi.....	II.60
Gambar	2.18 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011-2015	II.73
Gambar	2.19 Pencari Kerja yang Ditempatkan per Tahun di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011-2015.....	II.73
Gambar	2.20 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011-2015	II.74
Gambar	2.21 Jumlah Kasus yang terjadi pada Perempuan dan Anak di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016.....	II.76
Gambar	2.22 Persentase Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016.....	II.85
Gambar	2.23 Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-	II.87
Gambar	2.24 Peta Rencana Deleniasi KSN Industri Lhoksumawe.....	II.90
Gambar	2.25 Luas Wilayah Produktif di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010-2014.....	II.108
Gambar	2.26 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016.....	II.109

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Luas Wilayah, Jumlah Kemukiman dan Jumlah Gampong di Kabupaten Aceh Utara menurut Kecamatan.....	II.3
Tabel 2.2 Perkembangan Distribusi Penduduk Kab. Aceh Utara menurut Kecamatan Tahun 2012-2016.....	II.19
Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan PDRB menurut sektor Tahun 2012-2015.....	II.20
Tabel 2.4 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Aceh Utara atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (persen).....	II.21
Tabel 2.5 Nilai Inflasi Rata-rata Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012- 2016.....	II.22
Tabel 2.6 Angka Kriminalitas Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016.....	II.25
Tabel 2.7 Peta Administrasi Kabupaten Aceh Utara.....	II.26
Tabel 2.8 Perkembangan Relatif IPM Kabupaten Aceh Utara dengan Provinsi Aceh Tahun 2012-2016.....	II.27
Tabel 2.9 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016.....	II.27
Tabel 2.10 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016.....	II.28
Tabel 2.11 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016.....	II.28
Tabel 2.12 APT Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011- 2016.....	II.29
Tabel 2.13 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016.....	II.30
Tabel 2.14 Angka Kelangsungan Hidup Bayi.....	II.31
Tabel 2.15 Angka Usia Harapan Hidup.....	II.32
Tabel 2.16 Presentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016	II.32
Tabel 2.17 Rasio Penduduk Kabupaten Aceh Utara yang bekerja selama periode Tahun 2011-2015.....	II.33
Tabel 2.18 Jumlah Grup Kesenian di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016.....	II.34
Tabel 2.19 Objek Wisata Budaya yang dapat Dikembangkan.....	II.35
Tabel 2.20 Perkembangan APS Kabupaten Aceh Utara Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2012-2016.....	II.37
Tabel 2.21 Ketersediaan Sekolah & Penduduk Usia Sekolah Tahun 2012-2016.....	II.38
Tabel 2.22 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Tahun 2012-2016.....	II.39
Tabel 2.23 Rasio Guru dan Murid Perkelas Rata-Rata Tahun 2012-2016.....	II.40
Tabel 2.24 Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016.....	II.41
Tabel 2.25 Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016.....	II.42
Tabel 2.26 Angka Putus Sekolah di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016.....	II.42
Tabel 2.27 Angka Kelulusan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016.....	II.43
Tabel 2.28 Angka Melanjutkan Sekolah di Kabupaten Aceh Tahun 2012-2016.....	II.43
Tabel 2.29 Guru dengan Kualifikasi S1/DIV di Kabupaten Aceh Tahun 2012-2016.....	II.44
Tabel 2.30 Jumlah Posyandu dan Jumlah Balita di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016.....	II.44
Tabel 2.31 Kondisi Prasarana Kesehatan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016.....	II.45
Tabel 2.32 Rasio Jumlah Dokter terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Aceh Utara.....	II.46
Tabel 2.33 Cakupan Komplikasi Kebidanan dan Penanganan Definitif terhadap Cakupan Kompikasi Kebidanan Tahun 2012-2016.....	II.47

Tabel 2.34	Jumlah Sasaran Ibu Bersalin dan Ibu Bersalin yang Ditolong Tenaga Kesehatan Tahun 2012-2016	II.49
Tabel 2.35	Cakupan Balita Gizi Buruk	II.50
Tabel 2.36	Perkiraan Penderita TBC dan Penderita yang Diobati di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016.....	II.51
Tabel 2.37	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Aceh Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 s.d 2016.....	II.51
Tabel 2.38	Jumlah Penderita HIV/AIDS di Kabupaten Aceh Utara.....	II.52
Tabel 2.39	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016.....	II.53
Tabel 2.40	Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016.....	II.54
Tabel 2.41	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup dan Angka Kematian Ibu per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Aceh Utara 2012-2016.....	II.54
Tabel 2.42	Sempadan dan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar.....	II.57
Tabel 2.43	Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Panjang Jalan yang Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m) Tahun 2012-2016.....	II.57
Tabel 2.44	Rasio Perkembangan Jaringan Irigasi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016.....	II.58
Tabel 2.45	Jumlah Sarana dan Prasarana Peribadatan (Masjid dan Meunasah) di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016.....	II.59
Tabel 2.46	Rasio Tempat Pemakaman Umum 2012-2016.....	II.61
Tabel 2.47	Rasio Pemukiman Layak Huni di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016.....	II.62
Tabel 2.48	Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar di Kabupaten Aceh Utara Aceh Utara Tahun 2012-2016.....	II.62
Tabel 2.49	Luas Penggunaan Lahan.....	II.64
Tabel 2.50	Luas Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya.....	II.65
Tabel 2.51	Luas Wilayah Banjir Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016.....	II.65
Tabel 2.52	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2012-2016.....	II.66
Tabel 2.53	Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016.....	II.67
Tabel 2.54	Perkembangan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2012-2016.....	II.67
Tabel 2.55	Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Tahun 2012-2016.....	II.68
Tabel 2.56	Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Waliyatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015.....	II.69
Tabel 2.57	Rasio Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016.....	II.69
Tabel 2.58	Jumlah Sarana Sosial di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016.....	II.72
Tabel 2.59	Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016.....	II.77
Tabel 2.60	Volume dan Produksi Sampah Tahun 2012-2016.....	II.79
Tabel 2.61	Kondisi Sarana dan Prasarana Persampahan Tahun 2012-2016.....	II.80
Tabel 2.62	Pemantauan Kualitas Air Tahun 2012-2016.....	II.81
Tabel 2.63	Penghijauan pada Kawasan Rawan Longsor dan Sumber Mata Air Tahun 2012-2016.....	II.81
Tabel 2.64	Jumlah Perusahaan Wajib AMDAL Tahun 2012-2016.....	II.82
Tabel 2.65	Jumlah Kasus Lingkungan Tahun 2012-2016.....	II.82
Tabel 2.66	Kepemilikan KTP di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016	II.83

Tabel 2.67	Jumlah PKK Aktif, Posyandu Aktif dan Jumlah Keseluruhan LPM di Aceh Utara	II.86
	Tahun 2012-2016.....	
Tabel 2.68	Rata-rata Jumlah Anak Perkeluarga dan Akseptor KB di Kabupaten Aceh Utara	II.86
	Tahun 2012-2016.....	
Tabel 2.69	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Jiwa) Kabupaten Aceh Utara	II.88
	Tahun 2012-2016.....	
Tabel 2.70	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016.....	II.89
Tabel 2.71	Sarana Pendukung Lalu Lintas Jalan Raya Tahun 2012-2015.....	II.90
Tabel 2.72	Sarana dan Fasilitas Pendukung Pelabuhan Krueng Geukuh.....	II.92
Tabel 2.73	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011-2016.....	II.93
Tabel 2.74	Jumlah UMKM di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016.....	II.94
Tabel 2.75	Jumlah Persentase UMKM di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016.....	II.95
Tabel 2.76	Jumlah Sektor Ekonomi UMKM Kabupaten Aceh Utara.....	II.95
Tabel 2.77	Jumlah Benda,Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten	II.97
	Aceh Utara Tahun 2012-2016.....	
Tabel 2.78	Penyelenggaraan Festival dan Jumlah Sarana Seni dan Seni Budaya di Kabupaten	II.98
	Aceh Utara Tahun 2012-2016.....	
Tabel 2.79	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun Kabupaten Aceh Utara	II.98
	Tahun 2012-2016.....	
Tabel 2.80	Koleksi Buku yang Tersedia pada Perpustakaan Daerah di Kabupaten Aceh Utara	II.99
	Tahun 2012-2016.....	
Tabel 2.81	Jumlah Produksi Ikan di Kabupaten Aceh UtaraTahun 2012-2016.....	II.101
Tabel 2.82	Jumlah Konsumsi Ikan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016.....	II.101
Tabel 2.83	Jumlah Wisatawan Tahun 2012-2016.....	II.102
Tabel 2.84	Perkembangan Produktivitas Tanaman Pangan di Kabupaten Aceh Utara	II.103
	Tahun 2012-2016.....	
Tabel 2.85	Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016.....	II.103
Tabel 2.86	Perkembangan Areal Komiditi Perkebunan Rakyat Kabupaten Aceh Utara	II.104
	Tahun 2012-2016.....	
Tabel 2.87	Produksi Komiditi Perkebunan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016.....	II.105
Tabel 2.88	Perkembangan Capaian Sektor Perindustrian di Kabupaten Aceh Utara	II.106
	Tahun 2012-2014 (Rp. Milyar).....	
Tabel 2.89	Perkembangan Capaian Sektor , Hotel dan Restoran Perdagangan di Kabupaten Aceh L	II.106
	Tahun 2012-2016.....	
Tabel 2.90	Ekspor Bersih Perdagangan di Kabupaten Aceh Utara.....	II.107
Tabel 2.91	Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008-2012.....	II.109
Tabel 2.92	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja	II.110
	Penyelenggaraan Urusan PemerintahanKabupaten Aceh Utara.....	
Tabel 3.1	Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2012-2016	III.3
	Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Aceh Utara.....	
Tabel 3.2	Neraca Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 - 2016.....	III.6
Tabel 3.3	Rasio Likuiditas Neraca Kabupaten Aceh Utara.....	III.9
Tabel 3.4	Rasio Solvabilitas Neraca Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 - 2015.....	III.10
Tabel 3.5	Analisis Porposi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Aceh Utara	III.11
	Tahun 2011 - 2015.....	
Tabel 3.6	Surplus dan Defisit Riil Anggaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011-2015.....	III.13
Tabel 3.7	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Aceh UtaraTahun 2011-2015.....	III.14

Tabel 3.8	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 - 2015	III.15
Tabel 3.9	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tahun 2011 - 2015.....	III.17
Tabel 3.10	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan daerah untuk mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara.....	III.19
Tabel 3.11	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara.....	III.21
Tabel 5.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 - 2022.....	V.3
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 - 2022.....	VI.2
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 - 2022.....	VI.7
Tabel 6.3	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif.....	VI.9
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 - 2022.....	VII.1
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan	VII.2
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022.....	VIII.1
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah.....	VIII.2

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Untuk memudahkan tercapainya cita-cita mulia tadi, suatu perencanaan pembangunan memerlukan penetapan tahapan-tahapan berikut prioritas pada setiap tahapan, yang bertolak dari sejarah, karakter sumber daya yang kita miliki dan tantangan yang sedang dihadapi. Hingga saat ini, tetap dipandang perlu adanya tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan untuk mencapai tujuan universal maupun tujuan khusus dari pembangunan Nasional dan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan yang berdimensi makro memuat visi, misi, dan arah kebijakan serta strategi pembangunan daerah untuk jangka 20 tahun. RPJP Kabupaten Aceh Utara merupakan acuan dan pedoman dasar dalam proses penyusunan dokumen-dokumen perencanaan daerah lainnya sesuai yang diarahkan oleh perundang-undangan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan satu tahapan rencana pembangunan yang harus disusun oleh semua tingkatan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk menindaklanjuti Undang-Undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017 telah berakhir dan dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada tanggal 12 Juli 2017 maka perlu disusun RPJM Tahun 2017-2022 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan serta kerangka pendanaan. RPJM Kabupaten Aceh Utara 2017-2022 merupakan RPJM periode ke III dan IV dari pentahapan RPJP Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025.

Dokumen ini disusun secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah, Pemerintah Aceh Utara, DPRK, para ulama dan cendikiawan, pemuka adat, LSM tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

I.2. Dasar Hukum Penyusunan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dari pembangunan nasional sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 2 (dua) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Perlu dilakukan pembangunan secara terintegrasi dengan pembangunan nasional. Berdasarkan pertimbangan seperti itulah, RPJM Kabupaten Aceh Utara tahun 2017 - 2022 ini didasarkan pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat nasional maupun Kabupaten. Secara lebih rinci, yang dijadikan sebagai landasan penyusunan RPJM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 - 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang No 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

9. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;
18. Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033;
19. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 – 2032;
20. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 – 2025;
21. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.

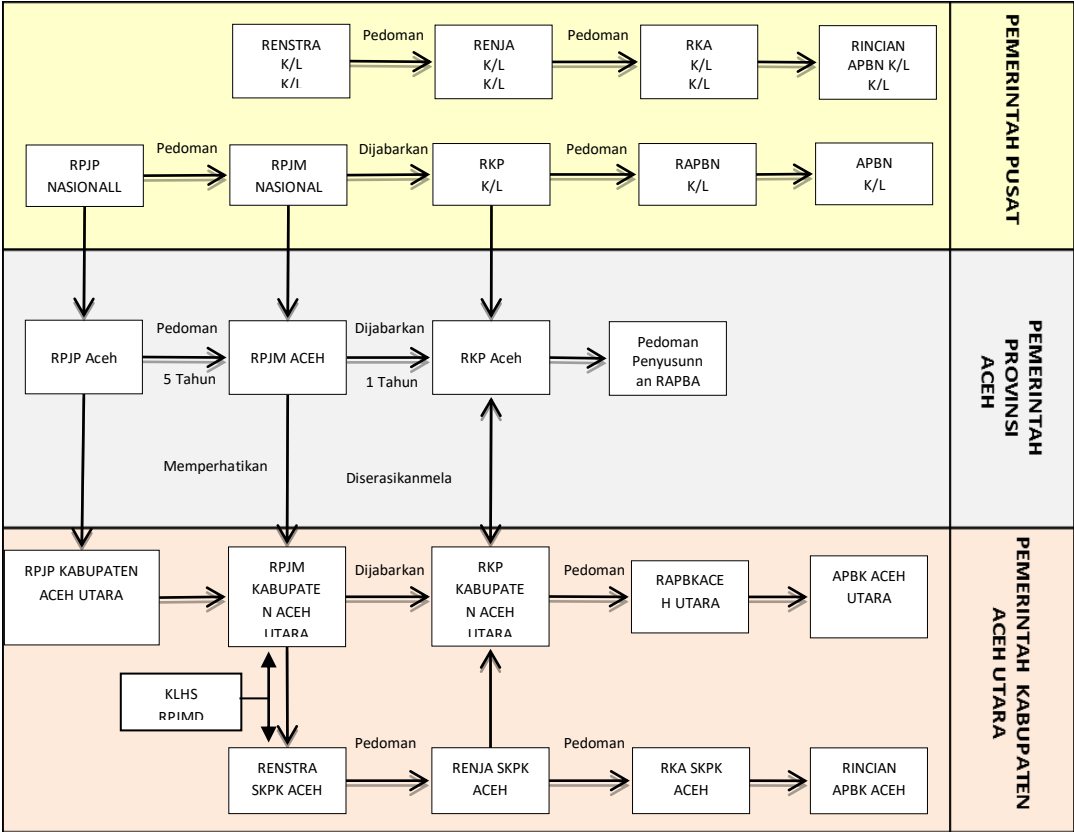
I.3. Hubungan antar Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Utara adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK) Aceh Utara Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA), Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disesuaikan dengan potensi, dan aspirasi masyarakat.

RPJMK Aceh Utara merupakan dokumen induk yang memuat arah kebijakan pembangunan kabupaten selama 5 (lima) tahun dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disusun berdasarkan tahapan yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

RPJMK Aceh Utara ini kemudian dijabarkan didalam rencana pembangunan tahunan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimana dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rencana Kerja (Renja) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) setiap tahunnya. Dengan demikian diharapkan sasaran dan tujuan pembangunan di dalam RPJMK ini dapat dicapai secara bertahap setiap tahunnya, sehingga diharapkan proses pembangunan terwujud dalam suatu sistem yang terencana dan berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya penyusunan RPJMK dapat dilihat pada bagan alur di bawah ini.

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



1.3.1. Keterkaitan RPJM Kabupaten dengan RTRW Kabupaten

Sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan ruangdaerah,maka RPJMK Aceh Utara memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 – 2032. Pertimbangan meliputi struktur ruang adalah : Rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah sedangkan untuk pola ruang meliputi Kawasan lindung dan kawasan budi daya

I.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMK Aceh Utara Tahun 2017-2022 adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan.

Tujuan penyusunan RPJMK Aceh Utara Tahun 2017-2022 adalah :

- 1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan;

2. Menyediakan pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen RPJM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022 disusun sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum materi rancangan awal RPJM yang memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Dalam bab ini menyajikan dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan sosial, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan hasil analisis dan kajian. Informasi gambaran umum kondisi daerah selaras dan mendukung permasalahan pembangunan daerah, isu strategis, visi/misi daerah, tujuan, sasaran pokok, dan kebutuhan perumusan arah kebijakan.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yaitu terkait Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu dan Kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bagian ini memuat informasi Permasalahan Pembangunan, Isu strategis daerah yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen RPJM ini karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan mendatang

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Penyajian dalam bab ini menguraikan tentang Visi, Misi kepala daerah terpilih yang telah disepakati, upaya perumusan Tujuan dan Sasaran yang menggambarkan keterkaitan antar elemen perencanaan dalam satu matrik.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih dan kemudian menjelaskan hubungannya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi , serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada bab ini dilakukan Penetapan indikator kinerja daerah untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi mengkaji segala fenomena yang ada di geosfer yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia. Dalam aspek geografi ini membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan letak atau lokasi suatu wilayah, bentuk muka buminya, luas area dan batas-batas wilayah yang mempunyai ciri-ciri khas tertentu, hal-hal yang berkenaan dengan unsur vegetasi (tetumbuhan atau flora, dunia binatang (fauna) dan kajian penduduk, serta membahas berkenaan dengan unsur kondisi tanah, hidrologi (tata air) baik perairan darat maupun laut dan kondisi iklim dari suatu wilayah.

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

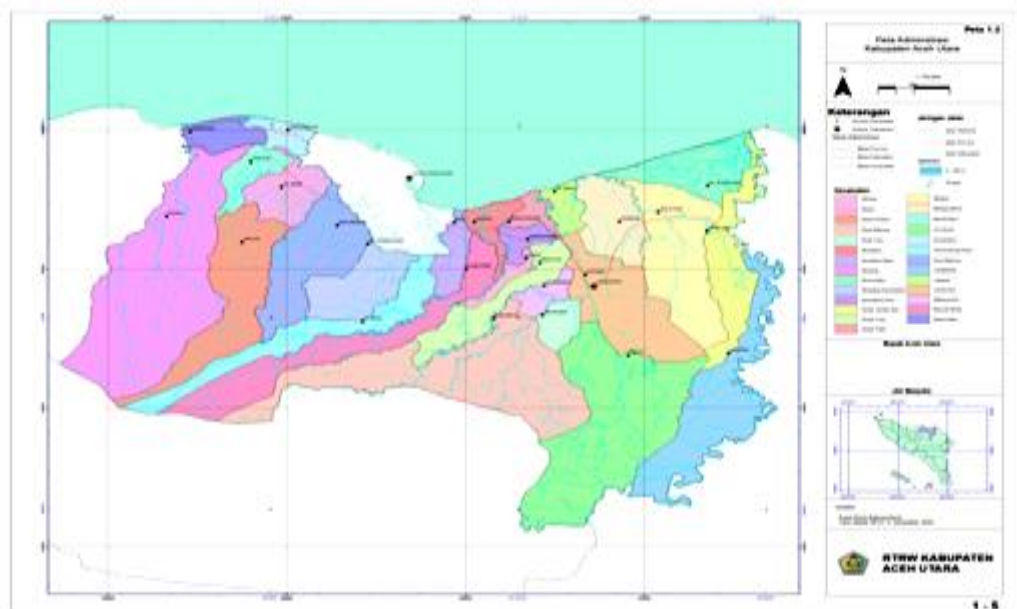
A. Letak Geografis

Berdasarkan Peta Bakosurtanal, Kabupaten Aceh Utaraterletak pada bagian utara Provinsi Aceh. Secara geografis, bataswilayah Kabupaten Aceh Utara dengan wilayah lainnya mengalami perubahan seiring adanya beberapa pemekaran wilayah antara lain berdasarkan Undang –Undang RI Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe dan terakhir Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Utara dari Wilayah Kota Lhokseumawe ke Lhoksukon di Wilayah Kabupaten Aceh Utara. Implikasi perubahan mempengaruhi batas wilayah kabupaten Aceh Utara dengan kabupaten yang melingkupinya.Batas wilayah Kabupaten Aceh Utara saat ini bersebelahan :

- Sebelah utara : SelatMalaka dan Kota Lhokseumawe
- Sebelah timur : Kabupaten Aceh Timur.
- Sebelah selatan : Kabupaten Bener Meriah.
- Sebelah barat : Kabupaten Bireuen

Gambaran tematik batas wilayah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana Gambar 2.1 berikut :

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Aceh Utara



Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013

Luas wilayah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032 disebutkan bahwa luas wilayah berdasarkan Undang-undang Daruratt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, dikurangi dengan luas wilayah pembentukan Kabupaten Bireun berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Simeulue dan luas wilayah pembentukan Kota Lhokseumawe berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe. Dengan demikian luas Kabupaten Aceh Utara sebesar 3.296,86 km², atau 329.686 Ha.

Secara administrasi wilayah Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 27 kecamatan 70 kemukiman 852 gampong. Sejak tahun 2009, secara administrasi perdesaan kabupaten Aceh utara hanya memiliki wilayah gampong sebagaimana Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara. Kecamatan Paya Bakong merupakan kecamatan terluas dengan luas 418,32 km² atau 12,69 persen dari luas Kabupaten Aceh Utara. Masing-masing kecamatan dibagi dalam 1 sampai 4 kemukiman. Pemerintahan Mukim diatur dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003 dan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim, disebutkan

kedudukan mukim sebagai unit pemerintah yang membawahi beberapa gampong yang dipimpin oleh seorang Imuem Mukim yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat.

Tabel 2.1
Luas Wilayah, Jumlah Kemukimandan Jumlah Gampong
di Kabupaten Aceh Utara menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	%	Jumlah Kemukiman	Jumlah Gampong
1.	Sawang	384,65	11,67	2	39
2.	Nisam	193,47	5,87	3	29
3.	Nisam Antara	30,00	0,91	1	6
4.	Banda Baro	18,00	0,55	1	9
5.	Kuta Makmur	151,32	4,59	3	39
6.	Simpang Kramat	79,78	2,42	2	16
7.	Syamtalira Bayu	75,36	2,29	4	38
8.	Geureudong Pase	271,45	8,23	1	11
9.	Meurah Mulia	202,57	6,14	3	50
10.	Matangkuli	78,65	2,39	4	49
11.	Paya Bakong	418,32	12,69	4	39
12.	Pirak Timu	45,99	1,39	2	23
13.	Cot Girek	189,00	5,73	3	24
14.	Tanah Jambo Aye	162,98	4,94	4	47
15.	Langkahan	150,52	4,57	3	23
16.	Seunuddon	100,63	3,05	3	33
17.	Baktiya	158,67	4,81	3	57
18.	Baktiya Barat	83,08	2,52	3	26
19.	Lhoksukon	243,00	7,37	4	75
20.	Tanah Luas	30,64	0,93	3	57
21.	Nibong	44,91	1,36	2	20
22.	Samudera	43,28	1,31	3	40
23.	Syamtalira Aron	28,13	0,85	4	34
24.	Tanah Pasir	20,29	0,62	1	18
25.	Lapang	19,36	0,59	1	11
26.	Muara Batu	33,34	1,01	2	24
27.	Dewantara	39,47	1,20	2	15
TOTAL		3.296,86	100,00	71	852

Sumber: BPS Aceh Utara Tahun 2016

Dilihat berdasarkan kemukiman, Kecamatan Syamtalira Bayu, Matangkuli, Paya Bakong, Tanah Jambo Aye, Lhoksukon dan Syamtalira Aron masing-masing memiliki 4 kemukiman. Sedangkan jumlah gampong terbanyak

di Kecamatan Lhoksukon yaitu sebanyak 75 gampong, sementara itu jumlah gampong paling sedikit yakni sebanyak 6 gampong berada di Kecamatan Nisam Antara yang merupakan kecamatan hasil pemekaran dari kecamatan nisam yang merupakan kecamatan induk.

B. Topografi dan Morfologi Wilayah

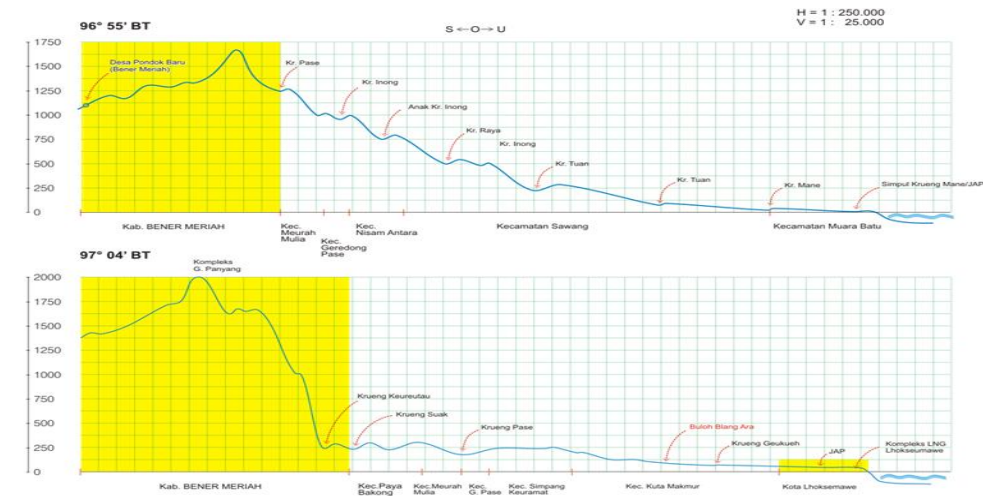
Sebelah utara berbatasan dengan laut, yaitu Selat Malaka, dan di sebelah selatan adalah kaki atau lereng pegunungan, maka secara umum bentuk permukaan bumi atau geomorfologi Kabupaten Aceh Utara dari arah pantai ke arah pegunungan adalah :

- Dataran pantai, yang terletak sepanjang tepi pantai.
- Dataran aluvial, yang terletak relatif memanjang di belakang dataran pantai.
- Zona lipatan, yang terletak relatif memanjang di belakang dataran aluvial.
- Zona volkanik, yang merupakan kaki/lereng sampai punggung pegunungan.

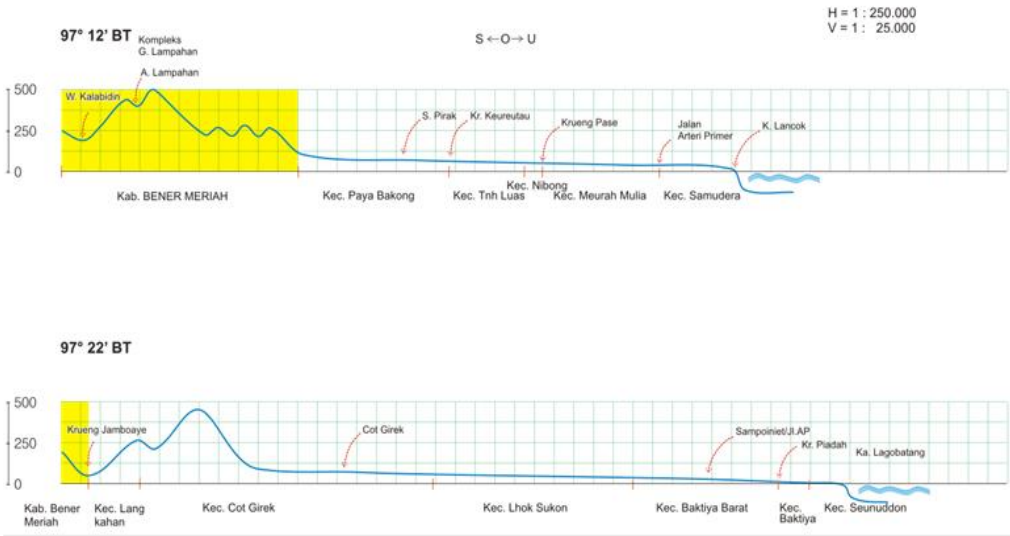
Selaras dengan geomorfologi tersebut, pada Gambar 2.2 diperlihatkan profil wilayah menurut arah utara – selatan, masing-masing pada garis 96⁰ 55’, 97⁰ 04’, 97⁰ 12’, dan 97⁰ 22’ BT. Berdasarkan Peta Rupa Bumi skala 1 : 50.000 (BAKOSURTANAL), yang menggambarkan topografi menurut garis ketinggian (kontur) Aceh Utara sebaran utamanya menurut selang ketinggian (Gambar2.3) yaitu :

- 0 – 25 m dpl : 146.096 Ha, atau 44,31 %;
- 25 – 100 m dpl : 63.781 Ha, atau 19,35 %;
- 100 – 500 m dpl : 88.526 Ha, atau 26,85 %;
- 500 – 1000 m dpl : 20.932 Ha, atau 6,35 %;
- Di atas 1000 m dpl : 10.351 Ha, atau 3,14%

Gambar 2.2
Profil Morfologi Wilayah Kabupaten Aceh Utara

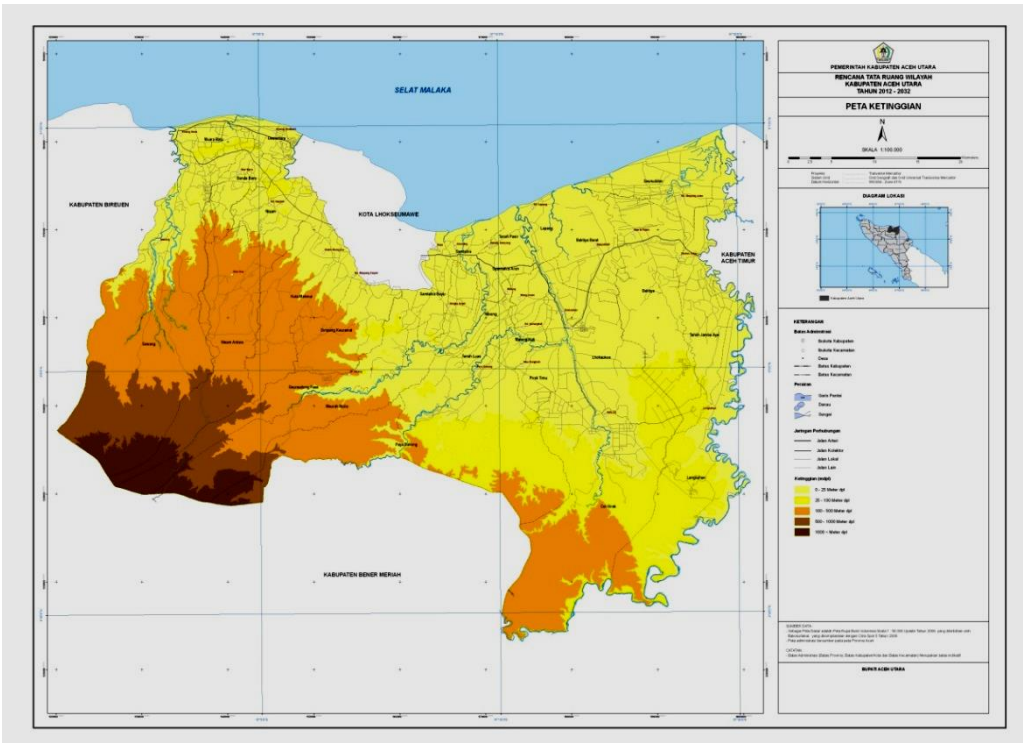


GAMBAR LANJUTAN
PROFIL WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA



Sumber: Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara

Gambar 2.3
Peta Ketinggian Lahan Kabupaten Aceh Utara

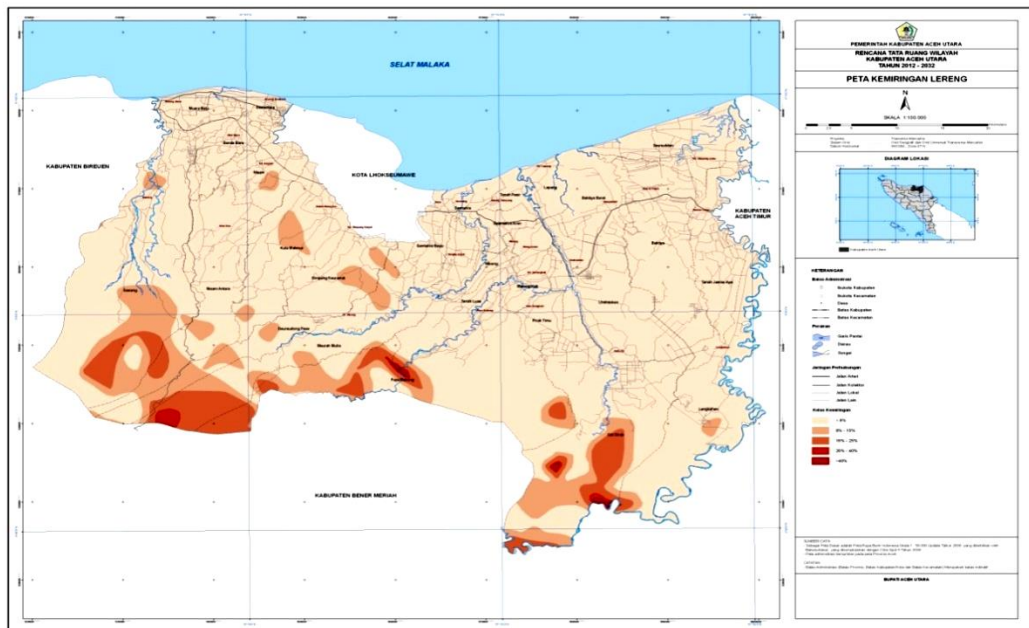


Sumber: Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara

Berdasarkan Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Aceh Utara dari Yayasan Leuser Internasional (YLI), dapat dikemukakan sebaran kemiringan lahan di Aceh Utara (Gambar2.4) yaitu :

- 0 – 2 % : 50,38 %, atau sekitar166.063 Ha;
- 2 – 8 % : 18,85 %, atau sekitar 62.146 Ha;
- 8 – 15 % : 10,54 %, atau sekitar 34.749 Ha;
- 15 – 25 % : 9,59 %, atau sekitar 31.617 Ha;
- 25 – 40 % : 7,26 %, atau sekitar 23.935 Ha;
- > 40 % : 3,39 %, atau sekitar 11.176 Ha.

Gambar 2.4
Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Aceh Utara



Sumber: Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara

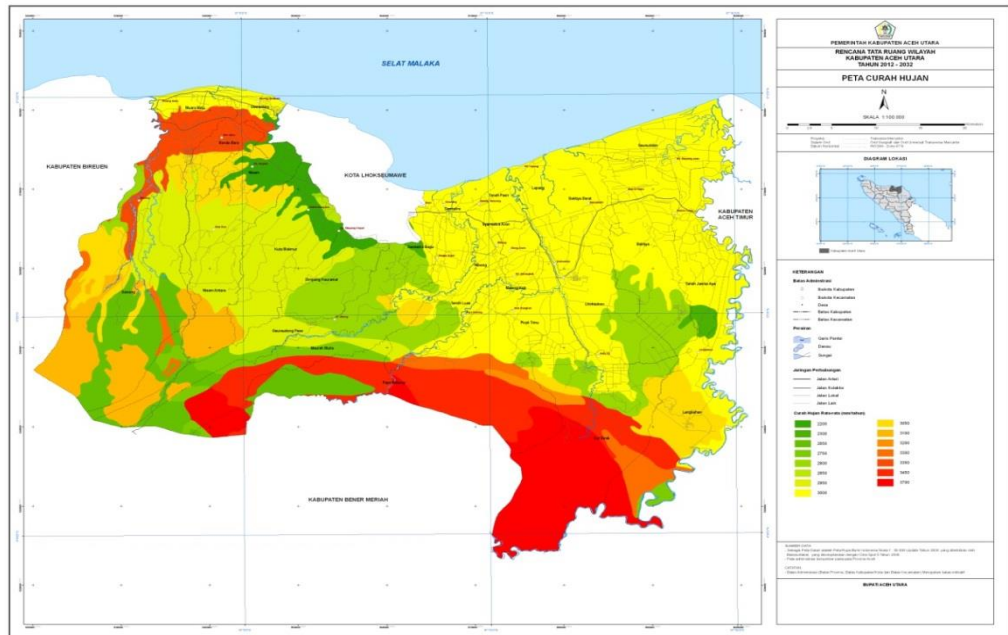
C. Iklim

Wilayah Kabupaten Aceh Utara sebagai bagian dari wilayah Provinsi Aceh, termasuk tipe iklim muson; dan klasifikasi menurut Mohr, Schmid & Ferguson, termasuk iklim tipe C. Wilayah Kabupaten Aceh Utara relatif lebih kering dibandingkan dengan wilayah lainnya di Provinsi Aceh, karena pengaruh Pegunungan Bukit Barisan, di mana wilayah sebelah utara dan timur Pegunungan Bukit Barisan cenderung lebih kering dibandingkan wilayah sebelah barat dan selatannya.

Curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Aceh Utara berkisar antara 1000 – 2500 mm, dengan hari hujan 92 hari. Musim hujan terjadi pada bulan Agustus sampai Januari, dengan curah hujan maksimal terjadi di bulan Oktober-November, yang mencapai di atas 350 mm per bulan dengan hari hujan lebih dari 14 hari. Sementara musim dengan curah hujan lebih rendah (cenderung kemarau) terjadi pada bulan Februari sampai Juli, dan yang cenderung terendah adalah sekitar bulan Maret-April.

Rata-rata suhu udara adalah 30⁰ C, dengan kisaran antara 26⁰ C sampai 36⁰ C. Suhu rata-rata pada musim penghujan adalah 28⁰ C, dan pada musim kemarau suhu rata-rata adalah 32,8⁰ C. Kelembaban udara berkisar antara 84 – 89 %, dengan rata-rata 86,6 %. Lebih jelasnya sebagaimana tercantum Gambar 2.5.

Gambar 2.5
Peta Curah Hujan Kabupaten Aceh Utara



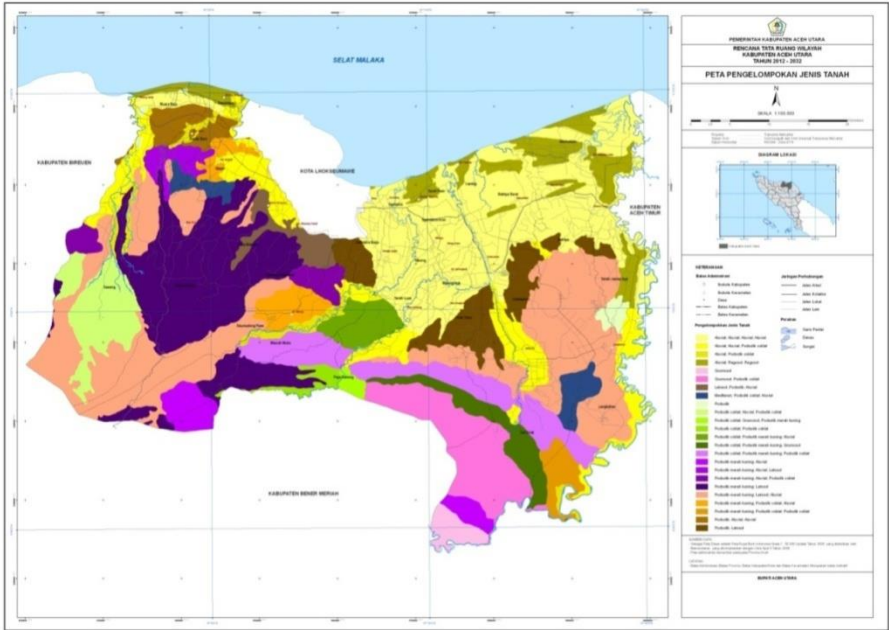
Sumber: Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara

D. Jenis Tanah dan Kedalaman Efektif Tanah

Jenis tanah mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kesesuaian lahan untuk budidaya pertanian maupun non-pertanian yang akan dikembangkan. Pengenalan terhadap karakteristik dan sebaran jenis tanah sangat penting terkait dengan upaya pemanfaatan sumber daya tanah/lahan di Kabupaten Aceh Utara.

Secara umum sebaran jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara dapat dibedakan atas 2 kelompok besar, yaitu dominan kelompok hidromorf di pesisir, sementara kelompok podsolik dominan di pedalaman. Karakter ini selaras pula dengan kedalaman efektif tanah, di mana sejak dari yang terdalam(>90 cm) sampai yang terdangkal (<30 cm) adalah mengikuti pola dari pesisir ke pedalaman. Jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.6.

Gambar 2.6
Peta Jenis Tanah Kabupaten Aceh Utara

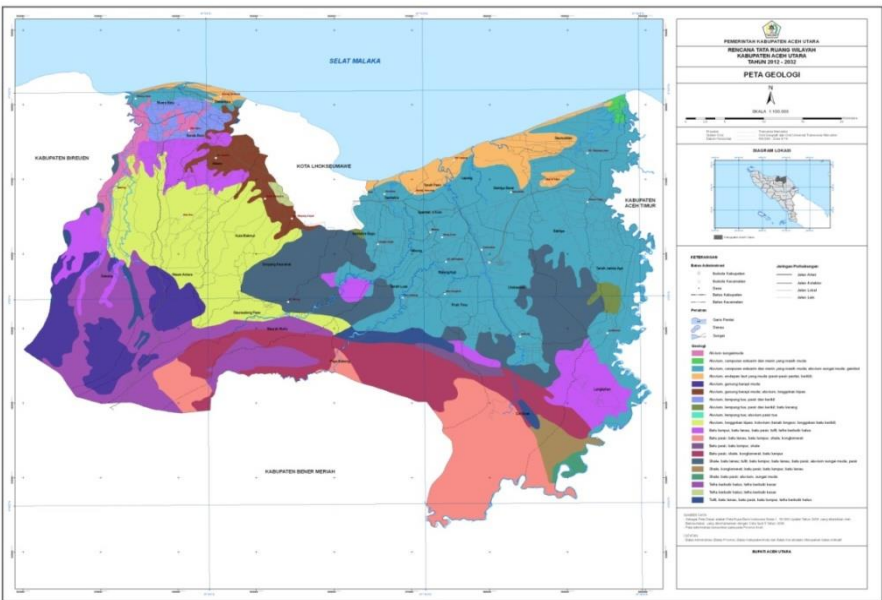


Sumber:Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara

E. Geologi

Struktur geologi yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Utara secara garis besar terdiri atas batuan Quarter yang cenderung di bagian pesisir (bagian utara), dan batuan Tersier yang cenderung di bagian pedalaman (bagian selatan). Sebaran ini selaras dengan topografi yang menaik dari utara ke selatan, dan selaras pula dengan pola hilir ke hulu dalam DAS. Jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 2.7.
Peta Geologi Kabupaten Aceh Utara



Sumber: Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Pembangunan Kabupaten Aceh Utara diprioritaskan pada pembangunan yang memperhatikan potensi wilayah yaitu melalui pengembangan kawasan perkebunan, pertanian tanaman pangan, dan perikanan yang merupakan mata pencaharian utama sehingga dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Aceh Utara 2012 – 2032 dan sesuai karakteristik wilayah maka pengembangan kawasan budidaya dalam rencana pola ruang Kabupaten Aceh Utara yaitu :

A. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi ini relatif terletak antara kawasan hutan lindung dan batas dengan Kabupaten Bener Meriah dengan kawasan perkebunan dan kawasan budidaya lainnya. Selain pemantapan kawasan hutan produksi yang telah ada sebelumnya, juga direncanakan pemanfaatan belukar di bagian lebih hulu lagi dari yang direncanakan untuk kawasan perkebunan. Total luas kawasan hutan produksi ini adalah 30.687 Ha.

Sebaran kawasan hutan produksi di Kabupaten Aceh Utara meliputi : Kecamatan Langkahan 1.341 hektar; Kecamatan Cot Girek 9.502 hektar ; Kecamatan Meurah Mulia 4.278 hektar; Kecamatan Geureudong Pase 2.710 hektar; Kecamatan Nisam Antar 2.930 hektar; Kecamatan Sawang 4.952 hektar; dan Kecamatan Paya Bakong 5.000 hektar.

Pemanfaatan kawasan hutan produksi yaitu berupa :

- a. Eksploitasi hutan, dalam bentuk pengambilan kayu dengan pola tebang pilih dan tanam kembali.
- b. Pengambilan hasil hutan non-kayu seperti : rotan, getah, madu lebah, buah-buahan, dan lain-lainnya

B. Kawasan Peruntukan Pertanian

1. Kawasan Pertanian Lahan Basah

Kawasan sawah (pertanian lahan basah) merupakan pemantapan dari kawasan sawah yang ada dewasa ini dan direkomendasikan penambahan/ perluasannya pada lahan-lahan yang potensial di sekitarnya dan berpeluang untuk dapat dilayani oleh jaringan irigasi/pengairan. Kendati dengan luas

yang bervariasi, kawasan sawah terdapat di semua kecamatan. Total luas kawasan sawah ini adalah 46.901 Ha.

Kegiatan-kegiatan budidaya atau ekonomi produksi lainnya yang potensial tergabung sebagai kegiatan sampingan/diversifikasi antara lain adalah :

- Perikanan air tawar, dengan pola mina-padi, kolam/tebat, kerambah pada saluran irigasi, dan penangkapan pada perairan tersebut;
- Peternakan, yang dapat terdiri atas ternak besar, ternak kecil, dan unggas (terutama itik atau bebek);
- Pertanian palawija/hortikultura, terutama sebagai tanaman selingan dalam kalender tanam, ataupun sebagai tanaman sela.

2. Kawasan Pertanian Lahan Kering (Kebun Campuran)

Kawasan kebun campuran tersebar di semua kecamatan dengan luas mencapai 44.493 Ha Fungsi kawasan ini adalah sebagai kebun campuran, yang dicirikan oleh variasi tanaman yang beragam dan kegiatan budidaya lainnya meliputi : perumahan perdesaan yang terselip, industri kecil, peternakan, dan lain-lain.

3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Dengan prinsip bahwa hasil kegiatan sawah yaitu padi merupakan bahan pokok strategis bagi kebutuhan masyarakat, maka keberadaan kawasan sawah ini menjadi sangat penting dan sejauh mungkin dipertahankan luasnya. Apabila masih memungkinkan bagi pencetakan sawah baru pada daerah yang ada dukungan prasarana irigasi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga keberlanjutan lahan pangan di Kabupaten Aceh Utara. Luasan lahan pangan berkelanjutan mencapai 39.777 ha dari total luas kawasan untuk sawah.

4. Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan sebarannya terletak di bagian pedalaman wilayah dengan luasan mencapai 162.672 Ha. Pemanfaatan utama kawasan perkebunan adalah kegiatan budidaya perkebunan, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar.

5. Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan letaknya tersebar di Kabupaten Aceh Utara khususnya di bagian pedalaman wilayah dan tidak terdelineasi serta tersebar di seluruh kecamatan. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan lahan penggembalaan untuk sumber pakan ternak. Kawasan peternakan ini terselip pada kawasan pertanian, kawasan perkebunan dan sebagian kawasan permukiman yang memiliki lahan terbuka hijau. Jenis ternak yang potensial untuk dikembangkan terdiri atas ternak besar, ternak kecil, dan unggas. Ternak besar yang dapat dibudidayakan seperti lembu dan kerbau akan terpusat di Bukit Sentang Kecamatan Lhoksukon, sedangkan ternak kecil adalah kambing dan kelinci. Ternak unggas yang potensial dibudidayakan adalah itik atau bebek.

C. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan tambak merupakan pemantapan dari kawasan tambak yang ada dewasa ini, yang sebarannya adalah di bagian wilayah pesisir, dengan kecenderungan sebaran yang lebih besar di bagian timur. Total luas kawasan tambak adalah 12.174 Ha sedangkan Perikanan tangkap kurang lebih seluas 37.744 Ha.

Rencana pengelolaan kawasan tambak adalah pemanfaatan utama untuk kegiatan tambak yang didukung oleh sistem saluran untuk kebutuhan airnya.

Pengembangan potensi serta kawasan peruntukan perikanan didukung dengan pengembangan prasarana perikanan berupa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kuala Cangkoy.

D. Kawasan Peruntukkan Pertambangan

Potensi tambang yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara dapat dibedakan atas :

1. Potensi pertambangan mineral logam terdiri dari:
 - Emas, Meliputi : Kecamatan Murah Mulia;
 - Kromium/Emas Putih, meliputi : Kecamatan Geureudong Paseh, Murah Mulia, Paya Bakong, Perak Timur, Cot Gireh; dan
 - Besi, meliputi Kecamatan Paya Bakong.
2. Potensi pertambangan mineral non logam terdiri dari :
 - Andesit meliputi : Kecamatan Sawang

- Bentonit, meliputi : Kecamatan Sawang
 - Stronsium, meliputi : Kecamatan Sawang dan Tanah Luas
3. Potensi pertambangan batuan terdiri dari :
 - Batu gunung meliputi : Kecamatan Nisam Antara, Nisam, Sawang, Simpang Keuramat, Geureudong Pase.
 - Pasir meliputi : Kecamatan Nisam Antara, Sawang, Geureudong Pase, Paya Bakong, Langkahan.
 - Pasir urug meliputi : Kecamatan Nisam Antara, Sawang, Geureudong Pase, Paya Bakong, Langkahan.
 - Batu Kapur meliputi : Kecamatan Muara Batu.
 - Tanah liat meliputi : Kecamatan Cot Girek, dan Muara Batu
 4. Potensi pertambangan batubara, meliputi : Kecamatan Sawang, Nisam Antara, Kuta Makmur, Simpang Keramat, Geureudong Pase, Syamtalira Bayu, Murah Mulia, Nibong, Tanah Luas, Paya Bakong, Pirak Timur, Lhok Sukon, Baktia, Cot Girek, Langkahan, Jambo Aye; dan
 5. Potensi panas bumi potensi energi panas bumi berada di Kecamatan Nisam Antara.
 6. Bahan tambang dari dalam perut bumi, yang dalam hal ini berupa gas alam, seperti yang telah dieksploitasi oleh Perusahaan EMOI (Exxon Mobil Oil Indonesia) yang dikenal dengan LNG Arun, instalasi tambang gas melewati beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah dengan luas area kurang lebih 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) hektar; meliputi :
 - Kecamatan Syamtalira Aron,
 - Kecamatan Tanah Luas, Kecamatan Nibong,
 - Kecamatan Matangkuli,
 - Kecamatan Paya Bakong,
 - Kecamatan Cot Girek; dan
 - Kecamatan Langkahan.

Bahan tambang dari dalam perut bumi berupa gas alam ini potensi depositnya bersifat antar wilayah, yaitu Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur. Bahan tambang Galian C dieksplotasi baik di daratan (berupa tanah urug, tanahliat, dan batu kapur), maupun di perairan sungai, dan terutama di tepi sungai (pasir, sirtu, batu, kerikil).

E. Kawasan Peruntukan Industri

1. Kawasan Industri Sedang

Kawasan peruntukan industri sedang berada di Kecamatan Cot Girek, Kecamatan Lhoksukon, Kecamatan Geureudong Pase, Kecamatan Simpang Keuramat. Kawasan peruntukan industri sedang yang ada di Kabupaten Aceh Utara merupakan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian.

2. Kawasan Industri Kecil

Kawasan industri kecil tersebar pada beberapa kecamatan, dan banyak terselip kawasan permukiman. Kawasan industri kecil terdiri dari sentra-sentra industri rumahan (home industry). Kegiatan industri kecil ini merupakan salah satu penggerak perekonomian masyarakat kecil khususnya yang berada di pedesaan. Terdapat variasi hasil industri kecil yang potensial untuk dikembangkan. Hasil industri kecil di Kecamatan Tanah Jambo Aye yang dapat dikembangkan adalah industri produk pisang sale, di Kecamatan Dewantara (Ulee Pulo dan Ulee Reuleung) adalah industri pembuatan batu bata, di Kecamatan Muara Batu (Bungkah) dan Kecamatan Baktiya adalah industri produk kerajinan souvenir khas Aceh.

F. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan pariwisata yang dikembangkan di Kabupaten Aceh Utara diklasifikasikan menurut lokasi dan bentuk objeknya, yaitu :

1. Pariwisata Budaya

Pariwisata budaya yang dikembangkan adalah objek wisata budaya, yaitu :

- Makam Malikussaleh & Malikul Dhahir, di Kec. Samudera;
- Makam Tgk 44, di Kec. Samudera;
- Makam Naina Husam Al-Din, di Kec. Samudera;
- Makam Sidi Abdullah Tajul Nilah, di Kec. Samudera;
- Makam Tgk Syarif, di Kec. Samudera;
- Makam Sultanah Nahrisyah, di Kec. Samudera;
- Makam Tgk Batee Bale A, di Kec. Samudera;
- Makam Tgk Batee Bale B, di Kec. Samudera;
- Makam Tgk Saleh Salihin, di Kec. Samudera;
- Makam Maulana Abdurrahman Al-Fasi, di Kec. Samudera;
- Makam Said Syarif, di Kec. Samudera;

- Makam Perdana Menteri M.Yacob, di Kec. Samudera;
- Makam Raja Muhammad Mns Nibong, di Kec. Syamtalira Bayu;
- Makam Putra Raja Syuhada Cot Plieng, di Kec. Syamtalira Bayu;
- Makam Ratu Al'Ala Binti Malikul Dahir, di Kec. Pirak Timu;
- Makam Tgk Mursalah Ibnu Talabuddin, di Kec. Syamtalira Aron;
- Makam Tgk Meunasah Reulob, di Kec. Syamtalira Aron;
- Makam Raja Purupi, di Kec. Syamtalira Aron;
- Makam Tgk Jrat Manyang, di Kec. Baktiya Barat;
- Makam Tgk Di Glumpang, di Kec. Baktiya Barat;
- Makam Tgk Di Padang, di Kec. Baktiya;
- Makam Tgk Batee Badan, di Kec. Tanah Jambo Aye;
- Makam Glewang Anval, di Kec. Tanah Jambo Aye;
- Makam Tgk Pantee Keurajen, di Kec. Sawang;
- Rumah Adat Cut Meutia, di Kec. Matangkuli;
- Makam Cut Meutia, di Kec. Cot Girek.

2. Pariwisata Alam

- Objek wisata di pesisir pantai, berupa : Pantai Ulee Rubek di Ulee Rubek Timur dan Ulee Rubek Barat Kec. Seunuddon, Pantai Sawang di Sawang Kec. Samudera, Pantai Pusong di Bangka Jaya Kec. Dewantara; Pantai Dakuta Bungkah di Bungkah Kec. Muara Batu.
- Objek wisata di pedalaman, berupa : Air Terjun Blang Kulam di Sidomulyo Kec. Kuta Makmur, Air Terjun Seumirah di Kd. Seumirah Kec. Nisam Antara, Air terjun tujuh bidadari di Kec. Geureudong Pase, Pemandian Krueng Sawang di Sawang Kec. Sawang, Pusat Konservasi Gajah (PKG) di Kec. Cot Girek.

G. Kawasan Budidaya Lainnya

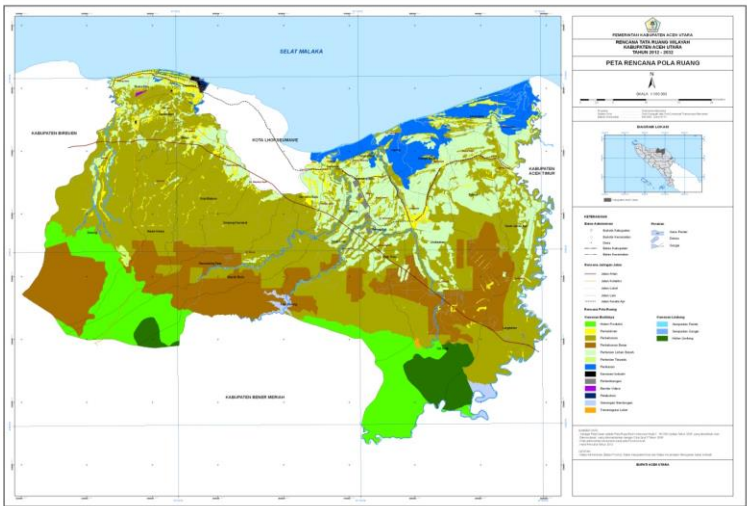
1. Kawasan Pelabuhan dan Bandar Udara

Kawasan pelabuhan adalah Pelabuhan Lhokseumawe di Krueng Geukueh, Kecamatan Dewantara, dengan luas 166 Ha. Pelabuhan ini dapat melayani kegiatan bongkar muat umum (pelabuhan umum) maupun bongkar muat khusus industri besar (pelabuhan khusus) untuk tujuan luar negeri dan dalam negeri (antar provinsi). Melayani angkutan penyeberangan luar negeri antara Lhokseumawe - Penang/Langkawi (Malaysia). Pelabuhan ini ditetapkan sebagai Pelabuhan Laut Internasional, terkait dengan dukungannya terhadap fungsi PKN Lhokseumawe.

2. Kawasan Bandar Udara adalah kompleks Bandar Udara Malikussaleh di Kecamatan Muara Batu, dengan luas 83 Ha. Bandara udara ini merupakan bagian dari dukungannya terhadap fungsi PKN Lhokseumawe sehingga diusulkan sebagai bandar udara pengumpan. Bandara ini dikelola oleh pihak Pemda Kabupaten Aceh Utara. Rute penerbangan yang dilayani saat ini yaitu Muara Batu-Medan dan Muara Batu-Banda Aceh.
3. Kawasan Pertanian Terpadu
Kawasan pengembangan pertanian terpadu terletak di tengah kawasan hutan produksi di Kecamatan Sawang dengan luasan 430 Ha. Berdasarkan karakter lokasinya, maka kegiatan pertanian yang dikembangkan adalah merupakan pertanian pada lahan kering, baik berupa perkebunan atau pertanian lahan kering maupun pertanian ikutan lainnya seperti peternakan, industri pengolahan hasil pertanian, dan lainnya.
4. Wilayah Laut Kewenangan
Panjang garis pantai mencapai 51 km sehingga berdasarkan kewenangan kabupaten sampai dengan 4 mil laut, maka luas wilayah laut kewenangan mencapai 37.744 Ha.
Pemanfaatan wilayah laut kewenangan saat ini masih terbatas pada bentuk pemanfaatan penangkapan ikan oleh para nelayan di pesisir, dan sebagai alur pelayaran menuju dan dari pelabuhan laut Lhokseumawe di Krueng Geukueh. Peluang pengembangan pemanfaatan selain untuk perikanan tangkap dapat juga untuk kegiatan wisata bahari, potensi tambang di bawah laut, jalur pelayaran tepi pantai, dan lainnya.
5. Kawasan Waduk Krueng Jambo Aye dan Krueng Keureuto
Kawasan Waduk Krueng Jambo Aye terletak di Kecamatan Langkahan yang memanfaatkan aliran Sungai Krueng Jambo Aye. Waduk yang dibangun dengan kapasitas 1,5 milyar m³ direncanakan digunakan selain sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air (PLTA) untuk memenuhi kebutuhan listrik wilayah I Aceh dengan kapasitas 235 MW, juga dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi untuk mengairi 55.700 Ha lahan persawahan, sebagai sumber air baku dengan debit 11,6 m³/det dan pengendalian banjir (daerah Langkahan, Tanah Jambo Aye, Baktiya dan Seunuddon), serta tempat rekreasi dan olah raga. Luas daerah genangan waduk ini direncanakan kurang lebih 2.745 Ha yang meliputi wilayah Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur.

6. Kawasan Waduk Krueng Keureuto terletak di Kecamatan Paya Bakong dan Kecamatan Tanah Luas yang memanfaatkan aliran Sungai Krueng Keureuto. Fungsi waduk ini adalah selain sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas 3,27 MW juga dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi untuk mengairi 4.568 Ha lahan persawahan, untuk pengendalian banjir dengan besar kendali 29,94 juta m² (banjir Paya Bakong, Pirak Timu, Matangkuli, Lhoksukon, Tanah Luas, Syamtalira Aron, Tanah Pasir, Lapang) serta tempat rekreasi dan olah raga. Luas daerah genangan waduk ini direncanakan kurang lebih 710 Ha.

Gambar 2.8.
Peta Pola Ruang Kabupaten Aceh Utara



Sumber: Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara

H. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana di Kabupaten Aceh Utara dapat dibedakan berdasarkan jenis bencana yang terjadi, yaitu :

1. Bencana longsor, dengan jalur dan ruang evakuasi di Gampong Gunci dan Gampong Riseh Teungoh (Kecamatan Sawang), Gampong Pase Sentosa (Kecamatan Geureudong Pase), Meunasah Leubok Kliet (Kecamatan Meurah Mulia), Gampong Meuria Matangkuli (Kecamatan Matangkuli), Gampong Alue Semambu (Kecamatan Cot Girek);
2. Bencana gelombang pasang, dengan jalur dan ruang evakuasi di Gampong Krueng Mate (Kecamatan Syamtalira Bayu), Gampong Beuringen, Gampong Matang Ulim, dan Gampong Keude Blang Mee (Kecamatan Samudera), Gampong Matang Janeng (Kecamatan Tanah Pasir), Gampong Keude Lapang (Kecamatan Lapang), Gampong Meunasah Hagu (Kecamatan

Baktiya Barat), Gampong Cot Trueng dan Gampong Ulee Titi (Kecamatan Seunuddon), dan Gampong Glumpang Umpung Uno (Kecamatan Tanah Jambo Aye);

3. Bencana banjir, dengan jalur dan ruang evakuasi di Gampong Binjee dan Gampong Blang Crok (Kecamatan Nisam), Gampong Ulee Nyeu (Kecamatan Bandar Baro), Gampong Meunasah Glong dan Gampong Keude Bayu (Kecamatan Syamtalira Bayu), Gampong Matang IX dan Gampong Punti (Kecamatan Matangkuli), Gampong Blang Gunci dan Gampong Teungoh Siron (Kecamatan Paya Bakong), Gampong Tanjong Putoh dan Gampong Paya Terbang (Kecamatan Tanah Luas), Gampong Blang Peuria (Kecamatan Samudera), Gampong Meucat (Kecamatan Syamtalira Aron), dan Gampong Tambon Baroh (Kecamatan Dewantara);
4. Bencana gempa bumi; dan Bencana tsunami, dengan jalur dan ruang evakuasi di Gampong Pante Gurah dan Pinto Makmur (Kecamatan Muara Batu), Gampong Uteun Geulinggang, Gampong Kd. Krueng Geukeuh, Gampong Paloh Igeuh, dan Gampong Tambon Baroh (Kecamatan Dewantara), Gampong Krueng Mate (Kecamatan Syamtalira Bayu), Gampong Beuringen, Gampong Matang Ulim, dan Gampong Keude Blang Mee (Kecamatan Samudera), Gampong Matang Janeng (Kecamatan Tanah Pasir), Gampong Keude Lapang (Kecamatan Lapang), Gampong Meunasah Hagu (Kecamatan Baktiya Barat), Gampong Cot Trueng dan Gampong Ulee Titi (Kecamatan Seunuddon), dan Gampong Glumpang Umpung Uno (Kecamatan Tanah Jambo Aye).

2.1.3. Demografi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara tercatat 593.492 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 2,00persen per tahun. Luas wilayah 3.296,86 km² maka kepadatan penduduk mencapai 180 jiwa/km² dengan sebaran di 27 kecamatan selama periode tahun 2012 -2016 sebagaimana tercantum pada Tabel 2.2.

Ditinjau dari distribusi penduduk terbesar di Kecamatan Lhoksukon mencapai 49.997 jiwa dan kepadatan penduduk terbesar di Kecamatan Dewantara mencapai 1.249 jiwa/km², sedangkan jumlah dan kepadatan penduduk terkecil di Kecamatan Geureudong Pase mencapai 5.002 jiwa atau 18

jiwa/km². Bila dilihat dari letaknya, maka dapat diindikasikan bahwa kecamatan-kecamatan di sekitar sumbu wilayah atau di sekitar jalan nasional cenderung mempunyai jumlah dan kepadatan penduduk lebih besar

Tabel 2.2.
Perkembangan Distribusi Penduduk Kabupaten Aceh Utara
menurut Kecamatan Tahun 2012-2016

No.	Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Sawang	34.999	35.457	36.502	37.198	35.811
2	Nisam	17.473	17.702	18.223	18.571	17.522
3	Nisam Antara	12.447	12.610	12.981	13.229	12.384
4	Banda Baro	7.518	7.617	7.841	7.991	7.546
5	Kuta Makmur	22.648	22.945	23.621	24.072	24.722
6	Simpang Kramat	8.946	9.063	9.330	9.508	11.872
7	Syamtalira Bayu	19.309	19.562	20.138	20.522	19.673
8	Geureudong Pase	4.613	4.674	4.812	4.904	4.617
9	Meurah Mulia	18.129	18.367	18.908	19.269	18.255
10	Matangkuli	17.035	17.258	17.766	18.105	17.295
11	Paya Bakong	13.053	13.224	13.614	13.874	14.474
12	Pirak Timu	7.624	7.724	7.952	8.104	7.805
13	Cot Girek	19.021	19.270	19.838	20.216	18.742
14	Tanah Jambo Aye	41.032	41.569	42.794	43.610	38.579
15	Langkahan	21.514	21.796	22.438	22.866	24.138
16	Seunuddon	23.800	24.112	24.822	25.295	24.441
17	Baktiya	33.978	34.423	35.437	36.113	33.284
18	Baktiya Barat	17.574	17.804	18.328	18.678	17.373
19	Lhoksukon	46.101	46.704	48.080	48.997	64.381
20	Tanah Luas	22.913	23.213	23.897	24.353	32.098
21	Nibong	9.375	9.498	9.778	9.964	13.175
22	Samudera	25.446	25.779	26.538	27.044	35.619
23	Syamtalira Aron	17.066	17.289	17.798	18.138	16.922
24	Tanah Pasir	8.548	8.660	8.915	9.085	8.440
25	Lapang	8.187	8.294	8.538	8.701	7.965
26	Muara Batu	25.527	25.861	26.623	27.131	24.680
27	Dewantara	45.496	46.091	47.449	48.354	41.679
Jumlah		549.370	556.566	572.961	583.892	593.492

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh Utara Tahun 2017

2.2. Aspek KesejahteraanMasyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi Aceh Utara periode 2012-2016 ditunjukkan oleh PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 dan tanpa memasukkan migas, berkisar antara 3,303,27 persen. Nilai PDRBADHK tanpa migas Aceh Utara selama pada tahun 2012 nilainya sebesar 10,322 triliun rupiah dan terus tumbuh hingga mencapai 12,005 triliun rupiah pada tahun 2016 dengan pertumbuhan rata-rata 4,16 persen per tahun.

Jika dengan memasukkan migas, nilai PDRB Aceh Utara selama periode 2012-2016 mengalami penurunan yaitu dari 18,51 triliun rupiah tahun 2012 turun menjadi 15,347 triliun rupiah tahun 2016.

Tabel 2.3
Laju PertumbuhanPDRB MenurutSektorTahun2012-2016 (Persen)

SEKTOR	CAPAIAN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Pertanian	4,14	6,06	4,17	4,10	4,77
Pertambangan dan Penggalian	-2,93	-8,03	-14,61	-39,72	-5,99
- Pertambangan migas dan panas bumi	-3,01	-8,37	-15,15	-41,06	-6,82
- Pertambangan dan penggalian lainnya	1,59	10,68	9,50	7,16	9,84
Industri Pengolahan	6,96	-8,10	0,48	3,80	-10,23
Pengadaan Listrik dan Gas	7,72	7,18	5,62	5,64	10,17
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,41	5,53	5,93	4,90	9,87
Konstruksi	6,52	8,62	6,99	4,50	14,46
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,60	7,94	7,77	6,32	7,21
Transportasi dan Pergudangan	7,25	7,79	2,74	3,72	4,79
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,01	9,81	9,72	6,76	9,73
Informasi dan Komunikasi	9,23	9,44	9,48	2,73	5,72
Jasa Keuangan dan Asuransi	-5,98	1,42	-5,72	1,36	6,20
Real Estate	3,89	7,51	7,64	6,36	9,44
Jasa Perusahaan	1,67	5,90	7,45	2,15	5,60
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	2,67	8,07	4,28	7,93	11,67
Jasa Pendidikan	6,27	6,83	5,74	8,84	10,13
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13,02	9,50	8,34	7,80	10,21
Jasa Lainnya	4,63	6,30	6,00	3,92	10,24
PDRB (Non Migas)	5,38	3,30	4,18	4,65	3,27
PDRB (Migas)	1,59	-1,74	-3,59	-11,53	-0,89

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016

Tabel 2.4
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Aceh Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (Persen)

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian	19,83	21,25	23,77	31,22	32,75
	1. Pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	14,06	15,01	17,18	22,43	23,36
	2. Kehutanan dan penebangan kayu	0,30	0,33	0,35	0,43	0,44
	3. Perikanan	5,47	5,92	6,24	8,37	8,96
B	Pertambangan dan Penggalan	43,87	41,80	36,74	17,01	14,90
	1. Pertambangan Migas dan Panas Bumi	43,13	40,91	35,74	15,67	13,44
	2. Pertambangan dan penggalan lainnya	0,74	0,85	1,00	1,34	1,46
C	Industri Pengolahan	14,61	13,27	13,52	17,21	14,30
D	Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,07	0,08
E	Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
F	Konstruksi	2,78	3,06	3,41	4,51	5,21
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,99	7,65	8,34	11,19	12,33
H	Transportasi dan Pergudangan	3,87	4,27	4,55	5,79	5,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,24	0,27	0,31	0,42	0,47
J	Informasi dan Komunikasi	1,12	1,22	1,35	1,70	1,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,01	1,04	1,05	1,36	1,45
L	Real Estate	1,44	1,61	1,82	2,44	2,69
M,N	Jasa Perusahaan	0,19	0,20	0,22	0,29	0,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	1,50	1,58	1,83	2,60	3,02
P	Jasa Pendidikan	0,79	0,84	0,92	1,32	1,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,13	1,25	1,40	1,93	2,18
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,58	0,62	0,68	0,91	1,04
PDRB tanpa Migas		11,22	11,85	12,81	13,77	14,48
PDRB dengan Migas		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara

r Angka revisi

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Pertumbuhan ekonomi Aceh Utara menurut lapangan usaha tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.3, Ditinjau dari kontribusi lapangan usaha, dapat dilihat pada Tabel 2.4, peranan sektor migas semakin menurun dari

43,87 persen pada tahun 2012 menjadi 14,90 persen pada tahun 2016. Jika ditinjau PDRB ADHB tanpa migas, kontribusi terbesar adalah sektor pertanian yang meningkat dari 19,83 persen pada tahun 2012 menjadi 32,75 persen pada tahun 2016. Kontribusi besar kedua adalah sektor industri pengolahan sebesar 14,61persen pada tahun 2012 dan 14,39 persen pada tahun 2016 dan selanjutnya sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusi sebesar 6,99 persen pada tahun 2012 meningkat menjadi 12,33 persen pada tahun 2016. Pada urutan keempat, sektor transportasi dan pergudangan dengan kontribusi 3,87 persen pada tahun 2012 meningkat menjadi 5,94 persen pada tahun 2016.

B. Laju Inflasi

Laju Inflasi menunjukkan tingkat perubahan harga-harga yang terjadi di suatu daerah. Laju inflasi tahun kalender 2016 hingga Desember 2016 untuk Kota Lhokseumawe sebesar 5,60 persen, Kabupaten Aceh Utara disetarakan dengan Kota Lhokseumawe sedangkan laju inflasi Provinsi Aceh sebesar 3,86 persen dan Nasional sebesar 3,02 persen.

Tabel 2.5
 Nilai Inflasi Rata-Rata Kabupaten Aceh Utara
 Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Lhokseumawe/ Aceh Utara	0,39	8,27	8,53	2,44	5,60
Aceh	0,22	7,31	8,09	1,53	3,86
Nasional	4,30	8,38	8,36	3,35	3,02

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh 2016

Terjadi penurunan tingkat inflasi dibandingkan tahun 2014 dengan tingkat inflasi mencapai 8,53 persen. Perkembangan tingkat inflasi di Kabupaten Aceh Utara, pola kecenderungannya mempunyai kesamaan dengan kecenderungan inflasi Aceh sebagaimana tercantum pada Tabel 2.5.

C. Pendapatan Regional Perkapita

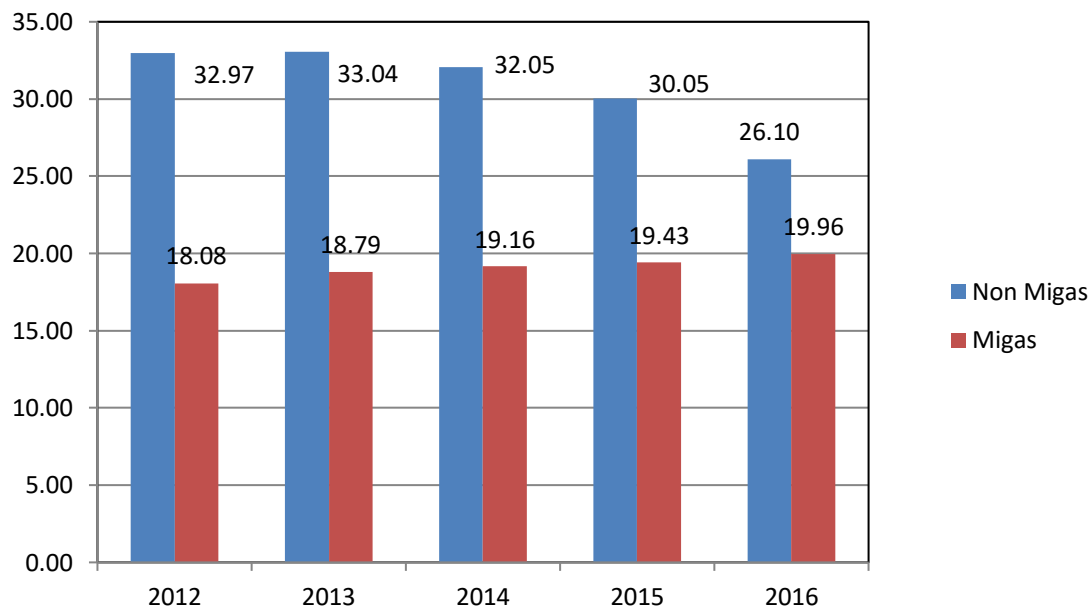
Angka PDRB mencerminkan produktivitas secara umum, tanpa mempertimbangkan pembagiannya ke masing-masing penduduk. Dengan

membagi PDRB dengan jumlah penduduk, akan diketahui tingkat produktivitas per kapita (PDRB per kapita). PDRB per kapita sering digunakan sebagai indikator awal untuk mengukur kesejahteraan penduduk suatu daerah. Untuk membandingkan kesejahteraan antardaerah, yang sering dipakai adalah PDRB per kapita ADHB, sedangkan untuk membandingkan antarwaktu, PDRB perkapita ADHK lebih tepat. PDRB per kapita Aceh Utara ADHB dengan migas cenderung menurun sebelum membaik di tahun 2016. Pada tahun 2016 PDRB per kapita Aceh Utara adalah Rp 28,19 juta per tahun, naik dari tahun 2015 yang sebesar Rp 27,97 juta per tahun.

Dengan mengeluarkan migas, tercatat bahwa selama 5 tahun terakhir PDRB per kapita Aceh Utara terus mengalami peningkatan. PDRB per kapita Aceh Utara tanpa migas pada tahun 2016 adalah sebesar Rp24,40 juta per tahun, atau naik dari tahun 2015 yang sebesar Rp23,59 juta per tahun. Angka ini jauh lebih rendah dari PDB per kapita nasional di tahun 2016 yang mencapai Rp47,96 juta per tahun. Sementara itu, PDRB per kapita Aceh Utara atas dasar harga konstan menunjukkan peningkatan yang sedikit lebih rendah dibandingkan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku. PDRB per kapita ADHK Aceh Utara pada tahun 2012 adalah sebesar Rp32,66 juta per tahun dengan migas dan Rp18,57 juta per tahun tanpa migas. Selama 5 tahun hingga tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 20,82 persen dengan migas dan meningkat sebesar 8,89 persen tanpa migas.

Secara rata-rata selama lima tahun terakhir, PDRB per kapita Aceh Utara dengan migas mengalami penurunan sebesar 5,55 persen per tahun, sedangkan PDRB per kapita tanpa migas mengalami kenaikan rata-rata sebesar 2,16 persen per tahun. PDRB per kapita Aceh Utara atas dasar harga konstan pada tahun 2016 dengan migas adalah sebesar Rp25,86 juta per tahun, sedangkan tanpa migas adalah sebesar Rp20,23 juta per tahun.

Gambar 2.9
PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2012 – 2016 (Juta Rupiah)

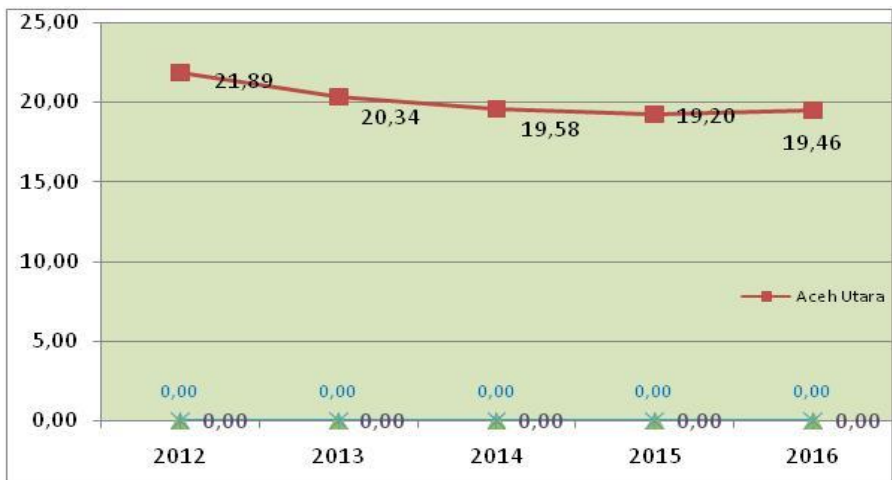


Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Utara

D. Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan makro yang harus diatasi secara berkelanjutan.Akhir tahun 2016 tercatat penduduk miskin di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 115.500jiwaatau 19,46persen dari jumlah penduduk sebanyak 593.492jiwa. kondisi ini menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh Utara masih rendah walaupun ada kecendrungan menurun dari tahun 2012-2016. Garis kemiskinan perkapita perbulan tahun 2016 berjumlah Rp 301.733

Gambar 2.10
Kemiskinan Kabupaten Aceh Utara



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara

E. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Angka kriminalitas yang tertangani pada tahun 2012 mencapai 74 kasus dari 89 kasus keseluruhans sebagaimana terlihat pada Tabel 2.6

Tabel 2.6
Angka Kriminalitas Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016

Kasus	Kejadian	Tertangani
Pembunuhan	5	4
Penganiayaan Berat	8	6
Penculikan	4	2
Pencurian dengan Kekerasan	2	2
Pencurian dengan Pemberatan	7	6
Pencurian Ranmor	15	13
Pencurian Kawat Telepon	12	10
Pemeriksaan	2	1
Pembakaran	5	4
Senpi/Handak	9	8
Pemerasan	15	14
Penyelundupan	5	4
Kejahatan Terhadap Kepala Negara	0	0
Jumlah	89	74

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Utara

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dikenal secara universal ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indexs (HDI). Angka IPM merupakan indeks komposit dari 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesehatan (angka usia harapan hidup), aspek pendidikan (angka melek huruf dan angka rata-rata lama sekolah), dan aspek ekonomi (rata-rata pengeluaran ril per kapita dalam paritas daya beli masyarakat). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Aceh Utara merupakan indikator tingkat pembangunan manusia melalui pengukuran keadaan penduduk menurut usia hidup, pengetahuan, dan hidup layak. Nilai IPM Kabupaten Aceh Utara setiap tahunnya menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2012, IPM Kabupaten Aceh Utara sebesar 64,82 dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 67,19.Perbandingan IPM antara Kabupaten Aceh Utara dan Provinsi Aceh terlihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.7
Perkembangan Relatif IPM Kabupaten Aceh Utara dengan Provinsi
Aceh Tahun 2012-2016

TAHUN	ACEH UTARA	ACEH
2012	64,82	67,81
2013	65,36	68,30
2014	65.93	68.81
2015	66,85	69,45
2016	67,19	70,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2017

Nilai IPM Kabupaten Aceh Utara setiap tahunnya menunjukkan tren peningkatan.Peningkatan ini tidak terlepas dari hasil kerja keras para unsur pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat. Kinerja pembangunan manusia dalam dimensi ekonomi, pendidikan, dan sosial yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini dapat menjadi indikasi bahwa kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Utara dari waktu ke waktu mengalami peningkatan, namun dibandingkan dengan IPM Aceh, IPM Aceh Utara masih berada di bawah Provinsi.

A. Pendidikan

1. Angka Melek Huruf

Salah satu aspek pendidikan pendidikan yang mempengaruhi IPM adalah Angka Melek Huruf (AMH). Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Pada periode 2012-2016, persentase angka melek huruf Kabupaten Aceh Utara mengalami peningkatan dari 90,50 persen menjadi 95,39 persen.Kondisi capaian ini dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.8
Perkembangan Angka Melek Huruf
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Penduduk Usia diatas 15 Tahun yang bisa Membaca dan Menulis	437.274	441.506	432.911	450.082	465,640
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	483.170	487.989	456.233	487.966	488,122
Persentase dapat baca tulis (AMH)	90,50	90,47	94,89	92.24	95,39

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angkarata-rata lama sekolah merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa lamanya penduduk di Kabupaten Aceh Utara rata-rata dalam menempuh pendidikan disetiap jenjang pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.9 berikut ini :

Tabel 2.9
Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2012-2016

Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
KabupatenAceh Utara	7,69	7,83	8,06	8,07	8,09
Provinsi Aceh	8,36	8,44	8,71	8,77	8,86

Sumber : BPS Aceh tahun 2017

Dari tabel di atas, pada tahun 2016 rata-rata lama sekolah masyarakat kabupaten Aceh Utara adalah 8,09 tahun ini menunjukkan bahwa lama sekolah masyarakat Aceh Utara adalah rata-rata diatas kelas II SLTP dan dibawah kelas III SLTP.

3. Angka Harapan Lama Sekolah

Selain rata-rata lama sekolah, komponen IPM dari unsur pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah Kabupaten Aceh Utara

meningkat dari tahun ke tahun. Rata-rata angka harapan lama sekolah Aceh Utara sudah berada di atas provinsi.

Tabel 2.10
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2012-2016

Angka HarapanLama Sekolah	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
KabupatenAceh Utara	13.77	13.89	13.99	14.10	14.11
Provinsi Aceh	13.19	13.36	13.53	13.73	13.89

4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan salah satu indikator ketersediaan akses layanan pendidikan. Kondisi APK di Kabupaten Aceh Utara terus memperlihatkan kondisi yang fluktuatif dari tahun ke tahun sejak 2012 hingga 2016. Pada jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah bahkan capaian APK pernah mencapai di atas 100 persen, yaitu pada tahun 2012 s.d 2013, namun pada tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan pada posisi 96,76 persen. Pada tahun 2016 APK SD/MI memperlihatkan sedikit kenaikan menjadi 97,75 persen. Terjadinya capaian angka di atas 100 persen pada tahun 2012 dan 2013 disebabkan adanya anak-anak umur di bawah 7 tahun yang sudah memasuki SD/MI dan juga adanya anak-anak dari luar kabupaten lain yang bersekolah di Kabupaten Aceh Utara.

Tabel 2.11
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2012-2016

Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
SD/MI					
Jumlah Murid SD/MI	78.049	75.265	73.018	72.021	72.461
Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun	72.666	72.018	73.417	74.438	74.127
APK/SD/MI (%)	107,41	101,80	99.86	96,76	97,75
SMP/MTS					
Jumlah Siswa SMP/MTS	31.640	33.182	35.448	35.838	35.510
Jumlah Penduduk kelompok Usia 13-15 tahun	35.292	35.671	36.070	37.075	36.419
APK SMP/MTS (%)	89,65	97,40	98.47	96,61	97,50
SMA/MA/SMK					
Jumlah Siswa SMA/MA/SMK	24.902	24.153	23.192	23.424	22.355

Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Penduduk kelompok Usia 16-18 tahun	35.326	34.909	35.587	35.696	35.931
APK SMA/MA/SMK (%)	70,49	66,09	65.59	65.68	62,22

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017

Pada jenjang SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) masih berada dibawah angka 100 persen. Pada periode 2012 – 2016 dari tahun 2012 sampai 2014 menunjukkan peningkatan dan pada tahun 2015 terjadi penurunan akan tetapi kembali mengalami kenaikan pada tahun 2016. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan menengah yaitu SMA/SMK dan MA posisinya masih berada dibawah capaian SMP/MTs, sepanjang tahun 2012 -2016 bila dirata-ratakan, dapat diketahui tingkat capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) tertinggi adalah tahun 2012 yaitu 70,49 persen dan Angka Partisipasi Kasar (APK) terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 62,22 persen.

5. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)

APT adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah disekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah. APT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan di suatu wilayah.APT merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi,menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12
APT Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011-2016

Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
SD	259,905	271,802	273,927	285.635	295.634
APT SD (%)	47.31	48.84	47.81	48.92	49,64
SMP	144,350	147,403	141,418	150.047	160.07
APT SMP (%)	26.28	26.48	24.68	25.70	26,88
SMA	88,601	94,209	84,595	91.411	96.718
APT SMA (%)	16.13	16.93	14.76	15.65	16,24
JumlahPenduduk	549,370	556,566	572,961	583.892	593.492

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017

Tabel 2.12 menunjukkan *trend* angka siswa menamatkan sekolah pada setiap jenjang pendidikan menunjukkan perkembangan yang terus meningkat

dalam 5 (lima) tahun terakhir sejak 2012-2016 kecuali pada tahun 2014 mengalami penurunan untuk semua tingkatan, kemudian tahun 2015 – 2016 terus menunjuk kenaikan kembali. Meningkatnya angka siswa yang menamatkan sekolah pada setiap jenjang pendidikan menunjukkan tingkat kesejahteraan dan kesadaran penduduk terhadap pendidikan terus meningkat.

6. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) periode 2012-2016 secara umum pada tingkat tingkat pendidikan SD/MI dan SMA/MA dan SMK menurun, APM SMP/MTs dari 63,43 persen pada tahun 2012 meningkat menjadi 67,86 persen pada tahun 2016. APMSD/MI dan SMP/MTs diatas 60 persen, sedangkan untuk SMA/MA dan SMK masih berada dibawah 51 persen yaitu 50,96 persen pada tahun 2012 yang tertinggi. Perkembangan APM kabupaten Aceh Utara dari tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.13
Angka Partisipasi Murni
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
SD/MI	91,54%	86,12%	84,00%	86,66%	83,49%
SMP/MTs	63,43%	68,21%	70,26%	68,19%	67,86%
SMA/SMK/MA	50,96%	45,87%	43,36%	45,92%	42,45%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017

B. Kesehatan

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pada bidang kesehatan. Kondisi pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial pada bidang ini pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia satu tahun. Kelangsungan hidup bayi sangat ditentukan oleh kondisi pertumbuhan janin di dalam uterus, kualitas pemeriksaan antenatal, penyakit ibu waktu hamil, penanganan persalinan dan perawatan sesudah lahir. Setiap bayi lahir dihadapkan pada kondisi yang berbeda baik secara sosial ekonomi maupun kondisi kesehatan secara umum, sehingga diperkirakan bayi mempunyai umur kelangsungan hidup yang berbeda pula.

Berdasarkan data lima tahun terakhir terlihat adanya *trend* fluktuasi. Data pada 2016 adalah 998,5/1000 KH, artinya probabilitas bayi untuk hidup dalam kurun waktu satu tahun terjadi peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya. Faktor ini disebabkan oleh karena terjadinya penurunan angka kematian bayi di Aceh Utara.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan dalam rangka menurunkan AKB antara lain : Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan khususnya kepada bidan dan bidan desa secara berkesinambungan dan diikuti dengan proses evaluasi terhadap kegiatan secara langsung, Proses pembelajaran bersama melalui kegiatan AMP (Audit Maternal Perinatal), adanya dukungan dana Otsus melalui kegiatan pelatihan APN (Asuhan Persalinan Normal), ANC (Ante Natal Care) terpadu serta perbaikan sistem rujukan dengan peningkatan akses tanggap darurat melalui program Public Safety Center (PSC) di tiga wilayah kerja, yaitu Puskesmas Muara Batu, Syamtalira Bayu, Tanah Jambo Aye, dan program pemberdayaan masyarakat (Program Desa Siaga).

Tabel. 2.14
Angka Kelangsungan Hidup Bayi

AKBH/ Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
Aceh Utara	994	991,7	988	993	998,5

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017

2. Angka Usia Harapan Hidup

AngkaUsiaHarapanHidup (AHH) atau yang dikenal juga dengan Angka Harapan Hidup saat lahir (*life expectancy at birth*) merupakan rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Jadi AHH pada periode 2012-2016 terus mengalami peningkatan sebagaimana diperlihatkan pada tabel dibawah.Usia Harapan Hidup biasanya digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan meningkatkan derajat kesehatan secara menyeluruh. Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu daerah, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.15
Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
KabupatenAceh Utara	68.40	68.41	68.42	68.48	68.51
Provinsi Aceh	69.23	69.31	69.35	69.50	69.51

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017

Data diatas menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan UHH dari tahun 2012 ke tahun 2016, hal ini disebabkan oleh karena meningkatnya akses pelayanan dan perawatan kesehatan melalui program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) di Puskesmas, tingkat ekonomi masyarakat terjadi peningkatan sehingga daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai.

3. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase Balita Gizi Buruk adalah jumlah balita gizi buruk terhadap total jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur dan klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO. Berdasarkan data Dinas Kesehatan pada tahun 2013 berjumlah 21 kasus berat, 2014 berjumlah 13 kasus berat dan tahun 2015 terdapat 12 kasus berat. Secara menyeluruh data gizi buruk yang mendapat perawatan baik itu rawat inap maupun rawat jalan berdasarkan data penimbangan berat badan

dan pengukuran tinggi badan (Standar Anthropometri) berada dibawah -3 SD, walaupun ada tidak adanya gejala klinis semua kasus dianggap gizi buruk.Pada tahun 2016 jumlah kasus gizi buruk sejumlah 56 kasus atau 0,11 persen dari jumlah balita.

Tabel 2.16
Persentase Balita Gizi Buruk
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah balita gizi buruk	170	110	75	104	56
Jumlah balita	51916	55268	54613	65298	52099
Persentase Balita Gizi Buruk	0,33	0,20	0,14	0,16	0,11

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022

Menindaklanjuti kasus tersebut maka telah dilaksanakan beberapa program antara lain PMT (Pemberian Makanan Tambahan) pemulihan kepada balita, serta pemantauan tumbuh dan kembang bayi dan balita melalui penimbangan di posyandu setiap bulannya.

C. Ketenagakerjaan

Salah satu isu penting dalam pembangunan di Indonesia adalah ketenagakerjaan. Permasalahan seperti tingkat pengangguran, lapangan pekerjaan, produktivitas pekerja, usia kerja menjadi perhatian kebijakan pemerintah karena terkait dengan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara masih menghadapi tantangan yang di bidang ketenagakerjaan, berupa terbatasnya lapangan kerja dan kualitas tenaga kerja yang relatif rendah.

Kabupaten Aceh Utara telah melakukan upaya mengurangi pengangguran secara maksimal. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2014 mengalami penurunan yang diikuti juga dengan penurunan jumlah pengangguran dan rasio penduduk yang bekerja meningkat mencapai 86 persen. Namun pada tahun 2015 tingkat pengangguran terbuka kembali meningkat mencapai 17,05 persen. Permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi adalah adanya pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga sering terjadi perselisihan diperusahaan antara pekerja dengan perngusaha pada saat berakhirnya kontrak kerja, karena sering perusahaan tidak membuat perjanjian kerja sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan.

Tabel 2.17
Rasio Penduduk Kabupaten Aceh Utara yang Bekerja
Selama Periode Tahun 2012– 2015

Karakteristik	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Angkatan kerja (orang)	225.482	236.109	217.174	220.640
Penduduk yang bekerja (orang)	190.591	193.678	187.683	183.025
Jumlah Pengangguran	34.891	42.431	29.491	37.615
Rasio Penduduk yang Bekerja (persen)	84,52	82,03	86,42	82,95
TPT (persen)	15,47	17,97	13,58	17,05

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2016

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah pengangguran seperti melahirkan program pemberdayaan ekonomi dan memberi berbagai jenis pelatihan kepada masyarakat.

2.2.3. Fokus Seni, Budaya dan Olah Raga

Dalam bidang seni, Kabupaten Aceh Utara memiliki 71 sanggar (group) kesenian yang tersebar di 27 kecamatan, sebagaimana pada gambar 2.12. Group ini merupakan kelompok pelestari khasanah budaya dengan berbagai jenis kesenian. Untuk tarian, misalnya, seperti debus, seudati, saman, ranup lampuan, pemulia jamee, marhaban, rapai geleng, didong, prang sabilillah, dalael khairat, nadham, meurkon, dhike lingiek, Nasyid, drama bahasa aceh, nariet, poh kipah, pantoen, drumband, seni pahat, ukir, dan melukis. Disamping itu, terdapat pula sastra (pantun, syair, hikayat) dan seni lukis (kaligrafi).

Tabel. 2. 18
Jumlah Grup Kesenian di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2012-2016

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Sanggar Seni	95	75	71	71	71

Sumber :Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016

Dari sejarah tersebut meninggalkan pula berbagai situs peninggalan/makam yang dapat menjadi objek wisata budaya yang dapat dikembangkan di Kabupaten Aceh Utaraserta tempat-tempat lain yang dapat singgahi oleh wisatawan sebagaimana Tabel 2.18.

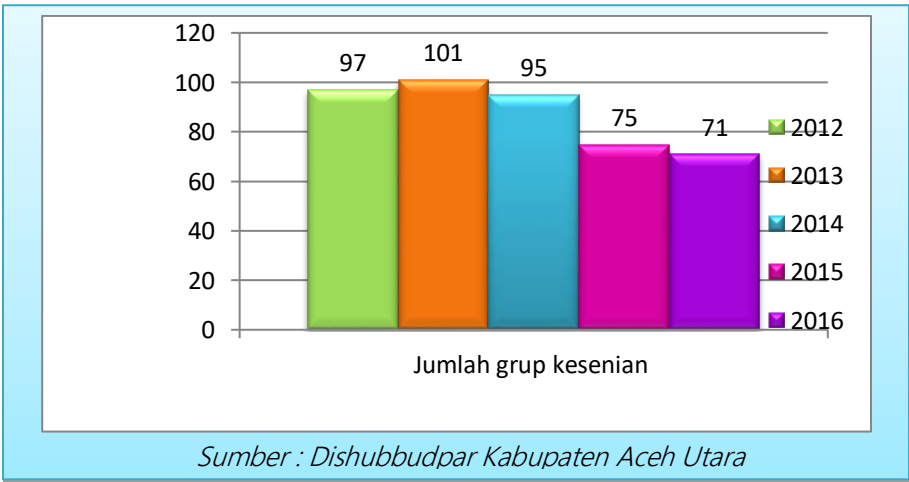
Beragam situs peninggalan/makam dan seni budaya tersebut merupakan aset sejarah dan kebudayaan Kabupaten Aceh Utara yang bernilai sangat tinggi dalam mendukung dan mendorong ketahanan budaya daerah. Banyaknya potensi Seni Budaya dan Pariwisata di kabupaten Aceh Utara mestinya menjadi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya, tetapi potensi ini belum terkelola dengan baik sehingga belum banyak memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian seni budaya di kabupaten Aceh Utara, pada tahun 2016 ditargetkan semua potensi dari sektor seni budaya dan pariwisata dapat dimanfaatkan minimal sebesar 40 persen untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan promosi, sosialisasi, dan pargelaran seni budaya serta ekonomi kreatif.

Tabel 2.19
Objek Wisata Budaya yang dapat Dikembangkan

No	Objek Wisata Budaya	Kecamatan
1	Pantai Dakuta Bungkah	Muara Batu
2	Pemandian Krueng Sawang	Sawang
3	Air Terjun Blang Kolam	Kuta Makmur
4	Air Terjun Seumirah/Lindek	Nisam
5	Makam Raja Muhammad	Syamtalira Bayu
6	Makam Para Raja Syuhada Cot Plieng	Syamtalira Bayu
7	Tugu Cot Plieng	Syamtalira Bayu
8	Makam Sultan Malikussaleh dan Malikul Dhahir	Samudera
9	Makam Tgk Peut Ploh Peut	Samudera
10	Makam Naina Husam Al-Din	Samudera
11	Makam Said Syarif	Samudera
12	Makam Sulthanah Nahrisyah	Samudera
13	Makam Sidi Abdullah Tajulnillah	Samudera
14	Makam Tgk Saleh Salihin	Samudera
15	Makam Tgk Batee Balee	Samudera
16	Makam Tgk Syaref	Samudera
17	Makam Maulana Abdurrahman Al-fasi	Samudera
18	Pantai Sawang	Samudera
19	Makam Ratu Al-'Aqla Binti Malikuldhahir	Matangkuli
20	Rumah Adat Cut Meutia	Matangkuli
21	Makam Cut Meutia	Matangkuli
22	Pantai Ulee Rubek	Seunuddon
23	Pantai Lapang (Kuala Cangkoi)	Lapang
24	Pantai Lanchok	Syantalira Bayu
25	Makam Cut Asiah	Tanah Pasir
26	Makam Pang Lateh/Pang Nanggroe	Lhoksukon
27	Makam Peutua Dollah	Baktiya Barat
28	Makam Putroe Beutong	Meurah Mulya
29	Makam Tgk. Di Geulanggang	Samudera
30	Makam Perdana Menteri	Aceh Utara
31	Makam Tgk.Syeh H.Ibrahim	Aceh Utara

Sumber : Dishubbudpar Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016

Gambar 2.11
Jumlah Grup Kesenian di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2012-2016



Sementara itu aspek keolahragaan juga tidak luput dari perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam upaya pembinaan dan peningkatan prestasi atlet melalui program kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. Hal ini terlihat dari cabang-cabang pembinaan yang telah dilakukan selama ini seperti Sepak bola, futsal, volley ball, badminton, tenis meja, tenis, renang, dayung, tinju, panjat tebing, atletik, sepeda, anggar dan lainnya yang dibina dibawah pembinaan KONI Kabupaten Aceh Utara. Selain itu juga peningkatan prasarana olahraga juga merupakan dilakukan melalui program kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olahraga seperti sarana prasarana di Kecamatan Lhoksukon terdiri dari fasilitas olahraga indoor dan out door, lapangan sepak bola (stadion) di Kecamatan Baktya serta kecamatan-kecamatan lainnya.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.

I. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

Pelayanan umum yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2017 di bidang pendidikan ditujukan untuk peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan. Indikator kinerja pelayanan pendidikan dapat dilihat dari tingkat partisipasi sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana serta tingkat kelulusan.

1. Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

a. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator untuk mengetahui berapa persen penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan di Kabupaten Aceh Utara. APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar dan menengah(7-15 tahun dan 15-18 tahun) yang masih menempuh pendidikan per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.Perkembangan APS kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.20
Perkembangan APS Kabupaten Aceh Utara
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
SD/MI	91,54%	97,72%	95,17%	94,26%	83,49%
SMP/MTs	63,43%	68,23%	41,95%	38,64%	67,83%
SMA/SMK/MA	-	52,46%	48,69%	48,22%	42,29%

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017

b. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah merupakan indikator untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menampung penduduk usia sekolah. Rasio ini adalah perbandingan jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan, yang dapat menunjukkan kemampuan untuk menampung penduduk usia pendidikan.

Tabel 2.21
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2012-2016

Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
SD/MI					
Jumlah Gedung Sekolah	402	402	407	407	409
Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Thn	72,666	72,018	73,417	73,823	74.127
Rasio/10.000	55.32	55.82	55.44	55.13	55,17
SMP/MTs					
Jumlah Gedung Sekolah	146	150	159	165	173
Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Thn	35,292	35,671	36,077	36,070	36.419
Rasio/10.000	41.37	42.05	44.07	45.74	47,50
SMA/SMK/MA					
Jumlah Gedung Sekolah	78	84	87	95	97
Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-19 Thn	35,326	34,909	35,587	35,695	35.931
Rasio/10.000	22.08	24.06	24.45	26.33	26,99

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Utara Tahun 2017

Peningkatan ketersediaan sekolah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 terus menunjukkan perkembangan yang positif. Rasio ketersediaan fasilitas pendidikan untuk menampung jumlah penduduk usia sekolah tertentu menunjukkan tingkat penyebaran layanan pendidikan juga meningkat.Hal ini terlihat dari pertumbuhan gedung sekolah untuk menjangkau akses layanan pendidikan di daerah-daerah yang terpencil dan terjauh. Fakta tersebut sangat relevan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam hal pendidikan pemerataan aksesibilitas layanan pendidikan ke setiap wilayah kabupaten.

Rasio standar ketersedian sekolah jenjang pendidikan SD/MI per 10.000 penduduk usia 7-12 tahun adalah 50 : 10.000 atau 1 : 200, 1 rombongan belajar maksimum 32 orang murid artinya pada satu satuan pendidikan dapat menampung 200 orang peserta didik. Ketersedian sekolah SD/MI di kabupaten Aceh Utara telah melebihi standar prasarana yaitu sudah > 50 bahkan telah mencapai 55,17 pada tahun 2016.

Rasio standar ketersedian sekolah jenjang pendidikan SMP/MTs per 10.000 penduduk usia 13-15 tahun adalah 31 : 10.000 atau 1 : 324, 1 rombongan belajar maksimum 36 orang murid artinya pada satu satuan pendidikan dapat menampung 224 orang peserta didik. Ketersedian sekolah SMP/MTs di kabupaten Aceh Utara telah melebihi standar prasarana yaitu sudah > 31 bahkan telah mencapai 47,50 pada tahun 2016.

Rasio standar ketersediaan sekolah jenjang pendidikan SMA/SMK/MA per 10.000 penduduk usia 16-19 tahun adalah 31 : 10.000 atau 1 : 324, 1 rombongan belajar maksimum 36 orang murid artinya pada satu satuan pendidikan dapat menampung 224 orang peserta didik. Ketersediaan sekolah SMA/SMK/MA di kabupaten Aceh Utara telah melebihi standar prasarana yaitu sudah > 31 bahkan telah mencapai 26,99 pada tahun 2016.

c. Rasio Guru terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar dan per 10.000 untuk tingkat pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Untuk mengetahui rasio guru terhadap murid/siswa di kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada Tabel 2.22.

Rasio guru terhadap murid di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2014 telah melebihi target Standar Pelayanan Minimal artinya jumlah guru di kabupaten Aceh Utara sudah lebih dari cukup karena sudah berada pada rasio 1 : < 25 (kurang dari 25) untuk semua jenjang pendidikan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk rasio guru dan murid adalah SD/MI 1 : 20 atau 50 : 1.000, SMP/MTs 1 : 25 atau 400 : 10.000 dan SMA/AMK/MA 1 : 25 atau 400 : 10.000.

Tabel 2.22
Rasio Murid dan Guru Jenjang Pendidikan
Tahun 2012-2016

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2012	2013	2014	2015	2016
I	SD/MI					
	1. Jumlah Guru	6,487	6,630	6,829	7,408	9.207
	2. Jumlah Murid	78,049	74,667	74,004	71,725	72.461
	3. Rasio Guru/Murid	12.03	11.26	10.84	9.68	7,87
	4. Rasio guru/murid per 1000	83.11	88.79	92.28	103.28	127,06
II	SMP/MTS					
	1. Jumlah Guru	3,515	3,547	3,746	4,228	4.512
	2. Jumlah Murid	31,640	33,053	34,840	52,662	35.510
	3. Rasio Guru/Murid	9.00	9.32	9.30	12.46	7,87
	4. Rasio guru/murid per 10000	1,111	1,073	1,075	80.29	127,06
III	SMA/MA/SMK					
	1. Jumlah Guru	2,083	2,098	2,175	3,023	3.080
	2. Jumlah Murid	24,902	24,153	23,320	23,599	22.355
	3. Rasio Guru/Murid	11.95	11.51	10.72	7.81	7,25
	4. Rasio guru/murid per 10000	836	869	933	1,281	137,8

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Utara Tahun 2017

d. Rasio Guru/Murid Perkelas Rata-rata

Dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu harus dijamin ketersediaan ruang kelas yang layak untuk masing-masing jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan SD/MI jika dibagi rata-rata maka ketersediaan ruang kelas masih kurang terutama di beberapa sekolah yang siswanya padat. Disamping itu masih terdapat beberapa sekolah terutama SD/MI yang meminjam ruang kelas untuk dipergunakan sebagai ruang guru dan kantor kepala sekolah karena belum tersedia ruang guru dan kantor. Terhadap sekolah-sekolah tersebut terus dilakukan upaya penyediaan ruang guru dan kepala sekolah yang representative agar dapat dikembalikan fungsi ruang kelas sebagaimana mestinya. Kemudian Pemerintah Aceh Utara perlu membuat aturan dan surat edaran kepada kepala sekolah semua jenjang pendidikan agar tidak menerima siswa baru melebihi ruang kelas yang ada sebab banyak sekolah lain yang kekurangan murid. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.23 berikut :

Tabel 2.23
Rasio Guru dan Murid Perkelas Rata - rata
Tahun 2012-2016

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2012	2013	2014	2015	2016
I	SD/MI					
	1. Jumlah Guru	6.487	6.630	6.829	7.408	9.207
	2. Jumlah Murid	78.049	74.667	74.004	71.725	72.461
	3. Jumlah Ruang Kelas	2.924	3.044	3.031	3.062	3.123
	4. Rasio guru per kelas	2,22	2,18	2,25	2,42	2,94
	5. Rasio Murid per kelas	26,69	24,53	24,42	23,42	23,20
II	SMP/MTS					
	1. Jumlah Guru	3.515	3.547	3.746	4.228	4.512
	2. Jumlah Murid	31.640	33.053	34.840	52.662	35.510
	3. Jumlah Ruang Kelas	1.148	1.192	1.213	1.317	1.369
	4. Rasio guru per kelas	3,06	2,98	3,09	3,21	3,29
	5. Rasio Murid per kelas	27,56	27,73	28,72	39,99	25,93
III	SMA/MA/SMK					
	1. Jumlah Guru	2.083	2.098	2.175	3.023	3.080
	2. Jumlah Murid	24.902	24.153	23.320	23.599	22.355
	3. Jumlah Ruang Kelas	775	822	926	938	969
	4. Rasio guru per kelas	2,75	2,69	2,55	3,22	3,17
	5. Rasio Murid per kelas	33,43	32,13	29,38	25,16	23,07

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017

Standar pelayanan minimal rasio murid perkelas tingkat SD/MI adalah 1 : 32, untuk SMP/MTs adalah 1 : 36 dan SMA/SMK/MA adalah 1 : 36. Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah ruang kelas untuk semua jenjang pendidikan telah melebihi standar pelayanan minimal.

2. Fasilitas Pendidikan

Teknologi pendidikan bukan dipandang secara fasilitas seperti laptop dan infokus. Akan tetapi teknologi merupakan ide untuk merancang program tersebut dan sarana prasaran tersebut hanya merupakan alat bantu pendidikan. Teknologi pendidikan yang terpenting adalah ide guru, rancangan guru, dan cara guru dalam mengajar. Teknologi pendidikan adalah tindakan guru untuk mengarahkan siswa pada tujuan pendidikan. Alat bantu yang merupakan fasilitas tersebut yaitu gedung RKB (Ruang Kegiatan Belajar-mengajar) yang merupakan sarana pembantu dari tindakan guru dalam mengajar.

Tabel 2.24
Jumlah Fasilitas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2012 s/d 2016

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI	402	406	408	407	409
2	SMP/MTs	146	158	171	165	173
3	SMA/MA/SMK	78	88	95	95	97
Jumlah		611	626	652	667	679

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017

3. Pendidikan Anak Usia Dini, NonFormal dan Informal (PAUDNI)

Pendidikan anak usia dini sebagaimana terlihat pada Tabel 2.25 terus meningkat dari tahun 2012 s.d 2016. Jumlah sekolah TK/RA dan PAUD Sejenis pada tahun 2012 sebanyak 458 unit dengan jumlah siswa 7.032 orang meningkat menjadi 520 unit dengan jumlah siswa 17.504 orang pada tahun 2016, hal ini menunjukkan semakin tingginya animo masyarakat dalam menyekolahkan anaknya pada pendidikan usia dini, pemerintah daerah terus berusaha meningkatkan jumlah fasilitas dan satuan pendidikan anak usia dini agar dapat terlayani pendidikan prasekolah dasar.

Tabel 2.25
Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2012-2016

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN/SISWA				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	TK/RA	200	250	259	273	272
2	PAUD Sejenis	258	226	253	249	248
	<i>Jumlah</i>	458	476	512	522	520
3	Jumlah Siswa TK	5.632	5.847	6.920	7.584	8.678
4	Jumlah Siswa RA	1.400	1.449	1.223	1.435	1.444
4	Jumlah Siswa PAUD Sejenis	*	*	*	2.098	7.382
	<i>Jumlah</i>	7.032	7.296	8.143	11.117	17.504

**data tidak tersedia*

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017

5. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah adalah perbandingan antara jumlah capaian kinerja APS tingkat jenjang pendidikan tertentu sekabupaten dengan jumlah seluruh APS jenjang pendidikan tertentu sekabupaten dikalikan dengan Seratus persen.

Rata-rata angka putus sekolah di kabupaten Aceh Utara dari tahun 2012-2016 adalah 0,59 persen, angka ini menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah di kabupaten Aceh Utara sudah cukup baik karena jumlah siswa yang berpartisipasi sekolah semua jenjang pendidikan, rata-rata 99,41 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.26
Angka Putus Sekolah di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2012-2016 (persen)

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI	0,09	0,09	0,05	0,04	0,06
2	SMP/MTs	0,13	0,19	0,24	0,23	0,17
3	SMA/MA/SMK	0,38	0,39	0,27	0,25	0,39
	Jumlah	0,60	0,67	0,56	0,52	0,62

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017

6. Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah perbandingan jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang pendidikan tertentu tahun sebelumnya. Tingkat kelulusan bisa menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan proses pendidikan. Tabel 2.27 menunjukkan tingkat kelulusan dari tahun ke tahun dalam periode 2012 s.d 2016.

Tabel 2.27
Angka Kelulusan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI	89,89	97,86	98,02	98,47	94,61
2	SMP/MTs	82,34	90,29	83,07	84,51	87,53
3	SMA/MA/SMK	77,06	77,66	74,57	75,33	73,16
	Rata-rata	83.10	88.60	85.22	86.10	85,16

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017

6. Angka Melanjutkan Sekolah

Angka melanjutkan sekolah merupakan perbandingan jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang pendidikan tertentu tahun tertentu dengan jumlah lulusan pada jenjang pendidikan dibawahnya tahun ajaran sebelumnya dikalikan seratus persen. Angka melanjutkan sekolah mulai SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMU/SMK/MA pada periode tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada tabel 2.28 berikut:

Tabel 2.28
Angka Melanjutkan Sekolah di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2012-2016

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2012	2013	2014	2015	2016
1	Dari SD/MI ke SMP/MTs	96,51	98,79	96,40	98,82	96,97
2	Dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK/MA	99,41	85,76	92,30	92,61	84,44
	Rata-rata	97,96	92,28	94,34	95,72	90,71

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017

7. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi

Persentase guru yang berpendidikan S1/D4 paling tinggi pada jenjang pendidikan menengah yakni guru sekolah SMA/MA/SMK yaitu 94,42 persen.

Tabel 2.29
Guru dengan Kualifikasi S1/DIV di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016

NO	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Guru SD/MI ≥ S1/D4	2.172	2.798	3.039	4.764	4.955
	Jumlah Guru	6.487	6.630	6.829	7.408	7.007
	Persentase SD/MI	33.48	42.20	44.50	64.31	70,71
2	Jumlah Guru SMP/MTs ≥ S1/D4	2.450	2.479	2.991	3.667	4.046
	Jumlah Guru	3.515	3.547	3.746	4.228	4.512
	Persentase SMP/MTs	69.70	69.89	79.85	86.73	88,67
3	Jumlah Guru SMA/MA/SMK ≥ S1/D4	1.902	1,925	2.004	2.776	2.908
	Jumlah Guru	2.083	2.098	2.175	3.020	3.080
	Persentase SMA/MA/SMK	91.31	91.75	92.14	91.92	94,42

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara 2017

Pada jenjang pendidikan dasar ternyata guru yang berpendidikan S1/D4 lebih sedikit dibandingkan jenjang pendidikan menengah, yaitu pada sekolah SMP yaitu 88,67 persen dan diikuti oleh guru SD/MI yakni sebesar 70,71 persen.

B. Kesehatan

1. Rasio Posyandu Persatuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Tabel 2.30
Jumlah Posyandu dan Jumlah Balita di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Posyandu	931	931	931	931	952
Jumlah Balita	51.916	55.268	54.613	65.298	52.099

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017

Idealnya 1 (satu) posyandu melayani 60-100 balita. Pada tahun 2015 rasio persatuan balita adalah 14,25 artinya satu posyandu melayani 70 balita, sedangkan pada tahun 2016 satu posyandu melayani 55 dengan rasio 18, 27. Terjadinya peningkatan rasio pada tahun 2016 karena ada penambahan jumlah Posyandu namun demikian kondisi tersebut masih dalam posisi ideal.

2. Rasio Puskesmas, Pustu persatuan Penduduk

Puskesmas, Pustu merupakan sarana fasilitas kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

Tabel 2.31
Kondisi Prasarana Kesehatan
di Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2012-2016

Jumlah Prasarana dan Penduduk	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Puskesmas	31	31	31	31	31
Jumlah Poliklinik	-	-	-	-	-
Jumlah Pustu	79	85	85	86	86
Jumah Penduduk	549.370	556.566	572.961	583.392	593.492
Rasio Puskesmas Per satuan penduduk	1:17.721	1:17.953	1:18.482	1:18.822	1:19.144
Rasio Poliklinik Per satuan penduduk	-	-	-	-	-
Rasio Pustu Per satuan penduduk	0,1438	0,1527	0,1483	0,1474	0,1443

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017

Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk idealnya adalah 1 : 30.000 Berdasarkan data dapat dilihat bahwa pada tahun 2015, 1 (satu) puskesmas melayani 18.483 penduduk sedangkan pada tahun 2015 satu puskesmas melayani 19.144 penduduk, dapat disimpulkan bahwa rasio puskesmas persatuan penduduk di Kabupaten Aceh Utara masih dalam kondisi yang ideal.

3. Rasio Dokter persatuan Penduduk

Dimensi kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sangat ditentukan oleh jumlah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang ada terdiri dari berbagai profesi diantaranya dokter. Pada periode 2012 - 2016 jumlah dokter yang ada pada Puskesmas – Puskesmas di Kabupaten Aceh Utara cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan adanya dokter yang

menduduki jabatan struktural dan adanya dokter yang pindah. Pada tahun 2012 jumlah dokter 150 dokter dan pada tahun 2016 tinggal 116 dokter. Hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.32
Rasio Jumlah Dokter terhadap Jumlah Penduduk di Kab. Aceh Utara
Tahun 2012-2016

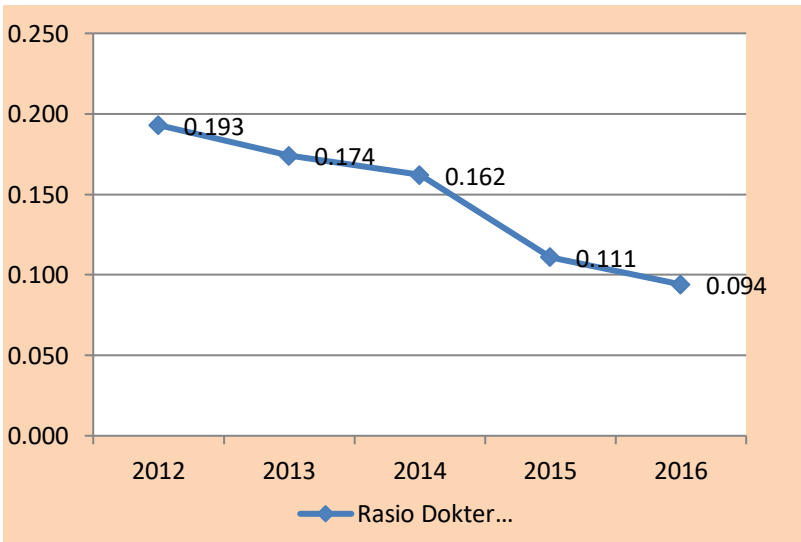
Jumlah Dokter dan Penduduk	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Dokter	150	142	138	119	116
Jumlah Penduduk	543.370	556.566	572.961	583.392	593.492
Rasio/ dokter	3.662	3.919	4.152	4.902	5.134
Angka Rasio	0,273	0,255	0,241	0,204	0,195
Rasio (WHO)	0,68	0,63	0,60	0,51	0,48

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017

Rasio dokter persatuan penduduk menurut WHO adalah 40/100.000 penduduk, artinya 1 dokter melayani 2.500 penduduk. Berdasarkan data diatas dapat dilihat pada tahun 2012, satu orang dokter melayani 3.662orang penduduk, dan pada tahun selanjutnya seorang dokter harus melayani terus bertambah, malah pada tahu 2016 seorang dokter harus melayani sampai 5.134 orang penduduk. Dari data diatas rasio dokter persatuan penduduk jauh kurang dari rasio yang ditetapkan WHO. Jumlah dokter tersebut sudah termasuk dokter PTT yang berjumlah 12 orang.

Rasio dokter di kabupaten Aceh Utara periode 2012-2016 di perlihatkan pada gambar 2.12 berikut:

Gambar 2.12
Rasio Dokter di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017

Sedangkan data jumlah dokter yang berada di Rumah Sakit Umum Cut Mutia sebanyak 58 orang baik di di tahun 2015. Dokter Umum 14 orang, Dokter Spesialis 37 orang, Dokter Sub Spesialis 3 orang dan Dokter Gigi 4 orang

4. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Komplikasi kebidanan idealnya terjadi pada 20 persen dari total sasaran ibu hamil, sehingga semakin banyak sasaran ibu hamil maka semakin tinggi pula komplikasi kebidanan. Selain itu dari total estimasi ibu yang beresiko komplikasi yang telah dilaporkan tersebut tidak semuanya kasus berakhir dengan komplikasi kebidanan. Target penanganan definitif komplikasi kebidanan adalah 80 persen dari total komplikasi yang ditangani di Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada Tabel 2.33 berikut:

Tabel 2.33
Cakupan Komplikasi Kebidanan dan Penanganan Definitif
terhadap Cakupan Komplikasi Kebidanan Tahun 2012 – 2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Komplikasi Kebidanan	1.172	1.485	2.740	2.808	2.873
Penanganan Definitif Komplikasi Bidan	1.172	1.485	1.632	2.658	2.037
Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	100	100	60	95	71

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017

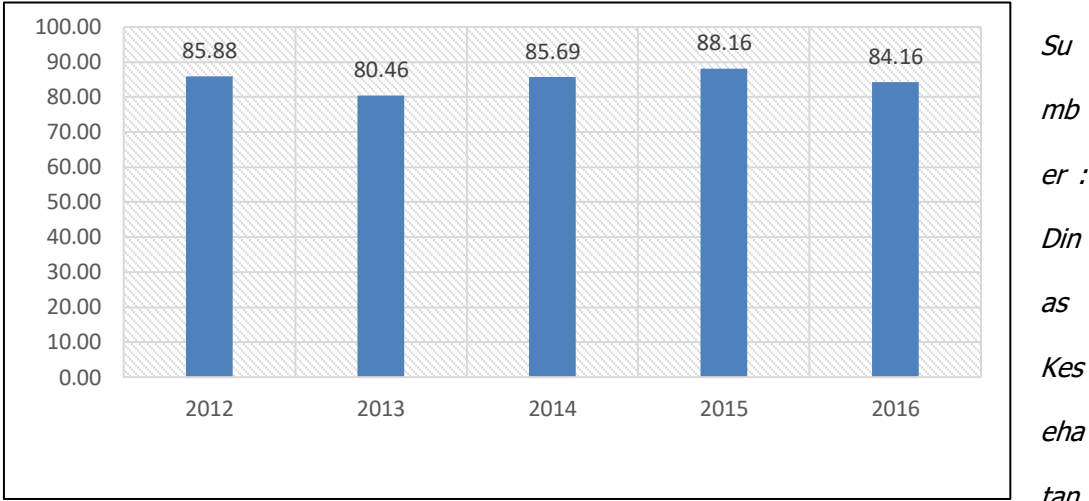
Dari data tersebut penanganan Komplikasi kebidanan mencapai 95 persen pada tahun 2015 dan mengalami penurunan menjadi 71 persen pada tahun 2016, hal ini disebabkan karena ada beberapa komplikasi kebidanan yang ditangani di Rumah Sakit ataupun di Klinik Swasta.

5. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Periode persalinan merupakan salah satu periode yang berkontribusi besar terhadap Angka Kematian Ibu. Sedangkan dalam target MDG’s salah satu yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesehatan ibu adalah menurunkan angka kematian ibu. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah pelayanan persalinan yang aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan. Target persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan

saat ini adalah 90% dari total sasaran ibu hamil. Dari data persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan mengalami peningkatan pada tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu mencapai 88 persen, namun mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 84%, kondisi tersebut masih berada dibawah target yang ditetapkan. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan dapat dilihat seperti Gambar dibawah ini :

Gambar 2.13
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan



Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017

Upaya peningkatan cakupan persalinan perlu dilakukan melalui upaya pelaksanaan program unggulan kesehatan ibu, diantaranya adalah kemitraan bidan dan dukun, peningkatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui Jampersal (Jaminan Persalinan) serta Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA). Persalinan yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan dapat menurunkan angka kematian ibu saat persalinan karena di tempat tersebut persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan dan tersedia sarana kesehatan yang memadai sehingga dapat menangani komplikasi yang mungkin terjadi pada saat persalinan yang membahayakan nyawa ibu dan bayi.

Tabel 2.34
 Jumlah Sasaran Ibu Bersalin dan Ibu Bersalin yang Ditolong
 Tenaga Kesehatan Tahun 2012 – 2016

NO	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Ibu Bersalin yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan	10.478	10.675	11.209	11.674	11.693
2.	Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin	12.201	13.286	13.081	13.242	13.894

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017

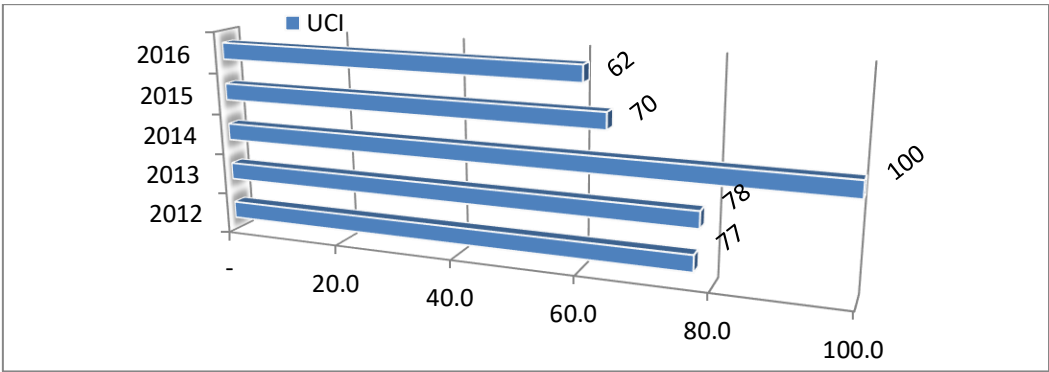
6. Cakupan Desa *Universal Child Immunization*

Salah satu target keberhasilan program imunisasi adalah tercapainya UCI yang merupakan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi secara merata pada bayi di 852 desa/kelurahan. Cakupan Desa *Universal Child Immunization* (UCI) di Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada Gambar 2.14.

Target nasional UCI (*Universal Child Immunization*) yaitu 100 persen, artinya semua anak yang menjadi sasaran harus di imunisasi. Berdasarkan data diatas, dapat terlihat bahwa terjadi *trend* penurunan cakupan Imunisasi dari tahun ke tahun. Data cakupan imunisasi pada tahun 2014 sebesar 70,3 persen, tahun 2015 sebesar 62 persen dan tahun 2016 terjadi penurunan lagi sebesar 60,5 persen. Hal ini disebabkan oleh karena berbagai faktor baik faktor internal seperti upaya menjalin hubungan dengan lintas sektor terkait, pelibatan tokoh masyarakat dalam program imunisasi belum maksimal dilakukan.

Faktor eksternalnya antara lain adanya isu vaksin haram oleh beberapa tokoh agama sehingga makin mempersulit tenaga kesehatan dalam menjalankan program imunisasi, penolakan masyarakat terhadap vaksin suntikan khususnya oleh orang tua bayi, adanya efek Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang menyebabkan orang tua enggan mengimunisasi anaknya karena berefek seperti terjadinya bengkak pada bagian yang diimunisasi dan efek demam setelah di imunisasi.

Gambar 2.14
Cakupan Desa UCI di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017

7. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Pemberian makan yang tidak sesuai dengan umur bayi, seperti pemberian pisang terlalu dini yang berpotensi terhadap gagalnya pemberian ASI eksklusif yang seharusnya diberikan sejak lahir sampai dengan usia 6 bulan tanpa adanya pemberian makanan tambahan lain. Selain itu, kurangnya dukungan terhadap ibu baik dari orang tua, suami dan mertua dalam hal pemberian ASI eksklusif serta status gizi ibu pada saat kehamilan.

Tabel 2.35
Cakupan Balita Gizi Buruk

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Cakupan balitan yang mendapat perawatan	100	100	100	100	100
Jumlah Kasus	170	110	75	104	56
Jumlah yang ditangani	170	110	75	104	56
Kasus Marasmus/Kwasiorkor	51	21	13	12	56

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016

Balita gizi buruk ditahun 2015 terdapat 104 kasus dan menurun pada tahun 2016 terdapat 56 kasus, hal ini menggambarkan adanya peningkatan kinerja tenaga kesehatan di Kabupaten Aceh Utara. Pada tahun 2016, dari 56 kasus Balita Gizi Buruk terdapat semuanya termasuk kasus *Marasmus Kwasiorkor*. Semua temuan kasus Balita Gizi Buruk (2012-2016) mendapat perawatan dengan pemberian makanan tambahan pemulihan, sedangkan untuk kasus marasmus kwasiorkor selain mendapat Pemberian Makanan Tambahan juga mendapatkan perawatan khusus baik di puskesmas maupun rumah sakit.

8. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC / BTA

Perkiraan jumlah penderita baru TBC di Kabupaten Aceh Utara periode 2012-2016 memperlihatkan trend penurunan yang signifikan, dimana pada tahun 2012 diperkirakan 6867 kasus dan pada tahun 2012 diperkirakan 350 kasus. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC/BTA .dalam kurun waktu 5 tahun ini bisa dilihat pada Tabel 2.36.

Tabel 2.36
Perkiraan Penderita TBC dan Penderita yang Diobati
di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 – 2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Perkiraan Penderita Tbc	867	861	667	335	350
Penderita Tbc diobati	355	432	294	325	281
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC / BTA	40,95	50,17	44,08	97,01	80,29

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017

Penderita penyakit TBC yang diobati masih berada dibawah 50%. Hal ini disebabkan oleh karena masih rendahnya penjarangan suspect TBC yaitu masih sebesar 40% yang terdeteksi, Droup Out (DO) masih tinggi karena efek samping obat yang menyebabkan pasien tidak mau melanjutkan minum obat selama 6 bulan, selain itu rendahnya kepedulian keluarga dalam membantu program PMO (Pemantauan Minum Obat) dan faktor masih rendahnya pengetahuan pasien dan keluarga terhadap penanganan penyakit TBC.

9. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Penderita DBD di Kabupaten Aceh Utara mencapai 108 kasus pada tahun 2016. Kasus pada tahun 2016 merupakan yang tertinggi selama periode 2012-2016. Angka Cakupan mencapai 100 persen setiap tahunnya, terlihat sebagaimana Tabel 2.37 di bawah ini.

Tabel 2.37
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 s.d 2015

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP	52	21	73	38	108
Jumlah penderita DBD yang ditemukan	52	21	73	38	108
Cakupan	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara tahun 2017

Setiap kasus DBD perlu dilakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE), *Larvasiding* (pembunuhan larva nyamuk), dan Pengasapan (fogging). Semua kasus yang terjadi ditangani dengan baik. Masih dijumpainya kasus yang terjadi, diakibatkan oleh masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap gerakan PSN DBD (pemberantasan sarang nyamuk DBD) yaitu dengan kegiatan 3M (Menguras, Menutup dan Mengubur).

Untuk keberhasilan program penanggulangan DBD perlu ditingkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap DBD (khususnya 3M). Selain itu ketercukupan ketersediaan anggaran khususnya untuk kegiatan sosialisai dan fogging sangat mendukung keberhasilan kegiatan penanggulangan DBD.

Jumlah penderita pada tahun 2015 menurun drastis dilihat dari tahun sebelumnya, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2016 yaitu sebanyak 108 kasus, sehingga diperlukan upaya yang maksimal dalam pencegahan dan penanggulan terhadap kasus DBD. Jumlah kasus penderita DBD di atas masih terjadi karena ada beberapa faktor penyebab yaitu curah hujan yang tidak dapat diprediksi secara tepat dan adanya kasus import dari daerah lain.

10. Penemuan Kasus HIV/AIDS

Tingkat prevalensi HIV/AIDS cenderung meningkat di Kabupaten Aceh Utara, terutama pada kelompok risiko tinggi. Penyebab terbanyak tertular adalah pengguna narkoba suntik yang proses penggunaannya dilakukan diluar Aceh dan penyebab kedua terbanyak adalah seks bebas. Jumlah kasus HIV/AIDS yang dilaporkan di Aceh Utara masih terus ditemukan dan secara akumulasi dari tahun 2007 sampai dengan 2016 berjumlah 62 kasus.

Tabel 2.38
Jumlah Penderita HIV/AIDS di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Penderita HIV/AIDS (Orang)	20	25	36	51	62

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016

Pendekatan untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini diarahkan pada pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Selain itu, pengendalian penyakit harus melibatkan semua pemangku

kepentingan dan memperkuat kegiatan promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Sampai saat ini pihak Dinas Kesehatan bersama dengan Komisi Penanggulangan AIDS dan tim VCT (*Voluntery Conseling Testing*) terus mencari dan melakukan penjangkauan kasus HIV/AIDS, dan hingga saat ini Aceh Utara merupakan Kabupaten yang tingkat penemuan kasus HIV/AIDS tertinggi di Provinsi Aceh.

11. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Utara tahun 2011 sampai 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.39, dimana ratio jumlah frekuensi pasien masyarakat miskin yang banyak berkunjung ke sarana kesehatan terjadi pada tahun 2013, 2014 dan tahun 2015.

Tabel 2.39
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1	113.129	597.558	115.400	114.592	60.969
Jumlah seluruh masyarakat miskin di kabupaten	227.849	307.080	115.400	114.592	119.18
Rasio	0.50	1.95	1.00	1.00	0.51

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017

Berdasarkan rasio jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Utara dengan jumlah kunjungan ke pelayanan kesehatan dasar menunjukkan seluruh masyarakat miskin terlayani pada pelayanan kesehatan dasar, keadaan ini menunjukkan akses pelayanan kesehatan sudah merata. Disisi lain cakupan pelayanan ini belum dianalisa dengan meninjau kepuasan pelayanan yang diberikan apakah sesuai dengan harapan pelanggan.

12. Cakupan Kunjungan Bayi

Jumlah kunjungan bayi bila dilihat pada gambar setiap tahunnya mengalami peningkatan, dapat diartikan sudah ada kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan bagi bayi. Data cakupan kunjungan bayi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2014, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2015 melebihi target karena adanya kunjungan luar wilayah. Sedangkan

pada tahun 2016 cakupan kunjungan bayi sudah mencapai 98,7 persend an hal ini disebabkan adanya peningkatan dan kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan.

Tabel 2.40
CakupanKunjungan Bayi
di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	9.846	10.817	10.656	11.537	11.595
Jumlah seluruh bayi lahir hidup	10.622	10.951	11.236	11.737	11.743
Cakupan	92,96	98,78	94,84	98,30	98,74

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017

13. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian bayi dan angka kematian ibu merupakan indikator keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan dimana dapat menggambarkan perkembangan derajat kesehatan, dapat juga digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya.

Tabel 2.41
Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup dan
Angka Kematian Ibu per 1000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Aceh Utara 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Kematian Bayi (AKB)	7	8	11	7	8
Angka Kematian Ibu (AKI)	150	136	258	127	221

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016

Angka kematian bayi merupakan indikator yang lazim digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat, selain itu program pembangunan kesehatan di Indonesia banyak menitikberatkan pada upaya penurunan AKB (Angka Kematian Bayi) dan AKI (Angka Kematian Ibu). Untuk Angka Kematian Bayi pada tahun 2016 menunjukkan penurunan sebesar 1/1000 dimana ada 1 bayi yang lahir mati dari 1000 kelahiran hidup..

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pekerjaan Umum

1.1 Jalan dan Jembatan Kabupaten Aceh Utara

Pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan merupakan salah satu faktor pendukung utama pertumbuhan perekonomian dan pembangunan wilayah mempunyai peran sangat penting. Infrastruktur tersebut berfungsi sebagai konektivitas antar pusat–pusat aktivitas masyarakat dan aksesibilitas keberadaan jaringan jalan dan jembatan dapat mendukung proses interaksi sosial karena pergerakan masyarakat dapat terlaksana dengan baik serta memungkinkan terjadinya mobilitas faktor-faktor produksi antar titik sentra produksi dengan lokasi pemasaran hasil produksi.

Pekerjaan peningkatan jalan merupakan kegiatan penanganan jalan yang dapat memperkuat struktur atau peningkatan kapasitas lalu lintas berupa pelebaran jalur lalu lintas. Pekerjaan peningkatan juga dapat berupa peningkatan dari jalan tanah ke jalan kerikil/jalan aspal atau dari jalan kerikil/agregat ke jalan aspal.

Pekerjaan pembangunan jalan meliputi pembukaan jalan sesuai dengan kebutuhan lalu lintas yang diperkirakan dan mengacu pada standar teknis jalan dengan umur rencana minimal 10 tahun. Pekerjaan pembangunan ini tidak menyangkut pembebasan/permasalahan lahan atau yang melintasi hutan lindung.

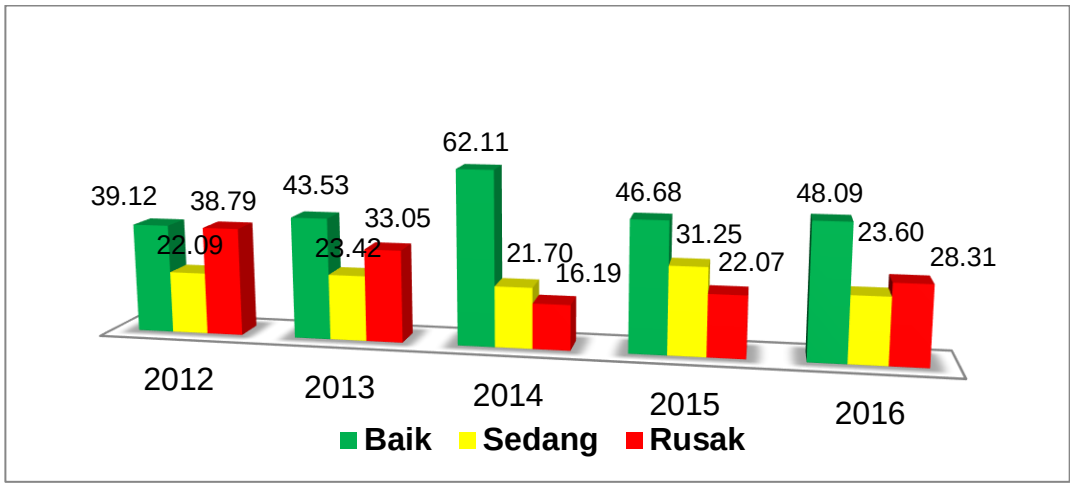
Rehabilitasi jalan merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap jenis kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam design, adapun jenis pekerjaannya disesuaikan dengan kondisi kerusakan yang terjadi. Kondisi Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Kabupaten Aceh Utara pada periode awal RPJM Kabupaten Aceh Utara Tahun 20012-2017 sebagai berikut :

1.1.1. Proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik

Panjang Jalan Kabupaten dan jalan strategis hingga tahun 2015 sepanjang 2.047,89 km, Kondisi jalan baik tahun 2015 sepanjang 839,5 Km atau 41 persen. kondisi perkerasan (sedang) mencapai 467,5 Km atau sebesar 23,94 persen yang pada umumnya merupakan jalan strategis yang menghubungkan jalan nasional ke pusat-pusat kecamatan, lingkungan pemukiman dan sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan dan perikanan. Sementara itu kondisi jalan rusak atau buruk sampai tahun 2015 sepanjang 728,4 Km atau sebesar 35,58 persen. Perkembangan dan kondisi Jalan Tahun

2012-2015 dan persentase perkembangan kondisi jalan dapat dilihat pada Gambar 2.15.

Gambar 2.15
Persentase Kondisi Jalan di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2012-2016



Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Aceh Utara 2017

a. Sempadan Jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

Aktifitas pedagang kaki lima di pusat-pusat kecamatan dan tumbuhnya bangunan-bangunan liar di beberapa kawasan kecamatan mengganggu kelancaran lalu lintas kota dan kenyamanan pengguna jalan serta keindahan penataan ruang kota, sempadan jalan yang digunakan untuk aktifitas perdagangan ini sulit dilakukan penataan jika kebijakan penindakan aturan memaksa tidak dilakukan. Berbagai upaya persuasif telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur kondisi ini, seperti pembenahan pada pusat pasar Lhoksukon, Geudong, Panton Labu, Krueng Geukuh, Krueng Mane dan lainnya. Namun tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat/pedagang untuk bekerjasama terhadap penataan kepentingan umum perlu dimediasikan secara berkerlanjutan, sehingga penataan sempadan jalan dapat dilakukan. Selama ini sempadan jalan yang digunakan pedagang kaki lima dan bangunan liar yang tumbuh sebagai berikut :

Tabel 2.42
Sempadan Jalan yang dipakai Pedagang Kaki Lima
atau Bangunan Rumah Liar

	2012	2013	2014	2015	2016
Panjang Sempadan Jalan yang dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Liar (Km)	52.78	52.65	52.46	52.34	52,15
Panjang seluruh Sempadan Kabupaten (Km)	213.27	213.27	213.27	223.94	225.18
Persentase	24,74	24,68	24,60	23,37	23,16

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara 2017

b. Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan

Pembangunan infrastruktur lingkungan seperti jalan dan jembatan, trotoar dan drainase dilakukan melalui program pembangunan infrastruktur pedesaan dan program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong. Peningkatan kualitas prasarana infrastruktur jalan, jembatan dan drainase lingkungan yang menghubungkan kawasan permukimandengan sentra produksi ekonomi masyarakat di perdesaaan.

Tabel 2.43
Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran
Pembuangan Air (Minimal 1,5 m) Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Panjang Jalan Bertrotoar dan Drainase (Km)	191,96	202,62	213,28	223,94	247,61
Panjang Jalan	443,539	1598,672	1755,294	1919,166	2115,224
Persentase	7,54	7,89	8,23	8,57	8,54

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017

1.2. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio kinerja irigasi sesuai dengan SPM Bidang Sumberdaya Air sangat baik = 100% dan kinerja jelek = < 55%. Rasio jaringan irigasi berdasarkan tabel di atas menunjukkan dari tahun 2012 sebesar 21,05% meningkat pada tahun 2015 menjadi 21,83% akan tetapi rasio kinerja irigasi masih jelek. Maka upaya pencapaian target SPM dicapai melalui pembangunan, rehabilitasi serta

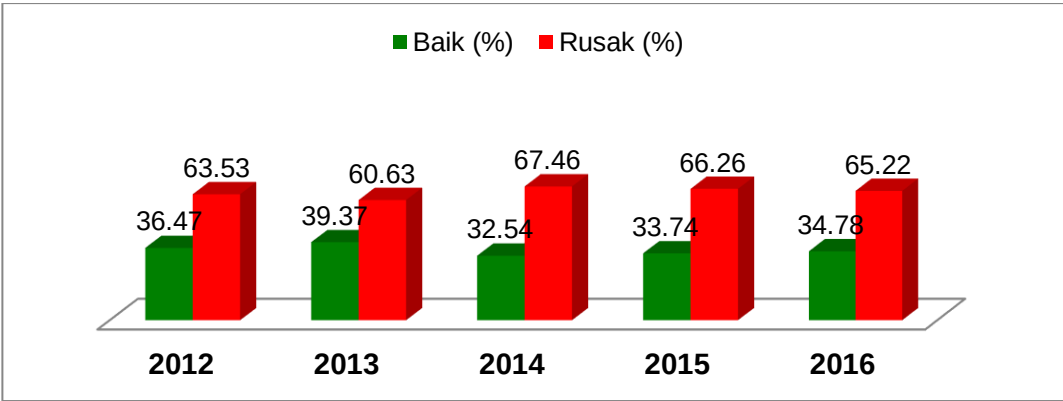
operasi dan pemeliharaan (O&P) jaringan irigasi sesuai kewenangan pemerintah termasuk di dalamnya adalah kegiatan-kegiatan penunjang seperti perencanaan, pengawasan dan pemberdayaan lembaga dan masyarakat petani.

Tabel 2.44
Rasio Perkembangan Jaringan Irigasi Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2012-2016

	2012	2013	2014	2015	2016
Panjang saluran (m)	310.499	319.500	483.113	561.666	563.166
LuasLahan Budidaya Pertanian (Ha)	45.714	45.766	45.482	47.372	47.372
Rasio Andalan	1:7	1:7	1:11	1:12	1:12

Sumber : Dinas Pengairan dan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016

Gambar 2.16
Kondisi Irigasi Tahun 2016



Sumber : Dinas Pengairan dan ESDM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016

1.3. Tempat Ibadah

Ketersediaan sarana dan prasarana tempat ibadah seperti mesjid, meunasah, dayah/pesantren, balai pengajian dan TPA/TPQ terus ditingkatkan terutama pembenahan fasilitas infrastruktur sarana yang telah ada. Peningkatan ini penting dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas ibadah masyarakat guna memenuhi unsur kebersihan, kenyamanan serta penataan lingkungan tempat ibadah. Perkembangan tempat ibadah sebgaimana Tabel berikut :

Tabel 2.45
 Jumlah Sarana dan Prasarana Peribadatan (Masjid dan Meunasah)
 di Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2012-2016

No.	Prasarana	Tahun (unit)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Masjid	328	328	335	334	364
2.	Meunasah	852	852	852	852	852
3.	Dayah	168	170	183	182	204
4.	Balai Pengajian	2.564	2.575	2.131	3.911	3.911
5.	TPQ	161	161	162	162	162

Sumber : Dinas Syari’at Islam Kab. Aceh Utara 2017

Jumlah tempat ibadah keseluruhan tahun 2015 sebanyak 4.069 unit, kondisi ini menurun jika dibandingkan tahun 2014 sebanyak 4.089 unit. Verifikasi kelayakan yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam memperoleh kondisi terdapat beberapa sarana dan prasarana tempat ibadah belum memenuhi kriteria sebagai tempat berlangsungnya kegiatan ibadah terutama berkaitan dengan balai pengajian di beberapa lokasi desa/gampong. Namun demikian jumlah meunasah telah merata pada setiap gampong dan dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana dan prasarana aktifitas ibadah dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

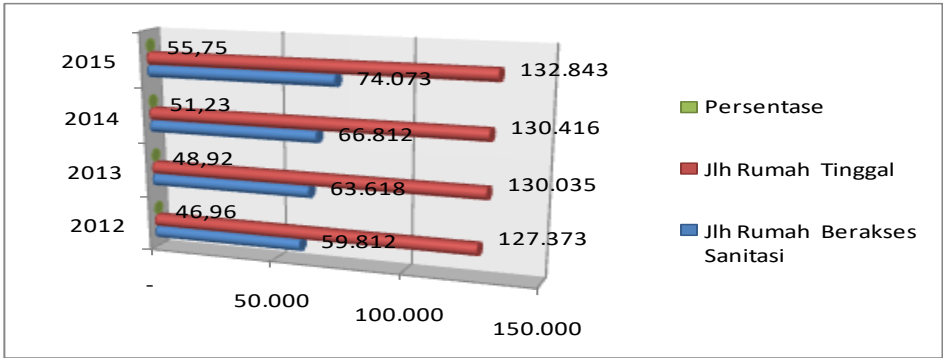
1.4. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Pelayanan rumah tinggal bersanitasi terdiri dari pemenuhan akses sanitasi terhadap MCK, persampahan dan drainase.Selain berkaitan dengan kualitas fisik permukiman, layanan dasar sanitasi berbanding lurus dengan kualitas kesehatan dan produktivitas masyarakat. Komitmen dan peran aktif Pemerintah daerah tercermin melalui pelaksanaan Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL). Melalui kedua program tersebut dan lainnya pemerintah daerah telah berkontribusi penuh pada upaya *sanitation mapping* dengan tujuan peningkatan pelayanan terhadap pengelolaan sanitasi di Kabupaten Aceh Utara.

Capaian pembangunan rumah tinggal bersanitasi pada tahun 2015sebesar 55,75 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 51,23 persen dan 48,92 persen pada tahun 2013, peningkatan rumah tinggal bersanitasi difokuskan terutama pada rumah tangga

miskin/dhuafa. Pelaksanaannya dilakukan melalui Program Percepatan Sanitasi Lingkungan maupun Program AMPL serta kegiatan lainnya yang tersebar di beberapa SKPK seperti Dinas Cipta Karya, Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan dan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.

Gambar 2.17
Persentase Rumah Berakses Sanitasi



Sumber : Dinas Cipta Karya Kabupaten Aceh Utara 2016

1.5. Rasio Tempat Pemakaman Umum

Penataan fasilitas tempat pemakaman umum dilaksanakan melalui program Pengelolaan Areal Pemakaman. Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan infrastruktur publik (*Public Service*) melalui penyediaan dan penataan tempat-tempat pelayanan umum khususnya penyediaan dan penataan pemakaman. Luas daya tampung tempat pemakaman umum setiap tahunnya terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tempat Pemakaman Umum dan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 534/2001 tentang Pelayanan Sarana Ruang Terbuka Hijau (Taman dan Pemakaman Umum. Rasio tempat pemakaman umum penduduk per satuan penduduk menunjukkan pada perbandingan antara tempat pemakaman umum per 1000 penduduk. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan dengan ukuran 2,50 x 1,50 (3,75 M2) untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Desa sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.46
Rasio Tempat Pemakaman Umum 2012-2016

	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Daya Tampung Tempat Pemakaman Umum	320.000	376.123	398.720	438.080	456.855
Jumlah Penduduk	549.370	556.566	572.961	583.892	593.492
Rasio	582	676	709	765	767

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara 2017

Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum per 1000 penduduk mengindikasikan ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk. Makin tinggi nilai indikator ini (rasio) semakin mampu suatu daerah menyediakan fasilitas sosial yang dibutuhkan oleh penduduk daerah tersebut. Rasio Tempat pemakaman Umum dari tahun 2012 pada tahun 2015 cenderung meningkat namun belum tercapai fasilitas sosial per 1.000 penduduk, dalam hal ini masih perlu perhatian Pemerintah terhadap TPU.

1.7. Rasio Permukiman layak huni

Rasio permukiman layak huni menunjukkan pada perbandingan luas permukiman dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan disajikan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.47
Rasio Permukiman Layak Huni di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016

	2012	2013	2014	2015	2016
Luas Pemukiman Layak Huni (Ha)	38.945	39.121	61.540	61,540	61.540
Luas Wilayah Permukiman (Ha)	112.626	112.935	113.321	113.451	113.451
Rasio	0,34	0,34	0,54	0,54	0,54

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara 2017

Kondisi ini menunjukkan mengukur proporsi luas permukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas permukiman. Nilai indikator ini mencerminkan kemampuan suatu daerah menyediakan kualitas permukiman yang layak huni. Semakin tinggi nilai indikator ini maka semakin mampu suatu daerah tersebut menyediakan permukiman yang layak huni. Rasio Luas permukiman layak huni Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2012 – 2015 terus meningkat, hal ini menunjukkan masih terdapat kawasan kumuh dalam wilayah permukiman.

1.8. Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar

Bangunan-bangunan liar yang tumbuh di beberapa kawasan kecamatan sepanjang sempadan sungai telah merubah wajah kota menjadi kawasan kumuh yang perlu secara berkelanjutan dilakukan penataan. Selain kumuh, sempadan sungai yang digunakan untuk bangunan liar ini telah merusak struktur dasar sungai, masalah kesehatan dan lingkungan.

Kawasan Sempadan sungai yang digunakan untuk bangunan liar terdapat di beberapa kawasan seperti pada daeran sempadan sungai di Kecamatan Panton Labu, Lhoksukon, Geudong, Krueng Mane dan beberapa daerah sempadan sungai lainnya di ibu kota kecamatan. Panjang sempadan sungai yang dipakai untuk bangunan liar dapat dilihat pada Tabel 2.47.

Tabel 2.48
Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar
di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016

Sempadan Sungai	2012	2013	2014	2015	2016
Panjang Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar (Km)	26,50	26,33	31,20	31,20	31,20
PanjangseluruhSempadan Sungai Kabupaten (Km)	185,5	185,5	156,00	156,00	156,00
Persentase	14,3	14,2	20,00	20,00	20,00

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara 2017

2. Penataan Ruang

Tataruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang disusun secara nasional, regional dan lokal. Secara nasional disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK).

Ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan

ruang. Hal tersebut di atas telah digariskan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Penataan ruang di Kabupaten Aceh Utara sebagaimana Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabuapten Aceh Utara Tahun 2012-2032 bertujuan untuk mewujudkan tata ruang kabupaten yang berbasis pada pengembangan perkebunan, pertanian tanaman pangan, perikanan dan industri melalui peningkatan peran dan fungsi infrastruktur wilayah sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan fungsi dan kedudukan sebagai:

1. Arahkan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumber daya, dan pembangunan daerah.
2. Penyelarasan kebijakan penataan ruang Nasional. Provinsi, dan Kabupaten
3. Pedoman dalam penyusunan RPJMD dan RPJPD

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosialekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Tata ruang perkotaan lebih kompleks dari tata ruang perdesaan, sehingga perlu lebih diperhatikan dan direncanakan dengan baik. Kawasan/zona di wilayah perkotaan dibagi dalam beberapa zona sebagai berikut:

1. Perumahan dan permukiman
2. Perdagangan dan jasa
3. Industri
4. Pendidikan
5. Perkantoran dan jasa
6. Terminal
7. Wisata dan taman rekreasi
8. Pertanian dan perkebunan
9. Tempat pemakaman umum
10. Tempat pembuangan sampah

Luas penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Utara sampai tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 2.49
Luas Penggunaan Lahan

Penggunaan Tanah	Luas	%
Sawah	47.372	14,29
Perkarangan/Bangunan	92.465	27,88
Tegalan/Kebun	45.655	13,77
Ladang/Huma	24.217	7,30
Pengembalaan	6.464	1,95
Sementara tdk diusahakan	9.968	3,01
Hutan Rakyat	26.770	8,07
Perkebunan	49.560	14,95
Tambak/Kolam/Empang	29.102	8,78
Jumlah/Total	331.573	100,00

Dampak dari rencana tata ruang di wilayah perkoaan yang tidak diikuti adalah kesemrawutan kawasan mengakibatkan berkembangnya kawasan kumuh yang berdampak kepada gangguan terhadap sistem transportasi, sulitnya mengatasi dampak lingkungan yang berimplifikasi kepada kesehatan, sulitnya mengatasi kebakaran bila terjadi kebakaran. Rencana tata ruang Kabupaten Aceh Utara tahun 2012-2032, luas kawasan budidaya diarahkan pada pengembangan kawasan pertanian dan perkebunan.

Pelaksanaan pembangunan daerah yang kurang memperhatikan pola ruang serta menjaga struktur lingkungan dengan baik, mengakibatkan keseimbangan dan keserasian ruang terganggu yang pada akhirnya menghambat laju pembangunan seperti terjadi bencana kekeringan, longsor, banjir pada akhir tahun 2015 di 14 Kecamatan yang meliputi kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, perumahan, perkantoran, pertanian, perkebunan, perikanan dan perdagangan.

Dampak bencana banjir tahun 2015 telah merusak infrastruktur dasar dan infrastruktur pertanian, luas wilayah banjir mencapai 21.489,2 Ha. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya luas wilayah berdampak lebih kecil dibandingkan pada tahun 2014, namun siklus banjir besar yang terjadi setiap tahunnya mengindikasikan bahwa keruasakan daerah tangkapan dan aliran sungai sudah cukup memprihatinkan. Perkiraan luas wilayah terkena banjir dapat dilihat pada Tabel 2.50.

Tabel 2.50
Luas Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

Kawasan Budi Daya	Luas (Ha)	%
Perumahan Kota	5,620	1.70
Perumahan Desa	8.290	2.51
Kebun Campuran	47.994	14.60
Sawah	46.971	14.22
Tambak	16.712	5.07
Perkebunan	162.672	49.34
Hutan Produksi	27.461	8.33
Industri Besar	263	0.08
Instalasi Tambang	498	0.15
Pelabuhan/Bandara	249	0.08
Pertanian Terpadu	430	0.13
Waduk	3.512	1,20

Tabel 2.51
Luas Wilayah Banjir Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2015

Dampak Banjir	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Luas Wilayah Terkena Dampak Banjir (Ha)	-	4.039,74	31.361,9	21.489,2	
Jumlah Kecamatan	-	16	26	14	

Sumber : BNPB Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016

Harapan masyarakat terhadap percepatan penyelesaian pembangunan waduk Krueng Keureuto kiranya mampu mereduksi banjir di wilayah timur dan tengah Kabupaten Aceh Utara. Namun demikian diperlukan peningkatan dan langkah kerjasama pemerintah daerah.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Air bersih adalah salah satu jenis sumberdaya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi.Kebutuhan air yang diperlukan untuk suatu daerah ditentukan oleh 2 (dua) parameter yaitu jumlah penduduk dan tingkat konsumsi air. Sumber air yang dapat digunakan sebagai air baku meliputi air sungai, air hujan, air tanah,

air permukaan dari air mata air. Kualitas umum air dapat diukur dengan parameter seperti bau, rasa, tingkat kekeruhan dan warna.

Perkembangan jumlah rumah tangga pengguna air bersih hingga tahun 2015 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya dan dapat dilihat sebagaimana Tabel di bawah ini :

Tabel 2.52
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2012-2016

	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	72.549	77.823	80.025	82.342	85.102
Jumlah seluruh rumah tangga	130.035	130.416	132.843	135.500	137.644
Persentase	56,96	59,85	60,24	62,76	61.82

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara 2017

Rumah tangga yang belum menggunakan air bersih pada tahun 2016 sebanyak 52.542 rumah tangga atau 38,16 persen. Secara universal akses (SDGs) diharapkan pada tahun 2019 jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih sebesar 100 persen.

2. Rumah Tangga Bersanitasi

Sanitasi salah satu bagian pelayanan dasar, yang menjadi kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar tersebut untuk menjamin akses sanitasi layak. Pemerintah daerah berupaya keras untuk memenuhi akses pelayanan sanitasi terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan sarana prasarana sanitasi yang berkesinambungan. Hal ini terlihat dari capaian akses sanitasi yang layak tahun 2013 yang secara nasional baru mencapai 60,91% dimana masih terdapat kesenjangan sebesar 39% yang harus dipenuhi hingga akhir tahun 2019 nantinya sesuai dengan target pemenuhan universal akses sanitasi sebesar 100% pada tahun 2019.

Capaian pembangunan rumah tinggal bersanitasi pada tahun 2016 sebesar 55,75 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 51,23 persen dan 48,92 persen pada tahun 2013, peningkatan rumah tinggal bersanitasi difokuskan terutama pada rumah tangga miskin/dhuafa. Pelaksanaannya dilakukan melalui Program Percepatan Sanitasi Lingkungan maupun Program AMPL serta kegiatan lainnya yang tersebar di beberapa SKPK seperti Dinas Cipta Karya, Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan dan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022

3. Rumah Layak Huni

Sementara itu, persentase rumah layak huni sesuai formulasi perhitungan jumlah rumah layak huni per seluruh rumah, maka persentase rumah layak huni tahun 2015 sebesar 86,56 persen atau 114.991 rumah tangga, semakin meningkat dibandingkan persentase rumah layak huni tahun sebelumnya. Perkembangan persentase rumah layak huni dan perkembangan pembangunan rumah layak huni selama kurun waktu tahun 2012-2014 dan dilihat pada Tabel 2.52 dan Tabel 2.53 berikut:

Tabel 2.53
Persentase Rumah Layak Huni
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016

Prasarana	2012	2013	2014	2015	2016
Rumah Layak Huni	107.571	109.877	110.512	112.749	116.997
Jumlah Rumah Tinggal	130.035	130.416	132.843	135.500	137.644
Persentase	82,75	84,25	83,13	83,21	85,00

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara 2017

Tabel 2.54
Perkembangan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
Tahun 2012 – 2016

Pembangunan Rumah Layak Huni (Unit)	2012	2013	2014	2015	2016	Jumlah
	102	528	481	214	185	1.510

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara 2017

Namun jumlah rumah yang tidak layak huni telah dibangun oleh pemerintah sampai tahun 2015 sebanyak 1.325 unit, maka seharusnya rumah yang tidak layak huni berkurang menjadi 16.482 unit, akan tetapi data rumah tidak layak huni pada tahun 2015 masih mencapai 17.852 unit. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penambahan penduduk yang membutuhkan rumah semakin bertambah. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara secara bertahap terus mengupayakan pembangunan rumah layak huni yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya dari berbagai sumber pendanaan Pemerintah, Baitul Mal, CSR perusahaan-perusahaan yang bersimpatik dan swadaya pemilik rumah serta masyarakat kondisi ini menunjukkan masih ada sekitar 13,44 persen atau sebanyak 17.852 unit rumah yang tidak layak huni.

4. Infrastruktur Drainase

Fungsi komponen drainase adalah upaya pembuangan air hujan keluar dari lokasi permukiman perumahan, pasar dan fasilitas umum lainnya untuk mengurangi atau menghindari terjadinya genangan air, mengendalikan volume air yang dapat berpotensi menggenangi di lokasi tanpa sumur resapan. Drainase mempunyai beberapa sistem yang terdiri dari drainase Primer, drainase sekunder, dan drainase tersier.

Tabel 2.55
Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat
Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Panjang jalan bertrotoar dan Drainase (Km)	191,96	202,62	213,28	234,9	247,6
Panjang Saluran Jalan (Km)	5.564,36	5.675,64	5.797,30	5.804,13	5.836,72
Persentase	3,45	3,57	3,68	4,05	4,24

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara 2017

Pembangunan drainase lingkungan perdesaan, perkotaan dan kawasan pasar dilaksanakan melalui peningkatan program pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong. Peningkatan kualitas saluran drainase yang baik (lancar) harus diupayakan pemerintah untuk menjaga kondisi lingkungan dan pusat-pusat aktifitas masyarakat dalam kondisi bersih, sehat dan tertata dengan baik. Gerakan gotong royong untuk menjaga kualitas saluran dalam kondisi lancar perlu di tingkatkan, selain untuk menjaga kondisi lingkungan juga terjalin hubungan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun daerah.

5. Infrastruktur Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum

Gedung yaitu segala sarana, prasarana atau infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya. Bangunan memiliki beragam bentuk, ukuran, dan fungsi, serta telah mengalami penyesuaian sepanjang sejarah yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti bahan bangunan, kondisi cuaca, harga, kondisi tanah, dan alasan

estetika.Pembangunan Infrastruktur dan fasilitas publik dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam lingkup sosial dan ekonomi.

E. Ketentraman, Ketertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat

Tahun Anggaran 2015 jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara adalah sebagai berikut

Tabel 2.56
Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2015

Personil	2015	2016
PNS	108	103
Tenaga Kontrak	134	406
Jumlah	242	509

Sumber : Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016

Selain PNS dan tenaga kontrak, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara mempunyai koordinator lapangan yaitu 3 orang terdiri dari TNI, Polri dan Sipil. Untuk Tahun Anggaran 2016 Korlap yang bertugas berasal dari TNI, Polres Aceh Utara dan Polres Lhokseumawe.

1. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2015 berjumlah 242 orang yang terdiri dari PNS, Tenaga kontrak lapangan dan tenaga kontrak administrasi. Dengan jumlah penduduk dalam Kabupaten Aceh Utara sebanyak 583.892 jiwa, maka rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk yaitu sebesar 4.14.

Tabel.2.57
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per10.000 Penduduk
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Polisi Pamong Praja (Orang)	73	108	241	242	509
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja (%) Per10.000 Penduduk	1.26	1.26	4.33	4.14	8.55

Sumber : Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016

Mengingat banyaknya jumlah penduduk, agar lebih meningkatkan peran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara dalam

wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2016. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melakukan penerimaan anggota baru tenaga kontrak Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara. Tenaga kontrak tersebut lebih difokuskan kinerjanya dalam wilayah kecamatan yaitu pelaksanaan kegiatan ba'da magrib serta kegiatan lainnya.

2. Penegakkan Perda/Qanun

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2014 telah melaksanakan penegakkan Perda/Qanun sebanyak 9 jenis yaitu :

1. Qanun Kab Aceh Utara No 4 Tahun 2006 Tentang Izin Usaha Industri
2. Qanun Kab Aceh Utara No 5 Tahun 2006 Tentang Izin Tempat Usaha
3. Qanun Kab Aceh Utara No 7 Tahun 2006 Tentang Bahan Galian C
4. Qanun Kab Aceh Utara No 5 Tahun 2012 Tentang Perizinan HO
5. Qanun Kab Aceh Utara No 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi IMB
6. Qanun Aceh No 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam
7. Qanun Aceh No 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya
8. Qanun Aceh No 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian)
9. Qanun Aceh No 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (perbuatan Mesum)

Tahun 2015 ada penambahan pelaksanaan 2 (dua) Perda/Qanun yaitu :

1. Qanun No 2 Tahun 2014 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak (belum dilaksanakan sosialisasi oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan terbentur dana pelaksanaan)
2. Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Jinayat, dimana Satpol PP dan WH bekerjasama dengan Dinas Syariat Islam telah mensosialisasikannya ke kecamatan-kecamatan.

3. Cakupan Patroli Petugas Satpol PP dan WH

Tingkat cakupan patroli untuk pelaksanaan K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) dalam indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di kabupaten/kota ditargetkan sebanyak 3 kali patroli per hari, namun Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara pada tahun

anggaran 2015 menargetkan 3 kali patroli dalam seminggu dan ini sangat jauh dari target yang ditetapkan dalam indikator SPM. Namun demikian Bidang Wilayatul Hisbah telah melaksanakan patroli 4 x dalam seminggu (1 tim dari masing-masing posko) dengan sistem acak dalam 27 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara.

4. Tingkat Penyelesaian Penyelenggaraan K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara dalam mewujudkan penyelenggaraan K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu :

1. Pengamanan Kantor Pemerintah
2. Operasi Penertiban Pedagang Kaki Lima
3. Operasi Penegakan Qanun/Perda
4. Pemantapan dan Penegakan Qanun Syariat Islam
5. Pengawasan, Pembinaan dan Advokasi Terhadap Pelanggaran Qanun

Dalam penyelesaian penyelenggaraan K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten Aceh Utara pada Tahun Anggaran 2015 telah terealisasi penyelesaian penyelenggaraan K3 sebanyak 96 kali dari 143 kali yang ditargetkan, atau sebesar 67,13%.

Kegiatan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten belum tercapai, disebabkan kurangnya jumlah mobil pemadam kebakaran. Jumlah mobil pemadam saat ini 10 unit yang seharusnya bisa sampai 20 unit. Dari tingkat waktu tanggap (response time rate) Daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) belum memadai dikarenakan kurangnya personil maupun peralatan. Jumlah kejadian kebakaran pada tahun 2015 sebanyak 20 kejadian. Tingkat keberhasilan ditentukan oleh beberapa faktor yaitu intensitas, volume bangunan, sistem jaringan transportasi wilayah, sarana dan prasarana termasuk potensi air serta potensi kebakaran, jarak dan jangkauan antar wilayah dan letak sumber air serta partisipasi masyarakat, aspek rescue dan aspek penegakan hukum juga menjadi faktor penentu.

F. Sosial

Jumlah Panti Asuhan pada tahun 2015 berkurang 1 (satu) dari 58 PA pada 2014 menjadi 57 PA di tahun 2015, panti jompo tahun 2015 juga berkurang 1 (satu) dari 3 PJ menjadi 2 PJ. Bantuan makan bagi anak asuh/jompo juga meningkat dari Rp. 2500/anak pada tahun 2014 menjadi Rp. 6.000/anak.

Mengingat tingginya harga kebutuhan pokok pada saat ini, sedangkan dana yang tersedia sangat minim maka anak asuh/jompo yang disantuni terbatas. Sarana dan Prasarana panti asuhan seperti asrama, MCK, dapur dan sebagainya yang harus direhab sementara sangat minim (belum memadai). Sebahagian mobiler panti seperti ranjang, lemari, kasur dan sebagainya tidak layak lagi. Selama ini honor pimpinan pengasuh tidak ada, maka panti tidak dapat meningkatkan kesejahteraan pengasuh.

Tabel 2.58
Jumlah Sarana Sosial di Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2012-2016

Jumlah Sarana	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Panti Asuhan	58	58	58	57	57
Jumlah Panti jompo	3	3	3	2	2
Jumlah Panti Rehabilitasi	-	-	-	-	-
Jumlah Rumah Singgah	-	-	-	-	-
DLL	-	-	-	-	-

Sumber : Dinsosnakermobduk Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016

2.3.2 Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu bidang tenagakerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.

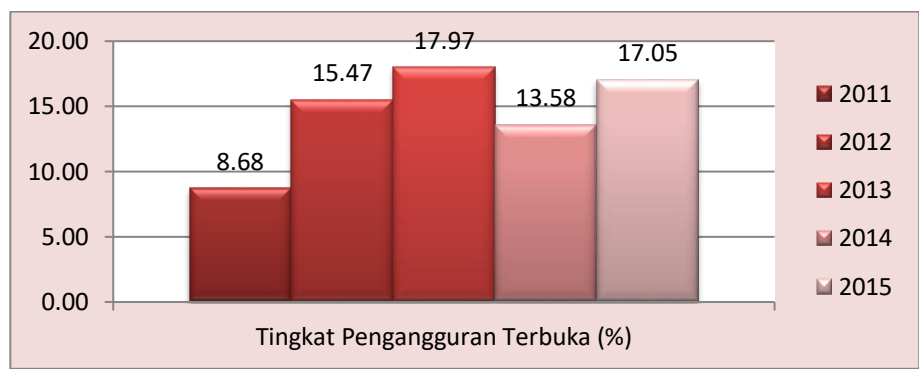
A. Tenaga Kerja

Perkembangan pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh produktivitas tenagakerja bekerja. Apabila Perkembangan ekonomi mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja, maka akan dapat menekan angka pengangguran terbuka.

Melihat data tahun 2015 sebagaimana Gambar 2.18, maka dapat dapat disimpulkan angka pengangguran di Aceh Utara semakin tinggi. Pada Tahun 2013 Dibandingkan daerah-daerah lain, tingkat pengangguran di Kabupaten

Aceh Utara tergolong tinggi, sehingga dikuatirkan akan timbul masalah sosial baru di tengah masyarakat, seperti meningkatnya kriminalitas dan kejahatan lainnya.

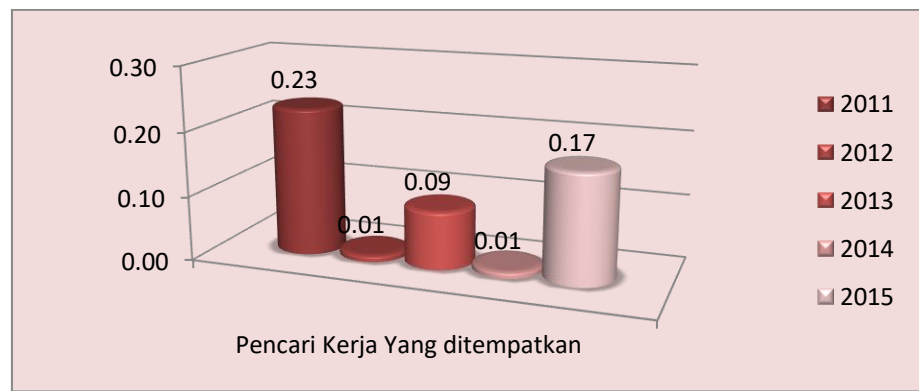
Gambar 2.18
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011-2015



Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Tahun 2016

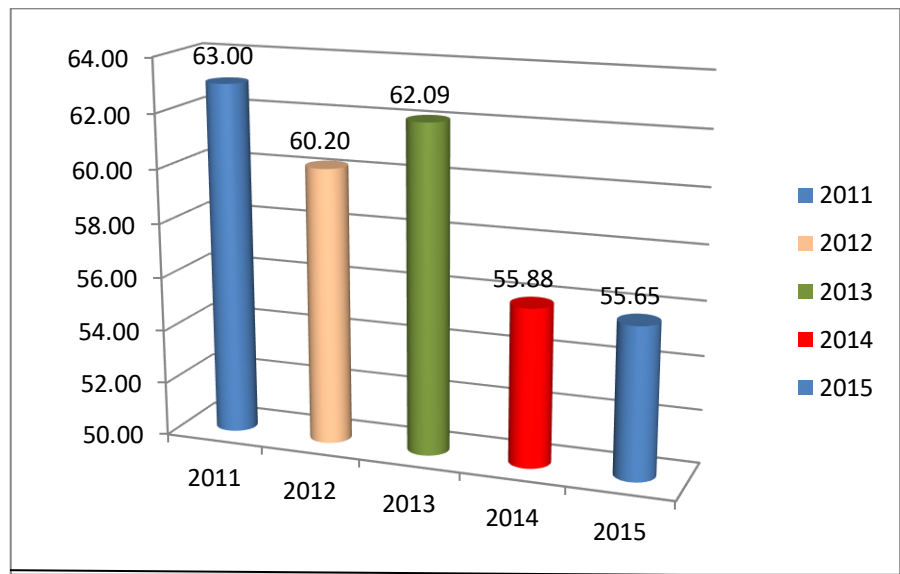
Pencari kerja yang ditempatkan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 berjumlah 1.358 orang hanya 5.52 persen dari jumlah pencari kerja yang terdaftar. Angka jumlah pencari kerja yang mendaftar dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 sebesar 7.962 orang atau 3.70 persen dari jumlah angkatan kerja.

Gambar 2.19
Pencari Kerja yang Ditempatkan per Tahundi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011-2015



Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Tahun 2016

Gambar 2.20
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen) Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2011-2015



Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Tahun 2016

Jumlah angkatan kerja tahun 2013 berjumlah 236.109 orang dan pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 217.174 orang dan tahun 2015 meningkat menjadi 220.640. Sedangkan jumlah penduduk usia di atas 15 tahun mengalami peningkatan dari 380.285 orang menjadi 396.448 orang. Hal ini berakibat menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari 62,09 persen pada tahun 2013 menjadi 55,65 persen pada tahun 2015.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 88,8 persen dengan jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah 6966 dari Jumlah Pekerja Perempuan sebanyak 7838 orang. Jumlah perempuan dilembaga pemerintah saat ini mencapai 6966 yang menduduki jabatan Eselon II hanya 2 orang, eselon III berjumlah 34 orang dan untuk eselon IV berjumlah 207. Perempuan yang menduduki kursi anggota dewan hanya 1 orang. Dari data yang kami peroleh jumlah perempuan masih sedikit dalam hal pengambilan keputusan hal ini sangat mempengaruhi terhadap pembangunan yang berpihak kepada perempuan atau kurang berspektif gender.

Rasio KDRT 34 melampaui (>) target Renstra yaitu hanya 14 kasus. Adapun permasalahan yang dihadapi:

- 1. Tenaga Psikolog yang tersedia belum memiliki sertifikat ahli, 2.
- 2. Belum terbangun koordinasi yang baik antar lintas sektor,

3. Gedung P2TP2A sebagai tempat menerima pengaduan yang masih kurang sarana dan prasarana,
4. Tenaga Konselor yang tersedia masih perlu peningkatan kapasitas,
5. Dana yang tersedia belum memadai,
6. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan malah jumlah pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat.

Partisipasi angkatan kerja perempuan belum memadai disebabkan anggapan perempuan masih lebih baik mengurus rumah tangga dari pada bekerja diluar rumah dan adat patriaki masih kentaldi gampong-gampong dan halini mempengaruhi pola pikir anak perempuan dan juga orang tuanya sehingga sulit sekali anak perempuan berkembang.

Pekerja Anak Usia 5-14 Tahun 2015 sebanyak 85 orang, Jumlah Pekerja Usia 5 Tahun ke atas 180 orang (belum tercapai).hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor : 1. Faktor ekonomi orangtua yang tidak mencukupi kebutuhan hidup sehingga anak bekerja,2. Faktor perceraian orang tua membuat anak terbengkalai dan terpaksa bekerja, 3. Faktor lingkungan yang mempengaruhi anak untuk mencari uang agar bisa bermain Games online di warnet. Tingginya angka pekerja anak disebabkan kurangnya pendidikan orangtua dan juga perhatian sehingga anak terbengkalai dan tidak melanjutkan pendidikannya dan ditambah lagi dengan pola pikir anak bahwa pendidikan nomor dua lebih baik kaya dari pada berpendidikan tapi miskin

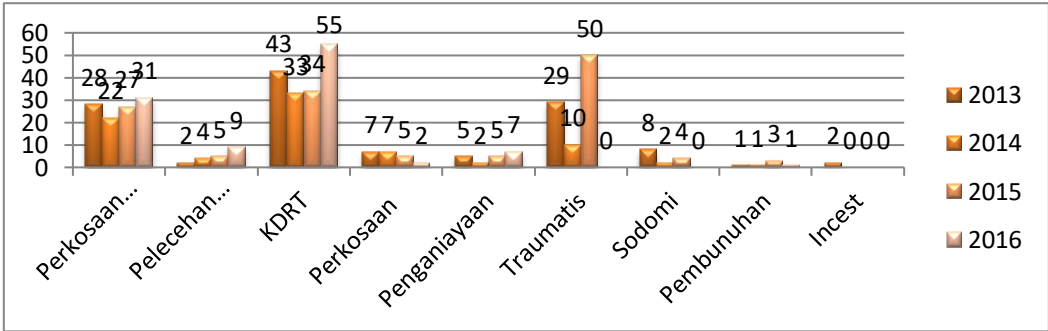
Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang terselesaikan tahun 2015 sebanyak 143 sesuai dengan jumlah pengaduan. Namun yang menjadi permasalahan;

1. Belum adanya rumah aman yang dapat dijadikan rujukan dalam penanganan kasus.
2. Belum adanya pelayanan pengaduan secara online sehingga menyulitkan masyarakat dalam membuat pengaduan.
3. Belum adanya transportasi yang memadai untuk mendampingi korban kekerasan yang perlu rujukan baik ke rumah sakit Umum maupun ke Polres Lhoksukon. Diharapkan dukungan konselor yang sangat tinggi terhadap penanganan kasus dan kerjasama sama yang baik antar lembaga layanan.

Jumlah kasus yang ditangani oleh unit layanan yang berada langsung dibawah koordinator Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami peningkatan hal ini dipengaruhi dengan beberapa sebab:

1. Sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat sudah menampakkan hasil yang memadai terbukti dengan banyak pengaduan yang dibuat oleh masyarakat yang melihat atau mengalami langsung kekerasan terhadap perempuan dan anak baik yang terjadi diranah publik maupun domestik
2. Koordinasi dengan Unit layanan perempuan dan anak (UPPA) Polres sudah terbangun dengan baik yaitu dengan rujukan kasus dan penanganan kasus dilakukan bersama-sama.
3. Pendamping kasus yang dilatih ditingkat kecamatan sudah bekerja walaupun belum maksimal
4. Unit layanan seperti P2TP2A sudah melakukan kerjasama dengan pekerja sosial ditingkat kecamatan sehingga masyarakat yang mengalami kekerasan lebih mudah mendapat informasi yang dibutuhkan.
5. Masyarakat khususnya perempuan sudah mengalami kemajuan dengan berani melapor langsung kejadian yang dialami baik ke Tingkat Polres maupun ke P2TP2A.

Gambar 2.21
Jumlah Kasus yang terjadi pada Perempuan dan Anak
di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016



Sumber : Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2016

Gambar 2.21 memperlihatkan jumlah kasus yang ditangani oleh unit layanan yang berada langsung dibawah koordinator Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari tahun 2014 ke tahun 2015.

C. Pangan

Kedaulatan Pangan tumbuh dalam menanggapi ilusi yang diberikan oleh prinsip ketahanan pangan, kebijakan penyediaan pangan yang dominasi secara global. Pendukung kedaulatan pangan menempatkan individu dalam memproduksi, mendistribusikan dan mengkonsumsi pangan di tengah pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan pangan. Ketersediaan

pangan adalah ketersediaan pangan secara fisik disuatu wilayah dari segala sumber, baik itu produksi pangan domestik, perdagangan pangan dan bantuan pangan.Ketersediaan pangan ditentukan oleh produksi pangan di wilayah tersebut, perdagangan pangan melalui mekanisme pasar, stok yang dimiliki oleh pedagang dan cadangan pemerintah dan bantuan pangan dari pemerintah atau organisasi lainnya.Namun mengingat tidak tersedianya data ketersediaan pangan diluar data produksi, maka untuk menghitung data ketersediaan pangan, kita hanya menggunakan data produksi saja.

Produksi pangan tergantung pada berbagai faktor diantaranya ketersediaan infrastruktur pertanian, benih yang berlabel/bermutu, Alat mesin pertanian yang memadai, kualitas dan kuantitas penyuluh, iklim, jenis tanah, curah hujan, serta komponen produksi pertanian yang digunakan untuk menghasilkan tanaman pangan.

Tabel 2.48 memperlihatkan bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2014 adalah 458,70 kg/jiwa/tahun, namun pada tahun 2015 terjadi penurunan menjadi 413,50 kg/jiwa/tahun. Pada tahun 2015 mengalami penurunan ketersediaan pangan utama dan tahun 2016 turun menjadi 375.59 kg/jiwa/tahun.

Tabel 2.59
Ketersediaan Pangan Utama
di Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2012-2016

No	KOMODITI	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan Utama per tahun (kg)	488,21	488,71	480,80	413,50	375,59
	Jumlah Penduduk	549.370	556.566	572.961	583.892	593.492

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017

D. Pertanahan

Luas tanah yang telah terdaftar/bersertifikat di Kabupaten Aceh Utara sampai dengan tahun 2014 adalah hanya mencapai 321,33 Ha dari luas total semua sebesar 329.686 Ha. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan kepemilikan tanah, ini diperlukan kerjasama yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Instansi Pertanahan untuk mendukung dan mensosialisasikan legalitas kepemilikan tanah antar masyarakat mengingat sengketa batas masih sering terjadi di Kabupaten Aceh Utara.

E. Lingkungan Hidup

Pelaksanaan pembangunan harus sejalan dengan peningkatan kualitas sumberdaya lingkungan hidup, berbagai tekanan terhadap lingkungan akibat adanya aktifitas manusia perlu menjadi perhatian kita bersama. Penurunan kualitas sumberdaya lingkungan hidup tentu berdampak pada pembangunan itu sendiri. Degradasi lingkungan terus menerus akan mengurangi daya dukung lingkungan terhadap keberlangsungan kehidupan manusia. Kondisi ini tentu bukan menjadi tujuan kita semua, karena dampak lingkungan yang rusak akan mengurangi laju perkembangan dan pembangunan daerah. Di sisi lain pemenuhan ruang terbuka hijau sebagaimana yang diamanatkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032 sebesar 30 persen dari luas kawasan permukiman perkotaan termasuk penataan dan pemeliharaan secara berkelanjutan terutama taman-taman kota, taman-taman sekolah yang menjadi prioritas dalam pemeliharaan lingkungan.

Pembangunan kualitas lingkungan hidup dalam pengelolaan persampahan sebagaimana UU Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Persampahan telah merubah paradigma pengelolaan persampahan yang bertumpu pada pembuangan akhir dengan paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumberdaya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Pengelolaan persampahan di Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan oleh Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara melalui program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, peningkatan operasional dan sosialisasi pengelolaan persampahan.

Cakupan pelayanan persampahan selama ini meliputi kawasan pasar dan kota kecamatan dengan kuantitas 100 m³/hari. Semetara itu luas wilayah Kabupaten Aceh Utara 329.686 ha dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 572.961 jiwa yang tersebar di 27 Kecamatan. Total jumlah timbunan sampah diperkirakan mencapai 85.944,15 m³/hari dengan asumsi 0,15 m³/org/hari. Volume dan produksi sampah sebagai mana Tabel 2.59 di bawah ini.

Tabel 2.60
Volume dan Produksi Sampah Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Sampah Yang ditangani (M3)	36.421,70	34.346,16	32.962,38	47.934,72	21.505,08
Jumlah Volume Produksi Sampah (M3)	300.780,08	304.714,41	308.080,44	313.696,15	100.063
Persentase	12,11	11,27	10,70	15,28	21,49

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab.Aceh Utara Tahun 2017

Sampah banyak terdapat disekitar lingkungan permukiman dan pasar di pusat-pusat ibu kota kecamatan, penataan dan kebersihan lingkungan sekitar pasar perlu pembenahan serta sosialisasi dan rehabilitasi pasar-pasar tradisional dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan persampahan masih dilakukan secara konvensional yaitu sampah yang telah terkumpul didalam bak penampung sementara (*countainer*) diangkut oleh 23 unit armada truk sampah dan dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) Teupin Keubeu di Kecamatan Lhoksukon yang beroperasi secara terbuka (*open dumping*), dikerjakan oleh 252 tenaga kebersihan. Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mendapat tambahan 20 Unit Kontainer dan 12 unit Truk Sampah dan 1 unit Excavator dari Pemerintah Aceh guna mendorong peningkatan layanan pengelolaan persampahan di daerah.

Master Plan Persampahan TPA teupin keubeu dengan luas 32 ha telah disusun, diharapkan tidak saja menjadi tempat proses akhir, tetapi juga berperan sebagai tempat pengolahan sampah terpadu. Dalam proses terpadu ini dipilah, dipisahkan dan dilakukan pengelolaan sehingga siap untuk dikembalikan ke lingkungan dalam bentuk yang aman bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Oleh karenanya TPA teupin Keube masih membutuhkan banyak sarana dan prasarana pendukung lainnya. Beberapa sarana dan prasarana angkut sebagaimana terlihat oleh Tabel berikut :

Tabel 2.61
Kondisi Sarana dan Prasarana Persampahan Tahun 2016/2017

Kendaraan	Jumlah	Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Truk Compactor	1	-	-	1
Armroll Truck	11	8	1	3
Dump Truck	23	19	1	3
Bulldoser	2	1	-	1
Excavator	2	1	-	1
Container	57	10	2	15
Mobil Tinja	2	2	-	-
Mobil sky lift	1	1	-	-
Excavator Mini	1	1	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Aceh Utara Tahun 2017

Keseimbangan kualitas lingkungan hidup harus berjalan harmonis dengan dinamika pembangunan yang berwawasan lingkungan berkelanjutan. Seirama dengan hal tersebut pemantauan terhadap kualitas mutu air perlu dijaga guna terbebas dari segala bentuk pencemaran akibat dari berbagai aktifitas industri dan permukiman. Tahun 2015 pencemaran status mutu air di fokuskan pada 5 kawasan dimana di tahun 2014 mencapai 4 kawasan dari 40 kawasan.

Pembangunan dengan prinsip penataan lingkungan hidup yang serasi, dan tidak mengabaikan fungsi dan struktur lingkungan yang telah ada, karena eksploitasi yang berlebihan mempengaruhi keseimbangan fungsinya, seperti pengambilan batu dan pasir untuk kepentingan pembangunan dengan tujuan peningkatan PAD (galian C) yang terjadi di beberapa tempat penambangan cukup memprihatinkan seperti kondisi galian di aliran sungai krueng sawang di Kecamatan Sawang. Penggalan yang dilakukan semakin meluas sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi kondisi Tapak Bendungan Krueng Sawang. Pengambilan batu gunung dan pengerukan gunung/bukit yang tidak memperhatikan ekosistem secara keseluruhan mengakibatkan terjadinya bahaya banjir dan longsor di beberapa tempat. Banjir yang terjadi pada akhir 2014 yang melumpuhkan infrastruktur dasar seluruh kecamatan (26 kecamatan) dalam Kabupaten Aceh Utara kiranya menjadi peringatan penting bagi seluruh stakeholder dalam melaksanakan pembangunan. Pemantauan kualitas mutu air terlihat sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.62
Pemantauan Kualitas Air Tahun 2012-2016

	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah kawasan permukiman atau industri dan sumber data air yang dipantau mutu airnya	8 Kawasan	5 Kawasan	4 Kawasan	4 Kawasan	2 Kawasan
Jumlah kawasan permukiman atau industri dan sumber mata air	40 Kawasan	40 Kawasan	40 Kawasan	40 Kawasan	40 Kawasan
Persentase	0,20	0,13	0,10	0,10	0,05

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Aceh Utara Tahun 2017

Tabel 2.63
Penghijauan Pada Kawasan Rawan Longsor dan Sumber Mata Air Tahun 2012 - 2016

	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	-	6 ha	8 ha	7 ha	68,4 ha
Jumlah seluruh wilayah rawan longsor dan sumber mata air	67,5 ha	70 ha	70 ha	70 ha	70 ha
Persentase	-	0,086	0,114	0,114	0,98

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Aceh Utara Tahun 2017

Upaya penghijauan secara berkelanjutan terus diupayakan seiring menggugah kepedulian stakeholder dan masyarakat terhadap kondisi lingkungan saat ini, sehingga kata "*alam tidak bersahabat dengan kita* " tidak menjadi kambing hitam dalam permasalahan lingkungan. Konsep pembangunan *go green* sudah sepatutnya menjadi kesadaran kolektif kita sehingga upaya ini membantu mempercepat perbaikan fungsi lingkungan yang telah berubah akibat aktifitas pembangunan selama ini. Gambaran aktifitas yang dilakukan terkait penghijauan dapat dilihat pada Tabel 2.62.

Upaya pengawasan juga terus ditingkatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pembangunan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Utara. Pengawasan aktifitas pembangunan yang berdampak langsung dengan kondisi sekitarnya diperlukan untuk mendeteksi sejak dini informasi dan situasi aktifitas yang dilakukan oleh industri atau perusahaan. Sejak tahun 2012 hingga 2014 perkembangan perusahaan wajib amdal sebagai berikut :

Tabel 2.64
Jumlah Perusahaan Wajib AMDAL
Tahun 2012–2016

	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi	3	3	4	4	4
Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL	4	4	4	4	4
Persentase	75	75	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Aceh Utara Tahun 2017

Tindakan lanjut pengawasan yang dilakukan kurun waktu tersebut di atas, belum dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu kepedulian kita semua menjadi komitmen penting terhadap lingkungan hidup dimana kita berada, sehingga kelestarian bumi terus terjaga (*one place, one earth*). Berbagai kasus pencemaran lingkungan yang tertangani selama ini sebagai berikut :

Tabel 2.65
Jumlah Kasus Lingkungan Tahun 2012-2016

	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda	5	2	3	3	5
Jumlah kasus lingkungan yang ada	5	2	8	4	5
Persentase	100	100	37,5	75	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Aceh Utara Tahun 2017

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang berumur di bawah 17 tahun tetapi sudah kawin atau sudah pernah kawin, dalam profil ini disebut penduduk wajib KTP. Dengan memiliki KTP penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya; misalnya urusan perbankan, mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya.

Sejak tahun 2010 KTP manual diganti secara bertahap dengan KTP elektronik yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk

sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Tabel 2.65 menyajikan jumlah kepemilikan KTP Elektronik.

Tabel 2.66
Kepemilikan KTP
di Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2012 – 2016

	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase Kepemilikan KTP	94	67	70	69	92

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Aceh Utara Tahun 2015

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat, secara lugas dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Dari definisi tersebut terlihat ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat. Tujuan utama tersebut diwujudkan salah satunya melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan dan kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan. Dari keluarga yang sejahtera ini, maka tata kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat melahirkan ketentraman, keamanan, keharmonisan, dan kedamaian. Dengan demikian, kesejahteraan keluarga menjadi salah satu tolok ukur dan barometer dalam.

Tabel 2.67
Jumlah PKK Aktif, Posyandu Aktif dan Jumlah Keseluruhan LPM
di Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
PKK aktif	506	518	499	698	480
Posyandu Aktif	481	486	931	952	952
Jumlah LPM	2090	2185	2185	2185	2185

Sumber : BPMKS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017

PKK merupakan suatu kelompok masyarakat yang terdiri dari ibu- ibu rumah tangga maupun ibu yang mempunyai karier di bidang lain, yang jelas bertujuan untuk mensejahterakan keluarga, unsur pelaksanaannya terdiri dari ketua PKK, Wakil Ketua, Sekretaris, bendahara, dan di dalamnya terdapat pengelompokan yang di bawah sekretariat yaitu :

1. Pokja I, yang menjalankan kegiatan bidang akhlakul karimah yaitu gotong royong
2. Pokja II, yang menjalankan kegiatan bidang pendidikan
3. Pokja III, bidang kerajinan
4. Dan pokja IV bidang kesehatan

Kegiatan yang ada dalam pokja tersebut setiap tahun dilakukan pembinaan untuk adanya peningkatan mutu dan kualitas serta peningkatan ibu-ibu dalam mengayomi keluarga namun dalam hal tersebut timbul suatu masalah yaitu ada ibu- ibu yang tidak atau malas bergabung, kurang minat atau sibuk dengan kegiatan lain ketika ada pembinaan PKK, sehingga ada tersebut PKK aktif dan PKK yang tidak aktif, berbeda jumlahnya antara tahun sebelum dan sesudah. Dapat kita lihat di grafik di atas selalu ada perbedaan jumlahnya.

Tim Penggerak PKK Kabupaten Setiap tahun adanya pembinaan di kecamatan tepatnya di balai Desa, jumlah desa per kecamatan dikumpulkan oleh ketua PKK Kecamatan kemudian dibagi kelompok dipisahkan antara ibu ketua PKK, Wakil ketua Sekretaris, Pokja I, II, III dan IV dengan Pembinaan masing- masing kelompok, Ibuk Ketua PKK memberi pengarahan kepada Ibuk Keuchik, sesuai dengan kegiatan di kabupaten.

Jumlah Dasawisma yang berbeda, jumlah anggota wirid, jumlah pos yandu, dan sebagainya tergantung dari keyakinan ibu-ibu di kecamatan tersebut, apabila sedang musim panen atau musim bercocok tanam, banyak ibu- ibu tidak aktif sehingga adanya penurunan jumlah kelompok aktif dan yang tidak aktif.

1. Posyandu

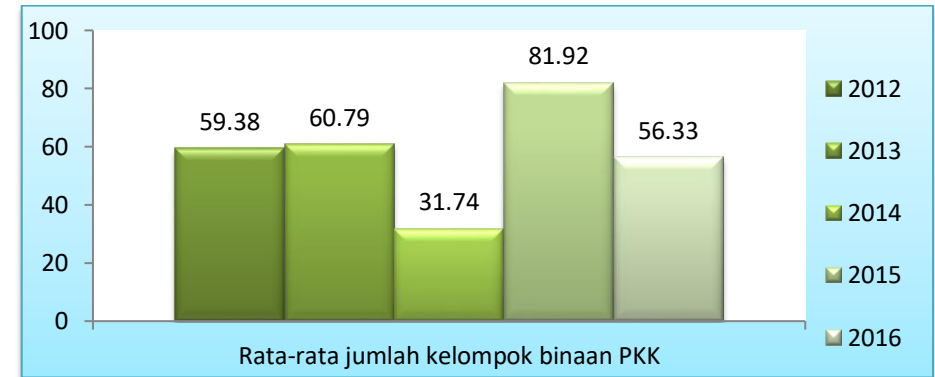
Kegiatan posyandu merupakan kegiatan Pokja IV, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, menurunnya grafik kegiatan posyandu karena masyarakat beranggapan obat suntik tersebut berasal dari babi, walaupun sudah diolah bermacam cara masih terasa bahwa obat itu haram masuk kedalam tubuh si anak, ada juga yang merasa anaknya sakit terus dan demam setelah disuntik, ada juga yang malas anaknya disuntik ada rasa sedih bayi disuntik.

Di samping penurunan ada juga peningkatan karena disaat itu adanya pengembangan pola pikir ibu- ibu yang baik dan kegiatan didesanya juga kurang sehingga rajin untuk membawa anaknya dan juga ibu hamil rajin mengecek kandungannya ke tempat posyandu yang telah disediakan di desanya masing-masing.

2. Kelompok PKK Binaan

Ketua PKK kabupaten melakukan pembinaa setiap tahun untuk 852 gampong, yang dilaksanakan di 27 Kecamatan. Satu hari terjangkau antara satu atau dua kecamatan, yang dibina tentang dana yang sudah disalurkan kedesa itu agar dapat dipergunakan dengan benar supaya dana bergulir dan bertambah dengan didasari kerajinan tangan, menanam bibit, obat- obatan dipekarangan jadi dengan adanya pembinaan ibu- ibu bisa menambah penghasilan rumah tangga, tetapi pengelolaan dana tergantung pada sistem yang dijalankan didesa. Dalam penataaan rumah, menata tempat yang seharusnya pada tempatnya,bisa membuat kue untuk menambah penghasilan, inti binaan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Gambar 2.22
Persentase Jumlah Kelompok Binaan PKK
di Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2012-2016



Sumber : BPMKS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan penduduk menjadi hal yang penting dalam perencanaan pembangunan dimana jumlah penduduk yang besar yang tidak diiringi dengan peningkatan kemampuan SDM akan menjadi beban bagi pemerintah daerah. Program Keluarga Berencana (KB) masih menjadi andalan utama dalam menekan jumlah anak dalam keluarga, hal ini tercermin dari peningkatan peserta KB aktif dancakupan peserta KB aktif yang stabil sehingga angka kelahiran dapat dikendalikan.

Tabel 2.68
Rata-rata Jumlah Anak Perkeluarga dan Akseptor KB
di Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Rata rata jumlah anak per keluarga	3,00	3,00	3,00	3,00	2,78
Cakupan peserta KB aktif	63,53	64,78	64,52	69,26	70,40
Rasio Akseptor KB	81,30	80,46	79,09	69,26	68,72

Sumber : BPMKS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016

1. Rata-rata jumlah anak per keluarga sebagaimana data tahun 2011–2015 adalah 3 Anak, data ini bersumber dari hasil pendataan keluarga oleh petugas PLKB Kabupaten Aceh Utara. Hasil pendataan setiap tahunnya tidak menunjukkan adanya perubahan statistik, hal ini dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat pada umumnya di Kabupaten Aceh Utara sudah sangat baik, Hampir seluruh keluarga yang dikunjungi oleh PLKB di lapangan mengungkapkan bahwa keluarga yang baik dengan jumlah anak yang tidak terlalu banyak. Faktor yang menjadi pertimbangan tersebut ternyata tidak terbatas pada keluarga ekonomi menengah kebawah saja, bahkan keluarga yang memiliki taraf ekonomi yang mapan juga menyadari mengenai jumlah anak. Sehingga ini sangat membantu tugas dan misi program KB di Kabupaten Aceh Utara.
2. Cakupan peserta KB aktif
Data menunjukkan perkembangan jumlah peserta KB aktif di Kabupaten Aceh Utara cenderung meningkat, dari tahun 2011 hingga 2013 terjadi peningkatan rata-rata sebesar 1 persen, data statistik menunjukkan adanya penurunan jumlah peserta dari tahun 2013 hingga 2014 sebesar 0,26 persen, akan tetapi peningkatan justru sangat signifikan terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 4,74 persen sehingga total cakupan jumlah peserta KB aktif pada tahun 2016 sebesar 69,26 persen. Besaran persentase cakupan peserta KB diukur dari banyaknya jumlah permintaan alat kontrasepsi di lapangan dan di klinik yang ada di Aceh Utara, dan terjadi penurunan pada tahun 2014 diakibatkan pada menurunnya perkiraan permintaan masyarakat (PPM) tahun 2014 yang harus menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia dari dana BkbbN Provinsi Aceh untuk Kabupaten Aceh Utara, terbukti pada tahun 2015 Aceh Utara mengajukan PPM lebih besar karena dana yang tersedia untuk pengadaan alat kontrasepsi juga lebih besar maka

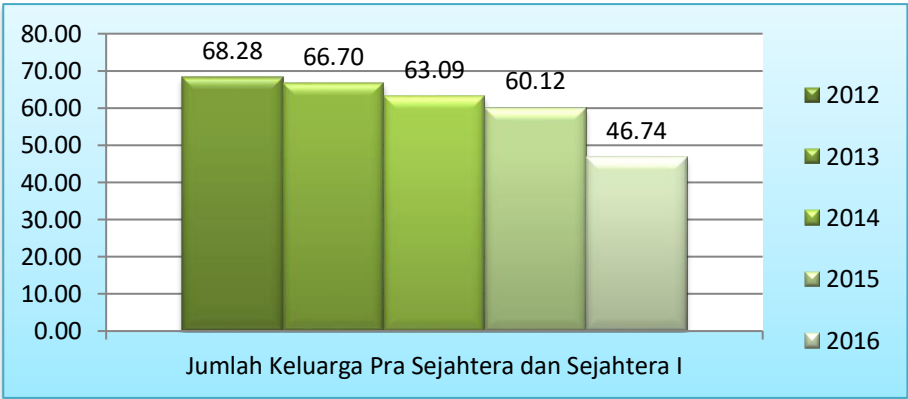
berdampak pada meningkatnya jumlah cakupan peserta KB pada tahun 2015. Adapun peserta KB yang paling banyak terdapat pada Kecamatan Dewantara.

3. Rasio Akseptor KB

Perbandingan antara peserta (akseptor) KB dengan jumlah pasangan usia subur yang ada diaceh utara dari data 2011 hingga 2015 mengalami angka persentase yang turun, hal ini dikarenakan adanya peningkatan secara signifikan jumlah pasangan usia subur yang ada di Kabupaten Aceh Utara dan belum sebanding dengan peningkatan jumlah peserta KB, sehingga sesuai data statistik yang didapat Rasio Akseptor mengalami penurunan secara pesrentase

Kebijakan dari BKKPN Pusat untuk tahun 2015 ialah menghilangkan kategoori “Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I” dalam pengelompokan hasil pentahapan keluarga sejahtera. Sehingga saat ini tidak dilakukan pendataan lagi untuk jumlah keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera.

Gambar 2.23
Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
di Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2012-2016



Sumber : BPMKS Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2016

Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2011 – 2015 dimana dari data hasil pendataan lapangan cenderung terus menurun, dari tahun 2011 sebesar 68,86 persen hingga tahun 2014 telah menurun menjadi 63,09 persen. Penurunan angka keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I akibat meningkatnya taraf kehidupan sebagian besar masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. Bahkan berdasarkan wacana dari BkbbN pusat bahwa pendataan untuk kategori keluarga ini tidak

lagi menjadi objek untuk tahun 2015 hingga mendatang, sehingga untuk tahun 2015 petugas lapangan belum melakukan pendataan terhadap jumlah keluarga untuk aktegori Prasejahtera dan sejahtera I.

Untuk lebih meningkatkan persediaan perkiraan permintaan masyarakat (PPM) dari BkbbN Provinsi Aceh, maka perlu untuk diketahui bersama bahwa peningkatan pelayanan KB di Kabupaten Aceh Utara perlu didukung dengan fasilitas yang memadai serta perlunya tenaga lini lapangan seperti Pos KB di lingkungan Desa diaktifkan kembali dengan pemberian honor dan perlu diadakan kegiatan lainnya seperti Kampung KB dan Lain-lain.

I. Perhubungan

Fasilitas umum terkait aktifitas perhubungan darat, laut dan udara yang paling menonjol adalah sarana terminal/bandara/pelabuhan barang dan penumpang umum. Berbagai upaya mendorong peningkatan sarana ini terus dilakukan karena memiliki nilai strategis wilayah sekitarnya seperti keberadaan pelabuhan umum Krueng Geukueh dan Bandar Udara Malikussaleh yang memiliki rute dan status aktifitas secara internasional dapat dimanfaatkan beberapa kabupaten/kota sekitar. Aktifitas mobilisasi arus penumpang sebagai berikut :

Tabel 2.69
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Jiwa) Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2012 – 2016

Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Jiwa)	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
	3.571.152	3.543.121	1.762.450	879.720	

Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016

Tingginya arus penumpang disuatu daerah dapat disebabkan oleh terdapatnya suatu lokasi wisata yang merupakan daerah kunjungan wisata lokal maupun manca negara dan daerah tersebut merupakan suatu daerah industri yang baru berkembang maupun daerah yang memang merupakan daerah industri itu sendiri. Indikator ini mengukur ketersediaan sarana angkutan umum yang dapat melayani masyarakat. Selain itu dapat menyediakan data tentang arus penumpang.

Jasa pelayanan angkutan dalam memobilisasi arus penumpang umum dan barang perlu dilakukan pengujian setiap waktu untuk menjaga kelayakan

kendaraan bermotor dalam melakukan aktifitas dengan tujuan nyaman dan lancarnya arus lalu lintas serta keselamatan di jalan raya. Berbagai upaya terus ditingkatkan dalam pelayanan bidang perhubungan darat ini dengan melakukan peningkatan baik sarana maupun prasarana. Tahun 2012 pembangunan gedung pengujian kendaraan bermotor serta fasilitas pendukungnya di kecamatan Bayu telah dapat dioperasikan sehingga aktifitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor lebih optimal dan secara terus menerus ditingkatkan operasionalnya. Aktifitas uji fisik kendaraan seperti kondisi lampu, ban, rem, stuur dan chasis kendaraan dapat dilakukan pada fasilitas tersebut, gambaran perkembangan uji kir angkutan umum sebagai berikut :

Tabel 2.70
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2012-2016

Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
	4.587	4.288	4.315	4.363	4.401

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017

Selanjutnya capaian perhubungan darat lainnya sebagai sarana pendukung aktifitas kelancaran moda transportasi darat yaitu pengadaan beberapa unit rambu lalu lintas jalan, dari rencana awal RPJM Kabupaten Aceh Utara 2012-2017 sebanyak 250 unit yang akan diadakan, hingga tahun 2015 teralisasi sebanyak 170 unit, marka jalan dari target awal sepanjang 2.000 m² hingga tahun 2015 teralisasi sepanjang 635 m² dan kebutuhan alat pemberi isyarat telah teralisasi sebanyak 6 unit yang dibutuhkan dari rencana awal. Sarana pendukung ini sangat berguna bagi keselamatan pengguna jalan, rincian data realisasi rambu lalu lintas, marka dan lampu pemberi isyarat jalan sebagai berikut :

Tabel 2.71
Sarana Pendukung Lalu Lintas Jalan Raya
Tahun 2012-2016

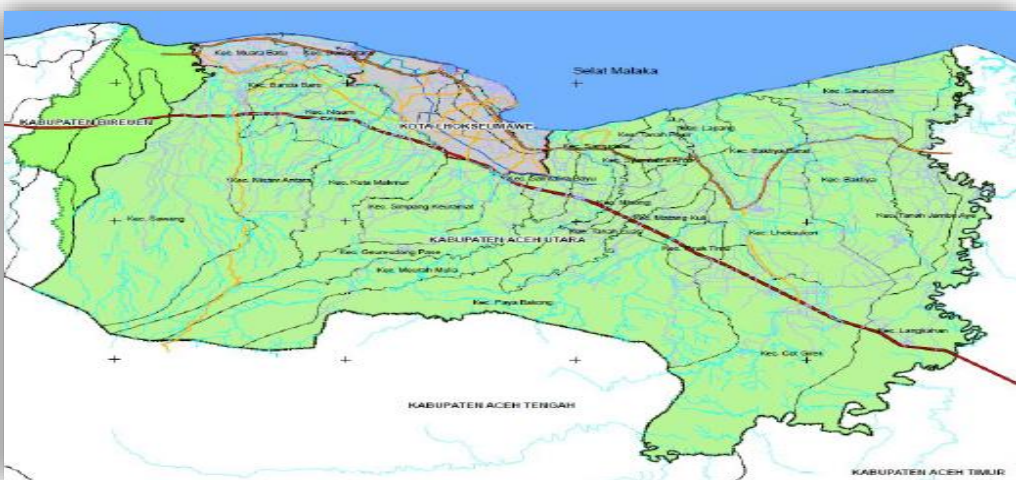
Sarana Pendukung	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Rambu- Rambu	-	130	40	170	70
Marka Jalan(m)2	-	373	471	635	600
Lampu Isyarat	-	-	3	6	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017

Rencana pola ruang pengembangan wilayah dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032 sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, wilayah Kabupaten Aceh Utara termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN), prasarana perhubungan merupakan infrastruktur pendukung dan penunjang kegiatan ekonomi skala nasional dan internasional seperti infrastruktur jalan, pelabuhan, airport.

Ranperpres penyusunan materi teknis Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Industri Lhokseumawe (RTR-KSN-KIL), Kabupaten Aceh Utara termasuk dalam zona inti (kecamatan Dewantara, Muara Batu dan sebahagian Banda Baro) dan zona pendukung (seluruh kecamatan) serta bagian dari zona pendukung Kawasan Ekonomi Strategis Terpadu (KAPET) Darussalam Aceh sebagaimana gambar berikut :

Gambar 2.24
Peta Rencana Deleniasi KSN Industri Lhokseumawe



Sejalan dengan rencana tersebut diatas, Presiden RI dalam arahan kunjungan ke Provinsi Aceh tanggal 9-10 Maret 2015 dalam rangka Ground Breaking Waduk Kreung Keureto di Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara telah memberi arahan dan instruksi kepada Menteri Koordinasi Kemaritiman RI "agar melakukan langkah terkait revitalisasi aset yang ada di Lhokseumawe dan Aceh Utara dan secara khusus ditugaskan untuk membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis Kawasan Industri yang telah ada".

Tindaklanjut arahan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Lhokseumawe tanggal 31 Juli 2015 dan ditindaklanjuti melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500/1168/2015 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Lhokseumawe tanggal 7 Agustus 2015. Selain itu, dalam Perpres No 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara termasuk dalam indikasi lokasi KEK (Kawasan Ekonomi Khusus)

Konsep dasar KEK adalah penyiapan kawasan yang lokasinya mempunyai aksesibilitas ke pasar global (akses ke pelabuhan dan atau bandara). Kawasan tersebut diberikan insentif tertentu untuk menarik investor karena KEK akan bersaing dengan negara-negara disekitarnya.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) akan bermanfaat bagi Kabupaten Aceh Utara untuk merevitalisasi industri-industri yang telah ada yaitu PT. PIM, PT. AAF dan KKA, serta peningkatan ekspor, peningkatan penanaman modal asing, pertumbuhan industri, diversifikasi produksi, penciptaan lapangan kerja, dan meningkatnya kualitas SDM melalui peningkatan keahlian dan transfer teknologi. Selain hal tersebut, aspek struktur ruang Kabupaten Aceh Utara cukup berpotensi dalam pengembangan pusat pertumbuhan baru di wilayah zona utara Provinsi Aceh dan bagian arahan dari pengembangan Kawasan Strategis Nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN).

Potensi strategis kedua infrastruktur ini (pelabuhan dan airport) harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan PAD, mengingat konsentrasi dan fokus Pemerintah Pusat dalam pengembangan wilayah semakin meningkat seiring dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir tahun 2016.

Implikasi yang diharapkan dengan aktifitas rencana tersebut terhadap pengembangan wilayah Kabupaten Aceh utara yakni semakin berkembang dan tumbuh menjadi pusat distribusi kawasan dengan aktifitas utama pada kedua fasilitas tersebut. Rencana ini menambah fungsi, peran dan aktifitas infrastruktur wilayah yang dapat dimanfaatkan daerah.

Tabel 2.72
Sarana dan Fasilitas Pendukung Pelabuhan Krueng Geukuh

Prasarana	Panjang/luas	Kedalamam	Kapasitas	Volume
Kolam Pelabuhan	2,5 mile	10 m	-	-
Dermaga	467,5	7 -9 m	5-20 Ton	-
Peralatan tambahan	-	-	-	13 unit
Gudang	7400 m ²	-	-	10 unit

Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016

Oleh sebab itu pembenahan pelabuhan umum Krueng Geukueh baik sarana dan prasarana semakin perlu ditingkatkan secara berkelanjutan dengan menambah berbagai fasilitas lain yang belum memadai. Berbagai fasilitas yang telah ada dapat dilihat pada Tabel 2.63.

Aktifitas pada Bandara Umum Malikussaleh dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Bandara Malikussaleh. Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara pasca operasionalnya diserahkan terimakan kepada oleh PT. Arun NGL Co pada bulan Mei 2008.

Bandar Udara ini memiliki *runway* sepanjang 1.850m dan lebar 30m merupakan bandara kelas III yang memiliki fasilitas Bandara Internasional yang dapat menampung pendaratan pesawat jenis Fokker 28, Hercules, ATR72-500, ATR72-600 sampai dengan pesawat Boeing 727-200. Tahun 2014, pemerintah Aceh Utara telah berupaya melalui Kementerian Perhubungan RI membantu menambah panjang runway hingga mencapai 3500m guna pengembangan bandara tersebut, namun hingga kini belum ada realisasinya.

Penerbangan berjadwal secara komersial telah dilakukan oleh beberapa maskapai (*airline*) PT. Wing Air dengan *round timed* pada setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu dari dan ke bandara Malikussaleh pukul 11.30 Wib kedatangan, pukul 12.15 Wib keberangkatan. Selanjutnya maskapai PT. Garuda Indonesia dengan *round timed* layanan setiap hari Senin, Rabu, Jumat dan Minggu untuk rute layanan Medan – Lhokseumawe pukul 13.15 Wib kedatangan dan pada pukul 14.30 Wib keberangkatan yang resmi beroperasi pada 4 Febuari 2015 lalu.

J. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Koperasi

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi aktif, maka di harapkan semakin menurunnya angka kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran. Jumlah keseluruhan koperasi di Kabupaten Aceh Utara sampai dengan tahun 2015 sebanyak 462 unit yang terdiri dari 123 koperasi aktif dan 252 koperasi tidak aktif dan sebanyak 87 unit koperasi yang telah di bubarkan. Persentase koperasi aktif dari tahun 2010 s.d 2015 terus mengalami penurunan sebesar 6.65 persen yaitu dari 541 jumlah unit Koperasi menjadi 462 unit koperasi sebagaimana yang tercantum pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.73
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011–2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Koperasi	541	548	548	462	462
2	Jumlah Koperasi Aktif	194	183	170	123	129
3	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	347	365	378	339	333
4	Jumlah Koperasi Yang Dibubarkan	-	-	-	87	-
5	Persentase Koperasi Aktif	35,86	33,39	31,02	26,62	27,92
6	Persentase Koperasi Tidak Aktif	64.14	66.61	68.98	73.38	72.07

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab. Aceh Utara Tahun 2017

Menurunnya jumlah Koperasi aktif di Kabupaten Aceh Utara sampaisaat ini karena masihmenghadapikendala. Secara umum permasalahan ataupun kendala yang sedang dihadapi oleh Koperasi yang ada di kabupaten Aceh Utara adalah menghadapi persoalan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) manajemen dan pengurus koperasi, sehingga koperasi tidak berjalan dengan baik, bahkan sampai dibubarkan. Persoalan lain juga dihadapi oleh koperasi dan usaha mikro kecil, menengah adalah menyangkut dengan terbatasnya jaringan usaha dan informasi pasar. Untuk ke depan langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara adalah melakukan perubahan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengurus koperasi melalui pelatihan pendampingan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja

koperasi dan pelatihan pendampingan penyusunan laporan keuangan kepada manajemen dan pengurus koperasi. Selain itu juga untuk dapat berjalan koperasi dengan baik, maka perlu adanya petugas konsultasi koperasi lapangan (PKPL) untuk dapat memberikan bimbingan dan konsultasi kepada manajemen dan pengurus koperasi di dalam Kabupaten Aceh Utara.

2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga sangat berperan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja di Kabupaten Aceh Utara. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) selama tahun 2012 s.d tahun 2015 terus mengalami peningkatan yaitu sebesar 1.512 UMKM atau mengalami peningkatan sebesar 20,92 persen. Bertambahnya UMKM disebabkan jumlah pengusaha (wira usaha baru) di kabupaten Aceh Utara bertambah. Namun demikian UMKM di Kabupaten Aceh Utara masih menghadapikendala, yaitu terbatas akses permodalan, bahan baku, informasi pasar serta jaringan kerja dan kemitraan, sehingga masih sulit berdaya saing dengan daerah lain. Pada tabel berikut ini dapat dilihat jumlah UMKM di Kabupaten Aceh Utara

Tabel 2.74
Jumlah UMKM di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 – 2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah UMKM	7.227	7.508	7.989	8.739	9.599

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017

Jumlah UMKM di Kabupaten Aceh Utara terdiri dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Jumlah UMKM pada tahun 2015 terus mengalami peningkatan. Untuk usaha mikro dari tahun 2010 s.d tahun 2015 meningkat sebanyak 916 unit atau 21,77 persen, sedangkan untuk usaha kecil dari tahun 2010 s.d tahun 2015 meningkat sebanyak 579 unit atau meningkat sebanyak 19,58 persen dan untuk usaha besar dari tahun 2010 s.d tahun 2015 meningkat sebanyak 17 unit atau meningkat sebanyak 26,98 persen.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terdiri dari 7 sektor ekonomi, seperti ditunjukkan pada Tabel 2.58, dapat dilihat bahwa dari 7 sektor ekonomi

yang bergerak untuk usaha miko, kecil dan menengah (UMKM) yang lebih berpotensi di Kabupaten Aceh Utara adalah pada sektor pertanian. Ini menandakan bahwa sektor pertanian sangat baik untuk lebih di kembangkan kedepan di Kabupaten Aceh Utara.

Tabel 2.75
Jumlah Persentase UMKM di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2012 – 2016

No.	Jumlah Usaha	2012 (unit)	(%)	2013 (unit)	(%)	2014 (unit)	(%)	2015 (unit)	(%)	2016 (unit)	(%)
1	Usaha Mikro	4.207	58,20	4.442	59,16	4.650	58,21	5.123	58,62	5.634	58,70
2	Usaha Kecil	2.957	40,92	3.003	40,00	3.280	41,06	3.536	40,46	3.853	40,13
3	Usaha Menengah	63	0,87	63	0,84	59	0,74	80	0,92	112	1,17
	JUMLAH UMKM	7.227	100	7.508	100	7.989	100	8.739	100	9.599	100

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017

Tabel 2.76
Jumlah Sektor Ekonomi UMKM Kabupaten Aceh Utara

No	Sektor Ekonomi	2012 UMKM (unit)	(%)	2013 UMKM (unit)	(%)	2014 UMKM (unit)	(%)	2015 UMKM (unit)	(%)	2016 UMKM (unit)	(%)
1	Perdagangan/jasa	1.434	19,84	1.434	19,10	1.813	22,69	2.245	25,69	2.734	28,49
2	Pertanian	4.316	59,72	4.316	57,48	4.329	54,18	4.360	49,89	4.412	45,46
3	Pertambangan	76	1,05	76	1,01	76	0,95	82	0,94	85	0,89
4	Industri	1.072	14,83	1.072	14,27	1.132	14,16	1.333	15,25	1.564	16,13
5	Perikanan/kelautan	88	1,21	88	1,17	98	1,22	127	1,45	163	1,70
6	Peternakan	-	-	281	3,74	298	3,73	334	3,82	359	3,73
7	Transportasi	241	3,33	241	3,20	243	3,41	258	2,95	282	2,93
	T o t a l	7.227	100	7.508	100	7.989	100	8.739	100	9.599	100

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017

K. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan di bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting pemerintah. Aspek keolahragaan juga tidak luput dari perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam upaya pembinaan dan peningkatan prestasi atlet melalui program kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. Hal ini terlihat dari cabang-cabang pembinaan yang telah dilakukan selama ini seperti Sepak bola, futsal, volly ball, badminton, tenis meja, tenis lapangan, renang,

dayung, tinju, panjat tebing, atletik, sepeda, anggar dan lainnya yang dibina dibawah pembinaan KONI Kabupaten Aceh Utara. Selain itu juga peningkatan prasarana olahraga juga dilakukan melalui program kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olahraga seperti sarana prasarana di Kecamatan Lhoksukon terdiri dari fasilitas olahraga indoor dan out door, lapangan sepak bola (stadion) di Kecamatan Baktya serta kecamatan-kecamatan lainnya. Pada tahun 2015 telah direncanakan pembangunan satu unit Sport Centre (pusat kegiatan olahraga) untuk kabupaten Aceh Utara yang dibangun di kecamatan Syamtalira Aron dan ditargetkan selesai pada tahun 2017.

1. Ruang Lingkup Olahraga

Pada tahun 2016 direncanakan peningkatan bidang olahraga sesuai dengan ruang lingkup olahraga yang meliputi kegiatan: Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi dan Olahraga Prestasi. Olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler. Dalam pengertian ini olahraga adalah suatu kegiatan untuk pendidikan atau hanya mengenalkan cabang-cabang olahraga tanpa menuntut peserta didik untuk dapat berprestasi dalam cabang olahraga tertentu.

Olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran. Olahraga rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga. Olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi. Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan di kabupaten Aceh Utara dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang berbasis pada pengembangan olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat. Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui penetapan kebijakan,

penataran/pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetisi, bantuan, pemudahan, perizinan, dan pengawasan. Pada tahun 2016 ditargetkan Pembinaan dan pengembangan olahraga terbagi menjadi 4 kegiatan yaitu:

1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah;
2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir;
3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional;
4. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat.

L. Kebudayaan

Dalam bidang seni dan budaya, Kabupaten Aceh Utara memiliki 75 sanggar (group) kesenian pada tahun 2014 yang tersebar di 27 kecamatan. Group ini merupakan kelompok pelestari khasanah budaya dengan berbagai jenis kesenian. Untuk tarian, misalnya, seperti debus, seudati, saman, ranup lampuan, pemulia jamee, marhaban, rapai geleng, didong, prang sabilillah, dalael khairat, nadham, meurkon, dhike lingiek, Nasyid, drama bahasa aceh, nariet, poh kipah, pantoen, drumband, seni pahat, ukir, dan melukis. Disamping itu, terdapat pula sastra (pantun, syair, hikayat) dan seni lukis (kaligrafi).

Sedangkan jumlah benda, situs dan kawasan budaya yang dilestarikan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel.2.77
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Situs
2012	72
2013	72
2014	72
2015	72
2016	72

Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2015

Beragam situs peninggalan/makam dan seni budaya tersebut merupakan aset sejarah dan kebudayaan Kabupaten Aceh Utara yang bernilai

sangat tinggi dalam mendukung dan mendorong ketahanan budaya daerah. Banyaknya potensi Seni Budaya dan Pariwisata di kabupaten Aceh Utara mestinya menjadi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya, tetapi potensi ini belum terkelola dengan baik sehingga belum banyak memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian seni budaya di Kabupaten Aceh Utara, pada tahun 2016 ditargetkan semua potensi dari sektor seni

Tabel 2.78
 Penyelenggaraan Festival dan Jumlah Sarana Seni dan Seni Budaya di Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2012-2016

No.	Uraian	Tahun					Ket
		2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Penyelenggaraan Festival	1	2	3	3	3	
2.	Jumlah Sarana Seni	1	3	3	3	3	
		Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	
3.	Jumlah Jenis Budaya	65	58	58	58	58	

Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016

Budaya dan pariwisata dapat dimanfaatkan minimal sebesar 40% untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan promosi, sosialisasi, dan pargelaran seni budaya serta ekonomi kreatif.

M. Perpustakaan dan Kearsipan

Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Aceh Utara selama tahun 2012-2016 menunjukkan angka yang fluktuatif, jumlah pengunjung tertinggi pada tahun 2016 sebanyak 10.314 orang, seperti dapat dilihat padaTabel berikut.

Tabel 2.79
 Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016

	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	7.542	8.339	2.718	3.769	10.314
Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	7.542	8.690	54.937	64.957	50.563

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Aceh Utara Tahun 2016

Selain dari segi perpustakaan keliling, kita juga dapat melihat kegiatan kearsipan. kegiatan dibidang ini terutama sekali melakukan pendataan dan

penataan dibidang kearsipan pada setiap SKPK baik itu dinas, badan, kantor maupun kecamatan yang tersebar di seluruh Aceh Utara. namun, masih terkendala yang disebabkan faktor transportasi. seperti diketahui, bahwa SKPK tersebar di seluruh Aceh Utara dan untuk menjangkaunya dibutuhkan armada yang memadai, namun selama ini penggunaan armada dimaksud terkadang berbenturan dengan kegiatan perpustakaan keliling maupun monitoring perpustakaan.

Tabel 2.80
Koleksi Buku yang Tersedia pada Perpustakaan Daerah
di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016

	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Jumlah koleksi judul buku yang tersedia</i>	6.833 Judul	10.676 Judul	12.805 Judul	13.137 Judul	15.128 Judul
<i>Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia</i>	16.995 Eks	31.677 Eks	31.083 Eks	41.323 Eks	50.563 Eks

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Tahun 2016

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

Sumber daya perikanan terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Pengelolaan antara kedua sumber daya ini berbeda satu sama lain dan tergantung pada kondisi eksternal. Pembangunan sektor perikanan juga merupakan salah satu andalan di Kabupaten Aceh Utara mengingat hampir sebagian wilayah berada di kawasan pesisir.

Luas wilayah Kabupaten Aceh Utara terbagi ke dalam 27 kecamatan yang mempunyai karakteristik wilayah masing-masing dengan panjang garis pantai mencapai 55,34 Km. Karakteristik wilayah Kabupaten Aceh Utara yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan dibagi menjadi 4 (empat) wilayah yaitu : 1) Wilayah Pengembangan Perikanan Tangkap (wilayah pantai), 2) Wilayah Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau (wilayah pesisir), 3) Wilayah Pengembangan Budidaya air Tawar (wilayah pedalaman), dan 4) Wilayah Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan.

1. Wilayah Pengembangan Produksi Perikanan Tangkap

Pengembangan perikanan tangkap harus memperhatikan ketersediaan potensi sumber daya ikan yang berada di wilayah pengelolaan perikanan. Pengembangan perikanan tangkap juga mesti diikuti dengan keberadaan pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan. Peningkatan pembangunan pelabuhan perikanan dilakukan dengan memperhatikan keberadaan nelayan dan ketersediaan pengolahan yang memadai.

Garis pantai Kabupaten Aceh Utara sepanjang 55,34 km merupakan salah satu potensi untuk pengembangan dan peningkatan produksi hasil perikanan tangkap. Pengembangan perikanan tangkap diarahkan di wilayah yang mempunyai pantai/laut sebagai daerah penangkapan ikan. Daerah pengembangan perikanan tangkap meliputi 8 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan : Muara Batu, Dewantara, Syamtalira Bayu, Samudera, Tanah Pasir, Lapang, Seunuddon, dan Tanah Jambo Aye.

2. Wilayah Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya Air Payau

Perikanan budidaya dipengaruhi oleh perlakuan terhadap ekosistem yang ada di hulu, seperti hutan dan daerah aliran sungai. Apabila terdapat perilaku yang merusak sumber daya di hulu secara berlebihan akan mengganggu daerah aliran sungai sehingga menyebabkan sedimentasi dan kurangnya pasokan air dan pakan alami. Wilayah pesisir Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu potensi untuk pengembangan perikanan budidaya air payau karena mempunyai luasan tambak 12.174 ha. Pengembangan perikanan budidaya air payau diarahkan pada daerah pesisir yang masih mempunyai pengaruh pasang surut, yang mempunyai sumber air tawar dari sungai maupun air asin dari laut sehingga akan mempermudah dalam pengelolaan pengairan dalam kegiatan budidaya. Daerah yang diarahkan untuk pengembangan budidaya air payau mencakup 13 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan : Muara Batu, Dewantara, Nisam, Syamtalira Bayu, Syamtalira Geudong, Tanah Pasir, Lapang, Syamtalira Aron, Lhoksukon, Baktiya Barat, Baktiya, Seunuddon, dan Tanah Jambo Aye.

3. Wilayah Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar

Dalam rangka pengembangan perikanan budidaya air tawar diarahkan di wilayah pedalaman Aceh Utara terutama yang didukung oleh sumberdaya air tawar seperti sungai, danau dan waduk. Namun untuk komoditas ikan air tawar dapat juga di kembangkan sampai ke daerah pesisir. Daerah prioritas untuk

pengembangan perikanan air tawar di Kabupaten Aceh Utara mencakup 14 Kecamatan yaitu Kecamatan : Sawang, Cot Girek, Langkahan, Geureudong Pase, Nisam, Lhoksukon, Kuta Makmur, Simpang Keuramat, Meurah Mulia, Paya Bakong, Tanah Luas, Matang Kuli, Bandar Baro, dan Nisam Antara.

4. Wilayah Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Pengembangan pengolahan hasil perikanan diarahkan di wilayah yang menjadi sentra produksi perikanan tangkap, hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan nilai produk terutama pada saat produksi perikanan tangkap yang melimpah. Daerah yang diarahkan untuk pengembangan pengolahan hasil perikanan meliputi 8 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan : Muara Batu, Dewantara, Syamtalira Bayu, Samudera Geudong, Tanah Pasir, Lapang, Seunuddon, dan Tanah Jambo Aye.

Tabel 2.81
Jumlah Produksi Ikan di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2012-2016

	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Produksi Ikan (ton)	20.720,27	22.197,25	24.109,57	26,808,41	28.295,30
Target Daerah yang mendapatkan bantuan pemda tahun n	21.544,01	23.923,34	26.682.06	27.543,10	30.185,49
Rasio	96,18	92,78	90,36	97,33	93,71

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun produksi ikan mengalami peningkatan, pada tahun 2016 produksi ikan terjadi peningkatan sebesar 1.486,89 ton bila dibandingkan pada tahun 2015. Walaupun terjadi peningkatan produksi namun belum mencapai sesuai dengan target daerah, ini dapat dilihat seperti pada tabel di atas.

Tabel 2.82
Jumlah Konsumsi Ikan di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2012-2016

	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	36,00	36,50	37,00	40,68	40,36
Target daerah	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
Rasio	94,74	96,05	97,37	107,05	106,21

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017

Pada tabel konsumsi ikan tersebut di atas menunjukkan bahwa target daerah pada tahun 2016 sebesar 38 kg/kapita/tahun sedangkan jumlah konsumsi perkapita pada tahun 2016 sebesar 40,36 kg/tahun. Ini menunjukkan bahwa jumlah konsumsi ikan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 2,36 kg dari target yang telah di tentukan.

B. Pariwisata

Pembangunan Pariwisata dan kebudayaan mempunyai potensi cukup tinggi di Kabupaten Aceh Utara, mengingat nilai budaya lokal yang memiliki nilai ekonomi jika mampu dikelola dengan profesional sehingga mampu menarik wisatawan agar berkunjung pada lokasi-lokasi wisata. Beberapa potensi budaya dan pariwisata yang ada yaitu potensi pariwisata alam dan potensi pariwisata budaya yang dikembangkan melalui berbagai program kegiatan seperti program pengembangan destinasi pariwisata, program pengelolaan keragaman budaya dan lain-lain. Potensi budaya yaitu sejarah, adat istiadat, seni dan pelaku seni perlu dikembangkan potensi yang dimiliki untuk menarik arus wisata baik wisatawan domestik dan manca negara. Jumlah wisatawan yang berkunjung pada potensi pariwisata di Kabupaten Aceh Utara sebagai berikut :

Tabel 2.83
Jumlah Wisatawan Tahun 2012-2016

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Wisatawan	15.921	27.152	29.867	20.811	111.038

Sumber : Dinas Pemuda,Olah Raga dan Pariwisata Tahun 2016

C. Pertanian

Pasca era bonanza migas pembangunan lebih difokuskan pada sektor pertanian, terutama di sub sektor pertanian tanaman pangan. Dengan luas baku sawah 45.485 ha merupakan potensi untuk pengembangan komoditi-komoditi unggulan daerah.Selama beberapa tahun terakhir, daerah ini mengembangkan sejumlah tanaman pangan seperti padi, kedelai, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar.

Tabel.2.84
Perkembangan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2012-2016

No.	Komoditi	Tahun (Ton)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Padi	407.716,14	387.180,31	389.945,41	365.618,27	314.168,38
2	Kedelai	3.232,64	2.812,45	7.882,97	9.424,59	10.123,28
3	Jagung	1.445,41	1.078,75	1.923,40	8.250,99	15.604,01
4	Kacang Tanah	705,73	229,94	174,55	248,75	248,75
5	Ubi Kayu	7.367,35	4.768,55	4.655,67	69,08	69,08
6	Ubi Jalar	499,21	348,17	400,10	4.552,02	4.552,02
7	Kacang Hijau	122,12	65,79	54,80	416,74	416,74

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman dan Pangan Tahun 2017

Tabel 2.85
Perkembangan Populasi Ternak
di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016

NO	JENIS TERNAK	TAHUN (EKOR)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Sapi	90.387	92.195	92.365	96.982	98.238
2	Kerbau	4.510	4.601	5.168	5.426	5.516
3	Kambing	137.937	138.254	70.113	73.621	75.600
4	Domba	50.560	52.119	12.998	13.652	14.024
5	Ayam Buras	587.396	587.925	253.914	265.794	837.256
6	Ayam Pedaging	383.606	421.967	842.718	926.996	3.881.396
7	Itik	300.243	371.098	1.932.377	171.258	359.639

Sumber : Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017

Dari Tabel di atas terlihat bahwa, secara umum perkembangan populasi ternak besar seperti sapi dan kerbau mengalami peningkatan populasi sejak tahun 2013 hingga 2015. Adapun persentase pertumbuhan populasi ternak besar sapi adalah 0,18 persen atau 170 ekor pada tahun 2014 dan 4,98 persen atau 4.617 ekor pada tahun 2015.

Untuk ternak unggas, berdasarkan Tabel di atas terjadi peningkatan populasi yang cukup tinggi pada ternak ayam buras dan ayam pedaging. Tingkat pertumbuhan populasi ayam buras pada tahun 2015 sebesar 4,68 persen atau 11.880 ekor, sedangkan pertumbuhan populasi ayam pedaging pada tahun 2015 adalah 10,00 persen atau 84.279 ekor.

Sub sektor perkebunan pada hakekatnya memiliki multifungsi dalam mendukung kehidupan masyarakat saat ini diantaranya (1) Fungsi ekonomi yaitu sebagai sumber pendapatan petani, menjamin tersedianya bahan baku industri berbasis produk, serta mendukung pengembangan agrowisata. (2)

Fungsi ekologis yaitu mendukung upaya konservasi, produksi oksigen dan reservoir air saat musim kemarau serta (3) Fungsi sosial sebagai penyedia lapangan kerja bagi sebahagian besar masyarakat pedesaan, sekaligus mencegah terjadinya urbanisasi

Tabel 2.86
Perkembangan Areal Komoditi Perkebunan Rakyat
Kabupaten Aceh UtaraTahun 2012-2016

NO	KOMODITI	TAHUN (Ha)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Karet	8.254	8.419	8.605	9.119	8.810
2	Kelapa Sawit	16.829	17.064	17.251	17.769	17.998
3	Kelapa Dalam	15.246	15.246	15.276	18.088	15.311
4	Kepala Hibrida	419	419	419	419	419
5	Kopi	975	975	4.975	4.985	2.627
6	Cengkeh	190	190	190	190	190
7	Pala	148	148	148	162	163
8	Pinang	12.267	12.267	12.267	12.267	12.275
9	Kapuk Randu	331	331	331	331	331
10	Kakao	8.602	8.962	9.143	7.373	9.216
11	Kemiri	713	713	713	713	715
12	Lada	19	19	19,5		
13	Sagu	717	692	687	687	689
14	Aren	467	467	467	467	467
15	Nilam	132	65	70	72	72
16	Tebu	49	65	70	72	72
17	Tembakau	-	-	51	35	35

Sumber : Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017

Bila dilihat dari tabel perkembangan areal komoditi perkebunan rakyat terutama komoditi unggulan kelapa sawit terjadi peningkatan, pada tahun 2012 seluas 16.829 ha menjadi 17.998 ha pada tahun 2016. Untuk komoditi karet terjadi penurunan dari 9.119 ha tahun 2015 menjadi 8.810 ha pada tahun 2016. Pada umumnya untuk komoditi perkebunan rakyat rata-rata mengalami peningkatan luasan dalam perkembangannya, hal ini dapat dilihat pada tabel di atas.

Tabel 2.87
 Produksi Komoditi Perkebunan Rakyat
 Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016

NO	KOMODITI	TAHUN (Ton)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Karet	4.471	4,472	4,483	4,483	4.485
2	Kelapa Sawit	163.178	163,150	163,948	165,624	166.696
3	Kelapa Dalam	10.297	10,295	10,294	10,294	10.297
4	Kepala Hibrida	300	297	299	285	285
5	Kopi	190	187	1,042	1,042	972
6	Cengkeh	7,7	8	7,6	8	8
7	Pala	34,4	28	43,6	35	35
8	Pinang	7.745	6,921	7,733	8.239	4.253
9	Kapuk / Randu	216	216	210	210	210
10	Kakao	3.057	3,222	3,263	3,264	3269
11	Kemiri	502	499	429	429	504
12	Lada	6,2	6	6,1	6,1	7
13	Sagu	145	146	144	144	175
14	Aren	331	331	326	326	327
15	Nilam	15,2	9	9	8	8
16	Tebu	22	26	26	29	29
17	Tembakau	-	150	155	200	200

Sumber : Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017

Produksi komoditi perkebunan rakyat terutama komoditi unggulan seperti karet dan kelapa sawit mengalami peningkatan. Produksi karet pada tahun 2012 sebesar 4.471 ton naik menjadi 4.485 ton pada tahun 2016. Sedangkan komoditi kelapa sawit produksi tahun 2012 sebesar 163.178 ton menjadi 166.696 ton pada tahun 2016. Produksi perkebunan dari tahun 2012 sampai tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di atas.

D. Perindustrian dan Perdagangan

1. Sektor Industri Pengolahan

Peran sektor industri pengolahan terhadap pembentukan ekonomi di Kabupaten Aceh Utara hanya dipengaruhi oleh sub sektor industri tanpa migas. Peranan sektor industri pengolahan terhadap total nilai PDRB terus mengalami fluktuatif, tetapi mengalami peningkatan yang positif daritahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Peningkatan tersebut tumbuh sebesar 2.616,02 Milyar atau sebesar 16,57 persen. Ini menandakan bahwa sektor industri juga mempunyai peranan atau kontribusi terhadap PDRB ADBH di Kabupaten Aceh Utara.

Tabel 2.88
 Perkembangan Capaian Sektor Perindustrian
 di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 – 2016
 (Rp. Milyar)

No	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Tanpa Migas	2.884,65	2.664,43	2.696,01	2.811,31	2.393,18
2	Persentase Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHB	25,68	22,46	21,04	27,67	16,52
3	Jumlah PDRB tanpa migas ADHB	11.228,89	11.859,04	12.813,57	13.773,00	14.481,78

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015

2. Perdagangan

Peran sektor perdagangan terhadap pembentukan ekonomi di Aceh Utara dapat dilihat pada Tabel 2.88 berikut :

Tabel 2.89
 Perkembangan Capaian Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
 di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 – 2016(Rp. Milyar)

No	Kontribusi Sektor Perdagangan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Tanpa Migas	1.380,55	1.537,10	1.663,93	1.827,35	2.062,99
2	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB	12,00	12,00	12,98	13,00	14,24
3	Jumlah PDRB tanpa migas ADHB	11.228,89	11.859,04	12.813,57	13.773,00	14.481,78

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015

Pola pertumbuhan sektor ini dalam kurun waktu lima tahun terakhir memperlihatkan kecendrungan naik untuk tiap tahunnya. Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sektor tersebut tumbuh sebesar 813,94 Milyar atau mengalami peningkatan kontribusi sebesar 92.33 persen, tetapi kalau dilihat dari persentase kontribusi terhadap PDRB tanpa migas ADBH mengalami kondisi yang berfluktuatif, bahkan pada tahun 2014 mengalami penurunan dari 13,12 persen menjadi 12,96 persen atau turun sebesar 0,16 persen.

3. Ekspor dan Impor

Ekspor bersih perdagangan terjadi fluktuatif dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Pada tahun 2010 ekspor bersih perdagangan mengalami peningkatan sebesar 28,89 persen, sedangkan untuk tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 11,03 persen. Untuk tahun 2012 mengalami kenaikan kembali secara signifikan yaitu sebesar 127,34 persen. Untuk surplus perdagangan pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.581.576.169,45 atau mengalami kenaikan sebesar 114,14 persen.

Tabel 2.90
Ekspor Bersih Perdagangan di Kabupaten Aceh Utara

	2012	2013	2014	2015	2016
Nilai Ekspor	1.245.159.885,21	705.529.565	408.491.712	370.776.050	241.799.192
Nilai Impor	579.473.593	30.344.438	11.735.512	96.267.420	3.641.503
Surplus Perdagangan	665.686.291	675.185.126	396.756.199	274.508.630	238.157.688

Sumber : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Lhokseumawe Tahun 2017

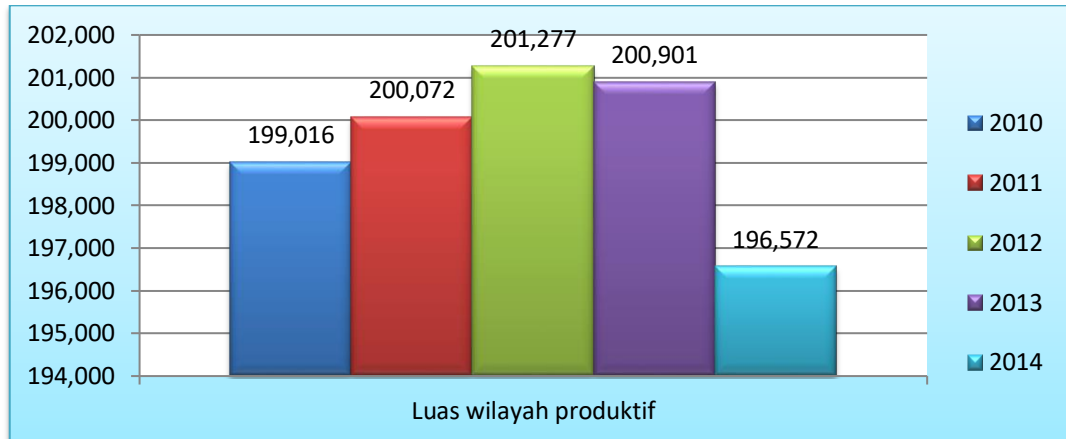
2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Fasilitas Wilayah Infrastruktur

Luas wilayah Kabupaten Aceh Utara yang tercatat adalah 3.296,86 km², atau 329.686 Ha. Dengan panjang garis pantai 51 km, dan kewenangan kabupaten adalah sampai 4 mil laut, maka luas wilayah laut kewenangan ini adalah 37.744 Ha atau 3.774,4 km².

Luas wilayah produktif tahun 2010 seluas 199.016 ha mengalami peningkatan di tahun 2012 yaitu seluas 201.277 ha. Pada tahun 2013 dan 2014 luas lahan produktif mengurangi penurunan menjadi 196.572 ha. Berkurangnya lahan produktif disebabkan adanya alih fungsi lahan.

Gambar 2.26
Luas Wilayah Produktif di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2010-2014



Sumber : BPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015

2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi

Untuk menciptakan realisasi investasi yang berkesinambungan diperlukan sebuah iklim investasi yang kondusif dalam perekonomian adalah harapan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat. Penciptaan investasi yang kondusif tidak hanya dipandang berdasarkan faktor ekonomi saja, seperti: suku bunga, inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB) dan lain-lain. Namun demikian faktor-faktor non ekonomi juga sangat mempengaruhi terhadap iklim investasi seperti : perizinan usaha, kestabilan politik, ketersediaan infrastruktur yang memadai, ketersediaan lahan untuk investasi, kepastian hukum dan tingkat kriminalitas dalam masyarakat.

Iklim investasi yang kondusif terjadi apabila didukung oleh pemerintah daerah, swasta, masyarakat maupun stakeholder terkait lainnya. Untuk dapat meningkatkan kegiatan ekonomi daerah, baik yang berskala besar maupun berskala kecil (Ekonomi kerakyatan), sehingga dapat mendongkrak pendapatan pemerintah daerah melalui pajak dan retribusi daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran melalui perluasan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia

A. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Kualitas tenaga kerja di Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan tingkat pendidikan. Jumlah lulusan S1/S2/S3 terus meningkat dari tahun 2011-2014, namun pada tahun 2015 mengalami penurunan. Rasio lulusan S1/S2/S3

merupakan jumlah lulusan S1/S2/S3 dibagi dengan jumlah penduduk dan dikali 10.000. Rasio lulusan S1/S2/S3 sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.90

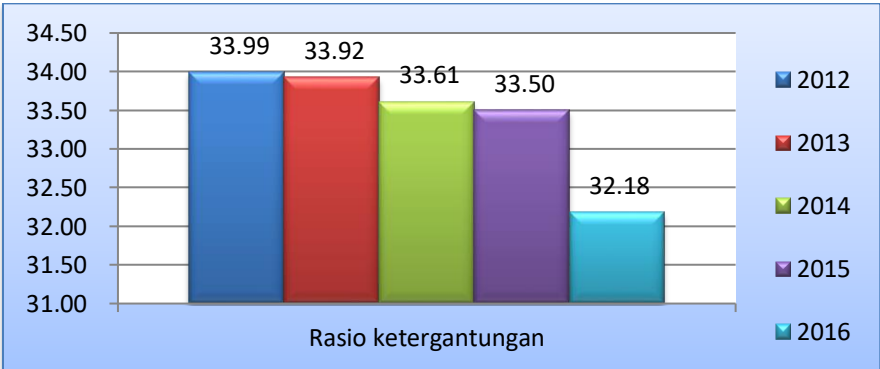
Tabel 2.91
Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2008-2012

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Lulusan S1/S2/S3	Rasio Lulusan S1/S2/S3
2012	549.370	11.817	215
2013	556.566	16.290	293
2014	572.961	16.860	294
2015	583.892	16.566	284
2016*	595.588	16.956	276

B. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Tingkat ketergantungan penduduk di Kabupaten Aceh Utara kurun waktu 2011-2015 menunjukkan angka yang berfluktuatif, sebagaimana pada Gambar 2.27.

Gambar 2.27
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2012-2016



Tabel 2.92
 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
 Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
 Kabupaten Aceh Utara

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
1.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1.	<i>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</i>							
1.1.1.	<i>Otononomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</i>							
1.1.1.1.	Pertumbuhan PDRB (ADHK)							
	- Pertumbuhan PDRB Migas	1,59	(1,74)	(3,47)	(11,48)	0,89	BPS	
	- Pertumbuhan PDRB Non Migas	5,38	3,30	4,39	4,69	3,27	BPS	
1.1.1.2.	Laju Inflasi	2,44	8,27	8,53	2,44	5,60	BPS	
1.1.1.3.	PDRB Perkapita (juta rupiah)							
	- PDRB Perkapita ADHB Migas	35,94	36,08	34,95	28,06		BPS	
	- PDRB Perkapita ADHB Non Migas	20,44	21,31	22,52	23,68		BPS	
	- PDRB Perkapita ADHK Migas	33,04	32,04	30,05	26,10		BPS	
	- PDRB Perkapita ADHK Non Migas	18,79	19,16	19,43	19,96		BPS	
1.1.1.4.	Indeks Gini							
1.1.1.5.	Pemerataan Pendapatan							
1.1.1.6.	Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional							
1.1.1.7.	Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan	78,48	79,66	80,42	80,80	80,54	Persen	sesuai (=)
1.1.1.8.	Angka Kriminalitas Tertangani						Kasus	
1.2.	<i>Fokus Kesejahteraan Masyarakat</i>							
1.2.1	<i>Pendidikan</i>							
1.2.1.1	Angka Melek Huruf	90,50	90,47	94,89	92.24	95,39	SPM persen	sesuai (=)
1.2.1.2	Angka Rata Rata Lama sekolah	7,69	7,83	8,06	8,07	8,09	tahun	Belum tercapai (<)
1.2.1.3	Angka Partisipasi Kasar	89,18	88,43	87,97	86,35	85,52	persen	sesuai (=)
1.2.1.4	Angka Pendidikan yang ditamatkan	29,91	30,75	29,56	29,84	25,21	siswa	sesuai (=)
1.2.1.5	Angka Partisipasi Murni	68,64	69,99	68,87	71,72	64,57	persen	sesuai (=)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
1.2.2	Kesehatan						SPM	
1.2.2.1	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	99,4	99,1	98,8	99,3	99,8	90%	Terlampau (>)
1.2.2.2	Angka Usia Harapan Hidup	68,50	68,90	70,00	70,40	72	72	Belum tercapai (<)
1.2.2.3	Persentase Balita Gizi Buruk	0,327	0,199	0,137	0,159	0,107	<5%	Terlampau (>)
1.3.	Fokus Seni Budaya dan Olah Raga							
1.3.1	Kebudayaan							
1.3.1.1	Jumlah grup kesenian	95	75	75	75		grup	Sesuai (=)
1.3.1.2	Jumlah Gedung	1	1	1	1	1	unit	sesuai (=)
1.3.2	Pemuda dan Olah Raga							
1.3.2.1	Jumlah klub olahraga	32	32	32	32		klub	sesuai (=)
1.3.2.2	Jumlah gedung olahraga	1	1	1	1		unit	sesuai (=)
2.	ASPEK PELAYANAN UMUM							
2.1.	Fokus Layanan Urusan Wajib							
2.1.1.	Pendidikan							
2.1.1.1.	Pendidikan Dasar						SPM	
2.1.1.1.1	Angka partisipasi sekolah	91,54	97,72	95,17	94,26	83,49	90%	Belum tercapai (<)
2.1.1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	39,59	40,64	41,32	42,44	55,17	50/100 00	Terlampau (>)
2.1.1.1.3.	Rasio guru/murid	11,63	10,98	11,02	11,07	7,87	1 guru / 32 murid	Terlampau (>)
2.1.1.1.4.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	9,11	9,11	9,66	9,35	5,41	6 guru / 1 sekolah	Terlampau (>)
2.1.1.1.2.	Pendidikan Menengah						SPM	
2.1.1.1.2.1.	Angka Partisipasi Sekolah	63,43	68,23	67,86	67,15	67,83	60%	Terlampau (>)
2.1.1.1.2.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	242	230	213	266	270	100%	Terlampau (>)
2.1.1.1.2.3.	Rasio guru terhadap murid	11,95	11,51	10,72	9,81	7,87		Terlampau (>)
2.1.1.1.2.4.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	2,75	2,69	2,55	3,22	5,58		Terlampau (>)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.1.1.3.	Fasilitas Pendidikan						SPM	
2.1.1.1.3.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	402	406	408	407	409	unit	sesuai (=)
2.1.1.1.3.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	224	246	266	260	270	unit	sesuai (=)
2.1.1.1.4.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						SPM	
2.1.1.1.4.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	19,60	30,18	57,27	63,14		persen	sesuai (=)
2.1.1.1.5.	Angka Putus Sekolah						SPM	
2.1.1.1.5.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	1,04	0,09	0,08	0,04	0,06	1% dari jml siswa bersekolah	Terlampau (>)
2.1.1.1.5.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	9,01	1,89	0,13	0,23	0,17	1% dari jml siswa bersekolah	Terlampau (>)
2.1.1.1.5.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,38	0,39	0,27	0,25	0,39	1% dari jml siswa bersekolah	Terlampau (>)
2.1.1.1.6.	Angka Kelulusan						SPM	
2.1.1.1.6.1.	Angka kelulusan (AL) SD/MI	11.560	12.442	12.462	11.708	94,81	siswa	sesuai (=)
2.1.1.1.6.2.	Angka kelulusan (AL) SMP/MTs	8.275	8.884	8.174	8.629	87,53	siswa	sesuai (=)
2.1.1.1.6.3.	Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	6.161	5.936	6.785	6.816	73,16	siswa	sesuai (=)
2.1.1.1.6.4.	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	96,51	98,79	96,40	98,82	104,99	95%	Terlampau (>)
2.1.1.1.6.5.	Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	99,41	85,76	92,30	92,61	75,31	25%	Terlampau (>)
2.1.1.1.6.6.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	6.524	7.202	8.034	11.207	6,823	guru	Terlampau (>)
2.1.2.	Kesehatan						SPM	
2.1.2.1.	Rasio Posyandu per-satuan balita	1/56	1/59	1/58	1/70	1/55	1/60-100 balita	sesuai (=)
2.1.2.2.	Rasio puskesmas, pustu per satuan penduduk	0,057/0,145	0,055/0,152	0,055/0,152	0,054/0,150	0,05/0,144	1/30.000 dan 3/30.000	Belum tercapai (<)
2.1.2.3.	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	1,90	1,80	1,80	1,80			
2.1.2.4.	Rasio dokter per satuan penduduk	0,16	0,22	0,167	0,113	0,090	40/100.000 penduduk	Belum tercapai (<)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.2.5.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,16	0,22	0,167	0,113	0,090	40/100.000 penduduk	Belum tercapai (<)
2.1.2.6.	Cakupan kompilasi kebidanan yang ditangani	45,85	49,30	60,00	95,00	80	80%	Terlampaui (>)
2.1.2.7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	85,87	80,46	85,69	88,15	84	90%	Belum tercapai (<)
2.1.2.8.	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	77,3	78,0	70	62	60,5	100%	Belum tercapai (<)
2.1.2.9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	28,49	23,81	100	100	100	100%	sesuai (=)
2.1.2.10.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	40,94	50,17	44,08	97	91	100%	Belum tercapai (<)
2.1.2.11.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100%	sesuai (=)
2.1.2.12.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	50	100	100	100	100	100%	sesuai (=)
2.1.2.13.	Cakupan kunjungan bayi	92,69	98,78	94,83	98,29	98,7	90%	Terlampaui (>)
2.1.2.14.	Cakupan puskesmas	114,81	114,81	114,81	115	114,81	100%	Terlampaui (>)
2.1.2.15.	Cakupan puskesmas pembantu	9,3	9,7	10	10,8	10	100%	Belum tercapai (<)
2.1.2.16.	Angka Kematian Bayi	5,93	8,22	11,12	7	1	<23%	Terlampaui (>)
2.1.2.17.	Angka Kematian Ibu	150,6	137,0	258,1	127	198	<102	Belum tercapai (<)
2.1.3.	Pekerjaan Umum							
2.1.3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	39,12	43,32	52,84	41,00	48,09	60%	Belum tercapai (<)
2.1.3.2	Rasio Jaringan Irigasi	1:89	1:86	1:11	1 : 11	1:12		
2.1.3.3	Jumlah tempat ibadah	3.912	3.925	4.089	4.069			
2.1.3.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	46,96	48,92	51,23	55,75	53,33	100%	Belum tercapai (<)
2.1.3.5	Rasio rumah layak huni	0.19	0,19	0,19	0,20	0,20		
2.1.3.6	Panjang jalan di lalui roda 4	61,21	66,83	79,64	77,93	71,69		
2.1.3.7	Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)	54,29	54,29	54,29		-		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.3.8	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	61,21	66,83	79,64	77,93	71,69	60%	Terlampau (>)
2.1.3.9	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	7,54	7,89	8,23	8,57	8,54		
2.1.3.10	Sempadan jalan yang di pakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	24,75	24,69	24,60	23,37	23,16		
2.1.3.11	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	14,3	14,2	20,0	20,1	20		
2.1.3.12	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	36,5	39,4	32,5	33,75	34,7	70-79%	Belum tercapai (<)
2.1.4.	Perumahan							
2.1.4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih	56,96	59,85	60,24	60,76	61,82	100%	Belum tercapai (<)
2.1.4.3.	Rumah tangga bersanitasi	46,96	48,92	51,23	53,98	55,75		
2.1.4.4.	Lingkungan pemukiman kumuh	2,23	9,58	9,58	9,58	-	<10%	Terlampau (>)
2.1.4.5.	Rumah layak huni	82,25	84,42	83,19	83,21	85,00		
2.1.5.	Tata Ruang							
2.1.5.1.	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	0,86	0,30	0,30	0,30	0,30	25%	Belum tercapai (<)
2.1.6.	Perhubungan							
2.1.6.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	3.571.152	3.543.121	1.762.450	879.720	-		
2.1.6.2	Rasio ijin trayek							
2.1.6.3	Jumlah uji KIR angkutan umum	4.547	4.240	4.315	4.363	4401		
2.1.6.4	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus	5	5	5	5	5		
2.1.6.5	Angkutan darat	1,72	1,72	1,71	1,74	1,74		
2.1.6.6	Kepemilikan KIR angkutan umum	49,96	51,03	51,20	-	-		
2.1.6.7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	20	20	20	20	20		
2.1.6.8	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	38.222	38.222	38.222	38.222	38.222		
2.1.6.9	Pemasangan rambu-rambu	18,42	22,57	12,24	15,02	-	100%	Belum tercapai (<)
2.1.7.	Lingkungan Hidup							
2.1.7.1	Persentase penanganan sampah	29,00	34,42	13,48	15,28	21,49	70%	Belum tercapai (<)
2.1.7.2	Pencemaran status mutu air	0,20	0,13	0,10	0,10	0,10		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.7.3	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	100	100	100	100	100		
2.1.8.	Kependudukan dan Catatan Sipil							
2.1.8.1	Kepemilikan KTP	95,68	98,25	98,25			100%	Belum tercapai (<)
2.1.8.2	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	21	71					
2.1.8.3	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada			
2.1.8.4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Ada	Ada	Ada	Ada			
2.1.9.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera						SPM	
2.1.9.1	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	3	3	3	3			
2.1.9.2	Rasio Akseptor KB	81,30	80,46	79,09	69,26			
2.1.9.3	Cakupan peserta KB aktif	63,53	64,78	64,52	69,26		80%	Belum tercapai (<)
2.1.9.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	68,28	66,70	63,09	63,09			
2.1.10.	Ketenagakerjaan						SPM	
2.1.10.1	Angka partisipasi angkatan kerja	60,20	62,09	55,88	55,65		100%	
2.1.10.2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	50,36	50,36	0	1,6		50%	
2.1.10.3	Tingkat partisipasi angkatan kerja	60,20	62,09	55,88	55,65		100%	Terlampaui (>) Belum tercapai (<)
2.1.10.4	Pencari kerja yang ditempatkan	0,01	0,09	0,01	0,17		70%	
2.1.10.5	Tingkat pengangguran terbuka	15,47	17,97	13,58	17,05			
2.1.11.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
2.1.11.1	Persentase koperasi aktif	33,52	35,15	31,02	26,02			
2.1.11.2	Usaha Mikro dan Kecil	99,13	99,13	99,27	99,08			
2.1.12.	Penanaman Modal							
2.1.12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	33	33	33			usaha	
2.1.12.2	Rasio daya serap tenaga kerja	84,53	82,03	86,42	82,95		persen	
2.1.13.	Kebudayaan							
2.1.13.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	1	1	1		kali	
2.1.13.2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	2	2	2	2		unit	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.13.3	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	23	75	75	76		persen	
2.1.14.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
2.1.14.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	-	1	1	-	1	4 kali/ Tahun	
2.1.14.1.	Kegiatan pembinaan politik daerah	1	1	1	1	1	Kali	
2.1.15.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
2.1.15.1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1,26	1,26	4,33	4,14			
2.1.15.2	Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk			0,2496	0,2496			
2.1.15.3	Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan							
2.1.15.4	Pertumbuhan ekonomi (Non Migas)	5,38	3,30	4,39	4,69			
2.1.15.5	Kemiskinan	21,57	20,34	19,58	19,20			
2.1.15.6	Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah	Ada	Ada	Ada	Ada			
2.1.15.7	Penegakan Perda							
2.1.15.8	Cakupan patroli petugas Satpol PP	15	15					
2.1.15.9	Tingkat penyelesaian penyelenggaraan K3(Ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten						70%	
2.1.15.10	Petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten	-	-	2.496	2.496		Petugas	
2.1.15.11	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	-	-	-				
2.1.15.12	Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	-	-	-				
2.1.15.13	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik	-	-	-				
2.1.15.14	Sistem informasi Manajemen Pemda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		sesuai (=)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.15.15	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	-	-	-				
2.1.16.	Ketahanan Pangan							
2.1.16.1.	Regulasi ketahanan pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		sesuai (=)
2.1.16.1.	Ketersediaan pangan utama	488,21	480,80	687,98	458,7			sesuai (=)
2.1.17.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
2.1.17.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	7,73	8,86	31,74	31,74		persen	sesuai (=)
2.1.17.2	PKK Aktif	516	518	499	698		PKK	sesuai (=)
2.1.17.3	Posyandu Aktif	481	486	931	952		Posyan du	sesuai (=)
2.1.18.	Statistik							
2.1.18.1	Buku Kabupaten Dalam Angka	ada	ada	ada	ada	ada	unit	sesuai (=)
2.1.18.2	Buku PDRB Kabupaten	ada	ada	ada	ada	ada	unit	sesuai (=)
2.1.19.	Perpustakaan							
2.1.19.1	Jumlah perpustakaan	16	16	16	52		unit	Belum tercapai (<)
2.1.19.2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	100	95,96	100	96		persen	Terlampau (>)
2.1.19.3	Koleksi buku yang tersedia dipergustakaan daerah	40,21	49,16	53,12	56,87		persen	Terlampau (>)
2.2.	Fokus Layanan Urusan Pilihan							
2.2.1.	Pertanian							
2.2.1.1	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	19,83	21,25	23,71	31,10		persen	
2.2.1.2	Kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB	14,06	15,01	17,15	22,34		persen	
2.2.2	Kehutanan							
2.2.2.1	Kerusakan kawasan hutan	7,94	14,63	14,74	14,74		persen	
2.2.2.2	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	0,30	0,33	0,35	0,43		persen	
2.2.3	Energi dan Sumberdaya Mineral							
2.2.3.1	Pertambangan Tanpa izin						persen	
2.2.3.2	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	43,92	41,11	36,37	24,74		persen	
2.2.4	Pariwisata							
2.2.4.1	Kunjungan wisata	15.921	27.152	29.867	20.811			

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.5	<i>Kelautan dan Perikanan</i>						SPM	
2.2.5.1	Produksi perikanan	20.412	24.203	24.109	27.635		ton	sesuai (=)
2.2.5.2	Konsumsi Ikan	99,53	93,57	97,37	106,53		persen	sesuai (=)
2.2.5.3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	12,14	47,14	45,71	49,29		persen	
2.2.6	<i>Perdagangan</i>							
2.2.6.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	7,07	7,76	8,67	10,41		Persen	
2.2.7	<i>Perindustrian</i>							
2.2.7.1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	14,04	13,13	13,66	16,42		persen	
3.	ASPEK DAYA SAING							
3.1	<i>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</i>							
3.1.1	<i>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</i>							
3.1.1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per kapita							
3.1.1.2	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita							
3.1.1.3	Produktivitas total daerah							
3.1.2	<i>Pertanian</i>							
3.1.2.1	Nilai tukar petani							
3.2	<i>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</i>							
3.2.1	<i>Perhubungan</i>							
3.2.1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	-	-	-				
3.2.1.2	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	-	-	-				
3.2.1.3	jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun	-	-	-				
3.2.2.	<i>Penataan Ruang</i>							
3.2.2.1	Ketaatan terhadap RTRW							
3.2.2.2	Luas wilayah produktif	134.965	141.873	141.574	141.130		ha	Sesuai (=)
3.2.2.3	Luas Wilayah Industri	263	263	263	263		ha	Sesuai (=)
3.2.2.4	Luas wilayah banjir	-	4039,74	31.361	21.489		ha	
3.2.2.5	Luas wilayah kekeringan						ha	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
3.2.2.6	Luas wilayah perkotaan	5.620	5.620	5.620	5.620		ha	
3.2.4	Lingkungan Hidup							
3.2.4.1.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	56,96	59,85	61,82	62,98		persen	Belum tercapai (<)
3.2.5	Komunikasi dan Informatika							
3.2.5.1	Rasio Ketersediaan daya listrik							
3.2.5.2	Persentase Rumah tangga yang menggunakan listrik	92,38	92,38	92,38	92,50		persen	Belum tercapai (<)
3.2.5.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telpon							
3.3	Fokus Iklim Berinvestasi							
3.3.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
3.3.1.1	Angka kriminalitas							
3.3.1.2	Jumlah demo							
3.3.1.3	Lama proses perijinan							
3.3.1.4	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah							
3.3.1.5	Jumlah Perda yang mendukung Iklim usaha							
3.3.1.6	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa							
3.4	Fokus Sumberdaya Manusia							
3.4.1	Ketenagakerjaan							
	Rasio Lulusan S1/S2/S3	215	293	294	284			
	Rasio ketergantungan	33,99	33,92	33,61	33,50		persen	

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBK

Pelaksanaan keuangan daerah Kabupaten Aceh Utara tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target APBK dan realisasinya, maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung. Secara umum gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2012-2016 menunjukkan peningkatan kinerja. Hal ini dapat dilihat dari penilaian BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2015 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

A. Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, hal utama yang harus diperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai program/kegiatan pembangunan daerah. Kemampuan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pengelompokan masing-masing jenis pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenis pendapatan terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, zakat dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana transfer khusus.
3. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari Dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan dana Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

B. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah terdiri dari beberapa komponen, yaitu :

1. Belanja Tidak Langsung (BTL) yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, Belanja Bagi

Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan belanja tidak terduga.

2. Belanja Langsung (BL) terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
 - a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
 - b. Pembayaran Pokok Utang

Realisasi pendapatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016 terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 19 persen. Jika dilihat dari kelompok pendapatan yang mengalami kenaikan antara lain pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah karena adanya dana otsus pada tahun 2015 dan 2016 serta adanya dana desa pada tahun anggaran 2016. Sedangkan dari sisi Pendapatan Asli Daerah juga mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan 51 persen. Rata-rata pertumbuhan belanja daerah selama periode 2012-2016 mencapai 18 persen, terdiri dari pertumbuhan Belanja Tidak Langsung sebesar 20 persen dan Belanja Langsung sebesar 15 persen. Rata-rata pertumbuhan pembiayaan sebesar 42 persen. Realisasi rata-rata pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah periode 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Aceh Utara

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN	1.260.246.258.762	1.493.268.533.998	1.755.876.485.679	1.921.139.363.919	2.415.623.274.834	17,66
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	64.481.984.261	99.930.629.292	178.550.865.625	131.690.956.711	388.973.762.275	56,72
1.1.1.	Pajak daerah	29.911.552.752	13.070.854.170	17.957.675.166	19.883.019.543	21.671.743.611	-7,74
1.1.2.	Retribusi daerah	11.099.944.020	52.079.085.316	120.242.771.918	51.154.249.742	5.912.482.340	-14,57
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	10.682.549.145	14.255.926.830	15.571.993.311	20.328.043.958	20.095.166.364	17,11
1.1.4.	Zakat	5.184.850.436	6.014.049.981	8.218.886.063	-	11.582.792.381	
1.1.5	Lain-lain PAD yang sah	7.603.087.908	14.510.712.995	16.559.539.167	40.325.643.468	329.711.577.579	156,62
1.2.	Dana Perimbangan	1.087.568.864.307	1.258.034.779.995	1.438.194.951.998	1.204.656.604.852	1.296.652.358.755	4,49
1.2.1.	Dana Transfer Umum	1.059.025.624.307	1.201.719.149.995	1.367.944.431.998	1.097.590.854.852	1.021.636.687.163	-0,89
1.2.3.	Dana alokasi khusus	28.543.240.000	56.315.630.000	70.250.520.000	107.065.750.000	275.015.671.592	76,18
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	108.195.410.194	135.303.124.711	139.130.668.056	584.791.802.356	729.997.153.804	61,17
1.3.1	Hibah	533.839.390	-	-	-	-	
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	14.000.000.000	
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)	17.232.876.804	18.038.861.711	21.874.507.654	37.552.556.304	53.508.440.421	32,74
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	80.428.694.000	101.909.263.000	117.256.160.402	192.441.150.000	532.964.060.000	60,44
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	10.000.000.000	15.355.000.000	-	132.384.928.052	129.524.653.383	

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.3.6	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat	-	-	-	222.413.168.000	-	
2	Belanja	1.212.682.531.924	1.471.191.695.466	1.704.732.393.611	1.962.749.812.611	2.429.455.210.854	18,97
2.1	Belanja Tidak Langsung	764.266.633.037	826.751.869.344	884.143.729.854	1.191.895.984.007	1.602.923.164.686	20,34
2.1.1	Belanja Pegawai	644.647.954.370	715.378.206.696	786.961.390.264	868.618.735.594	875.768.305.296	7,96
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
2.1.3	Belanja Subsidi	6.365.007.045	5.440.236.358	5.000.000.000	4.963.000.000	4.431.546.840	-8,65
2.1.4	Belanja Hibah	50.118.644.631	42.620.238.618	24.533.486.960	6.771.810.484	84.952.154.468	14,10
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	13.209.241.041	8.709.410.000	9.887.628.000	9.867.817.500	17.696.740.000	7,59
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	2.186.384.000	2.396.370.182	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	47.708.499.925	53.054.074.925	55.962.815.760	299.396.525.429	617.515.405.600	89,68
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.217.286.025	1.549.702.747	1.798.408.870	91.711.000	162.642.300	-47,96
2.2	Belanja Langsung	448.415.898.887	644.439.826.122	820.588.663.757	770.853.828.604	826.532.046.168	16,52
2.2.1	Belanja Pegawai	76.487.043.586	85.584.652.017	90.648.880.612	88.840.754.874	78.309.972.239	0,59
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	228.809.390.283	255.013.516.621	358.532.995.248	306.425.202.734	373.676.316.407	13,05
2.2.3	Belanja Modal	143.119.465.018	303.841.657.484	371.406.787.897	375.587.870.996	374.545.757.522	27,19
3	Pembiayaan	30.533.585.051	40.097.311.891	114.063.572.449	95.869.709.577	64.125.252.504	20,38
3.1	Penerimaan Pembiayaan	41.475.528.127	42.097.311.891	116.792.906.890	104.181.525.159	67.505.172.557	12,95
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	10.941.943.076	2.000.000.000	2.729.334.441	8.311.815.582	3.379.920.053	-25,45

3.1.2 Neraca Daerah

Laporan neraca daerah sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, melalui data neraca dapat diketahui tentang jumlah aset, baik aset lancar maupun aset tidak lancar serta kewajiban dan equitas dana. Selama periode 2012-2016 rata-rata pertumbuhan aset pemerintah Kabupaten Aceh Utara menurun 2,17 persen. Sedangkan rata-rata kewajiban mengalami rata-rata pertumbuhan 177,42 persen dan equitas dana mencapai minus 1,48 persen. Kondisi perkembangan neraca dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Neraca Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016

No.	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2012	2013	2014	2015	2016	(%)
1.	ASET	4.082.483.093.560	4.764.482.674.069	5.211.999.393.370	4.173.444.554.796	4.244.349.319.821	0,98
1.1.	ASET LANCAR	52.341.190.145	78.494.041.524	166.029.634.546	101.830.216.929	104.645.271.576	18,91
1.1.1.	Kas	42.097.311.892	61.952.353.890	110.367.111.518	66.990.414.457	44.913.329.436	1,63
1.1.2.	Piutang	3.511.103.681	10.479.574.313	35.278.184.200	24.720.401.454	46.328.674.356	90,59
1.1.3.	Persediaan	6.732.774.572	6.062.113.321	20.384.338.828	10.119.401.018	13.403.267.785	18,78
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG	199.323.757.462	196.052.411.745	193.247.565.678	199.345.051.101	190.932.105.437	-1,07
1.2.1.	Investasi Non Permanen	2.000.000.000	1.054.746.240	1.176.015.098	13.079.745.849	12.972.283.883	59,59
1.2.2.	Investasi Permanen	197.323.757.462	194.997.665.505	192.071.550.580	186.265.305.252	177.959.821.554	-2,55
1.3.	ASET TETAP	3.611.990.730.931	4.271.177.594.877	4.617.069.238.197	3.631.008.311.278	3.901.741.852.187	1,95
1.3.1.	Tanah	1.489.748.167.564	1.547.178.384.567	1.536.337.712.719	1.593.193.144.978	1.590.570.255.185	1,65
1.3.2.	Peralatan dan mesin	313.237.822.188	349.295.859.388	387.962.098.180	452.389.827.947	496.711.059.296	12,22
1.3.3.	Gedung dan bangunan	696.756.949.412	978.638.171.354	1.042.115.875.405	1.110.925.428.185	1.194.723.766.976	14,43
1.3.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	1.097.634.044.558	1.335.809.917.255	1.538.460.784.016	1.932.804.957.279	2.182.121.111.897	18,74
1.3.5.	Aset tetap lainnya	11.526.857.461	40.255.890.959	50.009.520.672	28.586.069.490	30.776.559.590	27,83
1.3.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	3.086.889.749	19.999.371.355	62.183.247.204	88.636.464.306	125.046.305.451	152,28
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	-	-	-	(1.575.527.580.907)	(1.718.207.206.209)	

No.	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2012	2013	2014	2015	2016	(%)
1.3.	ASET LAINNYA	218.827.415.022	218.758.625.923	235.652.954.948	241.260.975.488	47.030.090.621	-31,91
1.3.1.	Tagihan penjualan angsuran	329.415.022	260.625.923	226.876.323	193.386.547	142.497.093	-18,90
1.3.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	-	-	2.709.828.000	3.342.828.000	3.342.828.000	5,39
1.3.3.	Kemitraan dengan pihak ketiga	-	-	-	-	-	
1.3.4.	Aset tak berwujud			345.125.000	-	140.100.000	
1.3.5.	Aset lain-lain	218.498.000.000	218.498.000.000	232.371.125.625	237.724.760.941	43.404.665.528	-33,24
	JUMLAH ASET DAERAH	4.082.483.093.560	4.764.482.674.069	5.211.999.393.370	4.173.444.554.796	4.244.349.319.821	0,98
2.	KEWAJIBAN	374.587.882	13.598.971.778	8.150.030.900	29.106.783.050	162.219.235.252	356,18
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	374.587.882	13.598.971.778	8.150.030.900	29.106.783.050	162.219.235.252	356,18
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga	-	-	-	-	-	
2.1.2.	Uang muka dari kas daerah	-	-	-	-	-	
2.1.3.	Pendapatan diterima dimuka	-	-	-	73.961.686	98.450.777	
2.1.4.	Utang bunga	103.353.442	69.575.413	-	-	-	
2.1.5.	Utang belanja	-	-	-	15.321.188.856	140.288.172.952	
2.1.6.	Utang Transfer	-	-	-	-	10.534.716.413	
2.1.7.	Utang Jangka pendek lainnya	271.234.441	13.529.396.365	8.150.030.900	13.711.632.508	11.297.895.110	154,05

.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022

No.	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2012	2013	2014	2015	2016	(%)
3.	EKUITAS DANA	4.082.108.505.678	4.750.883.702.291	5.203.849.362.470	4.144.337.771.747	4.082.130.084.569	0,0001
3.1.	EKUITAS DANA LANCAR	51.966.602.262	64.895.069.746	157.879.603.646			
3.1.1.	SILPA	42.097.311.891	61.952.353.890	110.367.111.518			
3.1.2.	Cadangan piutang	3.511.103.681	10.479.574.313	35.278.184.200			
3.1.3.	Cadangan persediaan	6.732.774.572	6.062.113.321	20.384.338.828			
3.1.4.	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	(374.587.882)	(13.598.971.778)	(8.150.030.900)			
3.2.	EKUITAS DANA INVESTASI	4.030.141.903.416	4.685.988.632.545	5.045.969.758.823			
3.2.1.	Diinvestasikan dalam aset tetap	3.611.990.730.931	4.271.177.594.877	4.617.069.238.197			
3.2.2.	Diinvestasikan dalam aset lainnya	218.827.415.023	218.758.625.923	235.652.954.948			
3.2.3.	Dinvestasikan dalam investasi jangka panjang	199.323.757.462	196.052.411.745	193.247.565.678			
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	4.082.483.093.560	4.764.482.674.069	5.211.999.393.370	4.173.444.554.797	4.244.349.319.821	0,98

Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah Rasio Lancar (current rasio) dan Quick Ratio. Rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek, sedang Quick Ratio adalah jumlah aset lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan jumlah kewajiban jangka pendek. Berdasarkan formula tersebut, maka rasio likuiditas neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rasio Likuiditas Neraca Kabupaten Aceh Utara

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio Lancar	1,66	139,73	5,77	20,34	3,50
2	Rasio Cepat	0,79	121,75	5,32	17,87	1,71

A. Rasio Lancar (Current Ratio)

Rasio Lancar (Current Ratio), menunjukkan sejauh mana aktiva lancar dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek (hutang lancar), semakin besar perbandingan antar aktiva lancar dengan hutang lancar, maka semakin baik kemampuan pemerintah daerah untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Apabila rasio lancar (current ratio) 1 : 1 berarti semua aktiva dapat menutupi hutang. Rasio lancar (current ratio) dibawah 1, maka pemerintah daerah tidak lancar dalam menutupi kewajiban jangka pendek (hutang). Jika dilihat dari Tabel 3.11 tentang rasio likuiditas neraca Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2011- 2015 terhadap rasio lancar semua berat pada posisi di atas. Hal tersebut menandakan bahwa Kabupaten Aceh Utara sangat baik untuk melunasi kewajiban hutang jangka pendek.

B. Quick Ratio (Quick Ratio)

Rasio ini merupakan rasio uji cepat yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa tanpa memperhitungkan persediaan karena persediaan memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan dibandingkan dengan aset lain. Quick aset ini terdiri dari piutang dan surat-surat berharga yang dapat direalisasi menjadi uang dalam relatif pendek. Jadi intinya semakin besar rasio ini semakin cepat pemerintah daerah dalam dalam melunasi kewajiban hutang jangka pendek. Berdasarkan Tabel 3.3 bahwa hampir semua rasio cepat (quick ratio) berada pada posisi diatas 1, bahwa pada tahun 2012 rasio cepat berada pada angka 121,75, hal ini menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Utara sangat cepat dan lancar untuk melunasi kewajiban (hutang) jangka

pendek karena berada pada posisi dibawah 1, yaitu sebesar 0,79. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap asset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas berikut ini dapat dilihat pada rasio solvabilitas.

Tabel 3.4
Rasio Solvabilitas
Neraca Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011-2015

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio Kewajiban Terhadap Asset	0,28	0,009	0,29	0,44	0,01
2	Rasio Kewajiban Terhadap Ekuitas	0,29	0,009	0,30	0,44	0,01

1. Rasio Kewajiban Terhadap Asset

Rasio ini secara langsung membandingkan antara total hutang (kewajiban) dengan total asset dalam melakukan pendanaan pemerintah daerah, sehingga dapat menunjukkan kemampuan modal dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Semakin kecil rasio kewajiban terhadap asset maka semakin baik kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi semua hutang (kewajiban) terhadap kreditor namun demikian jika nilai rasio cukup besar atau berada diatas 1, maka kemampuan pemerintah daerah mulai sulit untuk melunasi hutang kepada kreditor. Berdasarkan Tabel 3.4 tentang rasio kewajiban terhadap aset menunjukkan bahwa dari tahun 2011-2015 kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara sangat baik untuk melunasi sejauh hutang kepada kreditor, karena semua berada pada kisaran angka di bawah 1.

2. Rasio Kewajiban Terhadap Ekuitas

Rasio ini secara langsung membandingkan antara total hutang (kewajiban) dengan total ekuitas, semakin kecil rasio kewajiban terhadap ekuitas maka semakin baik kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi hutang terhadap kreditor. Berdasarkan Tabel 3.4 tentang rasio kewajiban terhadap ekuitas, menunjukkan bahwa kemampuan ekuitas (modal) atau kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sangat baik untuk melunasi semua hutang terhadap kreditor. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.4, bahwa dari tahun 2011-2015 semua berada pada kisaran angka di bawah 1. Jika semakin mendekati pada posisi angka nol, maka rasio tersebut semakin baik.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah. Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana.

Analisis proporsi anggaran bertujuan untuk mendapatkan diskripsi tentang kebijakan pembelanjaan dan pembiayaan pengeluaran yang dapat digunakan dalam menentukan kebijakan di masa mendatang sebagaimana tercantum pada pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Aceh Utara 2012-2016

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase
			(Rp)	
		(a)	(b)	
1	Tahun 2012	721.134.997.956	1.223.624.475.000	58,93
2	Tahun 2013	800.962.858.713	1.473.191.695.466	54,37
3	Tahun 2014	877.610.270.876	1.707.461.728.052	51,40
4	Tahun 2015	957.459.490.468	1.971.061.628.193	48,58
5	Tahun 2016	954.078.277.535	2.432.835.130.907	39,22

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Kabupaten Aceh Utara terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SiLPA Tahun lalu, penerimaan kembali penyertaan modal, penerimaan kembali piutang dan penerimaan hutang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari SiLPA Tahun berkenaan, pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi. Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto dan selisih antara penerimaan

daerah dengan belanja daerah merupakan surplus/defisit belanja. Selama kurun waktu 2012 – 2014 APBK Aceh Utara mengalami surplus dan tahun 2015 – 2016 mengalami defisit. Terjadinya defisit pada tahun 2015 dan 2016 karena tidak tercapainya target pendapatan terutama dari dana perimbangan. Untuk menutupi defisit riil diperoleh dari sumber penerimaan pembiayaan terutama dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

Tabel 3.6
Surplus dan Defisit Riil Anggaran Kabupaten Aceh Utara

NO	Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1.260.246.258.762	1.493.268.533.998	1.755.876.485.679	1.921.139.363.919	2.415.623.274.834
	Dikurangi realisasi:					
2.	Belanja Daerah	1.212.682.531.924	1.471.191.695.466	1.704.732.393.611	1.962.749.812.611	2.429.455.210.854
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.941.943.076	2.000.000.000	2.729.334.441	8.311.815.582	3.379.920.053
	Defisit riil	36.621.783.762	20.076.838.532	48.414.757.627	(49.922.264.274)	(17.211.856.073)

Tabel 3.7
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Aceh Utara

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2012	2013	2014	2015	2016
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	-	-	-	100	100
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-

Tabel 3.8
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Aceh Utara

No.	Uraian	2012		2013		2014		2015		2016	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	42.097.311.981		61.952.353.890		104.181.525.159		67.505.172.557		44.262.985.224	
2.	Pelampauan penerimaan PAD										
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan										
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah										
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya										
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan										
7.	Kegiatan lanjutan										

3.3. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, perlu dilakukan analisis kerangka pendanaan yang bertujuan untuk menghitung total kapasitas riil keuangan daerah yang nantinya akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Secara umum kebijakan keuangan daerah terdiri dari 3 (tiga) kebijakan meliputi kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi pendapatan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari 2012 sampai dengan 2016. Proyeksi pendapatan dilakukan dengan melihat rata-rata pertumbuhan selama kurun waktu tersebut. Berdasarkan hasil analisis tersebut didapatkan proyeksi pendapatan daerah mengalami rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 4,92 persen. Proyeksi pendapatan Aceh Utara tahun 2018 berjumlah sebesar Rp. 1.898.673.321.669 dan terus mengalami peningkatan menjadi Rp. 2.300.857.392.032 pada tahun 2022.

Proyeksi belanja daerah pada tahun 2018 berjumlah sebesar Rp. 1.909.398.933.334 dan untuk tahun 2022 diproyeksikan belanja daerah mencapai Rp. 2.295.857.392.032 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4,72 persen per tahun. Sedangkan proyeksi pembiayaan, pada tahun 2018 penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 10.725.611.665 untuk menutupi defisit, sedangkan pada tahun 2020 sampai dengan 2022 diproyeksikan terdapat pengeluaran pembiayaan. Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Utara tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.9
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	PENDAPATAN	1.898.673.321.669	2.181.920.429.443	2.218.250.147.380	2.258.583.693.085	2.300.857.392.032	4,92
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	290.698.548.452	257.403.922.483	271.696.210.281	289.533.964.244	309.466.668.614	1,58
1.1.1.	Pajak daerah	25.108.809.000	25.837.689.900	28.421.458.890	31.263.604.779	34.389.965.257	8,18
1.1.2.	Retribusi daerah	4.667.156.152	5.335.340.013	6.169.476.018	6.957.266.425	7.140.172.995	11,22
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	20.015.000.000	22.016.500.000	23.117.325.000	24.273.191.250	25.486.850.813	6,23
	Zakat	9.501.000.000	10.166.070.000	10.877.694.900	11.639.133.543	12.453.872.891	7,00
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	231.406.583.300	194.048.322.570	203.110.255.473	215.400.768.246	229.995.806.659	-0,15
1.2.	Dana Perimbangan	993.927.948.000	1.013.806.506.960	1.034.082.637.099	1.054.764.289.841	1.075.859.575.638	2,00
1.2.2.	Dana Transfer Umum	993.927.948.000	1.013.806.506.960	1.034.082.637.099	1.054.764.289.841	1.075.859.575.638	2,00
1.2.3.	Dana transfer khusus						
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	614.046.825.217	910.710.000.000	912.471.300.000	914.285.439.000	915.531.147.780	10,50
1.3.1	Hibah						
1.3.2	Dana darurat						
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)	51.812.242.217	58.710.000.000	60.471.300.000	62.285.439.000	63.531.147.780	5,23
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	562.234.583.000	852.000.000.000	852.000.000.000	852.000.000.000	852.000.000.000	10,95

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya						
2	BELANJA	1.909.398.933.334	2.181.920.429.443	2.216.250.147.380	2.253.583.693.085	2.295.857.392.032	4,72
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.423.831.251.407	1.711.259.092.493	1.736.615.569.806	1.757.555.959.051	1.776.994.858.027	5,70
2.1.1	Belanja Pegawai	696.838.139.018	734.259.092.493	757.615.569.806	777.555.959.051	796.994.858.027	3,41
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
2.1.3	Belanja Subsidi	2.750.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	9,82
2.1.4	Belanja Hibah	2.608.100.000	5.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	30,22
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	11.088.723.500	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	-0,20
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	1.522.714.424	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	13,20
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	707.023.574.465	952.000.000.000	952.000.000.000	952.000.000.000	952.000.000.000	7,72
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	10,67
2.2	Belanja Langsung	485.567.681.927	470.661.336.949	479.634.577.574	496.027.734.034	518.862.534.005	1,67
3	PEMBIAYAAN	10.725.611.665	-	(2.000.000.000)	(5.000.000.000)	(5.000.000.000)	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	10.725.611.665					
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-		2.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	1,50

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah. Pada bagian ini akan dikemukakan kerangka pendanaan untuk menentukan arah kebijakan umum pendapatan dan belanja daerah anggaran lima tahun yang akan datang.

Tabel 3.10
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Aceh Utara

No.	Uraian	Proyeksi				
		2018	2019	2020	2021	2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Pendapatan	1.898.673.321.669	2.181.920.429.443	2.218.250.147.380	2.258.583.693.085	2.300.857.392.032
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran Sebelumnya	10.725.611.665	-	-	-	-
	Total penerimaan	1.909.398.933.334	2.181.920.429.443	2.218.250.147.380	2.258.583.693.085	2.300.857.392.032
	Dikurangi:					
4.	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	2.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.909.398.933.334	2.181.920.429.443	2.216.250.147.380	2.253.583.693.085	2.295.857.392.032

Selanjutnya kapasitas riil kemampuan keuangan yang tersedia tersebut (Tabel 3.10) dipergunakan untuk membiayai Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I, Prioritas II, dan Prioritas III. Pengalokasian dana pada prioritas III akan dipenuhi, setelah pemenuhan dana pada prioritas I dan prioritas II terlebih dahulu. Adapun rencana pengeluaran terhadap masing-masing prioritas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Prioritas I, yaitu berkaitan dengan alokasi belanja-belanja tidak langsung, seperti belanja pengawai, tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Belanja Tidak Terduga.
- b. Prioritas II, yaitu berkaitan berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (dedicated) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD dan amanat/kebijakan Nasional yang definitif, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20 (dua puluh) persen dan kesehatan sebesar 10 (sepuluh) persen. Prioritas II juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan penjabaran belanja langsung yang terdiri dari belanja pagawai, belanja modal dan belanja barang/jasa.
- c. Prioritas III, yaitu. dengan program prioritas di tingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari masing-masing urusan/bidang urusan yang berdampak luas pada masing-masing kelompok masyarakat yang dilayani. Hal ini disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan dengan layanan dasar serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan dan administrasi perkantoran serta program pendukung lainnya untuk peningkatkan pelayanan Perangkat daerah. Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai perkembangan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022 berdasarkan masing-masing prioritas dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.11
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Aceh Utara

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.909.398.933.334	2.181.920.429.443	2.216.250.147.380	2.253.583.693.085	2.295.857.392.032
2	Prioritas I	1.423.831.251.407	1.711.259.092.493	1.736.615.569.806	1.757.555.959.051	1.776.994.858.027
3	Prioritas II	351.665.839.556	338.394.532.417	338.482.369.337	359.028.422.439	365.687.919.154
4	Prioritas III	133.901.842.371	132.266.804.532	141.152.208.237	136.999.311.594	153.174.614.851

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Kabupaten Aceh Utara untuk waktu 5 (lima) tahun mendatang menghadapi permasalahan dan tantangan baik yang bersifat lokal (daerah) maupun yang bersifat global. Berdasarkan permasalahan dan tantangan ini maka selanjutnya dituangkan ke dalam isu-isu strategis untuk memberi arahan dalam perumusan visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Utara tahun 2017-2022.

4.1. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN ACEH UTARA

Berdasarkan pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dalam kurun waktu lalu telah banyak hasil dan manfaat yang telah dapat dirasakan oleh masyarakat, juga masih terdapat berbagai permasalahan-permasalahan pembangunan di Kabupaten Aceh Utara yang memerlukan perhatian dan fokus semua pihak dalam upaya mengimbangi dinamika perubahan dalam masyarakat. Oleh karena itu permasalahan-permasalahan pembangunan yang berdimensi dan berdampak luas perlu diinventarisasi sebagai langkah awal guna penanganan strategis yang dapat dilakukan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara lima tahun mendatang.

4.1.1. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih

Tata kelola pemerintahan belum baik, tercermin dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah, kurang profesionalnya aparatur pemerintah daerah, masih lemahnya penegakan hukum dan peraturan, lemahnya kapasitas pemerintahan desa untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah, kurangnya transparansi dan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik, belum terbebasnya pemerintahan daerah dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta belum optimalnya pelayanan publik.

Struktur organisasi yang ideal juga perlu didukung oleh penempatan sumber daya aparatur yang tepat, memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal ini perlu dijaga mulai dari perekrutan, penempatan, sampai dengan pengaturan reward dan punishment.

Dalam rangka mendorong terwujudnya reformasi birokrasi maka diperlukan pengembangan dan penyempurnaan fungsi perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terintegrasi dengan sistem pengawasan dan evaluasi pengeluaran anggaran secara berkala. Oleh karena itu maka diperlukan mekanisme pemantauan kinerja setiap lembaga pemerintahan daerah.

4.1.2. Kualitas Sumber Daya Manusia masih Rendah dan belum terintegrasinya pendidikan

Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, seperti tercermin masih rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan maupun aspek lainnya yang mengutamakan manusia dalam pembangunan. Rendahnya tingkat pendidikan diperlihatkan oleh :

1. Mutu Pendidikan yang masih tertinggal dengan daerah lain di Provinsi Aceh, sehingga menjadi kendala utama dalam peningkatan kualitas anak didik, oleh karena itu perlu ditingkatkan kembali Kompetensi Tenaga Pendidik yang memiliki sertifikasi sesuai standar yang telah ditetapkan agar tingkat kelulusan dapat meningkat dan berdaya saing;
2. Belum adanya integrasi pendidikan umum dengan pendidikan Islami serta kearifan lokal;
3. Tidak adanya modul ajar sebagai Juklak dan Juknis kompetensi pendidikan dasar terintegrasi;
4. Rendahnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
5. Sebaran guru yang tidak merata menurut bidang studi di setiap kecamatan;
6. Kompetensi lulusan siswa belum memenuhi kualifikasi untuk jenjang perguruan tinggi serta dunia usaha melalui bursa tenaga kerja , sehingga masih banyak dibutuhkan sekolah kejuruan yang mampu menghasilkan kualitas lulusan untuk bersaing dalam dunia usaha dan dunia industri;
7. Masih rendahnya partisipasi jenjang pendidikan usia dini sebagai akibat masih kurangnya sarana dan prasarana serta kualitas tenaga pendidik dilembaga PAUD;
8. Masih rendahnya partisipasi peserta didik tingkat jenjang pendidikan menengah.
9. Masih rendahnya pemanfaatan potensi SDA dan potensi sumber daya buatan (teknologi)

4.1.3. Tingginya Tingkat Kemiskinan

Angka Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara selama 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Bahkan angka kemiskinan di kabupaten Aceh Utara sudah melampaui target seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini. Pada tahun 2013 target kemiskinan yang ditargetkan di dalam RPJM Kabupaten Aceh Utara sebesar 21,30 persen, sedangkan hasilnya yang di capai berada di atas target yang telah ditetapkan sebesar 20,34 persen. Begitu juga pada tahun 2015, target kemiskinan turun sampai 19,95 dan hasilnya berada di atas target, yaitu 19,20 persen. angka kemiskinan tersebut tentunya belum begitu mengembirakan, karena kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara masih berada di atas rata-rata Provinsi Aceh sudah mencapai 17,76 persen dan juga untuk angka kemiskinan secara Nasional sudah mencapai 11,47 persen.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Utara untuk beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2015 yang sudah mencapai 111,440 jiwa atau setara dengan 19,20 persen dari jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Utara sebesar 583.892 jiwa. Penurunan tersebut karena semakin baiknya kualitas hidup di Kabupaten Aceh Utara. akan tetapi pada tahun 2016 tingkat kemiskinan kembali naik menjadi 19,46 persen dari jumlah penduduk 593.492 jiwa.

4.1.4. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran Terbuka merupakan gambaran kondisi dimana seseorang benar-benar tidak memiliki pekerjaan untuk mendapatkan pendapatan sebagai hasil imbalan dari kegiatan bekerjanya Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka adalah perbandingan penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan terhadap angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Aceh Utara selama beberapa tahun terakhir berdasarkan data BPS dari tahun 2012 s.d 2016 berfluktuasi dan cenderung meningkat. Pada tahun 2013, tingkat pengangguran terbuka mencapai angka tertinggi yaitu 17,97 persen dan pada tahun 2015 sebesar 17,05 persen, sedangkan tahun 2016 kembali turun Tingkat pengangguran terbuka di Aceh Utara merupakan yang tertinggi di Aceh.

4.1.5. Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera

Angka Harapan Hidup saat lahir (*life expectancy at birth*) merupakan rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Perkembangan usia harapan hidup Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2010 sampai dengan 2014 menunjukkan kondisi positif terhadap peningkatan angka usia harapan hidup, meskipun belum mencapai angka ideal. Tahun 2011, angka harapan hidup masyarakat Aceh Utara sebesar 68 tahun, Selanjutnya, angka tersebut terus bergerak naik menjadi 70,4 tahun pada tahun 2015.

Indikator yang menunjukkan rendahnya tingkat kesehatan adalah:

- a. tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB);
- b. tingginya angka gizi buruk pada anak balita;
- c. rendahnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan;
- d. rendahnya angka aksesibilitas pelayanan kesehatan; dan
- e. masih rendahnya cakupan Sarana Air Bersih (SAB);
- f. Masih kurangnya tenaga dokter.

4.1.6. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Belum Berkembang Dengan Baik

Sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang sangat strategis dalam menunjang perekonomian daerah sekaligus mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Aceh Utara adalah terkait dengan iklim usaha yang kurang kondusif, seperti besarnya biaya transaksi akibat masih adanya ketidakpastian berusaha, persaingan pasar yang kurang sehat, terbatasnya akses kepada sumber daya produktif terutama terhadap bahan baku, permodalan, sarana dan prasarana serta informasi pasar. Di sisi lain, tantangan utama yang dihadapi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Aceh Utara adalah masih rendahnya kinerja dan produktivitas usaha dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing untuk memenuhi permintaan pasar domestik, regional dan bahkan pasar internasional. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan produktifitas dan daya saing usaha mikro kecil menengah yang berbasis agro industry, industri kreatif, dan inovatif yang didukung oleh peningkatan kapasitas kelembagaan UMKM.

4.1.7. Belum memadainya kuantitas dan kualitas infrastruktur

Kabupaten Aceh Utara mempunyai jumlah panjang jalan yang jika dibentang hampir sama dengan jarak dari Provinsi Aceh ke Provinsi Lampung sehingga menjadi persoalan yang masih sulit untuk kita selesaikan diakibatkan pendanaan yang sangat terbatas. Pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk mendorong percepatan pembangunan perekonomian daerah. Infrastruktur wilayah terdiri dari beberapa aspek yaitu infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi, serta sarana dan prasarana permukiman.

Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah serta pengikat wilayah. Aspek infrastruktur transportasi di wilayah kabupaten Aceh Utara terdiri dari transportasi darat, laut dan udara. Salah satu indikator tingkat keberhasilan penanganan infrastruktur jalan adalah meningkatnya tingkat kemantapan dan kondisi jalan. Tingkat kemantapan jaringan jalan Kabupaten Aceh Utara berada pada kondisi sedang (62 persen). Hal ini disebabkan oleh tingginya frekuensi bencana alam serta beban lalu lintas yang sering melebihi standar Muatan Sumbu Terberat (MST) serta jumlah ruas yang sangat banyak.

Pada aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi, kondisi infrastruktur yang mendukung upaya konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan sistem informasi sumber daya air, dirasakan masih belum memadai. Potensi sumber daya air di Kabupaten Aceh Utara yang besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan pertanian, industri, dan kebutuhan domestik. Bencana banjir dan kekeringan juga masih terus terjadi antara lain akibat menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung lingkungan serta tersumbatnya muara sungai karena sedimentasi yang tinggi. Selain itu, kondisi jaringan irigasi juga belum memadai.

Pada aspek infrastruktur listrik dan energi, tingkat keberhasilan penanganan listrik dapat dilihat dari rasio elektrifikasi desa dan rumah tangga. Peningkatan rasio elektrifikasi perdesaan masih terus diupayakan melalui pembangunan jaringan listrik yang bersumber dari PLN. Pada aspek

telekomunikasi, cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi belum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah. Kondisi ini dicirikan dengan adanya beberapa wilayah yang belum terlayani. Lambatnya pertumbuhan pembangunan sambungan jasa telepon kabel tetap, salah satunya disebabkan oleh bergesernya fokus bisnis penyelenggara kepada pengembangan telekomunikasi bergerak (selular). Cakupan pelayanan prasarana dasar terutama di pedesaan masih rendah sebagai akibat tingginya kerusakan prasarana yang ada. Pengembangan infrastruktur wilayah masih terkendala kepada pembebasan lahan. Pengelolaan sampah terutama di perkotaan dan pemukiman padat masih menjadi kendala sebagai akibat kurangnya lahan untuk tempat pembuangan akhir (TPA) dan sarana pendukung.

4.1.8. Kinerja Badan Usaha Milik Daerah masih rendah

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mon Pase didirikan pada tahun 1988 melalui Perda No. 7/1988. Sebelumnya berstatus Badan Pengelola Air Minum (BPAM) di mana pembangunan dan pengembangannya ditangani oleh Proyek Peningkatan Saarana Air Bersih (PPSAB) Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Sampai saat ini, penyediaan air PDAM Tirta Mon Pase kepada masyarakat masih lebih mengarah pada misi pelayanan sosial ketimbang mengejar keuntungan (profit oriented). Dengan Harga Pokok Produksi (HPP) air sebesar Rp 7,024/m³, PDAM Tirta Mon Pase kemudian menjual kepada masyarakat hanya dengan harga Rp 2,961/m³. Karena itu dalam menjalankan fungsinya PDAM harus didukung oleh subsidi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Subsidi yang diberikan setiap tahun oleh Pemkab masih belum mencukupi untuk mendukung kegiatan PDAM. Sementara menaikkan harga jual dipandang akan memberatkan masyarakat.

Sampai tahun 2016, cakupan pelayanan PDAM masih relatif rendah, baru mencapai 20.65 persen. Sementara itu, meskipun tingkat kebocoran air PDAM terus diupayakan dikurangi, sampai Oktober 2016 tingkat kebocoran juga masih cukup tinggi, yaitu 47.2 persen. Kebocoran terutama disebabkan oleh kegiatan pembangunan jalan, selokan dan gedung yang tidak berkoordinasi dengan PDAM dan pencurian air lewat sambungan pipa rumah tangga. Keterbatasan dana dan rendahnya harga jual air dari PDAM menyebabkan sulitnya PDAM meningkatkan cakupan pelayanannya dan mengurangi kebocoran air secara signifikan. Untuk meningkatkan efisiensi kerja PDAM dalam jangka panjang dan

untuk menurunkan HPP, tentunya diperlukan dukungan dana yang memadai untuk pembangunan dan peremajaan peralatan yang dimiliki PDAM.

PD Bina Usaha

Selama kurun waktu 2007-2009, perusahaan daerah yang didirikan pada tahun 1980 ini telah mendapat penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp 46,000,503,655. Meskipun demikian, hingga kini perusahaan ini belum memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PD Bina Usaha terdiri dari beberapa anak perusahaan, yaitu PT Lido Graha Hotel, PT Bina Usaha I (perkapalan), PT NAA (penerbangan) dan PT Lambartek (tekstil). Secara keseluruhan kinerja semua anak perusahaan belum menggembirakan. Meskipun demikian, PT Lido Graha Hotel memiliki potensi yang besar untuk menambah penghasilan daerah. Kinerja perusahaan ini sempat membaik di tahun 2014, sayangnya setelah itu kinerjanya kembali menurun.

Lemahnya kinerja PD Bina Usaha tidak terlepas dari belum diterapkannya good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik (meliputi akuntabilitas, transparansi, dll) dalam pengelolaan perusahaan ini. Selain itu, aspek politis cukup mewarnai penentuan direksi perusahaan daerah ini. Lewat Qanun Pemerintah Kabupaten Aceh Utara No. 2 Tahun 2007, DPRK diwajibkan terlibat dalam melaksanakan fit and proper test (uji kelayakan) terhadap direksi perusahaan ini. Untuk memperbaiki kinerja PD Bina Usaha, aspek politis dalam pengelolaan lembaga ini perlu diminimalisir. Langkah utama yang perlu ditempuh adalah mengubah Qanun No. 2 Tahun 2007 yang melibatkan pihak DPRK dalam melakukan fit and proper test terhadap direksi PD Bina Usaha. Fit and proper test mestinya dapat dilakukan oleh Dewan Pengawas PD dengan melibatkan kalangan independen seperti akademisi atau kalangan profesional. Diharapkan melalui cara ini akan terpilih figur yang memiliki kapabilitas dan komitmen tinggi. Untuk ke depan juga perlu dipikirkan keanggotaan Dewan Pengawas yang dapat mengakomodir figur yang berkompeten seperti akademisi.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sabee Meusampee

BPR Sabee Meusampee didirikan tahun 1991 dengan badan hukum PT yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (97 persen) dan

Koperasi BPD (3 persen). Bank ini pernah di bawah pengawasan Bank Indonesia pada tahun 2010 karena mengalami persoalan kredit bermasalah dan permodalan di tahun 2009.

Sejak mendapat suntikan modal sebesar Rp 3 miliar dari Pemkab Aceh Utara pada tahun 2011, bank ini kemudian berubah menjadi bank yang sehat. Bank ini mulai berperan menambah PAD Kabupaten Aceh Utara, meskipun masih dalam jumlah relatif kecil. Pada tahun 2015, bank ini memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar Rp 86,360.174. Untuk memperluas layanan dan menyediakan bunga kredit rendah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat bawah, ke depan BPR memerlukan penguatan posisi dan tambahan penyertaan modal dari pemerintah daerah. Saat ini sedang dilakukan penyusunan Qanun Perusahaan Daerah dengan badan hukum PT untuk BPR.

Selama ini, BPR Sabee Meusampee telah berperan memberi pinjaman untuk modal kerja bagi petani, nelayan dan pedagang pasar. Untuk petani, misalnya, pinjaman diberikan bagi yang memiliki luas lahan maksimum 1 ha. Pinjaman ini cukup membantu petani dan membuat mereka tidak perlu lagi berhutang pada tengkulak yang menetapkan bunga yang tinggi.

PD Pase Energy

Perusahaan daerah ini didirikan berdasarkan Qanun Pemerintah Kabupaten Aceh Utara No. 13/2010. Perusahaan ini dirancang untuk bergerak di bidang energi. Pada tahun 2014, Pemkab Aceh Utara menyertakan modal pada Pase Energy sebesar Rp 2,5 miliar. Setelah itu Pemkab tidak pernah lagi melakukan penyertaan modal.

Dulu Pase Energy direncanakan berperan dalam beberapa investasi yang berlangsung di Kabupaten Aceh Utara, seperti dari PT Perta Arun Gas (PAG) dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Dalam perjalanannya, ternyata harapan itu gagal terwujud. Tarik menariknya kepentingan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten ternyata menimbulkan hambatan.

4.1.9. Keterlibatan Peran Swasta Dalam Pembangunan Masih Rendah.

Struktur perekonomian Aceh Utara masih didominasi oleh belanja pemerintah. Partisipasi pihak swasta belum menunjukkan pengaruh yang besar terhadap pembangunan. Pihak swasta masih sangat tergantung pada anggaran

belanja pemerintah (APBN, APBA dan APBK). Dalam hal ini, pemerintah daerah sangat mengharapkan investasi swasta, baik yang bersumber dari pengusaha lokal, nasional maupun asing untuk berinvestasi di Kabupaten Aceh Utara. Oleh karena itu, sinkronisasi investasi pembangunan menjadi penting untuk tercapainya sinergi yang optimal antara berbagai pelaku ekonomi melalui pembentukan kemitraan pemerintah-swasta-masyarakat. Kemitraan tersebut ditujukan untuk mensinergikan aktivitas yang dilakukan oleh dunia usaha dengan program pembangunan daerah. Implementasi dari hubungan kemitraan dilaksanakan melalui pola-pola kemitraan yang sesuai dengan sifat, kondisi budaya dan keunikan lokal.

4.1.10. Pemanfaatan Sumber Daya Alam belum Berwawasan Lingkungan

Pengelolaan sumber daya alam belum memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan. Selain itu lingkungan hidup juga menerima beban pencemaran yang tinggi akibat pemanfaatan sumber daya alam dan aktivitas manusia lainnya yang tidak memperhatikan pelestarian lingkungan.

Beberapa permasalahan pokok dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, pertama adalah keterbatasan data dan informasi dalam kuantitas maupun kualitasnya. Keterbatasan data dan informasi yang akurat berpengaruh pada kegiatan pengelolaan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang belum berjalan dengan baik. Sementara itu, sistem pengelolaan informasi yang transparan juga belum melembaga dengan baik sehingga masyarakat belum mendapat akses terhadap data dan informasi secara memadai.

Pemanfaatan sumber daya alam alam juga mengalami persoalan yang sama, seperti pemanfaatan energi baru terbarukan, sumber daya kehutanan dan kelautan sehingga belum mampu memperkuat nilai tambah masyarakat terhadap produk yang dihasilkannya. Hal ini dapat dilihat dari sistem pengelolaan hutan, pemanfaatan sumber daya air, usaha pertambangan, usaha perkebunan, dan kelautan serta pengelolaan kawasan pesisir yang belum tepat sehingga berdampak pada kerusakan ekosistem.

Permasalahan pokok lainnya adalah kurang efektifnya pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada, yang menyebabkan kerusakan sumber daya alam. Kondisi ini ditandai dengan

maraknya pengambilan atau perambahan hutan, kebakaran hutan dan lahan, serta pertambangan tanpa izin. Permasalahan pengembangan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan sebagai berikut :

1. Tingginya tingkat deforestasi dan degradasi lingkungan hidup
2. Data dan informasi SDA belum dapat diakses publik
3. Pengawasan dan pengendalian SDA masih sangat minim terhadap *illegal logging* dan *illegal fishing*
4. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya pesisir.
5. Sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan dan SDA masih rendah
6. Pembinaan dan peran kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam perlu peningkatan.
7. Terbatasnya sumber daya pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam.
8. Belum optimalnya perlindungan kepada masyarakat terhadap pencemaran udara dan air dari limbah industri
9. Belum terintegrasi pemberian izin pemanfaatan lahan dan sumber daya alam lainnya.
10. Frekwensi bencana banjir, longsor, kekeringan, lahan kritis menjadi rona lingkungan hidup saat ini. Indikasi degradasi lingkungan semakin tampak.
11. Pembinaan dan pengembangan pembangunan berkelanjutan serta responsif kebencanaan belum terintegrasi dengan baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

4.1.11.Pemanfaatan Potensi Pariwisata masih Kurang

Potensi budaya dan keindahan alam di Kabupaten Aceh Utara belum digali dan dikembangkan sebagai potensi wisata Kabupaten Aceh Utara yang berhasil guna. Peningkatan kinerja obyek dan daya tarik wisata belum dikembangkan secara optimal, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta belum tersedianya dukungan sarana dan prasarana pariwisata dengan standar nasional. Pengembangan wisata Religi di beberapa daerah belum sepenuhnya tergarap dengan baik sehingga menarik untuk dikunjungi. Banyaknya potensi pariwisata di kabupaten Aceh Utara belum bisa dikembangkan karena masih terjadinya kesalahan pandangan dan pemahaman antara pemerintah dengan masyarakat.

4.1.12.Produktivitas Hasil Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Masih Rendah dan Agroindustri belum berkembang

Rendahnya produktivitas pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan agroindustri disebabkan tidak optimalnya

pengelolaan sumber daya air, rendahnya kualitas dan kuantitas penyuluh dan faktor produksi lainnya. Selanjutnya permasalahan yang dihadapi adalah belum berdayanya industri kecil menengah (IKM). Hal ini terjadi karena lemahnya daya saing, rendahnya mutu produk, lemahnya keterkaitan IKM dengan industri besar, keterbatasan modal (tingginya suku bunga), serta rendahnya produktivitas.

4.1.13. Belum Optimalnya Pelaksanaan Pendidikan Politik, Sosial Budaya dan Adat

Lemahnya kontrol sosial terhadap remaja, dan anak-anak sekolah sehingga berdampak kepada maraknya kaum remaja dan anak sekolah cenderung menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan ganja, secara dini perlu diantisipasi dan ditangani secara serius dan diarahkan kepada hal-hal yang positif.

Belum efektifnya peran pelaku politik, sehingga berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaku dan partai politik. Pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dalam hal ini terlihat adanya perubahan perilaku masyarakat terhadap gangguan keamanan dan stabilitas politik. Kelembagaan adat yang ada belum mempunyai peran yang signifikan untuk memperkuat sosial budaya dan adat istiadat. Belum adanya qanun yang menguatkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk perusahaan-perusahaan di wilayah pemerintah kabupaten. Pengelolaan Panti Sosial belum profesional dan terbatasnya sarana dan prasarana panti sosial. Penanganan penyandang cacat dan kusta belum terintegrasi menuju kemandirian. Masih tingginya jumlah penyandang cacat dan penyandang kusta.

Pemerintah belum fokus pada penanganan pada cagar budaya Masih banyak tinggalan arkeologis (cagar budaya) yang belum ditemukan dan diselamatkan. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kelompok seni Terbatasnya peralatan dan perlengkapan seni yang dimiliki masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan kesenian tradisional. Rendahnya aktualisasi adat istiadat dalam kehidupan masyarakat.

4.1.14.Kapasitas Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Masih Rendah.

Kemampuan keuangan daerah dari tahun ke tahun mengalami penurunan disebabkan karena menurunnya dana transfer umum bagi hasil pajak dan bukan pajak akibat berkurangnya lifting dan harga migas. Pertumbuhan ekonomi dari tahun 2012-2016 mengalami kondisi yang fluktuatif. Dimana dari tahun 2012-2013 mengalami penurunan hingga 3,03 persen. Kemudian pada tahun 2014-2015 kembali mengalami peningkatan pertumbuhan mencapai 4,69 persen dan fluktuatifnya pertumbuhan ekonomi dikarenakan terjadi perlambatan pertumbuhan pada sektor unggulan pertanian dari 4,59 persen pada tahun 2014 menjadi 3,67 persen pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi kembali melambat menjadi sebesar 3,27 persen.

4.1.15.Masih Lemahnya Pelaksanaan Penegakan Supremasi Hukum

Seiring dengan berkembangnya demokrasi di Indonesia maka terjadi perubahan-perubahan kehidupan berpolitik yang fundamental dalam pelaksanaan demokrasi, desentralisasi dan penegakan hukum. Hukum harus dilaksanakan tanpa pandang bulu, kondisi aman yang sekarang terjadi harus terus dipertahankan. Akan tetapi permasalahan tetap ada dan akan diselesaikan dalam RPJMK ini. Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran hukum yang relatif rendah
2. Subtansi hukum terutama dalam regulasi ketentuan-ketentuan Qanun dan perundang-undangan lainnya masih terjadi inkonsistensi.
3. Komitmen yang tinggi dari penyelenggara pemerintahan daerah untuk pemberantasan korupsi masih lemah.
4. Belum adanya standar operasional prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan pemerintahan yang *clean* dan *clear government*.
5. Masih adanya pungutan-peungutan liar dalam birokrasi pemerintahan.

4.1.16.Masih Kurangnya Pemberdayaan Kepemudaan, Pramuka dan Keolahragaan

Peranan pemuda sebagai agen pembangunan Aceh Utara belum diberdayakan secara maksimal, sehingga belum mampu mengisi pembangunan disegala bidang. Lemahnya peran pemuda dalam pembangunan menyebabkan kenakalan remaja cenderung lebih tinggi seperti penyalahgunaan Narkoba,

terjadi krisis moral dan etika dalam segala bidang dan menyimpang dari syariat islam.

Kegiatan-kegiatan pembangunan yang melibatkan pemuda masih sangat kurang dilaksanakan sehingga pemuda tidak mempunyai ajang untuk menunjukkan kreatifitas dan penyaluran hobbi bakatnya, pemuda dalam tumbuh kembangnya membutuhkan sarana dan prasarana kepemudaan yang selama ini ketersediaanya masih kurang.

Minimnya fasilitas olah raga sehingga prestasi di bidang olahraga belum optimal. Terbatasnya partisipasi pemuda dalam segala bidang pembangunan, hal ini disebabkan kurangnya pembinaan dan pemberdayaan.

4.1.17. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Terbatasnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan mempengaruhi percepatan dan pencapaian pembangunan yang efektif dan efisien, sehingga dibutuhkan penguatan sumber daya perempuan dalam mengakses berbagai aktifitas publik. Belum optimalnya program dan kegiatan responsif gender, belum tersedianya data pilah gender pada semua perangkat daerah, dan belum optimalnya kelembagaan PUG dan Anak. Rendahnya jabatan publik yang diemban oleh perempuan, ditandai rendahnya pejabat perempuan eselon II, III, IV, dan rendahnya jumlah anggota DPRD perempuan. Meningkatnya kasus KDRT dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan rendahnya penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak, lansia dan penyandang disabilitas. Belum optimalnya jejaring lembaga pengelola keberdayaan perempuan dan anak.

4.1.18. Peran Lembaga Adat dan Agama dalam Perencanaan Pembangunan Belum Optimal

Kurangnya keterlibatan lembaga adat dan agama dalam perencanaan pembangunan. Lemahnya peran dan fungsi lembaga pemerintahan mukim, Belum optimalnya pelaksanaan qanun lembaga adat dan lembaga agama, Kurangnya koordinasi dan konsultasi antara lembaga adat dan agama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

4.1.19.Menerapkan Ukuran – Ukuran keberlanjutan pembangunan.

Pembangunan yang berkelanjutan di kabupaten aceh utara dengan fokus kepedulian bersama berazaskan syariat islam dan kepemimpinan yang visioner untuk kesejahteraan ekonomi dan sosial yang berawal dari tingkat gampong, dengan mengandalkan potensi budaya dan sumberdaya alam dengan fokus pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia islami, penguasaan teknologi, pengembangan pertanian, dan aktivitas ekonomi ramah lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan ini di wujudkan dengan penerapan ukuran-ukuran sebagai berikut:

1. Ukuran keberlanjutan Makro, seperti PDRB Hijau, tabungan asli (genuine saving) gabungan dari perubahan stok sumber daya alam, degradasi kualitas LH, perubahan modal manusia dan sosial, perubahan modal fisik
2. Ukuran dalam SDG sesuai mandat pemerintahan pusat
3. Adopsi Rencana Aksi Daerah (RAD)-Gerakan Rumah Kaca (GRK) dan Budgettagging
4. Integrasi kebijakan dasar pembangunan lintas sektor. Berupa kebijakan RTRW berbasis KLHS, harmoni tata ruang darat dan laut, integrasi perizinan lintas sektor, lahan pangan berkelanjutan, kawasan industri Aceh utara
5. Integrasi data dasar tatakelola lanscape
6. Integrasi data statistik lintas sektor
7. Ukuran – ukuran keakraban sosial (konflik berbasis ideologi kelompok/parpol, konflik sumberdaya alam, konflik perbatasan administrasi)

4.2. ISU STRATEGIS

Perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Utara tahun 2017-2022 merupakan bagian integral dari lingkungan strategis secara regional. Oleh karena itu perlu disusun strategi pengembangan wilayah yang dapat menciptakan sinergi antar wilayah, antar sektor dan antar pelaku, sehingga dapat memberikan hasil-hasil yang efektif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungannya.

4.2.1. Isu Strategis Pembangunan Aceh Utara 2017 – 2022

Berdasarkan analisis SWOT, maka yang menjadi isu strategis pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Pemindahan kegiatan pemerintahan ke Ibukota Kabupaten;

Pemindahan Pemerintahan ke Ibukota kabupaten penting untuk dilaksanakan, mengingat 15 tahun sudah ditetapkannya pusat administrasi Pemerintahan Aceh Utara di Lhoksukon. Kondisi saat ini baru 8 Organisasi Perangkat Daerah yang sudah melakukan kegiatan di Lhoksukon dari 36 Organisasi Perangkat Daerah.

2. Peningkatan produksi pertanian, perikanan dan agroindustri;

Alih fungsi lahan pertanian kepada lahan pemukiman dan industri merupakan salah satu penyebab menurunnya produksi hasil pertanian. Untuk meningkatkan produksi hasil pertanian perlu mempertahankan lahan-lahan pertanian yang masih produktif secara berkesinambungan. Pertanian merupakan sektor utama penghasil bahan-bahan makanan dan bahan-bahan industri yang dapat diolah menjadi bahan sandang, pangan dan papan yang dapat dikonsumsi maupun diperdagangkan, maka dari itu pembangunan pertanian merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Kabupaten Aceh Utara dengan panjang garis pantai mencapai 55,34 Km dan luas tambak 12.174 ha merupakan potensi untuk dapat meningkatkan produksi baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, sehingga konsumsi ikan yang merupakan salah satu protein hewani mampu diserap oleh masyarakat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Pemenuhan ketahanan dan kemandirian pangan;

Ketahanan pangan sangat tergantung pada tiga pilar utama yaitu : 1) ketersediaan pangan; 2) keterjangkauan pangan; dan 3) pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan serta pemasukan pangan. Keterjangkauan pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau dua kombinasi dari berbagai sumber seperti : produksi dan pesediaan sendiri, pembelian, barter dan bantuan pangan. Pemanfaatan pangan merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi

cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan, distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga.

4. Penguatan pelaksanaan syariat Islam;

Umumnya masyarakat Aceh mengaku berkeyakinan agama Islam namun pelaksanaan syariat Islam belum sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana disyariatkan oleh Islam, masih langka kita menemukan seorang muslim yang benar-benar melaksanakan syariat Islam secara kaffah, masih banyak terdapat kasus-kasus pelanggaran syariat, oleh karena itu untuk mencapai pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh dikalangan pemuda, mahasiswa, pelajar, aparatur pemerintah dan masyarakat lainnya perlu penguatan dan pembinaan pelaksanaan syariat Islam oleh pemerintah, ulama dan masyarakat.

5. Reformasi Birokrasi dan Tatakelola Pemerintahan;

Reformasi birokrasi bertujuan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga bisa memberikan kesejahteraan dan rasa keadilan pada masyarakat banyak. Di sisi lain birokrasi sangat sarat dengan banyak tugas dan fungsi, karena tidak saja hanya terfokus kepada pelayanan publik, tetapi juga bertugas dan berfungsi sebagai motor pembangunan dan aktivitas pemberdayaan. Proses reformasi yang harus dilakukan birokrasi nampaknya bukan hal yang mudah karena harus memformat ulang dengan penuh kritik dan tindakan korektif struktur dan konfigurasi birokrasi itu dari yang serba sakral feodal ke serba rasional dan profesional. Tugas utama pemerintah terhadap rakyatnya adalah memberikan pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Demikian pentingnya pelayanan publik oleh pemerintah ini sehingga sering dijadikan tolok ukur keberhasilan suatu rezim pemerintah, terlebih sekarang ketika paradigma Good Governance (kepemerintahan yang baik) dikedepankan dimana akuntabilitas, efektivitas dan efesiensi dijadikan tolok ukur dalam pelayanan sektor publik.

6. Penyelesaian aset daerah dan batas wilayah;

Konflik terhadap aset daerah dan batas wilayah masih terus terjadi, jika diidentifikasi banyak faktor yang menyebabkan konflik ini, diantaranya

dikarenakan oleh ketidakjelasan batas wilayah dan aset daerah yang dibiarkan begitu saja dalam kurun waktu yang relatif lama dan sebelumnya tidak menimbulkan persoalan. Hal ini menjadi isu penting yang harus segera diselesaikan.

7. Peningkatan kualitas pendidikan umum yang terintegrasi dengan pendidikan agama dan kearifan lokal;

Peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh pendidikan, bila kualitas pendidikan yang diterima rendah maka rendahnya sumber daya manusia tersebut. Oleh karena itu peningkatan kualitas pendidikan harus selalu ditingkatkan untuk menghadapi persaingan hidup kedepan yang penuh dengan persaingan. Kualitas pendidikan tidak lepas dari kurikulum yang bermutu yaitu kurikulum yang mampu mengintegrasikan pendidikan umum dengan pendidikan agama dan kearifan lokal serta adat istiadat. Kurikulum merupakan pedoman mendasar dalam proses belajar mengajar di dunia pendidikan yang penuh dengan tantangan dan juga sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Berhasil tidaknya suatu pendidikan, tentu akan sangat tergantung pada kurikulum. Kurikulum nasional tidak cukup dijadikan pedoman dalam mencapai tujuan pendidikan yang bermutu tanpa ditunjang oleh kurikulum kearifan lokal yang memuat norma-norma keagamaan dan kearifan lingkungan dimana tempat penyelenggaraan pendidikan itu dilaksanakan.

Sekolah merupakan komponen dalam masyarakat, sebab sekolah berada dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, program sekolah harus disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan daerah dan masyarakat. Demikian juga pribadi-pribadi yang ada dalam sekolah yang hidup dalam lingkungan masyarakat, sehingga perlu diupayakan agar setiap pribadi dapat menyesuaikan diri dan akrab dengan daerah lingkungannya.

8. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat sangat diperlukan dalam mengisi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Hal ini berkaitan dengan kualitas manusia sebagai human capital yang bertindak sebagai pelaku pembangunan.

9. Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur dasar;

Pengembangan layanan infrastruktur dasar publik merupakan kewajiban pemerintah. Kebutuhan infrastruktur dasar publik merupakan prioritas

pembangunan yang terus diupayakan setiap pemerintah daerah dalam memenuhi pelayanan dasar kepada masyarakat. Luas wilayah Kabupaten Aceh Utara mencapai 3.296,86 km², atau 329.686 Ha, terdiri dari 27 kecamatan dan 852 desa. Tipologi daerah terbagi dalam 3 (tiga) zona yaitu pesisir, tengah dan pegunungan/perbukitan. Luas wilayah administrasi dan jumlah desa yang besar ini membutuhkan investasi infrastruktur dasar publik seperti jalan, jembatan, irigasi, sarana dan prasarana permukiman dan lingkungan yang cukup besar pula.

Peningkatan layanan sarana dan prasarana permukiman dan lingkungan difokuskan pada sinergisitas program dalam rangka pencapaian target nasional universal acces dalam penyediaan air bersih dan sanitasi, pengembangan rumah sehat sedehana, penataan infrastruktur wilayah seperti jalan lingkungan, drainase dan gorong-gorong serta penataan fasilitas umum lainnya. Perkembangan rumah tangga pengguna air bersih tahun 2016 baru mencapai 61,82 persen, sedangkan capaian rumah tinggal besanitasi masih sebesar 55,75 persen. Sementara itu persentase rumah layak huni mencapai 85 persen. Upaya-upaya peningkatan terus dilakukan melalui sinergisitas program dan kegiatan serta kebijakan pemanfaatan dana desa. Peningkatan infrastruktur wilayah dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan lingkungan, kenyamanan, ketertiban umum dan pada akhirnya meningkatkan nilai kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Utara.

10. Peningkatan kapasitas fiskal daerah;

Kapasitas fiskal merupakan ukuran kemampuan pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dari sumber-sumber yang dimilikinya. Kapasitas fiskal dapat di anggap sebagai salah satu tolak ukur kemampuan keuangan daerah ataupun sebagai potret kemandirian daerah. Semakin besar kapasitas fiskal suatu daerah, maka semakin kuat kemampuan keuangan daerah tersebut.

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Aceh Utara sampai saat ini masih bergantung pada sumber penerimaan pusat, baik berupa dana otonomi khusus (otsus), dana transfer (dana perimbangan) maupun dari sumber lain pendapatan yang sah. Sedangkan sumber penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) masih sangat kecil sekali hanya sekitar 9,43

persen dari total pendapatan, sehingga sangat sulit untuk menopang keuangan daerah.

Dengan masih rendahnya kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), maka pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara harus melakukan langkah-langkah yang strategis untuk meningkatkan kapasitas fiskal untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat :

- Perlu adanya suatu peraturan yang lebih ketat terhadap penerimaan pajak daerah, retribusi daerah maupun zakat sebagai potensi penerimaan daerah untuk lebih dapat meningkatkan PAD.
- Harus adanya penguatan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah untuk dapat mengawasi dan mengevaluasi kembali atas penyertaan modal yang telah disalurkan, sehingga kinerja BUMD dapat lebih baik lagi, sehingga dapat menghasilkan PAD yang lebih optimal.
- Badan Usaha Milik daerah (BUMD) maupun Badan Usaha Milik Gampong harus dapat diisi oleh manajemen yang lebih profesional, sehingga badan usaha daerah tersebut dapat lebih baik lagi.

11. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong;

Konsep pembangunan yang terpusat telah membuktikan bahwa sulitnya mencapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakat sebagaimana tujuan pembangunan itu sendiri, oleh karena sistem pembangunan suatu wilayah harus diubah yaitu pembangunan dari pinggiran menuju ke pusat atau pembangunan dari gampong menuju kota. Untuk membangun dari pinggiran menuju pusat perkotaan tentulah diperlukan sumber daya manusia di gampong yang berkualitas agar tujuan pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat di gampong dapat tercapai, oleh karena itu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat digampong perlu diprioritaskan dalam rencana kerja pemerintah kabupaten Aceh Utara tahun 2019.

12. Perbaikan iklim investasi daerah dan Pemanfaatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe;

Perbaikan iklim investasi salah satunya dapat dilakukan dengan menghadirkan investor untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan, guna mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah pusat telah memberikan perhatian serius terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Hal ini

ditandai dengan lahirnya Peraturan Pemerintah RI No. 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe yang telah di usulkan oleh konsorsium yang terdiri dari : PT. Pertamina (persero), PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. Pelabuhan Indonesia I (Pelindo), PT. Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) sebagai potensi dan keunggulan yang ada di daerah. Dan telah di keluarkannya Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 2017 tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus di Aceh. Selain itu juga ditandai dengan rencana pengembangan melalui perjanjian kerja sama operasional barang milik negara berupa aktiva kilang LNG Arun. Pelaksanaan kerja sama ini dilakukan antara lembaga manajemen aset negara dengan patriot nusantara Aceh sebagai Badan Usaha Pembangunan Pengelola KEK, tetapi sampai saat ini belum dapat teralisasi yang telah di harapkan selama ini.

13. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan mitigasi bencana;

Kabupaten Aceh Utara juga merupakan daerah yang rawan bencana alam. Berdasarkan data yang dikaji, riwayat bencana di Aceh Utara sejak tahun 1970-an kerap dilanda banjir. Bencana tersebut juga diduga akibat pola ruang yang diperuntukkan lahan untuk perkebunan. HGU yang beroperasi di Kabupaten Aceh Utara, sebagian besar berada dibantaran sungai, sehingga rentan terjadi banjir luapan. Akhir 2015 misalnya, banjir melanda 285 Gampong yang tersebar pada 365 titik. Banjir luapan ini terjadi akibat pendangkalan dasar sungai ekses dari lumpur yang tergerus dari pembukaan lahan secara besar-besaran.

14. Peredaran, Penggunaan narkoba dan tingginya kasus HIV dan PMKS ;

Lemahnya kontrol sosial terhadap remaja, dan anak-anak sekolah sehingga berdampak kepada maraknya kaum remaja dan anak sekolah cenderung menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan ganja, secara dini perlu diantisipasi dan ditangani secara serius dan diarahkan kepada hal-hal yang positif. Disamping itu peranan pemuda di Aceh Utara sebagai agen pembangunan Aceh Utara belum diberdayakan secara maksimal, sehingga belum mampu mengisi pembangunan disegala bidang. Lemahnya peran pemuda dalam pembangunan menyebabkan kenakalan remaja cenderung lebih tinggi seperti penyalahgunaan Narkoba, terjadi krisis moral dan etika

dalam segala bidang dan menyimpang dari syariat islam sehingga banyak terjadi kasus-kasus penyakit masyarakat.

15. Penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Perempuan dan anak tidak jarang menjadi target yang rentan mengalami kekerasan berbasis gender. Kondisi perempuan dan anak-anak di Aceh Utara akan semakin terancam dengan berbagai tindak kekerasan yang dialaminya. Peningkatan kasus ini menjadi peringatan bagi Pemerintah Aceh Utara untuk lebih serius pada upaya pencegahan hingga penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara lebih baik di masa mendatang, Oleh karena itu penanganan dan pencegahan konflik kekerasan menjadi prioritas pemerintah saat ini.

4.2.2. Isu Strategis Pembangunan Prioritas Nasional Dalam Nawa Cita

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019. Selanjutnya dalam upaya Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional, penguatan kerangka kelembagaan pemerintah akan lebih memfokuskan pada upaya untuk mendukung pencapaian agenda prioritas Pemerintah yang tetuang dalam Nawa Cita. Target pencapaian agenda prioritas dari pembangunan nasional akan menjadi target bersama yang harus dicapai oleh seluruh daerah, sesuai kewenangan masing-masing, baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Kebijakan nasional yang sejalan dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Utara adalah kebijakan pengembangan kawasan ekonomi melalui pengembangan kawasan industri yaitu kawasan industri terutama pengolahan hasil bumi, hasil laut, dan industri kreatif lainnya, dimana kriteria yang akan kita penuhi adalah :

- a. Telah memenuhi potensi sumberdaya alam
- b. Adanya perusahaan perintis (Pelabuhan Laut yang cukup memadai)
- c. Dukungan dan Komitmen Pemerintah Daerah
- d. Adanya indikasi peran sektor/kementerian lain (termasuk dalam program nasional)

- e. Memiliki kesesuaian lahan
- f. Memiliki akses terhadap pelabuhan laut dan transport darat yang memadai
- g. Memiliki sumberdaya pendukung (listrik, gas dll)
- h. Dukungan sumberdaya Manusia (jumlah dan kualitas)

4.2.3. Isu Strategis Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Sedangkan sasaran nasional untuk pembangunan desa dan kawasan perdesaan adalah membangun desa tertinggal sampai 5000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2000 desa.

Arah kebijakan nasional pembangunan desa dan kawasan perdesaan, termasuk daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi tahun 2015- 2019 diantaranya adalah :

- a. Pengawasan Implementasi Undang-Undang Desa secara sistematis. Konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.
- b. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan.
- c. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa – kota.
- d. Kurangnya peran pemerintah gampong dalam menjalankan kewenangan lokal
- e. Pengembangan komoditas unggulan sistem kluster ditingkat Desa
- f. Peningkatan kualitas dan kapasitas pengelolaan BUMG

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menetapkan visi:

“ Terwujudnya Keberlanjutan Pembangunan Masyarakat Aceh Utara yang Berbudaya, Sejahtera, Mandiri dan Islami (BERSEMI) ”.

Penjelasan Visi:

Kata-kata yang dirangkai dalam kalimat visi di atas mengandung arti atau makna sebagai berikut :

Berbudaya artinya mengamalkan falsafah Aceh yang Islami yakni: Adat bak Pôteumeurehôm, Hukôm bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Bentara.

Sejahtera artinya masyarakat Aceh Utara memperoleh kemakmuran dalam keadilan, kesenangan hidup dalam keadaan aman dan tenteram lahir bathin.

Mandiri artinya masyarakat yang mampu berdiri sendiri tanpa ketergantungan kepada pihak lain.

Islami artinya masyarakat yang berakhlak mulia, berperilaku, berbicara, berbuat, dan bertindak sesuai dengan Syariat Islam

5.2. Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, perlu dipandu melalui misi. Hal ini tidak lepas dari pemaknaan misi adalah perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Sedangkan misi untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan lima butir misi sebagai berikut :

- 1) Menciptakan pemerintahan Aceh Utara yang bersih, berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penegakan hukum serta penegakan syariat Islam dengan semangat MoU Helsinki dan UUPA;

- 2) Meningkatkan pembangunan SDM yang profesional, berkualitas, berbudaya dan pengarusutamaan gender sesuai dengan tuntunan Syari'at Islam;
- 3) Meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan yang bermutu;
- 4) Meningkatkan infrastruktur dasar dan pemerintahan dengan memperhatikan penataan ruang, kelestarian lingkungan dan mendukung pertanian berkelanjutan; dan
- 5) Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi potensi daerah, perbaikan iklim investasi, pemberdayaan gampong yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan, diperlukan tujuan dan sasaran yang dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	
I.	Misi I : Menciptakan pemerintahan Aceh Utara yang bersih, berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penegakan hukum serta penegakan syariat islam berpedoman pada MoU Helsinki dan UUPA	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Nilai AKIP Pemerintah Daerah	CC	B	B	B	B	B	B
			Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP	n/a	2	3	3	3	3	3
			Meningkatnya maturitas SPIP	Level maturitas SPIP	n/a	3	3	3	3	3	3
			Mempertahankan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Sinkronisasi dan konsistensi perencanaan	Persentase kesesuaian program dalam RKPD terhadap program dalam RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatkan pelayanan publik	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Nilai indeks kepuasan masyarakat	75	75,9	76	76,95	77,5	80	80
			Meningkatnya kapasitas aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	n/a	60%	62%	64%	68%	70%	70%
		Meningkatkan kapasitas kelembagaan mukim dan pemerintah gampong	Meningkatnya kapasitas apartur gampong	Persentase aparatur gampong yang mengikuti diklat	45%	50%	55%	60%	65%	75%	75%

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menegakkan syariat Islam	Meningkatnya pengamalan syariat islam	Persentase Majelis Taklim aktif	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya Penegakan Syariat Islam	Angka Pelanggaran terhadap Syariat Islam	n/a	0,138	0,129	0,121	0,112	0,099	0,099
II.	Misi II : Meningkatkan pembangunan SDM yang profesional, berkualitas dan pengarusutamaan gender sesuai dengan tuntunan Syari'at Islam	Meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu, islami dan berdaya saing	Meningkatnya partisipasi sekolah	APM	75,67%	77,50%	82,50%	88,50%	93,00%	95,00%	95,00%
			Meningkatnya kualitas SDM	Angka rata-rata lama sekolah	8,15	9	9,5	10	10,5	11	11
			Terlaksananya pendidikan yang berbasis islami dan kearifan lokal	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum terintegrasi	-	-	10%	20%	30%	40%	40%
			Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik yang Lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)	19,00%	23,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	60,00%
		Meningkatkan Peran Perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Persentase keterwakilan perempuan dalam proses pembangunan	15%	20%	22%	25%	28%	30%	30%
		Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Berkurangnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah kasus	n/a	80	60	55	40	30	30
III	Meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan yang	Meningkatkan Layanan Kesehatan yang Bermutu	Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	68,51	71	71,5	71,6	71,7	71,9	71,9

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	
	bermutu		Meningkatnya mutu layanan kesehatan ibu	Angka Kematian Ibu	139	123	105	93	81	68	68
			Meningkatnya mutu layanan kesehatan Bayi	Angka Kematian Bayi	5	4	4	4	3	3	3
IV	Meningkatkan infrastruktur dasar dan pemerintahan dengan memperhatikan penataan ruang, kelestarian lingkungan dan mendukung pertanian berkelanjutan	Meningkatkan Infrastruktur dasar publik dan pengembangan wilayah	Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik	47,7	52,3	57,8	62,6	67,1	72,1	72,1
			Meningkatnya infrastruktur pendukung pertanian	Persentase Luasan Daerah Irigasi (DI) baik yang teraliri air irigasi	34,7	39,1	44,3	48,5	53,8	61,1	61,1
			Meningkatnya ketersediaan dan akses air bersih	Persentase akses air bersih	63,58	65,56	67,61	69,78	72,03	74,43	74,43
			Meningkatnya prasarana lingkungan pemukiman	Persentase Rumah Tangga dengan Akses sanitasi	57,85	60,67	63,82	67,09	70,43	73,95	73,95
			Meningkatnya infrastruktur perumahan	Persentase rumah layak huni	84,72	86,24	87,81	89,43	91,10	92,82	92,82
			Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran	Persentase gedung kantor yang berlokasi di Ibukota Kabupaten	34,37	40,62	46,87	53,12	59,37	65,62	65,62
		Meningkatkan kesiagaan dan Kewaspadaan dalam Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana alam	Tingkat Resiko Bencana	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks kualitas Lingkungan hidup (air, udara dan tutupan lahan)	n/a	55	60	65	70	75	75
V	Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi potensi daerah, perbaikan iklim investasi, pemberdayaan gampong yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	3,27	4,5	4,6	4,7	5	5.25	5.25
			Menurunnya ketimpangan pendapatan	Gini Rasio	0,269	0,265	0,262	0,259	0,255	0,251	0,251
		Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran	Menurunnya tingkat kemiskinan	Persentase tingkat kemiskinan	19,46	17,25	16,45	15,55	14,85	14,05	14,05
			Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Persentase tingkat pengangguran terbuka	11,02	10	8,5	8	7,5	6,9	6,9
		Mengendalikan Inflasi Daerah	Terkendalnya tingkat inflasi daerah	Tingkat inflasi	2,87	3,5	3	3	3	3	3
		Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan	Meningkatnya produksi hasil pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	4,77	5	5,25	5,4	5,5	5,6	5,6
		Menmbuh kembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis Agroindustri	Meningkatnya pembangunan berbasis industri, koperasi dan UMKM	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	-10,23	3,25	4	5,2	6	6,7	6,7
		Meningkatkan Kapasitas Fiskal	Meningkatnya kontribusi PAD ke dalam APBD	Kontribusi PAD terhadap APBD	10 %	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan RPJM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022

Perencanaan dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang dapat diimplementasikan. Segala sesuatu yang secara langsung bertujuan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD dianggap sebagai strategi. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Selain strategi, hal lainnya yang penting adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Beberapa strategi pembangunan dan arah kebijakan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2022

Visi : Melanjutkan Pembangunan Masyarakat Aceh Utara yang Berbudaya, Sejahtera, Mandiri dan Islami

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1 : Menciptakan pemerintahan Aceh Utara yang bersih, berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penegakan hukum serta penegakan syariat islam dengan semangat MoU Helsinki dan UUPA		
1.1 Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah	1.1.1 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Peningkatan Efektifitas Kinerja Birokrasi dan Layanan Publik yang Responsif, transparan dan akuntabel
	1.1.2 Meningkatnya Kapabilitas APIP	
	1.1.3 Meningkatnya maturitas SPIP	
	1.1.4 Mempertahankan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah dan Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah
	1.1.5 Sinkronisasi dan konsistensi perencanaan	Perencanaan berbasis aplikasi yang terintegrasi dengan penganggaran
1.2 Meningkatkan pelayanan publik	1.2.1 Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Peningkatan tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah
	1.2.2 Meningkatnya kapasitas aparatur	Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan
1.3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan mukim dan pemerintah gampong	1.3.1 Meningkatnya kapasitas aparatur mukim dan gampong	Meningkatkan kapasitas aparatur mukim dan gampong melalui pendidikan dan pelatihan

Tujuan	Sasaran	Strategi
1.4 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menegakkan syariat Islam	1.4.1 Meningkatnya pengamalan syariat islam	1. Menghidupkan majelis taklim di Kecamatan dan gampong 2. Peningkatan pelayanan kehidupan beragama
	1.4.2 Meningkatnya Penegakan Syariat Islam	1. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan syariat Islam 2. Sosialisasi pola hidup sesuai syariat
Misi 2 : Meningkatkan pembangunan SDM yang profesional, berkualitas dan pengarusutamaan gender sesuai dengan tuntunan Syari'at Islam		
2.1 Meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu, islami dan berdaya saing	2.1.1 Meningkatnya partisipasi sekolah	1. Peningkatan akses pendidikan 2. Pendistribusian guru yang merata
	2.1.2 Meningkatnya kualitas SDM	Meningkatkan mutu pendidikan
	2.1.3 Terlaksananya pendidikan yang berbasis islami dan kearifan lokal	1. Menetapkan kurikulum berbasis islami dan keraifan lokal 2. Sosialisasi penerapan kurikulum berbasis islami dan kearifan lokal
	2.1.4 Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	1. Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan
2.2 Meningkatkan Peran Perempuan dalam pembangunan	2.2.1 Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	1. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan
2.3 Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	2.3.1 Berkurangnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Membangun kota layak anak 2.
Misi 3 : Meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan yang bermutu		
3.1 Meningkatkan Layanan Kesehatan yang Bermutu.	3.1.1 Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat	1. Meningkatnya pelayanan kesehatan yang merata , terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta pada upaya

Tujuan	Sasaran	Strategi
		promotif - preventif. 2. Meningkatnya Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
	3.1.2 Meningkatnya mutu layanan kesehatan ibu	
	3.1.3 Meningkatnya mutu layanan kesehatan Bayi	
Misi 4 : Meningkatkan infrastruktur dasar dan pemerintahan dengan memperhatikan penataan ruang, kelestarian lingkungan dan mendukung pertanian berkelanjutan		
4.1 Meningkatnya Infrastruktur dasar publik dan pengembangan wilayah	4.1.1 Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan	1. Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
	4.1.2 Meningkatnya infrastruktur pendukung pertanian	1. Peningkatan infrastruktur pendukung pertanian 2. Mendorong pembangunan infrastruktur pertanian yang menjadi kewenangan pusat dan provinsi melalui sumber dana APBN dan APBA
	4.1.3 Meningkatnya ketersediaan dan akses air bersih	1. Pemenuhan infrastruktur penyediaan air bersih
	4.1.4 Meningkatnya prasarana lingkungan pemukiman	1. Peningkatan sarana dan prasarana pemukiman
	4.1.5 Meningkatnya infrastruktur perumahan	1. Pembangunan dan rehab rumah 2. Pemanfaatan dana desa untuk pembangunan dan rehab rumah layak huni

Tujuan	Sasaran	Strategi
	4.1.6 Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran	1. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran
4.2 Meningkatkan kesiagaan dan Kewaspadaan dalam Penanggulangan Bencana	4.2.1 Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana alam	1. Peningkatan layanan pra bencana, bencana dan pasca bencana
4.3 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	4.3.1 Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	1. Peningkatan layanan kelestarian lingkungan hidup berkelanjutan
		2. Meningkatkan kawasan hijau di darat, pesisir dan daerah-daerah sumber air
Misi 5 : Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi potensi daerah, perbaikan iklim investasi, pemberdayaan gampong yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan		
5.1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata	5.1.1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dari semua lapangan usaha terutama pertanian, industri dan jasa dan pariwisata
	5.1.2 Menurunnya ketimpangan pendapatan	
5.2 Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran	5.2.1 Menurunnya tingkat kemiskinan	1. Peningkatan produksi pertanian 2. Meningkatnya peran BUMG dalam pemberdayaan gampong
	5.2.2 Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	1. Menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha
5.3 Mengendalikan Inflasi Daerah	5.3.1 Terkendalinya tingkat inflasi daerah	1. Pengendalian distribusi barang dan jasa

Tujuan	Sasaran	Strategi
5.6 Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan agroindustri	5.6.1 Meningkatnya produksi hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan	1. Intensifikasi, ekstensifikasi usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan 2. Percepatan pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kelautan dan perikanan
5.7 Menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis Agroindustri	5.7.1 Meningkatnya pembangunan berbasis industri, koperasi dan UMKM	1. Meningkatkan peran koperasi dan UMKM 2. Mendorong peran pemerintah dalam pemanfaatan KEK 3. Mendorong tumbuhnya industri berbasis pertanian
5.8 Meningkatkan Kapasitas Fiskal	5.8.1 Meningkatnya kontribusi PAD ke dalam APBD	1. Mengevaluasi dan mengenali sumber dan potensi PAD 2. Revitalisasi BUMD

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2022

Arah Kebijakan				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
- Mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi daerah	- Memantapkan laju pertumbuhan ekonomi daerah	- Memantapkan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	- Memantapkan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	- Memantapkan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif
- Meningkatkan produktivitas komoditi unggulan tanaman bahan makanan, perikanan, perkebunan, dan peternakan	- Meningkatkan daya saing komoditi-komoditi unggulan	- Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pendukung/penunjang di kawasan sentra-produksi	- Mengembangkan industri pengolahan produk-produk pertanian.	- Memantapkan industri pengolahan produk-produk pertanian
- Menyusun kebijakan pengembangan pariwisata islami	- Mengembangkan potensi pariwisata islami	- Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata	- Mempertahankan kondisi sarana dan prasarana pariwisata	- Mempertahankan kondisi sarana dan prasarana pariwisata
- Meningkatkan pengendalian dampak kerusakan lingkungan.	- Meningkatkan pengendalian dampak kerusakan lingkungan.	- Meningkatkan pengendalian dampak kerusakan lingkungan.	- Meningkatkan pengendalian dampak kerusakan lingkungan.	- Meningkatkan pengendalian dampak kerusakan lingkungan.
- Meningkatkan kualitas SDM dengan membuat kebijakan pendidikan yang terintegrasi	- Meningkatkan kualitas SDM dengan penerapan pendidikan yang terintegrasi	- Meningkatkan kualitas SDM dengan penerapan pendidikan yang terintegrasi	- Meningkatkan kualitas SDM dengan penerapan pendidikan yang terintegrasi	- Meningkatkan kualitas SDM dengan penerapan pendidikan yang terintegrasi

Arah Kebijakan				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
- Meningkatkan kualitas jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.	- Meningkatkan kualitas jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.	- Meningkatkan kualitas jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.	- Meningkatkan kualitas jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.	- Meningkatkan kualitas jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
- Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang mendukung pertanian berkelanjutan	- Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang mempercepat pengurangan ketimpangan wilayah	- Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi	- Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang mempercepat pengembangan ekonomi dan perdagangan	- Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang mempercepat pengembangan ekonomi dan perdagangan
- Memelihara kualitas sarana peribadatan agar terus meningkat fungsinya sebagai pusat pengembangan syariat Islam	- Mengembangkan syiar Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat.	- Mengembangkan syiar Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat.	- Mengembangkan syiar Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat.	- Mengembangkan syiar Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Dari hasil telaahan visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, maka Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
2. Pendidikan dan Budaya
3. Keistimewaan Aceh
4. Kesehatan dan Kesejahteraan
5. Infrastruktur
6. Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
7. Penanggulangan Kemiskinan
8. Ketahanan Pangan dan nilai tambah produk pertanian
9. Pariwisata Islami
10. Perbaikan Iklim Investasi
11. Pemberdayaan Gampong

Tabel 6.3
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Visi : Terwujudnya Keberlanjutan Pembangunan Masyarakat Aceh Utara yang Berbudaya, Sejahtera, Mandiri dan Islami (BERSEMI)															
1	Misi 1 :Menciptakan pemerintahan Aceh Utara yang bersih, berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penegakan hukum serta penegakan syariat islam berpedoman pada MoU Helsinki dan UUPA															
	Tujuan :															
1.1	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	n/a					64		65		66		66		
	Sasaran :															
1.1.1	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Nilai AKIP Pemerintah Daerah	CC	B		B		B		B		B		B		
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terkendalinya Administrasi Pengendalian dan Program Kegiatan Pembangunan	100%	100%	59.650.000	100%	73.158.500	100%	80.474.350	100%	82.083.837	100%	90.292.221	100%	385.658.908	SETDAKAB
	Program Pengembangan Zona Integritas	Persentase SKPK yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani		-	-	3,00%	85.000.000	3%	170.000.000	3%	173.400.000	3%	190.740.000	12%	619.140.000	Inspektorat
	Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Lakip perangkat daerah yang baik dan tepat waktu	23,00%	30,00%	212.730.000	40%	346.444.500		-		-		-	75%	559.174.500	SETDAKAB
	Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Lakip perangkat daerah yang baik dan tepat waktu	23,00%	-	-	-	-	50%	200.000.000	60%	205.000.000	75%	210.000.000	75%	615.000.000	SETDAKAB
1.1.2	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP	n/a	2		3		3		3		3		3		
	Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase tenaga pemeriksa yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30%	13%	185.000.000	7%	188.700.000	7%	198.135.000	7%	202.097.700	7%	222.307.470	71%	996.240.170	Inspektorat
1.1.3	Maturitas SPIP	Level maturitas SPIP	n/a	3		3		3		3		3		3		
	Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Tingkat Pemahaman terhadap SOP dan SPIP	-	20%	763.000.000	20%	550.000.000	20%	605.000.000	20%	617.100.000	20%	678.810.000	100%	3.213.910.000	Inspektorat
1.1.4	Mempertahankan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya informasi laporan keuangan	99%	100%	265.810.000	100%	231.000.000	100%	235.620.000	100%	240.332.400	100%	245.139.048	100%	1.217.901.448	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen pengelolaan keuangan	100%	100%	5.732.231.000	100%	6.042.160.000	100%	6.223.424.000	100%	6.347.892.480	100%	6.474.850.330	100%	30.820.557.810	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase tindak lanjut temuan	76%	80%	2.143.000.000	85%	1.804.000.000	88%	1.894.200.000	92%	1.932.084.000	95%	2.208.292.400	95%	9.981.576.400	Inspektorat
1.1.5	Sinkronisasi dan konsistensi perencanaan	Persentase kesesuaian program dalam RKPD terhadap program dalam RPJMD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	1.314.691.695	100%	1.251.530.000	100%	1.376.683.000	100%	1.404.216.660	100%	1.732.300.993	100%	7.079.422.348	Bappeda
	Program perencanaan sosial dan budaya	Persentase kesesuaian program bidang sosial budaya dalam RKPD terhadap program dalam RPJMD	100%	100%	190.031.250	100%	210.000.000	100%	215.000.000	100%	219.300.000	100%	223.686.000	100%	1.058.017.250	Bappeda
	Program perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase kesesuaian program bidang prasarana wilayah dan SDA dalam RKPD terhadap program dalam RPJMD	100%	100%	89.775.100	100%	150.000.000	100%	153.000.000	100%	156.060.000	100%	159.181.200	100%	708.016.300	Bappeda
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase kesesuaian program bidang ekonomi dalam RKPD terhadap program dalam RPJMD	100%	100%	115.006.000	100%	204.250.000	100%	250.000.000	100%	255.000.000	100%	260.100.000	100%	1.084.356.000	Bappeda
	Program pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan data/informasi pembangunan daerah	100%	100%	100.000.000	100%	200.000.000	100%	300.000.000	100%	306.000.000	100%	312.120.000	100%	1.218.120.000	Bappeda
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aparatur perencana OPD yang terlatih	n/a	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	200.000.000	100%	204.000.000	100%	208.080.000	100%	812.080.000	Bappeda
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan	100%	100%	862.344.000	100%	1.006.570.000	100%	1.026.701.000	100%	1.047.235.020	100%	1.068.179.720	100%	5.011.029.740	Semua PD yang membidangi sosial budaya
	Program Perencanaan Ekonomi	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan	100%	100%	510.000.000	100%	579.340.000	100%	608.307.000	100%	620.473.140	100%	632.882.603	100%	2.951.002.743	Semua PD yang membidangi ekonomi
	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan	100%	100%	2.553.227.000	100%	642.576.200	100%	674.705.000	100%	688.199.100	100%	701.963.082	100%	5.260.670.382	Semua PD yang membidangi prasarana wilayah dan SDA
1.1.6	Meningkatnya penerapan hasil kelitbangan sebagai pengambilan kebijakan	Persentase tindak lanjut hasil penelitian dan inovasi pembangunan daerah	n/a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Program Kajian dan Penelitian Pengembangan Daerah	Persentase tindak lanjut hasil penelitian dan inovasi pembangunan daerah	n/a	100%	934.845.000	100%	705.000.000	100%	719.100.000	100%	733.482.000	100%	748.151.640	100%	3.840.578.640	Bappeda

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Tujuan :															
1.2	Meningkatkan pelayanan publik	Nilai indeks kepuasan masyarakat														
	Sasaran :															
1.2.1	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Nilai indeks kepuasan masyarakat		75,9		76		76,95		77,5		80		80		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	48.725.621.946	100%	49.557.841.669	100%	49.744.078.502	100%	51.133.444.458	100%	54.721.194.664	100%	253.882.181.239	Semua OPD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	70,00%	75,00%	10.298.190.000	80,00%	15.117.425.013	82,00%	11.706.338.400	85,00%	11.952.737.200	87%	15.197.807.500	87%	64.272.498.113	Semua OPD
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam penggunaan atribut pegawai	100%	100%	7.467.500.000	100%	495.810.000	100%	8.005.726.200	100%	515.840.724	100%	8.026.157.600	100%	24.511.034.524	Semua OPD
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Tingkat Pelayanan Kependudukan	n/a	91%	186.500.000	91%	421.600.000	92%	430.032.000	92%	450.000.000	93%	459.000.000	93%	1.947.132.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Perizinan dan Non Perizinan	Persentase pelayanan perizinan tepat waktu	100%	100%	240.000.000	100%	726.152.000	100%	740.675.040	100%	756.000.000	100%	771.120.000	100%	3.233.947.040	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Gampong	Tingkat peran kecamatan dalam pembangunan	n/a	100%	3.856.261.500	100%	3.948.830.000	100%	4.027.806.600	100%	4.108.362.732	100%	5.190.529.987	100%	21.131.790.819	Kecamatan
	Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Tingkat Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	100%	100%	766.132.500	100%	697.850.000	100%	711.807.000	100%	726.043.140	100%	740.564.003	100%	3.642.396.643	Kecamatan
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	100%	100%	11.578.101.980	100%	12.300.000.000	100%	12.556.000.000	100%	12.817.120.000	100%	13.183.462.400	100%	62.434.684.380	Sekretariat DPRK
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penataan Peraturan Perundang - Undangan	100%	100%	200.000.000	100%	102.035.000	100%	104.075.700	100%	106.157.214	100%	108.280.358	100%	620.548.272	SETDAKAB
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Pendataan Wilayah	100%	100%	150.000.000	100%	165.000.000	100%	168.300.000	100%	171.666.000	100%	175.099.320	100%	830.065.320	SETDAKAB
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kualitas Pelayanan Publik	100%	100%	459.000.000	100%	310.230.000	100%	316.434.600	100%	322.763.292	100%	329.218.558	100%	1.737.646.450	SETDAKAB
	Program Penyelenggaraan Pemerintah Gampong	Persentase Pelayanan Masyarakat	100%	100%	1.429.500.000	100%	1.648.325.000	100%	1.681.291.500	100%	1.714.917.330	100%	1.749.215.677	100%	8.223.249.507	SETDAKAB
	Program Pelayanan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum	Persentase kasus yang diselesaikan	100%	100%	100.000.000	100%	88.802.200	100%	90.578.244	100%	92.389.809	100%	94.237.605	100%	466.007.858	SETDAKAB
	Program Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM)	Persentase Masyarakat yang memahami HAM	100%	100%	30.000.000	100%	30.600.000	100%	31.212.000	100%	31.836.240	100%	32.472.965	100%	156.121.205	SETDAKAB
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Penerima Akses	100%	100%	597.990.000	100%	587.366.250	100%	599.113.575	100%	611.095.000	100%	623.316.899	100%	3.018.881.724	SETDAKAB
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terciptanya kemitraan yang baik dalam penyebaran informasi	100%	100%	2.062.231.600	100%	1.723.427.000	100%	2.371.935.540	100%	1.776.320.800	100%	2.450.694.432	100%	10.384.609.372	SETDAKAB, Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan, Sekretariat DPRK
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase Pengendalian Pengelolaan Keuangan	100%	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	30.600.000	100%	31.212.000	100%	31.836.240	100%	148.648.240	SETDAKAB

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	100%	100%	2.955.050.000	100%	2.906.185.500	100%	2.964.309.000	100%	3.023.595.180	100%	3.084.067.084	100%	14.933.206.764	SETDAKAB
	Program Peringatan Hari-hari Besar	Persentase Pelaksanaan Hari-Hari Besar yang dilaksanakan per hari-hari besar yang wajib dilaksanakan	100%	100%	2.017.150.000	100%	2.978.780.400	100%	3.038.356.000	100%	3.099.123.120	100%	3.161.105.582	100%	14.294.515.102	Semua PD yang menyelenggarakan peringatan hari-hari besar
	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Cakupan Pelayanan Jamaah Haji	100%	100%	640.000.000	100%	741.868.850	100%	756.706.227	100%	771.840.352	100%	787.277.159	100%	3.697.692.587	SETDAKAB
	Program Pembinaan Usaha-Usaha Peningkatan Produksi Sumber Daya Alam	Persentase Kesesuaian Pengembangan Usaha Produksi Sumber Daya Alam	100%		-		-	100%	250.000.000	100%	300.000.000	100%	350.000.000	100%	900.000.000	SETDAKAB
	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Tingkat Pelayanan Informasi	100%	100%	195.000.000	100%	95.482.651	100%	97.392.304	100%	100.000.000	100%	102.000.000	100%	589.874.955	SETDAKAB
	Program Penguatan Tata Laksana	Persentase peningkatan ketatalaksanaan perangkat daerah	100%	0%	-	0%	-	100%	250.000.000	100%	260.000.000	100%	275.000.000	100%	785.000.000	SETDAKAB
	Program Penguatan Kelembagaan	Capaian peningkatan kinerja perangkat daerah	100%	0%	-	0%	-	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	775.000.000	SETDAKAB
	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	Persentase terselesaikannya persertifikatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Aceh Utara	90%		129.500.000	95%	782.500.000	100%	370.200.000	100%	377.604.000	100%	380.000.000	100%	2.039.804.000	Dinas Pertanahan
	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase penyelesaian masalah pertanahan	n/a		-	80%	152.557.500	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	250.000.000	100%	822.557.500	Dinas Pertanahan
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Tersedianya aplikasi SIMPAT	n/a	1	144.000.000		-		-		-		-		144.000.000	Dinas Pertanahan
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	100%	100%	110.000.000	100%	96.153.604	100%	98.076.676	100%	150.000.000	100%	153.000.000	100%	607.230.280	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Persentase sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik	50%	55%	168.000.000	60%	129.688.708	65%	132.282.482	70%	175.000.000	75%	178.500.000	75%	783.471.190	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	100%	100%	110.000.000	100%	111.100.000		112.211.000		115.000.000		117.300.000		565.611.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase pengelola arsip yang mengikuti pelatihan kearsipan	n/a			50%	50.000.000		50.500.000		100.000.000		102.000.000		302.500.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.2.2	Meningkatnya kapasitas aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	n/a			60%		62%		64%		68%		70%		
	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	15%	100%	2.050.000.000	100%	1.150.000.000	100%	1.173.000.000	100%	1.196.460.000	100%	1.220.389.200	100%	6.789.849.200	BKPSDM
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	n/a		938.680.000		1.873.669.900		1.911.143.000		1.949.365.860		1.988.353.177		8.661.211.937	BKPSDM
	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis	n/a		799.750.000		985.500.000		1.131.860.000		1.243.897.200		1.256.175.144		5.417.182.344	Semua OPD

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.2.3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat															
	Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat koordinasi dan kerjasama dalam penyelesaian konflik	15,00%	30,00%	261.628.000	40,00%	550.000.000	50,00%	761.000.000	60,00%	797.220.000	85,00%	833.664.400	85,00%	3.203.512.400	Kesbangpol, SatpolPP
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat (PEKAT)	Tingkat penurunan kasus penyalahgunaan narkoba pertahun	1,00%	2,00%	250.000.000	2,00%	185.250.800	2,00%	188.955.000	2,00%	195.000.000	2,00%	198.900.000	10,00%	1.018.105.800	Kesbangpol
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Penegakan Qanun	100%	100%	1.846.600.000	100%	1.869.200.000	100%	1.906.584.000	100%	2.001.913.200	100%	2.041.951.000	100%	9.666.248.200	SATPOL PP
	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan pengamanan lingkungan	n/a	-	-	100%	150.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	1.250.000.000	100%	2.400.000.000	SATPOL PP
1.2.4	Meningkatnya pemahaman politik masyarakat															
	Program Pendidikan Politik Dalam Negeri	Persentase yang memilih pada PEMILU	66,40%			67,00%	16.700.000	67,00%	20.000.000	67,00%	100.000.000	72,00%	102.000.000	72,00%	238.700.000	Kesbangpol
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Tingkat penurunan kasus demonstrasi/kerusuhan yang berlatarbelakang ideologi per tahun	n/a	-	-	10,00%	20.000.000	10,00%	20.400.000	10,00%	75.000.000	10,00%	76.500.000	40,00%	191.900.000	Kesbangpol
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase pembinaan parpol, OKP, Ormas, LSM dan WNA	100%	100%	84.000.000	100%	2.097.250.000	100%	300.000.000	100%	350.000.000	100%	357.000.000	100%	3.188.250.000	Kesbangpol
	Tujuan :															
1.3	Meningkatkan kapasitas kelembagaan mukim dan pemerintah gampong															
	Sasaran :															
1.3.1	Meningkatnya kapasitas aparatur gampong	Persentase aparatur gampong yang mengikuti diklat	n/a			50%		55%		60%		65%		75%		
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persetase aparatur gampong yang mengikuti diklat	n/a	-	-	50%	450.000.000	55%	500.000.000	60%	500.000.000	65%	500.000.000	75%	1.950.000.000	DPMP2KB
1.3.2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Gampong	Tingkat peran kecamatan dalam pembangunan	n/a			100%		100%		100%		100%		100%		
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Jumlah gampong yang berkembang	n/a		100.000.000	74 gampong	161.983.000	74 gampong	165.222.660		170.000.000		173.400.000		770.605.660	DPMP2KB
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan gampong	100%		509.000.000	100%	100.000.000	100%	102.000.000	100%	150.000.000	100%	153.000.000	100%	1.014.000.000	DPMP2KB
	Program pengembangan lembaga ekonomi desa	Persentase BUMG yang memberi kontribusi pada Pendapatan Asli Gampong (PAG)	n/a	-	-	5,00%	972.000.000	6,00%	991.440.000	7,00%	1.041.012.000	8,00%	1.061.832.240	9,00%	4.066.284.240	DPMP2KB

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Tujuan :															
1.4	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menegakkan syariat Islam															
	Sasaran :															
1.4.1	Meningkatnya pengamalan syariat Islam	Persentase Majelis Taklim aktif Islam	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama	Persentase Layanan Kehidupan Beragama	100%	100%	7.499.345.800	100%	2.676.261.000	100%	2.491.106.220	100%	2.540.928.344	100%	2.591.746.911	100%	17.799.388.276	BAITUL MAAL, MPU dan DSI
	Program Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan	Persentase sarana dan prasarana keagamaan kondisi baik	60%		-	70%	750.000.000	80%	765.000.000	90%	780.300.000	100%	795.906.000	100%	3.091.206.000	Dinas Syariat Islam
	Program Pembinaan Tenaga, Lembaga dan Pengembangan Syariat Islam	Persentase lembaga yang dibina	40%	45%	4.628.000.000	50%	3.145.880.000	60%	2.000.000.000	70%	2.040.000.000	80%	2.080.800.000	80%	13.894.680.000	Dinas Syariat Islam
	Pembinaan Kehidupan Beragama	Persentase Pembinaan Kehidupan Beragama	60%		-		-	75%	300.000.000	80%	306.000.000	85%	312.120.000	100%	918.120.000	Dinas Syariat Islam
	Pengembangan, Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an	Persentase Masyarakat yang Memahami Al-Qur'an	n/a		-		-	50%	3.000.000.000	60%	3.060.000.000	70%	3.121.200.000	80%	9.181.200.000	Dinas Syariat Islam
	Pembinaan Dakwah dan syi'ar Islam	Persentase Syi'ar			-		-	100%	800.000.000	100%	816.000.000	100%	832.320.000	100%	2.448.320.000	Dinas Syariat Islam
	Program Peningkatan Peran dan Sumberdaya Ulama dalam Pembangunan	Persentase peran ulama dalam kehidupan bermasyarakat	20%		-	20%	2.363.431.000	20%	2.445.314.000	20%	2.495.314.000	20%	2.520.267.000	20%	9.824.326.000	MPU
	Program Peningkatan Silaturahmi dan Koordinasi Antara Umara dan Ulama	Persentase peran ulama dalam penetapan kebijakan pemerintah	100%		-	100%	85.000.000	100%	105.686.000	100%	107.900.000	100%	110.780.000	100%	409.366.000	MPU
1.4.2	Meningkatnya Penegakan Syariat Islam	Angka Pelanggaran terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam	0,148	0,138		0,129		0,121		0,112		0,099		0,099		
	Program Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam	Angka Pelanggaran terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam	0,148	0,138	4.220.000.000	0,129	3.436.653.000	0,121	3.560.839.173	0,112	3.639.781.345	0,099	3.713.483.224	0,099	18.570.756.743	Dinas Syariat Islam, Satpol PP dan WH
2	Misi II : Meningkatkan pembangunan SDM yang profesional, berkualitas dan pengarusutamaan gender sesuai dengan tuntunan Syari'at Islam															
	Tujuan :															
2.1	Meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu, islami dan berdaya saing															
	Sasaran :															
2.1.1	Meningkatnya partisipasi sekolah	APM	75,67%	77,50%		82,50%		88,50%		93%		95%		95%		
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	48%	50%	1.750.000.000	60%	1.724.600.000	75%	1.772.046.000	90%	1.825.207.000	100%	1.861.711.000	100%	8.933.564.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rata-rata APM SD dan SMP		77,50%	13.998.800.000	82,50%	16.336.800.000	88,50%	16.500.168.000	93%	16.795.173.000	95%	17.131.076.000	95%	80.762.017.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.1.2	Meningkatnya kualitas SDM	Angka rata-rata lama sekolah		9%		9,5%		10%		10,5%		11%		11%		
	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Angka Melek Huruf	95%	96%	455.000.000	97%	125.500.000	98%	459.550.000	99%	473.336.500	99,50%	482.802.910	99,50%	1.996.189.410	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	10314 org	10520 org	320.000.000	10731 org	237.040.000	10945 org	241.780.800	11164 org	500.000.000	11387 org	510.000.000	11387 org	1.808.820.800	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Peningkatan Sarana Fasilitas Pelayanan Perpustakaan	Persentase sarana dan prasarana perpustakaan dalam kondisi baik	70%	70%	-	70%	-	85%	250.000.000	90%	100.000.000	95%	100.000.000	95%	450.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Pengembangan Sumber daya Aparatur Perpustakaan	Persentase aparatur perpustakaan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30%		-		-	60%	100.000.000	70%	100.000.000	80%	100.000.000	80%	300.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya pelayanan MPD	100%	100%	492.000.000	100%	492.600.000	100%	502.452.000	100%	512.501.040	100%	522.751.061	100%	2.522.304.101	MPD
2.1.3	Terlaksananya pendidikan yang berbasis islami dan kearifan lokal	Persentase sekolah yang melaksanakan integrasi pendidikan	n/a	-		10%		20%		30%		40%		40%		
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah yang melaksanakan integrasi pendidikan	-	-	1.016.000.000	10%	4.844.930.000	20%	4.893.379.300	30%	5.040.180.000	40%	5.140.983.000	40%	20.935.472.300	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah yang melaksanakan integrasi Pendidikan	-	-	274.000.000	10%	287.879.554	20%	293.637.145	30%	299.509.888	40%	305.500.086	40%	1.460.526.673	MPD
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase dayah yang mandiri	0%	30%	320.000.000	50%	270.000.000	60%	275.400.000	70%	280.908.000	80%	286.526.160	100%	1.432.834.160	Dinas Pendidikan Dayah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah	Persentase Dayah dalam kondisi baik	81%	100%	1.000.000.000	100%	761.580.000	100%	776.811.600	100%	792.347.832	100%	808.194.789	100%	4.138.934.221	Dinas Pendidikan Dayah
	Program Pembinaan Tenaga, Lembaga dan Pengembangan Syariat Islam	Persentase dayah yang dibina	46%	100%	7.617.000.000	100%	7.688.460.000	100%	7.784.362.533	100%	7.939.833.598	100%	8.098.630.270	100%	39.128.286.400	Dinas Pendidikan Dayah
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase mutu pendidik pada Dayah	97,33%		-		-	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	300.000.000	Dinas Pendidikan Dayah
	Program Pemberdayaan Santri	Persentase Kemandirian Santri	15,00%		-		-	30%	100.000.000	40%	102.000.000	50%	104.040.000	60%	306.040.000	Dinas Pendidikan Dayah
2.1.4	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik yang Lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)	19%	23%		30%		40%		50%		60%		60%		
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang lulus UKG	19%	23%	933.000.000	30%	115.000.000	40%	534.480.000	50%	550.514.000	60%	561.524.000	60%	2.694.518.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Perencanaan Dan Pengawasan/Monitoring Dan Evaluasi	Tingkat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelayanan Pendidikan	100%	100%	9.000.000	100%	89.340.000	100%	91.126.800	100%	92.949.336	100%	94.808.323	100%	377.224.459	MPD
	Tujuan :															
2.2	Meningkatkan Peran Perempuan dalam pembangunan															
	Sasaran															
2.2.1	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Persentase keterwakilan perempuan dalam proses pembangunan	15,00%	20%		22,00%		25,00%		28,00%		30%		30%		
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase keterwakilan perempuan dalam proses pembangunan	15,00%	20%	-	22,00%	100.410.000	25,00%	102.418.200	28,00%	150.000.000	30%	153.000.000	30%	505.828.200	Dinas Sosial dan P3A

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase kelompok binaan PKK	56,34%	59,74%	750.000.000	63,14%	367.217.000	66,54%	374.561.340	69,94%	395.000.000	70,00%	402.900.000	70,00%	2.289.678.340	DPMP2KB
	Tujuan :															
2.3	Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak															
	Sasaran :															
2.3.1	Berkurangnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak		80 kasus		60 kasus		55 kasus		40 kasus		30 kasus		30 kasus		
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan kualitas anak dan perempuan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pemahaman dan sosialisasi tentang perlindungan anak dan perempuan	75%	78%	210.000.000	85%	171.489.500	87%	174.919.290	90%	190.000.000	93%	193.800.000	0,93	940.208.790	Dinas Sosial dan P3A
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	100,00%	100,00%	516.119.587	100,00%	435.335.000	100,00%	444.041.700	100,00%	465.000.000	100%	474.300.000	100%	2.334.796.287	Dinas Sosial dan P3A
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	75,00%	100,00%	287.496.420	100,00%	23.835.000	100,00%	24.311.700	100,00%	75.000.000	100%	100.000.000	100%	510.643.120	Dinas Sosial dan P3A
	Tujuan :															
2.4	Meningkatkan prestasi olahraga dan kemandirian pemuda															
	Sasaran :															
2.4.1	Meningkatnya Prestasi olahraga	Persentase atlet berprestasi	25,00%	25,00%		25,00%		30%		35%		40%		40%		
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Cakupan pembinaan olahraga	60,00%	65,00%	217.980.000	70,00%	641.466.000	75,00%	654.295.320	80,00%	670.000.000	85,00%	683.400.000	85,00%	2.867.141.320	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	65,00%		3.300.000.000	70,00%	920.000.000	75,00%	938.400.000	80,00%	957.168.000	85,00%	976.311.360	85,00%	7.091.879.360	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Persentase atlet berprestasi	25,00%	25,00%	-	25,00%	-	30%	200.000.000	35%	204.000.000	40%	208.080.000	40%	612.080.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2.4.2	Meningkatnya kemandirian pemuda	Persentase wirausaha muda	15%	20%		23%		30%		40%		50%		50%		
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase Peran Pemuda dalam Pembangunan	15%	20%	550.000.000	23%	170.000.000	26%	173.400.000	29%	176.868.000	32%	180.405.360	32%	1.250.673.360	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Program Peningkatan Upaya Pertumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase Wirausaha Muda	10%	20%		23%		30%	200.000.000	40%	204.000.000	50%	208.080.000	50%	612.080.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Persentase Penurunan Penyalahgunaan Narkoba	n/a						100.000.000		102.000.000		104.040.000		306.040.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Tujuan :															
2.5	Menguatkan tatanan budaya dan adat istiadat															
	Sasaran :															
2.5.1	Menguatnya tatanan budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami	Persentase kekayaan dan keragaman budaya yang dikelola	40%	50%		60%		70%		80%		85%		85%		
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase kekayaan budaya yang dikelola	40%	50%	210.000.000	60%	327.500.000	70%	334.050.000	80%	500.000.000	85%	510.000.000	85%	1.881.550.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Situs Sejarah kekayaan budaya dan adat istiadat yang dipelihara/dilestarikan	0%		-	5%	250.000.000	5%	255.000.000	5%	260.100.000	5%	265.302.000	20%	1.030.402.000	MAA
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase keragaman budaya yang dikelola	40%	50%	2.729.542.350	60%	218.550.000	70%	222.921.000	80%	275.000.000	85%	280.500.000	85%	3.726.513.350	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase nilai budaya yang berkembang	40%			50%	175.000.000			55%	500.000.000	60%	2.200.000.000	60%	2.875.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Hukum Adat	Persentase Gampong yang menerapkan administrasi peradilan adat	0,70%	1,20%	60.000.000	5%	60.000.000	9%	61.200.000	10%	62.424.000	15%	63.672.480	40,90%	307.296.480	MAA
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Tersedianya pelayanan MAA	100%	100%	430.000.000	100%	384.520.000	100%	392.210.400	100%	400.054.608	100%	408.055.700	100%	2.014.840.708	MAA
	Program Pengembangan dan Pelestarian Adat	Jumlah Keputusan, Seruan, Himbauan, Naskah hasil kajian adat istiadat yang diadopsi oleh pemerintah daerah dan masyarakat	2 Dokumen		-		-	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	55.999.999	2 Dokumen	60.000.000	6 Dokumen	165.999.999	MAA
3	Misi III : Meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan yang bermutu															
	Tujuan :															
3.1	Meningkatkan Layanan Kesehatan yang Bermutu															
	Sasaran :															
3.1.1	Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	68,51	71		71,5		71,6		71,7		71,9		71,9		
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	87%	90%	85.621.200.000	92%	63.668.200.000	94%	64.578.246.000	96%	68.452.940.000	98%	73.244.645.800	98%	355.565.231.800	Dinas Kesehatan
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase puskesmas yang direhabilitasi	38%	56%	2.900.000.000	69%	500.000.000	84%	500.000.000	94%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	4.900.000.000	Dinas Kesehatan
	Program Pembangunan Sarana Prasarana kesehatan	Persentase Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam kondisi baik	10	20	100.000.000	30	80.000.000	40	91.800.000	50	93.636.000	60	95.508.720	70	460.944.720	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan, Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan	Persentase Alkes yang memadai di faskes	n/a	30	-	40	453.800.000	50	458.338.000	60	462.921.000	70	472.179.420	70	1.847.238.420	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan Primer Puskesmas dan Jaringannya	Persentase Puskesmas yang di Akreditasi	n/a		-		-	80%	50.000.000	90%	51.000.000	100%	52.020.000	100%	153.020.000	Dinas Kesehatan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.1.2	Meningkatnya mutu layanan kesehatan ibu	Angka Kematian Ibu														
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	84,16%	86,86%	155.000.000	89,57%	692.000.000	92,28%	698.920.000	94%	705.909.000	95%	720.027.180	95%	2.971.856.180	Dinas Kesehatan
3.1.3	Meningkatnya mutu layanan kesehatan Bayi	Angka Kematian Bayi	5/1000 KH	4/1000 KH		4/1000 KH		4/1000 KH		3/1000 KH		3/1000 KH		3/1000 KH		
	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita dan Gizi	Angka Kematian Bayi	5/1000 KH	4/1000 KH	96.500.000	4/1000 KH	106.500.000	4/1000 KH	107.565.000	3/1000 KH	108.640.000	3/1000 KH	110.812.800	3/1000 KH	530.017.800	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Imunisasi dan pencegahan penyakit	Persentase kegiatan Imunisasi	70	75	-	80	528.440.000	82	483.724.000	85	488.061.000	90	497.822.220	90	1.998.047.220	Dinas Kesehatan
3.1.4	Meningkatnya Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)															
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase promosi/penyuluhan kesehatan yang dilakukan	84,24	86,21	275.000.000	90	360.000.000	90,43	363.600.000	93,43	370.872.000	100	378.289.440	100	1.747.761.440	Dinas Kesehatan
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan rumah sehat	65%	70%	120.000.000	75%	535.000.000	80%	540.350.000	85%	551.157.000	87%	562.180.140	87%	2.308.687.140	Dinas Kesehatan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Persentase Kasus PTM yang tertangani	100	100	-	100	653.000.000	100	659.530.000	100	666.125.000	100	679.447.500	100	2.658.102.500	Dinas Kesehatan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase KLB yang tertangani	100	100	297.500.000	100	2.598.260.000	100	2.624.242.000	100	2.650.484.000	100	2.703.493.000	100	10.873.979.000	Dinas Kesehatan
3.1.5	Meningkatnya kinerja rumah sakit	Indek kepuasan pasien		80%		82%		83%		84%		85%		85%		
	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Bed Occupancy Rate (Tingkat Hunian RS) penduduk miskin	83%	0,83	270.480.000	84%	214.280.000	84%	247.227.600	85%	252.172.000	85%	257.215.440	85%	1.241.375.040	RSUCM
	Program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan	85%	0,86	91.514.588.000	87%	115.658.113.000	88%	116.414.694.000	89%	117.578.840.131	90%	124.457.782.138	90%	565.624.017.269	RSUCM
	Program Pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit kondisi baik	80%	-	-	-	-	83%	867.000.000	84%	884.340.000	85%	902.026.800	85%	2.653.366.800	RSUCM
3.1.6	Meningkatnya Fasilitas kesehatan sesuai standar	Menurunnya angka rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi		4194		4000		3900		3800		3700		3700		
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Cakupan Fasilitas yang terstandar sesuai dengan tipe rumah sakit	75%	-	77%	70.000.000	78%	71.400.000	79%	72.828.000	80%	74.284.560	80%	288.512.560	RSUCM	
3.1.7	Meningkatnya pengembangan dan kualitas Sumber Daya Manusia	Anka pegawai yang melanjutkan pendidikan sesuai kompetensi		35		15		15		10		10		85		
	Program Peningkatan Sumber daya kesehatan	Cakupan Tenaga terampil sesuai kompetensi di bidangnya	39%	-	-	-	-	45%	500.000.000	47%	510.000.000	50%	520.200.000	50%	1.530.200.000	RSUCM
3.1.8	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan penduduk	2,04%	1,93%		1,82%		1,71%		1,60%		1,60%		1,60%		
	Program Keluarga Berencana	Ratio Akseptor KB	68,72%	70%	68.000.000	71,22%	132.910.000	72,47%	135.568.200	73,72%	140.000.000	75,00%	142.800.000	75,00%	619.278.200	DPMP2KB

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	n/a		-	5,56%	50.000.000	5,56%	51.000.000	5,56%	75.000.000	5,56%	76.500.000	25,00%	252.500.000	DPMP2KB
	Program Persediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah	Persentase Capaian Jumlah TK/RA	-	-	-	-	-	5	191.000.000	5	355.000.000	5	229.626.000	15	775.626.000	DPMP2KB
4	Misi IV : Meningkatkan infrastruktur dasar dan pemerintahan dengan memperhatikan penataan ruang, kelestarian lingkungan dan mendukung pertanian berkelanjutan															
	Tujuan :															
4.1	Meningkatkan Infrastruktur dasar publik dan pengembangan wilayah															
	Sasaran :															
4.1.1	Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan	Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan	47,70%	52,30%		57,80%		62,60%		67,10%		72,10%		72,10%		
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase terhubungnya pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas)	100,00%	100,00%	13.083.718.200	100,00%	7.453.960.000	100,00%	7.528.499.600	100,00%	7.904.924.000	100,00%	8.221.120.960	100,00%	44.192.222.760	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase tingkat kondisi jalan baik dan sedang	47,70%	52,30%	7.324.000.000	57,80%	3.877.030.000	62,60%	3.954.570.600	67,10%	4.073.207.000	72,10%	4.154.671.000	72,10%	23.383.478.600	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan	70,00%	100,00%	455.075.000	100,00%	282.757.800	100,00%	368.916.000	100,00%	376.294.000	100,00%	383.819.880	100,00%	1.866.862.680	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.1.2	Meningkatnya infrastruktur pendukung pertanian	Persentase Luasan pertanian terairi														
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase perkembangan jaringan pengairan	34,70%	39,10%	3.762.255.000	44,30%	5.478.006.250	48,50%	3.950.000.000	53,80%	4.068.500.000	61,10%	4.149.870.000	61,10%	21.408.631.250	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Persentase pemanfaatan sumber air alami	2%		195.000.000	2%	198.900.000	2%	202.878.000	2%	250.000.000	2%	255.000.000	8%	1.101.778.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase Tingkat Ketersediaan Air Baku	100%		-	100%	61.544.800	100,00%	62.775.696	100,00%	150.000.000	100,00%	153.000.000	100,00%	427.320.496	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.1.3	Tersedianya dokumen perencanaan dan data base infrastruktur	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan data base infrastruktur	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
	Program Survey Investigasi dan Pemutakhiran data base	Persentase jalan,jembatan dan bangunan air yang diinspeksi dan disurvey	100%	100%	-	100%	150.000.000	100%	153.000.000	100%	156.060.000	100%	159.181.200	100%	618.241.200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Perencanaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi	Persentase Tingkat Ketersediaan Dokumen	100%	100%	-	100%	1.356.472.500	100,00%	1.383.601.000	100,00%	1.411.273.000	100,00%	1.439.498.000	100,00%	5.590.844.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Sistim Informasi Keciptakarya	Persentase Ketersediaan data dan informasi keciptakarya	61,25%	62,25%	50.000.000	65,25%	51.000.000	67,25%	52.020.000	69,25%	55.000.000	71,25%	56.100.000	67,25%	264.120.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Perencanaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi	Tingkat Ketersediaan Dokumen	100,00%			100,00%	779.547.000	100,00%	787.342.470	100,00%	826.709.594	100,00%	868.045.073	100,00%	3.261.644.137	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.1.4	Meningkatnya ketersediaan dan akses air bersih	Persentase akses air bersih	63,58%	65,56%		67,61%		69,78%		72,03%		74,43%		74,43%		
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi	Persentase penduduk berakses air minum	60,70%	62,70%	2.280.000.000	64,70%	1.037.190.200	66,70%	1.057.934.004	68,70%	1.079.092.000	70,70%	1.100.673.000	70,70%	6.554.889.204	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.1.5	Meningkatnya prasarana lingkungan pemukiman	Persentase Rumah Tangga dengan Akses sanitasi	57,85%	60,67%		63,82%		67,09%		70,43%		73,95%		73,95%		
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase rumah tinggal bersanitasi	57,85%	60,67%	233.000.000	63,92%	116.200.000	67,09%	326.524.000	70,43%	332.894.000	73,95%	339.312.000	73,95%	1.347.930.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, SETDAKAB
	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	56,15%	59,15%	1.193.500.000	62,15%	553.080.000	65,15%	564.141.600	68,15%	569.783.000	71,15%	581.178.660	65,15%	3.461.683.260	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase Luas areal Pemakaman terkelola				0,37	200.000.000		204.000.000		206.000.000		210.000.000		820.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Persentase gampong dengan infrastruktur baik	n/a		4.191.850.000		3.361.630.000		3.428.862.600		3.463.151.000		3.532.414.000		17.977.907.600	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.1.6	Meningkatnya infrastruktur perumahan	Persentase rumah layak huni	84,72%	86,24%		87,81%		89,43%		91,10%		92,82%		92,82%		
	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	85,45%	85,46%	850.000.000	85,47%	1.505.000.000	85,48%	1.535.100.000	85,49%	1.565.802.000	85,50%	1.597.118.000	85,50%	7.053.020.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.1.7	Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran	Persentase gedung kantor yang berlokasi di Kabupaten Aceh Utara	34,37%	40,62%		46,87%		53,12%		59,37%		65,62%		65,62%		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase gedung kantor yang berlokasi di Kabupaten Aceh Utara	34,37%	40,62%	42.321.480.758	46,87%	24.276.910.000	53,12%	18.622.000.000	59,37%	25.000.000.000	65,62%	15.000.000.000	65,62%	125.220.390.758	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Pengembangan Ibukota Kabupaten	Persentase Pemindahan SKPK	34,37%	40,62%	200.000.000	46,87%	212.000.000	53,12%	216.240.000	59,37%	220.564.800	65,62%	224.976.096	65,62%	1.073.780.896	SETDAKAB
4.1.8	Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW	Persentase ketaatan terhadap RTRW	n/a	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang	n/a	-	100%	575.000.000	100,00%	500.000.000	100,00%	500.000.000	100,00%	500.000.000	100,00%	2.075.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Dokumen tata ruang	n/a	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100,00%	222.000.000	100,00%	224.040.000	100,00%	226.120.800	100,00%	872.160.800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Setdakab
4.1.9	Meningkatnya pelayanan angkutan	Persentase pelayanan angkutan	90%	90%		90%		93%		93%		95%				
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Rehabilitasi prasarana	79%	100%	90.000.000	100%	43.500.000	100%	44.370.000	100%	100.000.000	100%	102.000.000	100%	379.870.000	Dinas Perhubungan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Persentase layanan angkutan darat	100%	100%	1.382.870.000	100%	1.299.615.410	100%	1.325.607.718	100%	1.352.119.000	100%	1.419.724.084	100%	6.779.936.211	Dinas Perhubungan
	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Tingkat keselamatan berlalu lintas	n/a	100%	300.500.000		-	100%	303.505.000	100%	310.000.000	100%	325.499.145	100%	1.239.504.145	Dinas Perhubungan
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	51,2	51,45	160.000.000	51,75	225.525.000	52,05	230.035.500	52,35	235.000.000	52,6	239.700.000	52,6	1.090.260.500	Dinas Perhubungan
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Udara	Tingkat Pelayanan Angkutan Udara	n/a	100%	990.000.000	100%	979.636.690	100%	999.229.424	100%	1.029.206.000	100%	1.049.790.120	100%	5.047.862.233	Dinas Perhubungan
4.1.10	Meningkatnya pelayanan pertanian	Persentase tanah PEMDA yang bersertifikat														
	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah	Persentase fasilitasi pengadaan tanah	n/a		-		-	100%	228.697.770	100%	250.000.000	100%	255.000.000	100%	733.697.770	Dinas Pertanahan
	Program Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara	Persentase fasilitasi pengadaan tanah	n/a		-	100%	224.213.500		-		-		-		224.213.500	Dinas Pertanahan
	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase ketersediaan data dan informasi pertanahan	n/a		-		-	25%	200.000.000	50%	300.000.000	75%	300.000.000	75%	800.000.000	Dinas Pertanahan
4.1.11	Terpenuhinya operasional lampu jalan	Cakupan pelayanan operasional lampu jalan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Program Perbaikan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman	Cakupan pelayanan operasional lampu jalan	100%	100%	11.245.931.041	100%	11.445.920.000	100%	11.674.838.400	100%	12.258.580.000	100%	12.871.509.000	100%	59.496.778.441	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Tujuan:															
4.2	Meningkatkan kesiapsiagaan dan Kewaspadaan dalam Penanggulangan Bencana															
	Sasaran:															
4.2.1	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Tingkat Resiko Bencana	Tinggi	Tinggi		Tinggi		Sedang		Sedang		Sedang		Sedang		
	Program Pengendalian Banjir	Persentase pengurangan area genangan banjir	3,00%	3,00%	2.286.318.000	3,00%	2.814.269.000	3,00%	2.870.554.380	3,00%	2.927.965.000	3,00%	2.986.524.000	15,00%	13.885.630.379	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Rehabilitasi dan Rekontruksi	Persentase tingkat pelayanan rehabilitasi dan rekontruksi	65%	65%	205.000.000	85%	140.000.000	87%	142.800.000	87%	145.656.000	100%	148.569.000	100%	782.025.000	BPBD
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase tingkat pelayanan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan	65%	65%	643.581.000	70%	339.236.000	75%	346.020.720	80%	352.941.000	90%	359.999.000	90%	2.041.777.721	BPBD
	Program Forum Pengurangan Resiko Bencana	Persentase pengurangan resiko bencana	65%	65%	159.120.000	68%	115.320.000	70%	117.626.400	75%	120.000.000	90%	122.400.000	100%	634.466.400	BPBD
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	75%	75%	778.840.000	78%	941.439.000	80%	960.267.780	85%	985.000.000	98%	1.004.700.000	90%	4.670.246.780	BPBD
	Program Kedaruratan, Logistik dan Peralatan Kebencanaan	waktu persiapan penanggulangan bencana	60 menit	60 menit	723.770.000	60 menit	760.354.000	60 menit	775.561.080	60 menit	795.000.000	60 menit	810.900.000	60 menit	3.865.585.080	BPBD

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	100%	100%	2.495.470.000	100%	2.758.765.000	100%	2.813.940.000	100%	2.954.637.000	100%	3.013.729.000	100%	14.036.541.000	BPBD
	Tujuan:															
4.3	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup															
	Sasaran:															
4.3.1	Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup (air, udara dan tutupan lahan)	n/a	55		60		65		70		75		75		
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	n/a	55	571.262.200	60	442.210.000	65	451.054.200	70	475.000.000	75	480.000.000	75	2.419.526.400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan Hidup	100%	100%	91.200.000	100%	156.430.000	100%	159.558.600	100%	175.000.000	100%	178.500.000	100%	760.688.600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	21,49%	23,99%	8.300.000.000	27%	8.337.170.000	29%	8.503.913.400	32%	8.929.109.000	35%	9.018.400.000	35%	43.088.592.400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Pengelolaan dan Penataan Taman Kawasan Perkotaan	Persentase taman kota yang tertata	100%	100%	122.000.000	100%	252.590.000	100%	257.641.800	100%	275.000.000	100%	280.500.000	100%	1.187.731.800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya konservasi SDA	25%		-		-	25%	725.000.000	25%	775.000.000	25%	800.000.000	75%	2.300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	Meningkatnya pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	25%		-		-	25%	375.000.000	25%	400.000.000	25%	475.000.000	75%	1.250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
5	Misi V: Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi potensi daerah, perbaikan iklim investasi, pemberdayaan gampong yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan															
	Tujuan:															
5.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata															
	Sasaran:															
5.1.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	3,27	4,5		4,6		4,7		5		5,25		5,25		
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	8,2 T		255.000.000		149.330.000		452.316.000		525.000.000		600.000.000		1.981.646.000	SETDAKAB, Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Daerah	Nilai Ekspor	69,61 Rp (milyar)	72 rp(M)	36.210.000	73 rp(M)	53.850.000	74 rp(M)	100.000.000	75 rp(M)	150.000.000	76 rp(M)	153.000.000	76 rp(M)	493.060.000	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase meningkatnya jumlah Kunjungan wisata	n/a	2,00%	450.000.000	2,00%	324.749.500	2,00%	331.244.490	2,00%	500.000.000	2,00%	510.000.000	10,00%	2.115.993.990	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase meningkatnya jumlah Kunjungan wisata	n/a		-	2,00%	200.000.000	2,00%	200.000.000	2,00%	500.000.000	2,00%	200.000.000	8%	1.100.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Persentase Kemitraan dengan Dunia Usaha	n/a		-		-	15%	150.000.000	17%	250.000.000	19%	200.000.000	19%	600.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
5.1.2	Menurunnya ketimpangan pendapatan	Gini Rasio	0,269	0,265		0,262		0,259		0,255		0,251		0,251		
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan kelompok tani yang dibina	25%		-	30%	26.230.000	40%	500.000.000	50%	510.000.000	60%	520.200.000	60%	1.556.430.000	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan kelompok tani (perkebunan) yang dibina	10%	12%	57.010.000	15%	136.670.000	20%	150.000.000	23%	200.000.000	30%	300.000.000	30%	843.680.000	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Tujuan:															
5.2	Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran															
	Sasaran:															
5.2.1	Menurunnya tingkat kemiskinan	Persentase tingkat kemiskinan	19,46%	17,25%		16,45%		15,55%		14,85%		14,05%		14,05%		
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	20,00%	25,00%	1.262.600.000	30,00%	1.451.746.000	40,00%	1.480.780.920	50,00%	1.554.819.000	55,00%	1.585.915.000	55,00%	7.335.860.920	Dinas Sosial dan P3A
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase Penyandang disabilitas dan eks trauma yang mendapat bantuan	20,00%	25,00%	125.000.000	30,00%	150.000.000	35,00%	153.000.000	40,00%	250.000.000	50,00%	255.000.000	50,00%	933.000.000	Dinas Sosial dan P3A
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Persentase Pembinaan Kelembagaan Sosial	35,00%	47,00%	450.000.000	50,00%	618.824.000	68,00%	631.200.480	75,00%	643.824.000	80,00%	650.000.000	80,00%	2.993.848.480	Dinas Sosial dan P3A
	Program Keluarga Harapan (PKH)	Meningkatnya Persentase penerima manfaat Program keluarga harapan	20,00%	41,00%	500.000.000	53,00%	373.885.000	62,00%	381.362.700	66,00%	388.989.000	71,00%	390.000.000	71,00%	2.034.236.700	Dinas Sosial dan P3A
	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	Persentase panti asuhan/pati jompo yang dibina	30,00%	30,00%	-	40,00%	50.000.000	45,00%	51.000.000	50,00%	150.000.000	55,00%	153.000.000	55,00%	404.000.000	Dinas Sosial dan P3A
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Persentase Gepeng yang mendapat bantuan	30,00%	30,00%	-	40,00%	27.250.000	45,00%	27.795.000	50,00%	200.000.000	55,00%	204.000.000	55,00%	459.045.000	Dinas Sosial dan P3A
	Program Bantuan Sosial, Rastra dan BPNT	Meningkatnya persentase Penerima Manfaat Bantuan Sosial, Rastra dan BPNT	29,00%		-	58,00%	125.000.000	66,00%	127.500.000	71,00%	200.000.000	75,00%	200.000.000	75,00%	652.500.000	Dinas Sosial dan P3A
5.2.2	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Persentase tingkat pengangguran terbuka	11,02%	10,00%		8,50%		8,00%		7,50%		6,90%		6,90%		
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat dan kewirausahaan	20%	20%	336.000.000	20%	330.000.000	20%	336.600.000	20%	900.000.000	20%	918.000.000	100%	2.820.600.000	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100%	100%	113.000.000	100%	151.990.000	100%	155.029.800	100%	162.781.000	100%	165.000.000	100%	747.800.800	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	20%		-	20%	100.000.000	20%	102.000.000	20%	250.000.000	20%	255.000.000	20%	707.000.000	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Peningkatan sarana Pemukiman Transmigrasi			118.000.000		800.000.000		816.000.000		832.320.000		848.966.400		3.415.286.400	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Tujuan:															
5.3	Mengendalikan Inflasi Daerah															
	Sasaran:															
5.3.1	Terkendalinya tingkat inflasi daerah	Tingkat inflasi	4%	4%		4%		3%		3%		3%		3%		
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Tingkat Inflasi	4%	4%	200.000.000	4%	260.850.000	3%	275.000.000	3%	375.000.000	3%	382.500.000	0,03	1.493.350.000	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan	Tingkat Pelanggaran Terhadap Konsumen	n/a	40%	190.000.000		200.000.000	30%	200.000.000	25%	200.000.000	20%	200.000.000	20%	990.000.000	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Tujuan:															
5.4	Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan															
	Sasaran:															
5.4.1	Meningkatnya produksi hasil pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	4,77	5		5,25		5,4		5,5		5,6		5,6		
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Tingkat Produktivitas Pangan Utama	5,03 ton/ha	5,28	1.156.870.000	5,35	1.000.650.000	5,4	1.020.663.000	5,45	1.100.000.000	5,5	1.022.000.000	5,5	5.300.183.000	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Nilai ekspor pertanian			98.260.000		233.140.000		237.802.800		250.000.000		255.000.000		1.074.202.800	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Produktivitas padi	5,03 ton/ha	5,28	1.153.950.000	5,35	673.510.000	5,4	900.000.000	5,45	918.000.000	5,5	936.360.000	5,5	4.581.820.000	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Jumlah produksi padi	440.738,83 ton	442862	1.267.410.000	444726	1.951.700.000	446379	2.146.870.000	450216	2.361.557.000	455327	2.408.788.140	455327	10.136.325.140	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Peningkatan Produktivitas perkebunan unggulan	n/a	5%	166.450.000	5%	872.910.000	5%	900.000.000	5%	918.000.000	5%	936.360.000	25%	3.793.720.000	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Produksi perkebunan unggulan (kakao)	3.270 ton	3382	710.430.000	3421	1.816.470.000	3490	1.907.293.000	3560	2.002.657.000	3673	2.042.710.140	3673	8.479.560.140	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Tingkat kestabilan harga daging di hari-hari besar	90%	95%	109.080.000	100%	150.850.000	100%	155.000.000	100%	158.100.000	100%	161.262.000	100%	734.292.000	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Populasi ternak besar	108.045 ekor	110.052	391.360.000	112.075	959.430.000	114.126	978.618.000	121.000	1.000.000.000	125.000	1.020.000.000	125.000	4.349.408.000	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Penurunan kasus penyakit ternak	n/a	5%	756.470.000	5%	480.510.000	5%	490.120.200	5%	525.000.000	5%	535.500.000	25%	2.787.600.200	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Ketersediaan Pangan Utama	100%	100%	946.090.000	100%	486.110.000	100%	495.832.200	100%	550.000.000	100%	561.000.000	100%	3.039.032.200	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Pelestrasian Sumber Daya Perikanan	Persentase tingkat kelestarian sumber daya perikanan	n/a	-	-	16%	4.149.970.000	24%	2.500.000.000	32%	2.524.999.603	40%	2.500.000.000	40%	11.674.969.603	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Revitalisasi Penyuluh Perikanan	Persentase daya guna penyuluh perikanan	14%	-	-	-	-	42%	300.000.000	51%	300.000.000	60%	300.000.000	60%	900.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Penurunan Jumlah kasus ilegal fishing	5%	5%	74.730.000	5%	140.290.000	5%	150.000.000	5%	153.000.000	5%	156.060.000	25%	674.080.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya Jumlah produksi perikanan budi daya	5%	5%	951.000.000	5%	1.094.810.000	5%	1.200.000.000	5%	1.224.000.000	5%	1.248.480.000	25%	5.718.290.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Jumlah produksi perikanan tangkap	5%	5%	5.820.190.000	5%	359.000.000	5%	375.000.000	5%	382.500.000	5%	390.150.000	25%	7.326.840.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pembinaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Cakupan bina kelompok nelayan	41%	50,50%	272.630.000	56,89%	89.800.000	63,24%	100.000.000	65,98%	102.000.000	74,80%	104.040.000	74,80%	668.470.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah produksi perikanan	5%	5%	386.000.000	5%	56.100.000	5%	75.000.000	5%	76.500.000	5%	78.030.000	25%	671.630.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Tingkat konsumsi ikan per kapita pertahun	40,36 kg perkapita/thn	-	-	44,02 kg perkapita/thn	2.455.000.000	45,85 kg perkapita/thn	1.500.000.000	47,08 kg perkapita/thn	2.820.000.000	49,50 kg perkapita/thn	3.160.000.000	49,50 kg perkapita/thn	9.935.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengembangan Lingkungan Sosial	Meningkatnya prasarana usaha tani tembakau	n/a	5%	260.900.000	5%	267.370.000	5%	275.000.000	5%	280.500.000	5%	300.000.000	25%	1.383.770.000	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	Meningkatnya produksi perkebunan tembakau	200 ton	-	-	5%	267.370.000	5%	375.000.000	5%	400.000.000	5%	400.000.000	20%	1.442.370.000	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Tujuan:															
5.5	Menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis Agroidustri															
	Sasaran:															
5.5.1	Meningkatnya pembangunan berbasis industri, koperasi dan UMKM	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	-10,23	3,25		4		5,2		6		6,7		6,7		
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan bina kelompok pengrajin	4404 IKM	4448 IKM	333.000.000	4492 IKM	788.940.000	4537 IKM	867.834.000	4582 IKM	885.190.680	4628 IKM	902.894.494	4628 IKM	3.777.859.174	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Program Pengembangan industri pangan	Persentase industri pangan terhadap industri pengolahan	38,83%		-	39,05%	300.000.000	39,54%	315.000.000	39,81%	321.300.000	39,84%	327.726.000	39,84%	1.264.026.000	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Cakupan bina kelompok pengrajin	4404 IKM	4448 IKM	786.000.000	4492 IKM	750.080.000	4537 IKM	787.584.000	4582 IKM	803.335.680	4628 IKM	819.402.394	4628 IKM	3.946.402.074	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Jumlah sentra industri potensial	11 centra	11 centra	100.000.000	12 centra	385.080.000	13 centra	404.334.000	14 centra	412.420.680	15 centra	420.669.094	15 centra	1.722.503.774	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase UKM yang mendapat akses modal	51,78%	52,76%	143.610.000	55,05%	179.080.000	57,34%	182.661.600	59,54%	190.000.000	61,93%	193.800.000	61,93%	889.151.600	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	98,83%	98,83%	144.020.000	98,83%	100.000.000	98,83%	102.000.000	98,83%	150.000.000	98,83%	153.000.000	98,83%	649.020.000	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	27,92%	30,16%	37.220.000	33,87%	251.580.000	40,12%	256.611.600	45,76%	275.000.000	51,25%	280.500.000	51,25%	1.100.911.600	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentasewirausaha yang memahami wawasan dan etika berbisnis dan manajemen yang profesional	10,00%					15,00%	121.036.000	20,00%	125.000.000	30,00%	127.500.000	30,00%	373.536.000	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Program Pengembangan Data Koperasi dan UKM	Persentase ketersediaan data koperasi dan UKM	n/a	100,00%	110.330.000		-		-		-		-		110.330.000	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Program Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Pembinaan Koperasi dan UKM	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan koperasi dan UKM	n/a					100,00%	81.890.000	100,00%	85.000.000	100,00%	86.700.000	100,00%	253.590.000	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Tujuan:															
5.6	Meningkatkan Kapasitas Fiskal															
	Sasaran:															
5.6.1	Meningkatnya kontribusi PAD ke dalam APBD	Kontribusi PAD terhadap APBD														
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	Persentase sarana dan prasarana pasar kondisi baik	62,00%	72,00%	2.293.400.000	74,00%	930.440.000	80,00%	1.023.484.000	86,00%	1.043.953.680	92,00%	1.064.832.754	92,00%	6.356.110.434	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	53 perusahaan	62 perusahaan	177.000.000	65 perusahaan	200.500.000	68 perusahaan	204.510.000	70 perusahaan	208.600.200	75 perusahaan	212.772.204	75 perusahaan	1.003.382.404	SETDAKAB, Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan
	Program Pembinaan Tenaga, Lembaga dan Pengembangan Swariat Islam	Meningkatnya jumlah Muzakki			3.706.656.000		3.914.176.000		3.992.459.520		4.072.308.710		4.153.754.885		19.839.355.115	Baitul Mal

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Indikasi rencana program prioritas memuat program-program prioritas untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJM telah dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya program prioritas sebagai rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan setiap tahunnya dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara.

Kerangka pendanaan merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBK Aceh Utara. Kerangka pendanaan dialokasikan ke tiap-tiap program prioritas pada masing-masing urusan untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Program prioritas, capaian kinerja dan kerangka pendanaan menjadi pedoman bagi SKPK Aceh Utara untuk diimplementasikan ke dalam kegiatan prioritas selama lima tahun mendatang. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 - 2022 sebagaimana tercantum pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2022

Kode	Kapasitas Riil / Belanja	Proyeksi				
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kapasitas riil keuangan	1.909.398.933.334	2.181.920.429.443	2.216.250.147.380	2.253.583.693.085	2.295.857.392.032
2	Belanja	1.909.398.933.334	2.181.920.429.443	2.218.250.147.380	2.258.583.693.085	2.300.857.392.032
	Belanja Tidak Langsung	1.423.831.251.407	1.711.259.092.493	1.736.615.569.806	1.757.555.959.051	1.776.994.858.027
	Belanja Pegawai	696.838.139.018	734.259.092.493	757.615.569.806	777.555.959.051	796.994.858.027
	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	2.750.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
	Belanja Hibah	2.608.100.000	5.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
	Belanja Bantuan Sosial	11.088.723.500	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000
	Belanja Bagi Hasil	1.522.714.424	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
	Belanja Bantuan Keuangan	707.023.574.465	952.000.000.000	952.000.000.000	952.000.000.000	952.000.000.000
	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
3	Belanja Langsung	485.567.681.927	470.661.336.949	479.634.577.574	496.027.734.034	518.862.534.005

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				298.860.804.999		287.679.060.350		284.571.612.330		299.243.609.424		303.949.415.040		1.474.304.502.144	
1.1	Pendidikan				18.152.800.000		23.146.830.000		24.159.623.300		24.684.410.500		25.178.096.910		115.321.760.710	
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	48,00%	50,00%	1.750.000.000	60,00%	1.724.600.000	75,00%	1.772.046.000	90,00%	1.825.207.000	100%	1.861.711.000	100%	8.933.564.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rata-rata APM SD dan SMP		77,50%	13.998.800.000	82,50%	16.336.800.000	88,50%	16.500.168.000	93,00%	16.795.173.000	95,00%	17.131.076.000	95,00%	80.762.017.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Angka Melek Huruf	95,39%	96,00%	455.000.000	97,00%	125.500.000	98,00%	459.550.000	99,00%	473.336.500	99,50%	482.802.910	99,50%	1.996.189.410	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang lulus UKG	19,00%	23,00%	933.000.000	30,00%	115.000.000	40,00%	534.480.000	50,00%	550.514.000	60,00%	561.524.000	60,00%	2.694.518.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah yang melaksanakan integrasi pendidikan	-	-	1.016.000.000	10%	4.844.930.000	20,00%	4.893.379.300	30,00%	5.040.180.000	40,00%	5.140.983.000	40,00%	20.935.472.300	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.2	Kesehatan				181.350.268.000		186.117.593.000		189.256.636.600		194.399.925.131		206.227.935.158		957.352.357.889	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	87,00%	90%	85.621.200.000	92%	63.668.200.000	94%	64.578.246.000	96%	68.452.940.000	98%	73.244.645.800	98%	355.565.231.800	Dinas Kesehatan
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase puskesmas yang direhabilitasi	38%	56%	2.900.000.000	69%	500.000.000	84%	500.000.000	94%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	4.900.000.000	Dinas Kesehatan
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	84%	87%	155.000.000	89,57%	692.000.000	92,28%	698.920.000	94,00%	705.909.000	95,00%	720.027.180	95,00%	2.971.856.180	Dinas Kesehatan
	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita dan Gizi	Angka Kematian Bayi	5/1000 KH	4/1000 KH	96.500.000	4/1000 KH	106.500.000	4/1000 KH	107.565.000	3/1000 KH	108.640.000	3/1000 KH	110.812.800	5/1000 KH	530.017.800	Dinas Kesehatan
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase promosi/penyuluhan kesehatan yang dilakukan	84,24	86,21	275.000.000	90	360.000.000	90,43	363.600.000	93,43	370.872.000	100	378.289.440	100	1.747.761.440	Dinas Kesehatan
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan rumah sehat	65	70	120.000.000	75	535.000.000	80	540.350.000	85	551.157.000	87	562.180.140	87	2.308.687.140	Dinas Kesehatan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase KLB yang tertangani	100	100	297.500.000	100	2.598.260.000	100	2.624.242.000	100	2.650.484.000	100	2.703.493.000	100	10.873.979.000	Dinas Kesehatan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Persentase Kasus PTM yang tertangani	100	100	-	100	653.000.000	100	659.530.000	100	666.125.000	100	679.447.500	100	2.658.102.500	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Imunisasi dan pencegahan penyakit	Persentase kegiatan Imunisasi	70	75	-	80	528.440.000	82	483.724.000	85	488.061.000	90	497.822.220	90	1.998.047.220	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan, Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan	Persentase Alkes yang memadai di faskes	n/a	30	-	40	453.800.000	50	458.338.000	60	462.921.000	70	472.179.420	70	1.847.238.420	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pembangunan Sarana Prasarana kesehatan	Persentase Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam kondisi baik	10	20	100.000.000	30	80.000.000	40	91.800.000	50	93.636.000	60	95.508.720	70	460.944.720	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan Primer Puskesmas dan Jaringannya	Persentase Puskesmas yang di Akreditasi	n/a	-	-	-	-	80%	50.000.000	90%	51.000.000	100%	52.020.000	100%	153.020.000	Dinas Kesehatan
	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Bed Occupancy Rate (Tingkat Hunian RS) penduduk miskin	83%	83%	270.480.000	84,00%	214.280.000	84,00%	247.227.600	85,00%	252.172.000	85,00%	257.215.440	85,00%	1.241.375.040	RSUCM
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Cakupan Fasilitas yang terstandar sesuai dengan tipe rumah sakit	75%	-	-	77%	70.000.000	78%	71.400.000	79%	72.828.000	80%	74.284.560	80%	288.512.560	RSUCM
	Program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan	85%	86%	91.514.588.000	87,00%	115.658.113.000	88,00%	116.414.694.000	89,00%	117.578.840.131	90,00%	124.457.782.138	90,00%	565.624.017.269	RSUCM
	Program Pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit kondisi baik	80%	-	-	-	-	83%	867.000.000	84%	884.340.000	85%	902.026.800	85%	2.653.366.800	RSUCM
	Program Peningkatan Sumber daya kesehatan	Cakupan Tenaga terampil sesuai kompetensi di bidangnya	39%	-	-	-	-	45%	500.000.000	47%	510.000.000	50%	520.200.000	50%	1.530.200.000	RSUCM
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				34.871.716.200		27.299.840.550		26.247.733.480		27.154.289.000		27.843.071.500		143.416.650.729	
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase terhubungnya pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas)	100,00%	100,00%	13.083.718.200	100,00%	7.453.960.000	100,00%	7.528.499.600	100,00%	7.904.924.000	100,00%	8.221.120.960	100,00%	44.192.222.760	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase tingkat kondisi jalan baik dan sedang	47,70%	52,30%	7.324.000.000	57,80%	3.877.030.000	62,60%	3.954.570.600	67,10%	4.073.207.000	72,10%	4.154.671.000	72,10%	23.383.478.600	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan	70,00%	100,00%	455.075.000	100,00%	282.757.800	100,00%	368.916.000	100,00%	376.294.000	100,00%	383.819.880	100,00%	1.866.862.680	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase perkembangan jaringan pengairan	34,70%	39,10%	3.762.255.000	44,30%	5.478.006.250	48,50%	3.950.000.000	53,80%	4.068.500.000	61,10%	4.149.870.000	61,10%	21.408.631.250	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Persentase pemanfaatan sumber air alami	2,00%		195.000.000	2,00%	198.900.000	2,00%	202.878.000	2,00%	250.000.000	2,00%	255.000.000	8,00%	1.101.778.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengendalian Banjir	Persentase pengurangan area genangan banjir	3,00%	3,00%	2.286.318.000	3,00%	2.814.269.000	3,00%	2.870.554.380	3,00%	2.927.965.000	3,00%	2.986.524.000	3,00%	13.885.630.379	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	56,15%	59,15%	1.193.500.000	62,15%	553.080.000	65,15%	564.141.600	68,15%	569.783.000	71,15%	581.178.660	65,15%	3.461.683.260	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Persentase gampong dengan infrastruktur baik	n/a		4.191.850.000		3.361.630.000		3.428.862.600		3.463.151.000		3.532.414.000		17.977.907.600	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi	Persentase penduduk berakses air minum	60,70%	62,70%	2.280.000.000	64,70%	1.037.190.200	66,70%	1.057.934.004	68,70%	1.079.092.000	70,70%	1.100.673.000	70,70%	6.554.889.204	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang			-	100%	575.000.000	100,00%	500.000.000	100,00%	500.000.000	100,00%	500.000.000	100,00%	2.075.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Dokumen tata ruang	n/a	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100,00%	222.000.000	100,00%	224.040.000	100,00%	226.120.800	100,00%	872.160.800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Setdakab
	Program Survey Investigasi dan Pemutakhiran data base	Persentase jalan,jembatan dan bangunan air yang diinspeksi dan disurvey	100%	100%	-	100%	150.000.000	100,00%	153.000.000	100,00%	156.060.000	100,00%	159.181.200	100,00%	618.241.200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Perencanaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi	Persentase Tingkat Ketersediaan Dokumen	100%	100%	-	100%	1.356.472.500	100,00%	1.383.601.000	100,00%	1.411.273.000	100,00%	1.439.498.000	100,00%	5.590.844.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase Tingkat Ketersediaan Air Baku	100%		-	100%	61.544.800	100,00%	62.775.696	100,00%	150.000.000	100,00%	153.000.000	100,00%	427.320.496	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				57.210.722.799		40.670.926.000		35.544.100.850		42.643.582.594		33.388.652.073		209.457.984.316	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase gedung kantor yang berlokasi di Kabupaten Aceh Utara	34,37%	40,62%	42.321.480.758	46,87%	24.276.910.000	53,12%	18.622.000.000	59,37%	25.000.000.000	65,62%	15.000.000.000	65,62%	125.220.390.758	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	85,45%	85,46%	850.000.000	85,47%	1.505.000.000	85,48%	1.535.100.000	85,49%	1.565.802.000	85,50%	1.597.118.000	85,50%	7.053.020.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Pengembangan Sistim Informasi Keciptakaryaan	Persentase Ketersediaan data dan informasi keciptakaryaan	61,25%		50.000.000	65,25%	51.000.000	67,25%	52.020.000	69,25%	55.000.000	71,25%	56.100.000	67,25%	264.120.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase rumah tinggal bersanitasi	57,85%	60,67%	233.000.000	63,92%	116.200.000	67,09%	326.524.000	70,43%	332.894.000	73,95%	339.312.000	73,95%	1.347.930.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan SETDAKAB
	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase Luas areal Pemakaman terkelola				0,37	200.000.000		204.000.000		206.000.000		210.000.000		820.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Perencanaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi	Tingkat Ketersediaan Dokumen	100,00%			100,00%	779.547.000	100,00%	787.342.470	100,00%	826.709.594	100,00%	868.045.073	100,00%	3.261.644.137	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Rehabilitasi dan Rekontruksi	Persentase tingkat pelayanan rehabilitasi dan rekontruksi	65,00%	65,00%	205.000.000	85,00%	140.000.000	87,00%	142.800.000	87,00%	145.656.000	100,00%	148.569.000	100,00%	782.025.000	BPBD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase tingkat pelayanan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan	65,00%	65,00%	643.581.000	70,00%	339.236.000	75,00%	346.020.720	80,00%	352.941.000	90,00%	359.999.000	90,00%	2.041.777.721	BPBD
	Program Forum Pengurangan Resiko Bencana	Persentase pengurangan resiko bencana	85,00%	65,00%	159.120.000	68,00%	115.320.000	70,00%	117.626.400	75,00%	120.000.000	90,00%	122.400.000	100,00%	634.466.400	BPBD
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	75,00%	75,00%	778.840.000	78,00%	941.439.000	80,00%	960.267.780	85,00%	985.000.000	98,00%	1.004.700.000	90,00%	4.670.246.780	BPBD
	Program Kedaruratan, Logistik dan Peralatan Kebencanaan	waktu persiapan penanggulangan bencana	60 menit	60 menit	723.770.000	60 menit	760.354.000	60 menit	775.561.080	60 menit	795.000.000	60 menit	810.900.000	60 menit	3.865.585.080	BPBD
	Program Perbaikan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman	Cakupan pelayanan operasional lampu jalan	100%	100%	11.245.931.041	100%	11.445.920.000	100%	11.674.838.400	100%	12.258.580.000	100%	12.871.509.000	100%	59.496.778.441	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				4.937.698.000		7.647.165.800		6.510.879.000		6.973.770.200		7.873.744.400		33.943.257.400	
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat koordinasi dan kerjasama dalam penyelesaian konflik	15,00%	30,00%	261.628.000	40,00%	550.000.000	50,00%	761.000.000	60,00%	797.220.000	85,00%	833.664.400	85,00%	3.203.512.400	Kesbangpol, Satpol PP
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat (PEKAT)	Tingkat penurunan kasus penyalahgunaan narkoba pertahun	1,00%	2,00%	250.000.000	2,00%	185.250.800	2,00%	188.955.000	2,00%	195.000.000	2,00%	198.900.000	10,00%	1.018.105.800	Kesbangpol
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase pembinaan parpol, OKP, Ormas, LSM dan WNA	100%	100%	84.000.000	100%	2.097.250.000	100%	300.000.000	100%	350.000.000	100%	357.000.000	100%	3.188.250.000	Kesbangpol
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Tingkat penurunan kasus demonstrasi/kerusuhan yang berlatarbelakang ideologi per tahun	n/a	-	-	10,00%	20.000.000	10,00%	20.400.000	10,00%	75.000.000	10,00%	76.500.000	40,00%	191.900.000	Kesbangpol
	Program Pendidikan Politik Dalam Negeri	Persentase yang memilih pada PEMILU	66,40%			67,00%	16.700.000	67,00%	20.000.000	67,00%	100.000.000	72,00%	102.000.000	72,00%	238.700.000	Kesbangpol
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Penegakan Qanun	100%	100%	1.846.600.000	100%	1.869.200.000	100%	1.906.584.000	100%	2.001.913.200	100%	2.041.951.000	100%	9.666.248.200	Satpol PP
	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan pengamanan lingkungan	n/a	-	-	100%	150.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	1.250.000.000	100%	2.400.000.000	Satpol PP
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	100%	100%	2.495.470.000	100%	2.758.765.000	100%	2.813.940.000	100%	2.954.637.000	100%	3.013.729.000	100%	14.036.541.000	BPBD
1.6	Sosial				2.337.600.000		2.796.705.000		2.852.639.100		3.387.632.000		3.437.915.000		14.812.491.100	
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	20,00%	25,00%	1.262.600.000	30,00%	1.451.746.000	40,00%	1.480.780.920	50,00%	1.554.819.000	55,00%	1.585.915.000	55,00%	7.335.860.920	Dinas Sosial dan P3A
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase Penyandang disabilitas dan eks trauma yang mendapat bantuan	20,00%	25,00%	125.000.000	30,00%	150.000.000	35,00%	153.000.000	40,00%	250.000.000	50,00%	255.000.000	50,00%	933.000.000	Dinas Sosial dan P3A

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Persentase Pembinaan Kelembagaan Sosial	35,00%	47,00%	450.000.000	50,00%	618.824.000	68,00%	631.200.480	75,00%	643.824.000	80,00%	650.000.000	80,00%	2.993.848.480	Dinas Sosial dan P3A
	Program Keluarga Harapan (PKH)	Meningkatnya Persentase penerima manfaat Program keluarga harapan	20,00%	41,00%	500.000.000	53,00%	373.885.000	62,00%	381.362.700	66,00%	388.989.000	71,00%	390.000.000	71,00%	2.034.236.700	Dinas Sosial dan P3A
	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	Persentase panti asuhan/pati jompo yang dibina	30,00%	30,00%	-	40,00%	50.000.000	45,00%	51.000.000	50,00%	150.000.000	55,00%	153.000.000	55,00%	404.000.000	Dinas Sosial dan P3A
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Persentase Gepeng yang mendapat bantuan	30,00%	30,00%	-	40,00%	27.250.000	45,00%	27.795.000	50,00%	200.000.000	55,00%	204.000.000	55,00%	459.045.000	Dinas Sosial dan P3A
	Program Bantuan Sosial, Rastra dan BPNT	Meningkatnya persentase Penerima Manfaat Bantuan Sosial, Rastra dan BPNT	29,00%	-	58,00%	125.000.000	66,00%	127.500.000	71,00%	200.000.000	75,00%	200.000.000	75,00%	652.500.000	Dinas Sosial dan P3A	
2.	Wajib Bukan Pelayanan Dasar				27.837.462.157		24.440.243.813		27.553.809.439		30.852.882.999		33.147.444.628		143.831.843.035	
2.1	Tenaga Kerja				449.000.000		581.990.000		593.629.800		1.312.781.000		1.338.000.000		4.275.400.800	
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat dan kewirausahaan	20%	20%	336.000.000	20%	330.000.000	20%	336.600.000	20%	900.000.000	20%	918.000.000	100%	2.820.600.000	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100%	100%	113.000.000	100%	151.990.000	100%	155.029.800	100%	162.781.000	100%	165.000.000	100%	747.800.800	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	20%	-	20%	100.000.000	20%	102.000.000	20%	250.000.000	20%	255.000.000	20%	707.000.000	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1.013.616.007		731.069.500		745.690.890		880.000.000		921.100.000		4.291.476.397	
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan kualitas anak dan perempuan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pemahaman dan sosialisasi tentang perlindungan anak dan perempuan	75,00%	78,00%	210.000.000	85,00%	171.489.500	87,00%	174.919.290	90,00%	190.000.000	93,00%	193.800.000	93,00%	940.208.790	Dinas Sosial dan P3A
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	100%	100%	516.119.587	100%	435.335.000	100%	444.041.700	100%	465.000.000	100%	474.300.000	100%	2.334.796.287	Dinas Sosial dan P3A
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	75,00%	100,00%	287.496.420	100%	23.835.000	100%	24.311.700	100%	75.000.000	100%	100.000.000	100%	510.643.120	Dinas Sosial dan P3A

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase keterwakilan perempuan dalam proses pembangunan	15,00%		-	22,00%	100.410.000	25,00%	102.418.200	28,00%	150.000.000	30,00%	153.000.000	30,00%	505.828.200	Dinas Sosial dan P3A
2.3	Pangan				946.090.000		486.110.000		495.832.200		550.000.000		561.000.000		3.039.032.200	
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Ketersediaan Pangan Utama	100%	100%	946.090.000	100%	486.110.000	100%	495.832.200	100%	550.000.000	100%	561.000.000	100%	3.039.032.200	Dinas Pertanian dan Pangan
2.4	Pertanahan				129.500.000		1.159.271.000		998.897.770		1.147.604.000		1.185.000.000		4.620.272.770	
	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	Persentase terselesaikannya persertifikatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Aceh Utara	90%		129.500.000	95%	782.500.000	100%	370.200.000	100%	377.604.000	100%	380.000.000	100%	2.039.804.000	Dinas Pertanahan
	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah	Persentase fasilitasi pengadaan tanah	n/a		-		-	100%	228.697.770	100%	250.000.000	100%	255.000.000	100%	733.697.770	Dinas Pertanahan
	Program Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara	Persentase fasilitasi pengadaan tanah	n/a		-	100%	224.213.500		-		-		-		224.213.500	Dinas Pertanahan
	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase penyelesaian masalah pertanahan	n/a		-	80%	152.557.500	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	250.000.000	100%	822.557.500	Dinas Pertanahan
	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase ketersediaan data dan informasi pertanahan	n/a		-		-	25%	200.000.000	50%	300.000.000	75%	300.000.000	75%	800.000.000	Dinas Pertanahan
2.5	Lingkungan Hidup				9.084.462.200		9.188.400.000		10.472.168.000		11.029.109.000		11.232.400.000		51.006.539.200	
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	n/a	55	571.262.200	60	442.210.000	65	451.054.200	70	475.000.000	75	480.000.000	75	2.419.526.400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan Hidup	100%	100%	91.200.000	100%	156.430.000	100%	159.558.600	100%	175.000.000	100%	178.500.000	100%	760.688.600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	21,49%	23,99%	8.300.000.000	26,75%	8.337.170.000	29,25%	8.503.913.400	32,25%	8.929.109.000	35,05%	9.018.400.000	35,05%	43.088.592.400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Pengelolaan dan Penataan Taman Kawasan Perkotaan	Persentase taman kota yang tertata	100%	100%	122.000.000	100%	252.590.000	100%	257.641.800	100%	275.000.000	100%	280.500.000	100%	1.187.731.800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya konservasi SDA	35%		-		-	25%	725.000.000	25%	775.000.000	25%	800.000.000	75%	2.300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	Meningkatnya pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	35%		-		-	25%	375.000.000	25%	400.000.000	25%	475.000.000	75%	1.250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2.6	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil				186.500.000		421.600.000		430.032.000		450.000.000		459.000.000		1.947.132.000	
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Tingkat Pelayanan Kependudukan		91,00%	186.500.000	91,00%	421.600.000	92,00%	430.032.000	92,00%	450.000.000	93,00%	459.000.000	93,00%	1.947.132.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				1.359.000.000		2.051.200.000		2.133.224.000		2.256.012.000		2.291.132.240		10.090.568.240	
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Jumlah gampong yang berkembang	n/a		100.000.000	74 gampong	161.983.000	74 gampong	165.222.660		170.000.000		173.400.000		770.605.660	DPMP2KB
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan gampong	100%	100%	509.000.000	100%	100.000.000	100%	102.000.000	100%	150.000.000	100%	153.000.000	100%	1.014.000.000	DPMP2KB
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase kelompok binaan PKK	56,34%	59,74%	750.000.000	63,14%	367.217.000	66,54%	374.561.340	69,94%	395.000.000	70,00%	402.900.000	70,00%	2.289.678.340	DPMP2KB
	Program pengembangan lembaga ekonomi desa	Persentase BUMG yang memberi kontribusi pada Pendapatan Asli Gampong (PAG)	n/a		-	5,00%	972.000.000	6,00%	991.440.000	7,00%	1.041.012.000	8,00%	1.061.832.240	9,00%	4.066.284.240	DPMP2KB
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persetase aparatur gampong yang mengikuti diklat	n/a		-	50,00%	450.000.000	55,00%	500.000.000	60,00%	500.000.000	65,00%	500.000.000	75,00%	1.950.000.000	DPMP2KB
2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				68.000.000		182.910.000		377.568.200		570.000.000		448.926.000		1.647.404.200	
	Program Keluarga Berencana	Ratio Akseptor KB	68,72%	70%	68.000.000	71,22%	132.910.000	72,47%	135.568.200	73,72%	140.000.000	75,00%	142.800.000	75,00%	619.278.200	DPMP2KB
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	n/a		-	5,56%	50.000.000	5,56%	51.000.000	5,56%	75.000.000	5,56%	76.500.000	25,00%	252.500.000	DPMP2KB
	Program Persediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah	Persentase Capaian Jumlah TK/RA	-	-	-	-	-	5	191.000.000	5	355.000.000	5	229.626.000	15	775.626.000	DPMP2KB
2.9	Perhubungan				2.923.370.000		2.548.277.100		2.902.747.642		3.026.324.999		3.136.713.348		14.537.433.089	
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Rehabilitasi prasarana	79%	100%	90.000.000	100%	43.500.000	100%	44.370.000	100%	100.000.000	100%	102.000.000	100%	379.870.000	Dinas Perhubungan
	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Persentase layanan angkutan darat	100%	100%	1.382.870.000	100%	1.299.615.410	100%	1.325.607.718	100%	1.352.119.000	100%	1.419.724.084	100%	6.779.936.211	Dinas Perhubungan
	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Tingkat keselamatan berlalu lintas	n/a	100%	300.500.000	-	-	100%	303.505.000	100%	310.000.000	100%	325.499.145	100%	1.239.504.145	Dinas Perhubungan
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	51,2	51,45	160.000.000	51,75	225.525.000	52,05	230.035.500	52,35	235.000.000	52,6	239.700.000	52,6	1.090.260.500	Dinas Perhubungan
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Udara	Tingkat Pelayanan Angkutan Udara	n/a	100%	990.000.000	100%	979.636.690	100%	999.229.424	100%	1.029.206.000	100%	1.049.790.120	100%	5.047.862.233	Dinas Perhubungan
2.10	Komunikasi dan Informatika				2.855.221.600		2.406.275.901		2.454.401.419		2.487.415.800		2.537.164.115		12.740.478.835	
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Penerima Akses	100%	100%	597.990.000	100%	587.366.250	100%	599.113.575	100%	611.095.000	100%	623.316.899	100%	3.018.881.724	SETDAKAB
	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Tingkat Pelayanan Informasi	100%	100%	195.000.000	100%	95.482.651	100%	97.392.304	100%	100.000.000	100%	102.000.000	100%	589.874.955	SETDAKAB
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terciptanya kemitraan yang baik dalam penyebaran informasi	100%	100%	2.062.231.600	100%	1.723.427.000	100%	1.757.895.540	100%	1.776.320.800	100%	1.811.847.216	100%	9.131.722.156	SETDAKAB, Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan, Sekretariat DPRK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				435.180.000		530.660.000		744.199.200		825.000.000		841.500.000		3.376.539.200	
	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase UKM yang mendapat akses modal	51,78%	52,76%	143.610.000	55,05%	179.080.000	57,34%	182.661.600	59,54%	190.000.000	61,93%	193.800.000	61,93%	889.151.600	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	98,83%	98,83%	144.020.000	98,83%	100.000.000	98,83%	102.000.000	98,83%	150.000.000	98,83%	153.000.000	98,83%	649.020.000	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	27,92%	30,16%	37.220.000	33,87%	251.580.000	40,12%	256.611.600	45,76%	275.000.000	51,25%	280.500.000	51,25%	1.100.911.600	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase wirausaha yang memahami wawasan dan etika berbisnis dan manajemen yang profesional	10,00%					15,00%	121.036.000	20,00%	125.000.000	30,00%	127.500.000	30,00%	373.536.000	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Program Pengembangan Data Koperasi dan UKM	Persentase ketersediaan data koperasi dan UKM	n/a	100%	110.330.000		-		-		-		-		110.330.000	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Program Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Pembinaan Koperasi dan UKM	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan koperasi dan UKM	n/a					100%	81.890.000	100%	85.000.000	100%	86.700.000	100%	253.590.000	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
2.12	Penanaman Modal				672.000.000		1.075.982.000		1.397.501.040		1.489.600.200		1.583.892.204		6.218.975.444	
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	8,2 T		255.000.000		149.330.000		452.316.000		525.000.000		600.000.000		1.981.646.000	SETDAKAB, Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan
	Program Perizinan dan Non Perizinan	Persentase pelayanan perizinan tepat waktu	100%	100%	240.000.000	100%	726.152.000	100%	740.675.040	100%	756.000.000	100%	771.120.000	100%	3.233.947.040	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	53 perusahaan	62 perusahaan	177.000.000	65 perusahaan	200.500.000	68 perusahaan	204.510.000	70 perusahaan	208.600.200	75 perusahaan	212.772.204	75 perusahaan	1.003.382.404	SETDAKAB, Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan
2.13	Kepemudaan dan Olahraga				4.067.980.000		1.731.466.000		2.266.095.320		2.314.036.000		2.360.316.720		12.739.894.040	
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Cakupan pembinaan olahraga	60,00%	65,00%	217.980.000	70,00%	641.466.000	75,00%	654.295.320	80,00%	670.000.000	85,00%	683.400.000	85,00%	2.867.141.320	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase Peran Pemuda dalam Pembangunan	15,00%	20,00%	550.000.000	23,00%	170.000.000	26,00%	173.400.000	29,00%	176.868.000	32,00%	180.405.360	32,00%	1.250.673.360	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase Wirausaha Muda	10,00%					30,00%	200.000.000	40,00%	204.000.000	50,00%	208.080.000	50,00%	612.080.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Persentase Penurunan Penyalahgunaan Narkoba	n/a						100.000.000		102.000.000		104.040.000		306.040.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	60,00%	65,00%	3.300.000.000	70,00%	920.000.000	75,00%	938.400.000	80,00%	957.168.000	85,00%	976.311.360	85,00%	7.091.879.360	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Persentase Atlit Berprestasi	25,00%	-	-			30%	200.000.000	35%	204.000.000	40%	208.080.000	40%	612.080.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2.14	Kebudayaan				2.939.542.350		721.050.000		556.971.000		1.275.000.000		2.990.500.000		8.483.063.350	
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Kekayaan Budaya yang dikelola	40%	50%	210.000.000	60%	327.500.000	70%	334.050.000	80%	500.000.000	85%	510.000.000	85%	1.881.550.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Keragaman Budaya yang dikelola	40%	50%	2.729.542.350	60%	218.550.000	70%	222.921.000	80%	275.000.000	85%	280.500.000	85%	3.726.513.350	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Nilai Budaya yang berkembang	40%			50%	175.000.000		-	55%	500.000.000	60%	2.200.000.000	60%	2.875.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.15	Perpustakaan				320.000.000		237.040.000		591.780.800		700.000.000		710.000.000		2.558.820.800	
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	10314 org	10520 org	320.000.000	10731 org	237.040.000	10945 org	241.780.800	11164 org	500.000.000	11387 org	510.000.000	11387 org	1.808.820.800	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Peningkatan Sarana Fasilitas Pelayanan Perpustakaan	Persentase sarana dan prasarana perpustakaan dalam kondisi baik	70%	70%	-	70%	-	85%	250.000.000	90%	100.000.000	95%	100.000.000	95%	450.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Pengembangan Sumber daya Aparatur Perpustakaan	Persentase aparatur perpustakaan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30%	0%	-	0%	-	60%	100.000.000	70%	100.000.000	80%	100.000.000	80%	300.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.16	Kearsipan				388.000.000		386.942.312		393.070.158		540.000.000		550.800.000		2.258.812.470	
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	100%	100%	110.000.000	100%	96.153.604	100%	98.076.676	100%	150.000.000	100%	153.000.000	100%	607.230.280	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Persentase sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik	50%	55%	168.000.000	60%	129.688.708	65%	132.282.482	70%	175.000.000	75%	178.500.000	75%	783.471.190	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	100%	100%	110.000.000	100%	111.100.000		112.211.000		115.000.000		117.300.000		565.611.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase pengelola arsip yang mengikuti pelatihan kearsipan	n/a			50%	50.000.000		50.500.000		100.000.000		102.000.000		302.500.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	Urusan Pilihan				18.139.350.000		22.175.769.500		21.706.847.490		24.480.334.323		24.804.931.414		111.307.232.727	
3.1	Pariwisata				450.000.000		524.749.500		681.244.490		1.250.000.000		910.000.000		3.815.993.990	
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase meningkatnya jumlah Kunjungan wisata	n/a	2,00%	450.000.000	2,00%	324.749.500	2,00%	331.244.490	2,00%	500.000.000	2,00%	510.000.000	10%	2.115.993.990	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase meningkatnya jumlah Kunjungan wisata	n/a	-		2,00%	200.000.000	2,00%	200.000.000	2,00%	500.000.000	2,00%	200.000.000	8%	1.100.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Persentase Kemitraan dengan Dunia Usaha	n/a	-	-			15%	150.000.000	17%	250.000.000	19%	200.000.000	19%	600.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3.2	Pertanian				6.128.190.000		8.836.810.000		10.036.367.000		10.623.814.000		10.838.180.280		46.463.361.280	
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Tingkat Produktivitas Pangan Utama	5,03 ton/ha	5,28	1.156.870.000	5,35	1.000.650.000	5,4	1.020.663.000	5,45	1.100.000.000	5,5	1.022.000.000	5,5	5.300.183.000	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan kelompok tani yang dibina	25%	-		30%	26.230.000	40%	500.000.000	50%	510.000.000	60%	520.200.000	60%	1.556.430.000	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Nilai ekspor pertanian			98.260.000		233.140.000		237.802.800		250.000.000		255.000.000		1.074.202.800	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Produktivitas padi	5,03 ton/ha	5,28	1.153.950.000	5,35	673.510.000	5,4	900.000.000	5,45	918.000.000	5,5	936.360.000	5,5	4.581.820.000	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Jumlah produksi padi	440.738,83 ton	442862	1.267.410.000	444726	1.951.700.000	446379	2.146.870.000	450216	2.361.557.000	455327	2.408.788.140	455327	10.136.325.140	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan kelompok tani (perkebunan) yang dibina	10%	12%	57.010.000	15%	136.670.000	20%	150.000.000	23%	200.000.000	30%	300.000.000		843.680.000	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Peningkatan Produktivitas perkebunan unggulan	n/a	5%	166.450.000	5%	872.910.000	5%	900.000.000	5%	918.000.000	5%	936.360.000	25%	3.793.720.000	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Produksi perkebunan unggulan (kakao)	3.270 ton	3382	710.430.000	3421	1.816.470.000	3490	1.907.293.000	3560	2.002.657.000	3673	2.042.710.140	3673	8.479.560.140	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Tingkat kestabilan harga daging di hari-hari besar	90%	95%	109.080.000	100%	150.850.000	100%	155.000.000	100%	158.100.000	100%	161.262.000	100%	734.292.000	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Populasi ternak besar	108.045 ekor	110052	391.360.000	112075	959.430.000	114126	978.618.000	121000	1.000.000.000	125000	1.020.000.000	125000	4.349.408.000	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Penurunan kasus penyakit ternak	n/a	5%	756.470.000	5%	480.510.000	5%	490.120.200	5%	525.000.000	5%	535.500.000	25%	2.787.600.200	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Pengembangan Lingkungan Sosial	Meningkatnya prasarana usaha tani tembakau	n/a	5%	260.900.000	5%	267.370.000	5%	275.000.000	5%	280.500.000	5%	300.000.000	25%	1.383.770.000	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	Meningkatnya produksi perkebunan tembakau	200 ton	0	-	5%	267.370.000	5%	375.000.000	5%	400.000.000	0,05	400.000.000	5%	1.442.370.000	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.3	Perdagangan				2.719.610.000		1.445.140.000		1.598.484.000		1.768.953.680		1.800.332.754		9.332.520.434	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Daerah	Nilai Ekspor	69,61 Rp (milyar)	72 rp(M)	36.210.000	73 rp(M)	53.850.000	74 rp(M)	100.000.000	75 rp(M)	150.000.000	76 rp(M)	153.000.000	76 rp(M)	493.060.000	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Tingkat Inflasi	4%	4%	200.000.000	4%	260.850.000	3%	275.000.000	3%	375.000.000	3%	382.500.000	3%	1.493.350.000	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	Persentase sarana dan prasarana pasar kondisi baik	62%	72%	2.293.400.000	74%	930.440.000	80%	1.023.484.000	86%	1.043.953.680	92%	1.064.832.754	92%	6.356.110.434	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan	Tingkat Pelanggaran Terhadap Konsumen	n/a	40%	190.000.000		200.000.000	30%	200.000.000	25%	200.000.000	20%	200.000.000	20%	990.000.000	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
3.4	Perindustrian				1.219.000.000		2.224.100.000		2.374.752.000		2.422.247.040		2.470.691.981		10.710.791.021	
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan bina kelompok pengrajin	4404 IKM	4448 IKM	333.000.000	4492 IKM	788.940.000	4537 IKM	867.834.000	4582 IKM	885.190.680	4628 IKM	902.894.494	4628 IKM	3.777.859.174	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Program Pengembangan industri pangan	Persentase industri pangan terhadap industri pengolahan	38,83%	38,83%	-	39,05%	300.000.000	39,54%	315.000.000	39,81%	321.300.000	39,84%	327.726.000	39,84%	1.264.026.000	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Cakupan bina kelompok pengrajin	4404 IKM	4448 IKM	786.000.000	4492 IKM	750.080.000	4537 IKM	787.584.000	4582 IKM	803.335.680	4628 IKM	819.402.394	4628 IKM	3.946.402.074	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Jumlah sentra industri potensial	11 centra	11 centra	100.000.000	12 centra	385.080.000	13 centra	404.334.000	14 centra	412.420.680	15 centra	420.669.094	15 centra	1.722.503.774	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
3.5	Transmigrasi				118.000.000		800.000.000		816.000.000		832.320.000		848.966.400		3.415.286.400	
	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Peningkatan sarana Pemukiman Transmigrasi			118.000.000		800.000.000		816.000.000		832.320.000		848.966.400		3.415.286.400	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3.6	Kelautan dan Perikanan				7.504.550.000		8.344.970.000		6.200.000.000		7.582.999.603		7.936.760.000		37.569.279.603	
	Program Pelestrasian Sumber Daya Perikanan	Persentase tingkat kelestarian sumber daya perikanan	n/a		-	16%	4.149.970.000	24%	2.500.000.000	32%	2.524.999.603	40%	2.500.000.000	40%	11.674.969.603	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Revitalisasi Penyuluh Perikanan	Persentase daya guna penyuluh perikanan	14%		-		-	42%	300.000.000	51%	300.000.000	60%	300.000.000	60%	900.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Penurunan Jumlah kasus ilegal fishing	5%	5%	74.730.000	5%	140.290.000	5%	150.000.000	5%	153.000.000	5%	156.060.000	25%	674.080.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya Jumlah produksi perikanan budi daya	5%	5,00%	951.000.000	5,00%	1.094.810.000	5,00%	1.200.000.000	5,00%	1.224.000.000	5,00%	1.248.480.000	25%	5.718.290.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Jumlah produksi perikanan tangkap	5%	5,00%	5.820.190.000	5,00%	359.000.000	5,00%	375.000.000	5,00%	382.500.000	5,00%	390.150.000	25%	7.326.840.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pembinaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Cakupan bina kelompok nelayan	41,43%	50,5	272.630.000	56,89	89.800.000	63,24	100.000.000	65,98	102.000.000	74,8	104.040.000	74,8	668.470.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah produksi perikanan	5%	5%	386.000.000	5%	56.100.000	5%	75.000.000	5%	76.500.000	5%	78.030.000	25%	671.630.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Tingkat konsumsi ikan per kapita pertahun	40,36 kg perkapita/thn	-		44,02 kg perkapita/thn	2.455.000.000	45,85 kg perkapita/thn	1.500.000.000	47,08 kg perkapita/thn	2.820.000.000	49,50 kg perkapita/thn	3.160.000.000	49,50 kg perkapita/thn	9.935.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
4	Fungsi Penunjang Urusan				110.961.278.971		109.710.482.732		116.246.212.323		111.473.292.987		128.569.497.024		576.960.764.038	
4.1	Perencanaan				5.835.075.045		4.344.266.200		4.804.396.000		4.900.483.920		5.298.493.598		25.182.714.763	
	Program pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan dokumen data/informasi pembangunan daerah	100%	100%	100.000.000	100%	200.000.000	100%	300.000.000	100%	306.000.000	100%	312.120.000	100%	1.218.120.000	Bappeda
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aparatur perencana OPD yang terlatih	n/a	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	200.000.000	100%	204.000.000	100%	208.080.000	100%	812.080.000	Bappeda
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	1.314.691.695	100%	1.251.530.000	100%	1.376.683.000	100%	1.404.216.660	100%	1.732.300.993	100%	7.079.422.348	Bappeda
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase kesesuaian program bidang ekonomi dalam RKPD terhadap program dalam RPJMD	100%	100%	115.006.000	100%	204.250.000	100%	250.000.000	100%	255.000.000	100%	260.100.000	100%	1.084.356.000	Bappeda
	Program perencanaan sosial dan budaya	Persentase kesesuaian program bidang sosial budaya dalam RKPD terhadap program dalam RPJMD	100%	100%	190.031.250	100%	210.000.000	100%	215.000.000	100%	219.300.000	100%	223.686.000	100%	1.058.017.250	Bappeda
	Program perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase kesesuaian program bidang prasarana wilayah dan SDA dalam RKPD terhadap program dalam RPJMD	100%	100%	89.775.100	100%	150.000.000	100%	153.000.000	100%	156.060.000	100%	159.181.200	100%	708.016.300	Bappeda
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan	100%	100%	862.344.000	100%	1.006.570.000	100%	1.026.701.000	100%	1.047.235.020	100%	1.068.179.720	100%	5.011.029.740	Semua PD yang membidangi sosial budaya
	Program Perencanaan Ekonomi	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan	100%	100%	510.000.000	100%	579.340.000	100%	608.307.000	100%	620.473.140	100%	632.882.603	100%	2.951.002.743	Semua PD yang membidangi ekonomi
	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan	100%	100%	2.553.227.000	100%	642.576.200	100%	674.705.000	100%	688.199.100	100%	701.963.082	100%	5.260.670.382	Semua PD yang membidangi prasarana wilayah dan SDA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.2	Keuangan				6.142.041.000		6.273.160.000		6.459.044.000		6.588.224.880		6.719.989.378		32.182.459.258	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya informasi laporan keuangan	99%	100%	265.810.000	100%	231.000.000	100%	235.620.000	100%	240.332.400	100%	245.139.048	100%	1.217.901.448	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen pengelolaan keuangan	100%	100%	5.732.231.000	100%	6.042.160.000	100%	6.223.424.000	100%	6.347.892.480	100%	6.474.850.330	100%	30.820.557.810	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Tersedianya aplikasi SIMPAT	n/a	1	144.000.000		-		-		-		-		144.000.000	Dinas Pertanahan
4.3	Kepegawaian				2.988.680.000		3.023.669.900		3.084.143.000		3.145.825.860		3.208.742.377		15.451.061.137	
	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	15%	100%	2.050.000.000	100%	1.150.000.000	100%	1.173.000.000	100%	1.196.460.000	100%	1.220.389.200	100%	6.789.849.200	BKPSDM
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	n/a		938.680.000		1.873.669.900		1.911.143.000		1.949.365.860		1.988.353.177		8.661.211.937	BKPSDM
4.4	Penelitian dan Pengembangan				934.845.000		705.000.000		719.100.000		733.482.000		748.151.640		3.840.578.640	
	Program Kajian dan Penelitian Pengembangan Daerah	Persentase tindak lanjut hasil penelitian dan inovasi pembangunan daerah	n/a	100%	934.845.000	100%	705.000.000	100%	719.100.000	100%	733.482.000	100%	748.151.640	100%	3.840.578.640	Bappeda
4.5	Pengawasan				3.150.650.000		2.700.858.500		2.947.809.350		3.006.765.537		3.390.442.091		15.196.525.478	
	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase tindak lanjut temuan	76%	80%	2.143.000.000	85%	1.804.000.000	88%	1.894.200.000	92%	1.932.084.000	95%	2.208.292.400	95%	9.981.576.400	Inspektorat
	Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase tenaga pemeriksa yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30%	13%	185.000.000	7%	188.700.000	7%	198.135.000	7%	202.097.700	7%	222.307.470	71%	996.240.170	Inspektorat
	Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Tingkat Pemahaman terhadap SOP dan SPIP	-	20%	763.000.000	20%	550.000.000	20%	605.000.000	20%	617.100.000	20%	678.810.000	100%	3.213.910.000	Inspektorat
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terkendalinya Administrasi Pengendalian dan Program Kegiatan Pembangunan	100%	100%	59.650.000	100%	73.158.500	100%	80.474.350	100%	82.083.837	100%	90.292.221	100%	385.658.908	SETDAKAB
	Program Pengembangan Zona Integritas	Persentase SKPK yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani		-	-	3,00%	85.000.000	3%	170.000.000	3%	173.400.000	3%	190.740.000	12%	619.140.000	Inspektorat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.6	Administrasi Pemerintahan				91.909.987.926		92.663.528.132		98.231.719.973		93.098.510.790		109.203.677.941		485.107.424.762	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	48.725.621.946	100%	49.557.841.669	100%	49.744.078.502	100%	51.133.444.458	100%	54.721.194.664	100%	253.882.181.239	Semua OPD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	70,00%	75,00%	10.298.190.000	80,00%	15.117.425.013	82,00%	11.706.338.400	85,00%	11.952.737.200	87%	15.197.807.500	87%	64.272.498.113	Semua OPD
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam penggunaan atribut pegawai	100%		7.467.500.000		495.810.000	100%	8.005.726.200	100%	515.840.724	100%	8.026.157.600	100%	24.511.034.524	Semua OPD
	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis	n/a		799.750.000		985.500.000		1.131.860.000		1.243.897.200		1.256.175.144		5.417.182.344	Semua OPD
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase Pengendalian Pengelolaan Keuangan	100%	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	30.600.000	100%	31.212.000	100%	31.836.240	100%	148.648.240	SETDAKAB
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	100%	100%	2.955.050.000	100%	2.906.185.500	100%	2.964.309.000	100%	3.023.595.180	100%	3.084.067.084	100%	14.933.206.764	SETDAKAB
	Program Peringatan Hari-hari Besar	Persentase Pelaksanaan Hari-Hari Besar yang dilaksanakan per hari-hari besar yang wajib dilaksanakan	100%	100%	2.017.150.000	100%	2.978.780.400	100%	3.038.356.000	100%	3.099.123.120	100%	3.161.105.582	100%	14.294.515.102	Semua PD yang menyelenggarakan peringatan hari-hari besar
	Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Lakip perangkat daerah yang baik dan tepat waktu	23,00%	30,00%	212.730.000	40%	346.444.500		-		-		-	75%	559.174.500	SETDAKAB
	Program Penguatan Tata Laksana	Persentase peningkatan ketatalaksanaan perangkat daerah	100%	0%	-	0%	-	100%	250.000.000	100%	260.000.000	100%	275.000.000	100%	785.000.000	SETDAKAB
	Program Penguatan Kelembagaan	Capaian peningkatan kinerja perangkat daerah	100%	0%	-	0%	-	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	775.000.000	SETDAKAB
	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Persentase Layana Kehidupan Beragama	100%	100%	640.000.000	100%	741.868.850	100%	756.706.227	100%	771.840.352	100%	787.277.159	100%	3.697.692.587	SETDAKAB
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penataan Peraturan Perundang - Undangan	100%	100%	200.000.000	100%	102.035.000	100%	104.075.700	100%	106.157.214	100%	108.280.358	100%	620.548.272	SETDAKAB
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru Wilayah	Persentase Pendataan Wilayah	100%	100%	150.000.000	100%	165.000.000	100%	168.300.000	100%	171.666.000	100%	175.099.320	100%	830.065.320	SETDAKAB
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kualitas Pelayanan Publik	100%	100%	459.000.000	100%	310.230.000	100%	316.434.600	100%	322.763.292	100%	329.218.558	100%	1.737.646.450	SETDAKAB
	Program Penyelenggaraan Pemerintah Gampong	Persentase Pelayanan Masyarakat	100%	100%	1.429.500.000	100%	1.648.325.000	100%	1.681.291.500	100%	1.714.917.330	100%	1.749.215.677	100%	8.223.249.507	SETDAKAB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pelayanan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum	Persentase kasus yang diselesaikan	100%	100%	100.000.000	100%	88.802.200	100%	90.578.244	100%	92.389.809	100%	94.237.605	100%	466.007.858	SETDAKAB
	Program Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM)	Persentase Masyarakat yang memahami HAM	100%	100%	30.000.000	100%	30.600.000	100%	31.212.000	100%	31.836.240	100%	32.472.965	100%	156.121.205	SETDAKAB
	Program Pengembangan Ibukota Kabupaten	Persentase Pemindahan SKPK	34,37%	40,62%	200.000.000	46,87%	212.000.000	53,12%	216.240.000	59,37%	220.564.800	65,62%	224.976.096	65,62%	1.073.780.896	SETDAKAB
	Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Lakip perangkat daerah yang baik dan tepat waktu	23,00%		-		-	50%	200.000.000	60%	205.000.000	75%	210.000.000	75%	615.000.000	SETDAKAB
	Program Pembinaan Usaha-Usaha Peningkatan Produksi Sumber Daya Alam	Persentase Kesesuaian Pengembangan Usaha Produksi Sumber Daya Alam	100%		-		-	100%	250.000.000	100%	300.000.000	100%	350.000.000	100%	900.000.000	SETDAKAB
	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Gampong	Tingkat peran kecamatan dalam pembangunan	n/a	100%	3.856.261.500	100%	3.948.830.000	100%	4.027.806.600	100%	4.108.362.732	100%	5.190.529.987	100%	21131790819	Kecamatan
	Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Tingkat Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	100,00%	100,00%	766.132.500	100,00%	697.850.000	100,00%	711.807.000	100,00%	726.043.140	100,00%	740.564.003	100,00%	3.642.396.643	Kecamatan
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	100%	100%	11.578.101.980	100%	12.300.000.000	100%	12.556.000.000	100%	12.817.120.000	100%	13.183.462.400	100%	62.434.684.380	Sekretariat DPRK
5.	Keistimewaan				30.256.001.800		26.655.780.554		30.142.605.391		30.757.160.701		31.349.858.888		149.161.407.334	
5.1	Pendidikan				9.712.000.000		9.589.859.554		9.923.790.078		10.120.049.694		10.320.450.688		49.666.150.013	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya pelayanan MPD	100%	100%	492.000.000	100%	492.600.000	100%	502.452.000	100%	512.501.040	100%	522.751.061	100%	2.522.304.101	MPD
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah yang melaksanakan integrasi Pendidikan	0%	0%	274.000.000	10%	287.879.554	20%	293.637.145	30%	299.509.888	40%	305.500.086	40%	1.460.526.673	MPD
	Program Perencanaan Dan Pengawasan/Monitoring Dan Evaluasi	Tingkat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelayanan Pendidikan	100%	100%	9.000.000	100%	89.340.000	100%	91.126.800	100%	92.949.336	100%	94.808.323	100%	377.224.459	MPD
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase dayah yang mandiri	0%	30%	320.000.000	50%	270.000.000	60%	275.400.000	70%	280.908.000	80%	286.526.160	100%	1.432.834.160	Dinas Pendidikan Dayah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah	Persentase Dayah dalam kondisi baik	81%	100%	1.000.000.000	100%	761.580.000	100%	776.811.600	100%	792.347.832	100%	808.194.789	100%	4.138.934.221	Dinas Pendidikan Dayah
	Program Pembinaan Tenaga, Lembaga dan Pengembangan Syariat Islam	Persentase dayah yang dibina	46,43%	100%	7.617.000.000	100%	7.688.460.000	100%	7.784.362.533	100%	7.939.833.598	100%	8.098.630.270	100%	39.128.286.400	Dinas Pendidikan Dayah
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase mutu pendidik pada Dayah	97,33%		-		-	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	300.000.000	Dinas Pendidikan Dayah
	Program Pemberdayaan Santri	Persentase Kemandirian Santri	15,00%		-		-	30%	100.000.000	40%	102.000.000	50%	104.040.000	60%	306.040.000	Dinas Pendidikan Dayah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.2	Kebudayaan				490.000.000		694.520.000		758.410.400		778.578.607		797.030.180		3.518.539.187	
	Program Pengembangan Hukum Adat	Persentase Gampong yang menerapkan administrasi peradilan adat	0,70%	1,20%	60.000.000	5%	60.000.000	9%	61.200.000	10%	62.424.000	15%	63.672.480	40,90%	307.296.480	MAA
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Tersedianya pelayanan MAA	100%	100%	430.000.000	100%	384.520.000	100%	392.210.400	100%	400.054.608	100%	408.055.700	100%	2.014.840.708	MAA
	Program Pengembangan dan Pelestarian Adat	Jumlah Keputusan, Seruan, Himbauan, Naskah hasil kajian adat istiadat yang diadopsi oleh pemerintah daerah dan masyarakat	2 Dokumen		-		-	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	55.999.999	2 Dokumen	60.000.000	6 Dokumen	165.999.999	MAA
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Situs Sejarah kekayaan budaya dan adat istiadat yang dipelihara/dilestarikan	0%		-	5%	250.000.000	5%	255.000.000	5%	260.100.000	5%	265.302.000	20%	1.030.402.000	MAA
5.3	Keagamaan				20.054.001.800		16.371.401.000		19.460.404.913		19.858.532.400		20.232.378.020		95.976.718.134	
	Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama	Persentase Layanan Kehidupan Beragama	100%	100%	7.499.345.800	100%	2.676.261.000	100%	2.491.106.220	100%	2.540.928.344	100%	2.591.746.911	100%	17.799.388.276	Baitul Mal, MPU dan DSI
	Program Pembinaan Tenaga, Lembaga dan Pengembangan Syariat Islam	Meningkatnya jumlah Muzakki			3.706.656.000		3.914.176.000		3.992.459.520		4.072.308.710		4.153.754.885		19.839.355.115	Baitul Mal
	Program Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan	Persentase sarana dan prasarana keagamaan kondisi baik	60%		-	70%	750.000.000	80%	765.000.000	90%	780.300.000	100%	795.906.000	100%	3.091.206.000	Dinas Syariat Islam
	Program Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam	Angka Pelanggaran terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam	0,148	0,138	4.220.000.000	0,129	3.436.653.000	0,121	3.560.839.173	0,112	3.639.781.345	0,099	3.713.483.224	0,099	18.570.756.743	DSI, Satpol PP dan WH
	Program Pembinaan Tenaga, Lembaga dan Pengembangan Syariat Islam	Persentase lembaga yang dibina	40%	45%	4.628.000.000	50%	3.145.880.000	60%	2.000.000.000	70%	2.040.000.000	80%	2.080.800.000	80%	13.894.680.000	Dinas Syariat Islam
	Pembinaan Kehidupan Beragama	Persentase Pembinaan Kehidupan Beragama	60%		-		-	75%	300.000.000	80%	306.000.000	85%	312.120.000	100%	918.120.000	Dinas Syariat Islam
	Pengembangan, Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an	Persentase Masyarakat yang Memahami Al-Qur'an	n/a		-		-	50%	3.000.000.000	60%	3.060.000.000	70%	3.121.200.000	80%	9.181.200.000	Dinas Syariat Islam
	Pembinaan Dakwah dan syi'ar Islam	Persentase Syi'ar	n/a		-		-	100%	800.000.000	100%	816.000.000	100%	832.320.000	100%	2.448.320.000	Dinas Syariat Islam
	Program Peningkatan Peran dan Sumberdaya Ulama dalam Pembangunan	Persentase peran ulama dalam kehidupan bermasyarakat	20%		-	40%	2.363.431.000	60%	2.445.314.000	75%	2.495.314.000	80%	2.520.267.000	80%	9.824.326.000	MPU
	Program Peningkatan Silaturahmi dan Koordinasi Antara Umara dan Ulama	Persentase peran ulama dalam penetapan kebijakan pemerintah	100%		-	100%	85.000.000	100%	105.686.000	100%	107.900.000	100%	110.780.000	100%	409.366.000	MPU
TOTAL					486.054.897.927		470.661.336.949		480.221.086.973		496.807.280.434		521.821.146.994		2.455.565.749.278	

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Indikator Kinerja Daerah merupakan ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk Tahun 2017 – 2022. Secara rinci dijelaskan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 8.1
 Penetapan Indikator Kinerja Utama
 Kabupaten Aceh Utara 2017-2022

No	Indikator	Satuan	Target Tahun ke				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai AKIP Pemerintah Daerah	Huruf	B	B	B	B	B
2	Kapabilitas APIP	Level	2	3	3	3	3
3	Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3
4	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Persentase kesesuaian program dalam RKPD terhadap program dalam RPJMD	%	100	100	100	100	100
6	Nilai indeks kepuasan masyarakat	Indeks	75,9	76	76,95	77,5	80
7	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	60	62	64	68	70
8	Persentase aparatur gampong yang mengikuti diklat	%	50	55	60	65	75
9	Tingkat peran kecamatan dalam pembangunan	%	100	100	100	100	100
10	Persentase Majelis Taklim aktif	%	100	100	100	100	100
11	Angka pelanggaran terhadap syariat Islam	Per 1000 penduduk	0,138	0,129	0,121	0,112	0,099
12	APM SD/MI	%	85	90	95	98	100
13	APM SMP	%	70	75	82	88	90
14	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	9	9,5	10	10,5	11
15	Persentase sekolah yang melaksanakan integrasi pendidikan	%	-	10	20	30	40
16	Persentase Tenaga Pendidik yang Lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)	%	23	30	40	50	60
17	Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak	kasus	80	60	55	40	30
18	Angka Harapan Hidup	tahun	71	71,5	71,6	71,7	71,9
19	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	123	105	93	81	68
20	Angka Kematian Bayi	Per 1000 kelahiran hidup	4	4	4	3	3
21	Persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	52,3	57,8	62,6	67,1	72,1
22	Persentase Luasan Daerah Irigasi (DI) baik yang teraliri air irigasi	%	39,1	44,3	48,5	53,8	61,1
23	Persentase akses air bersih	%	65,56	67,61	69,78	72,03	74,43
24	Persentase Rumah Tangga dengan Akses sanitasi	%	60,67	63,82	67,09	70,43	73,95
25	Persentase rumah layak huni	%	86,24	87,81	89,43	91,10	92,82
26	Persentase gedung kantor yang berlokasi di Kabupaten Aceh Utara	%	40,62	46,87	53,12	59,37	65,62
27	Tingkat Resiko Bencana	rendah/sedang/tinggi	tinggi	sedang	sedang	sedang	sedang
28	Indeks kualitas lingkungan hidup (air, udara dan tutupan lahan)	Indeks	55	60	65	70	75
29	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,5	4,6	4,7	5	5,25
30	Gini Rasio	indeks	0,265	0,262	0,259	0,255	0,251
31	Persentase tingkat kemiskinan	%	17,25	16,45	15,55	14,85	14,05
32	Persentase tingkat pengangguran terbuka	%	10	8,5	8	7,5	6,9
33	Tingkat inflasi	%	4	3,5	3	3	3
34	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	5	5,25	5,4	5,5	5,6
35	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	3,25	4	5,2	6	6,7
36	Kontribusi PAD terhadap APBD	%	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal	Satuan	Target Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Pertumbuhan PDRB	3,27	%	4,5	4,6	4,7	5	5,25
2	Laju inflasi	5,6	%	4	3,5	3	3	3
3	PDRB per kapita							
	- PDRB Tanpa Migas	24,40	Rp	25,50	26,40	27,20	28,50	29,40
	- PDRB Dengan Migas	28,19	Rp	28,19	27,29	26,49	25,79	25,29
4	Indeks Gini	0,27	indeks	0,265	0,262	0,259	0,255	0,251
5	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	80,54	%	82,75	83,55	84,45	85,15	85,95
6	Rasio kesenjangan kemiskinan	0,269	indeks	0,265	0,262	0,259	0,255	0,251
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,19	indeks	68,09	69,09	69,89	70,89	71,79
8	Angka melek huruf	95,39	%	96	97	98	99	99,5
9	Angka rata-rata lama sekolah	8,09	tahun	9	9,5	10	10,5	11
10	Angka usia harapan hidup	68,51	tahun	71	71,5	71,6	71,7	71,9
11	Persentase balita gizi buruk	0,11	%	0,1	0,1	0,09	0,07	0,05
12	Angka partisipasi angkatan kerja	55,65	%	59,65	62,65	65,65	69,65	72,65
13	Tingkat partisipasi angkatan kerja	55,65	%	59,65	62,65	65,65	69,65	72,65
14	Tingkat pengangguran terbuka	11,02	%	10	8,5	8	7,5	6,9
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	indeks	75,9	76	76,95	77,5	80
17	Persentase PAD terhadap pendapatan	15-20	%	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20
18	Opini BPK	WTP	WTP/WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	32,75	%	32,94	34,15	35,46	36,78	37,3
20	Kontribusi sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan & Jasa Pertanian/ terhadap PDRB	22,34	%	23	24	25	26	26,3
21	Produksi sektor pertanian (padi)	314168	ton	335.626	355.626	377.084	397.084	410.000
22	Produksi sektor perkebunan (sawit)	166689	ton	170.023	173.423	176.892	180.430	184.038
23	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	0,43	%	0,44	0,45	0,46	0,48	0,5
24	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	16,9	%	16,8	16,7	16	15,7	15
25	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,42	%	0,44	0,46	0,5	0,55	0,6
26	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	8,33	%	9,5	9,7	10	10,3	10,5
27	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,33	%	12,34	12,35	12,37	12,38	12,4
28	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	14,3	%	14,5	14,7	14,8	15,2	15,5
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Rasio ketergantungan	32,18	%	32	31,8	31,6	31,3	31
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Layanan Urusan Wajib Dasar								
1	Pendidikan							
1.1	Angka partisipasi Kasar							
1.1.1	Angka partisipasi Kasar (APK) SD/MI	97,75	%	98	98	98,5	98,75	99
1.1.2	Angka partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS	97,5	%	97,75	98	98	98,5	98,75
1.2	Angka pendidikan yang ditamatkan							
1.2.1	Angka pendidikan yang ditamatkan SD	49,64	%	50	51	52	53	54

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal	Satuan	Target Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022
1.2.2	Angka pendidikan yang ditamatkan SMP	26,88	%	27	27,5	28	28,5	29
1.3	Angka Partisipasi Murni							
1.3.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	83,49	%	85	90	95	98	100
1.3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	67,86	%	70	75	82	88	90
1.4	Angka partisipasi sekolah :							
1.4.1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	83,49	%	97,92	98,32	98,52	98,72	98,92
1.4.2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	67,83	%	70,83	73,83	76,83	79,83	80
1.4.3	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	42,29	%	46,69	51,09	55,49	59,89	60
1.5	Angka Putus Sekolah:							
1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,06	%	0,06	0,055	0,05	0,05	0,046
1.5.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,17	%	0,145	0,12	0,095	0,069	0,07
1.5.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,39	%	0,355	0,32	0,285	0,247	0,25
1.6	Angka Kelulusan:							
1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	94,61	%	95,91	97,21	98,51	99,81	99,8
1.6.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	87,53	%	89,38	91,24	93,1	94,96	95
1.6.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	73,16	%	78,62	84,08	89,54	94,94	95
1.7	Angka Melanjutkan (AM):							
1.7.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	96,97	%	97,5	98,04	98,59	99,15	99,2
1.7.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	84,44	%	87,08	89,7	92,31	94,81	95
1.8	Fasilitas Pendidikan:							
1.9	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	51,33	%	51,33	51,335	51,34	51,345	51,35
1.10	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	26,99	%	27,24	27,49	27,74	27,99	28,24
1.11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	0,127	%	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127
1.12	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	5,41	%	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
1.13	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	0,138	%	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138
1.14	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	5,58	%	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58
1.15	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	11909	%	12028	12148	12270	12393	12516
2	Kesehatan							
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	5	Per 1000 KH	4	4	4	3	3
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi	99,8		99,83	99,85	99,88	99,90	99,90
2.3	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	139	Per 100.000 KH	123	105	93	81	68
2.4	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,196		0,196	0,196	0,196	0,196	0,196
2.5	Rasio dokter per satuan penduduk	0,195		0,195	0,195	0,195	0,195	0,195
2.6	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	71	%	100	100	100	100	100
2.7	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	84,16	%	86,86	89,57	92,28	94	95
2.8	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	62	%	100	100	100	100	100
2.9	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	%	100	100	100	100	100
2.10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	80,29	%	85,22	90,22	95,22	96,00	100
2.11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	%	100	100	100	100	100
2.12	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,0018	%	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018
2.13	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	51	%	80	90	95	98	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal	Satuan	Target Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022
2.14	Cakupan kunjungan bayi	98,74	%	99,04	99,34	99,64	99,94	99,95
2.15	Cakupan puskesmas	122,22	%	122,22	122,22	122,22	122,22	122,22
2.16	Cakupan pembantu puskesmas	10,33	%	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
3.1	Pekerjaan Umum:							
3.1.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	47,7	%	52,3	57,8	62,6	67,1	72,1
3.1.2	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	8,54	%	8,8	9,2	9,7	10,15	10,6
3.1.3	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	23,16	23,09	23,05	22,99	22,95	22,9	22,86
3.1.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	57,85	%	60,67	63,82	67,09	70,43	73,95
3.1.5	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	20	%	19,75	19,6	19,55	19,5	19,45
3.1.6	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	4,25	%	4,55	4,8	5,2	45,5	45,85
3.1.7	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	34,7	%	39,1	44,3	48,5	53,8	61,1
3.1.8	Persentase penduduk berakses air minum	60,7	%	62,7	64,7	66,7	68,7	70,7
3.1.9	Persentase areal kawasan kumuh	9,58	%	9,57	9,55	9,53	9,5	9,47
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							
4.1	Rasio rumah layak huni	84,72	%	86,24	87,81	89,43	91,10	92,82
4.2	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	9,58	%	9,57	9,55	9,53	9,5	9,47
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
5.1	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	85	%	85,00	85,00	85,00	90,00	90
6	Sosial							
6.1	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	%	100	100	100	100	100
Layanan Urusan Wajib Non Dasar								
1	Tenaga Kerja							
1.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	57,21	%	59,00	62,00	63,00	65,00	69
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	75	%	100	100	100	100	100
3	Pangan							
3.1	Ketersediaan pangan utama	375,59	Rata-rata kg/thn	413,15	433,81	455,50	478,27	494,55
4	Pertanahan							
4.1	Persentase tanah PEMDA yang bersertifikat	n/a	%	0,00	10,00	25,00	50,00	75,00
5	Lingkungan Hidup							
5.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada
5.2	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	100	%	100	100	100	100	100
5.3	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	100	%	100	100	100	100	100
5.4	Timbulan sampah yang ditangani	100	%	100	100	100	100	100
5.5	Persentase cakupan area pelayanan	78	%	80	80	80	80	80
5.6	Persentase jumlah sampah yang tertangani	21,49	%	23,99	26,75	29,25	32,25	35,05

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal	Satuan	Target Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
6.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	63	%	70	77	85	90	95
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	65,22	%	69,22	73,22	77,22	81,22	80
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
7.1	Persentase PKK aktif	56,34	%	59,74	63,14	66,54	69,94	70
7.2	Persentase Posyandu aktif	100	%	100	100	100	100	100
7.3	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	42,73	%	47,72	52,72	57,72	62,72	67,72
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2,04	%	1,93	1,82	1,71	1,60	1,60
8.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,78	%	2,71	2,64	2,57	2,5	2,5
8.3	Ratio Akseptor KB	68,72	%	69,97	71,22	72,47	73,72	75
9	Perhubungan							
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	879.720	orang	880.470	881.670	882.870	884.370	884.120
9.2	Jumlah uji kir angkutan umum	4401	Buku	4486	4583	4695	4810	4810
9.3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	5	Unit	5	5	5	5	5
9.4	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	51,2	%	51,45	51,75	52,05	52,35	52,6
9.5	Pemasangan Rambu-rambu	51,2	%	51,45	51,75	52,05	52,35	52,6
10	Komunikasi dan Informatika							
10.1	Cakupan Layanan Telekomunikasi	n/a	%	100	100	100	100	100
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah							
11.1	Persentase koperasi aktif	27,92	%	30,16	33,87	40,12	45,76	51,25
11.2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	98,83	%	98,83	98,83	98,83	98,83	99
12	Penanaman Modal							
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	53	investor	54	57	59	62	65
13	Kepemudaan dan Olahraga							
13.1	Jumlah organisasi kepemudaan	n/a	organisasi	32	34	34	36	36
13.2	Jumlah wirausaha pemuda	n/a	orang	440	480	520	560	600
13.3	Jumlah atlit olahraga berprestasi	n/a	orang	27	35	40	46	50
14	Statistik							
14.1	Buku “kabupaten dalam angka”	Ada	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.2	Buku “PDRB”	Ada	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15	Kebudayaan							
15.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	3	festival	3	3	3	3	3
16	Perpustakaan							
16.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	0,20		0,21	0,21	0,22	0,22	0,23
16.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,30		0,31	0,31	0,32	0,32	0,33
16.3	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	10314	org	10520	10731	10945	11164	11387
16.4	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	15128	buku	15431	15739	16054	16375	16703
Layanan Urusan Pilihan								
1	Pertanian							
1.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	32,75	%	32,94	34,15	35,46	36,78	37,30
1.2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	5,03	ton	5,10	5,23	5,34	5,47	5,50
2	Perdagangan							
2.1	Ekspor Bersih Perdagangan	2.581.576.169		2.633.207.693	2.685.871.847	2.739.589.284	2.794.381.069	2.850.268.691
3	Kelautan dan Perikanan							
3.1	Produksi perikanan	28.295	ton	28.525	28.902	29.075	29.230	29.596
3.2	Konsumsi ikan	40	kg/kapita/tahun	41	41	41	41	42
3.3	Cakupan bina kelompok nelayan	41,43	%	50,51	56,89	63,24	65,98	74,76

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal	Satuan	Target Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022
Penunjang Urusan								
1	Perencanaan Pembangunan							
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan denganPERDA/PERKADA	Ada	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100	%	100	100	100	100	100
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100	%	100	100	100	100	100
1.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100	%	100	100	100	100	100
2	Keuangan							
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WDP/WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan							
3.1	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	n/a	%	60	62	64	68	70
4	Penelitian dan pengembangan							
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	100	%	100	100	100	100	100
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	100	%	100	100	100	100	100
4.3	Penerapan SIDA:							
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	n/a	%	100	100	100	100	100
5	Pengawasan							
5.1	Persentase tindak lanjut temuan	76	%	80	85	88	92	95
6	Sekretariat Dewan							
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada	Ada / Tidak	ada	ada	ada	ada	ada
6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada	Ada / Tidak	ada	ada	ada	ada	ada
6.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada	Ada / Tidak	ada	ada	ada	ada	ada
Keistimewaan dan Kekhususan								
1	Pendidikan							
1.1	Jumlah dayah yang memenuhi standarisasi pendidian dayah (dayah tipe A plus, A, B, C, D)	199	Unit	199	203	207	207	208
2	Keagamaan							
2.1	Terbentuknya badan kesejahteraan mesjid	n/a	unit	4	5	8	8	8
2.2	Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan	1	rasio	1	1	1	1	1

BAB IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022 memuat penjabaran visi dan misi pembangunan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan dan program pembangunan daerah serta kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan.

Dokumen ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPK dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Aceh Utara serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah.

Keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi ***Terwujudnya Keberlanjutan Pembangunan Masyarakat Aceh Utara yang Berbudaya, Sejahtera, Mandiri dan Islami (Bersemi)*** perlu didukung oleh konsistensi kebijakan pemerintah, keberpihakan kepada rakyat, dan komitmen bersama pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.

BUPATI ACEH UTARA



H. MUHAMMAD THAIB